



RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
MENENGAH
DAERAH



RPJMD
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2021 - 2026



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021, Nomor);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;

9. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah;
10. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
15. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun;

20. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya;
21. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
25. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
26. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan;
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
28. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan oleh pengguna anggaran;

30. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional;
31. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat;
32. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang;
33. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah;
34. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
35. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan;
36. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
37. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
38. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
39. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
40. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;

41. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
42. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
43. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan;
44. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*);
45. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud;
46. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program;
47. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
48. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
49. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
50. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
51. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;

52. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
53. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
54. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, yang menjabarkan:
 - a. visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
- (2) Guna menjamin terbangunnya sinkronisasi, RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan nasional (RPJMN, RPJPN), dokumen perencanaan Provinsi Bengkulu (RPJPD, RTRW dan RPJMD), dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Bengkulu Selatan (RPJPD, RTRW), serta memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- (3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTIMATIKA RPJMD

Pasal 3

(1) Sistimatika RPJMD, meliputi:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Gambaran Keuangan Daerah;
- Bab IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Bab IX : Penutup.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. Pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. Evaluasi terhadap capaian hasil RPJMD.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang RPJMD periode selanjutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, mengacu pada RPJMN, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI BENGKULU SELATAN,



GUSMAN MULYADI, SE.MM.

Diundangkan di Manna
pada tanggal 26 Agustus 2021

KEPALA BAKORIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,



YUDI SATRIA, SE.MM.

NIP. 19650218 199303 1 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU NOMOR 3/40 TAHUN 2021



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	10
1.4. Maksud dan Tujuan	21
1.5. Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	24
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	24
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	24
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	33
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	43
2.1.4. Demografi	46
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	48
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..	48
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	56
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	57
2.3. Aspek Pelayanan Umum	59
2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan	
Dasar	59
2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Bukan	
Pelayanan Dasar	75
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	91
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	99
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	101
2.3.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan	104
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum	105



2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	106
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	106
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	107
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	108
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	110
2.5.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	110
2.6.	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkulu Selatan	114
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	115
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	115
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	116
3.2.	Analisis Keuangan Daerah.....	136
3.2.1	Analisis Fiskal Daerah	136
3.2.2	Neraca Daerah	140
3.3.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	144
3.3.1	Kebijakan Pendapatan	144
3.3.2	Kebijakan Belanja	146
3.3.3	Kebijakan Pembiayaan	147
3.4.	Proporsi Penggunaan Anggaran	148
3.4.1.	Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	148
3.4.2.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	156
3.4.3.	Analisa Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	158
3.5.	Analisis Pembiayaan	162
3.6.	Kerangka Pendanaan	163
3.6.1.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja	164
3.6.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	175
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	188



4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	188
4.1.1 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	188
4.1.2 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum.....	193
4.2. Isu Strategis	217
4.2.1 Isu Strategis Internasional	218
4.2.2 Isu Strategis Nasional dan Daerah	222
4.2.3 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan	244
 BAB V	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	254
5.1. Visi.....	254
5.2. Misi	257
5.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 Dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025	259
5.4. Tujuan dan Sasaran	261
5.5. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas	279
5.6. Korelasi Isu Strategis dengan Perumusan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	292
 BAB VI	
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	295
6.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	298
6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	323
6.3. Program Pembangunan Daerah	328
 BAB VII	
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	346



BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..	376
8.1. Indikator Kinerja Utama	377
8.2. Indikator Kinerja Daerah	378
BAB IX PENUTUP	380
9.1. Pedoman Transisi	380
9.2. Kaidah Pelaksanaan	381



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024	14
Tabel 1.2	Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	15
Tabel 1.3	Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025	16
Tabel 1.4	Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Bengkulu Selatan	20
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan	25
Tabel 2.2	Jumlah Kelurahan dan Desa Dalam Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan	25
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Kecamatan 2020	28
Tabel 2.4	Luas dan Persentase Hutan Menurut Fungsinya	29
Tabel 2.5	Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan	29
Tabel 2.6	Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2030	31
Tabel 2.7	Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	33
Tabel 2.8	Hasil Produksi Padi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	34
Tabel 2.9	Luas Lahan dan Produksi Jagung Per Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	35
Tabel 2.10	Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	36
Tabel 2.11	Produksi Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan	36
Tabel 2.12	Potensi Bahan Galian Pertambangan Kabupaten Bengkulu Selatan	37
Tabel 2.13	Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan	39
Tabel 2.14	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Bengkulu Selatan	39
Tabel 2.15	Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan	40
Tabel 2.16	Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan	42



Tabel 2.17	Potensi dan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	44
Tabel 2.18	Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Menurut Kecamatan	46
Tabel 2.19	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	47
Tabel 2.20	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	47
Tabel 2.21	PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	48
Tabel 2.22	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020	49
Tabel 2.23	PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	50
Tabel 2.24	Perkembangan Inflasi Tahun 2020-2021	51
Tabel 2.25	Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	53
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2020	54
Tabel 2.27	Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020	55
Tabel 2.28	Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	55
Tabel 2.29	Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	58
Tabel 2.30	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	59
Tabel 2.31	Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.32	Sebaran Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	60
Tabel 2.33	Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	61
Tabel 2.34	Sebaran Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.35	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	62
Tabel 2.36	Rasio Guru Terhadap Siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	63
Tabel 2.37	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	64



Tabel 2.38	Perkembangan Akreditasi Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	64
Tabel 2.39	Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	65
Tabel 2.40	Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	66
Tabel 2.41	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	67
Tabel 2.42	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	67
Tabel 2.43	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	68
Tabel 2.44	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	68
Tabel 2.45	Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	69
Tabel 2.46	Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	70
Tabel 2.47	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	70
Tabel 2.48	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020	71
Tabel 2.49	Rasio Satuan Polisi Pamong Praja Per 1.000 Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	72
Tabel 2.50	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	73
Tabel 2.51	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	75
Tabel 2.52	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	76
Tabel 2.53	Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020	76
Tabel 2.54	Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	77
Tabel 2.55	Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	78
Tabel 2.56	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	79



Tabel 2.57	Capaian Perekaman e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	80
Tabel 2.58	Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	80
Tabel 2.59	Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	81
Tabel 2.60	Akseptor KB Aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	82
Tabel 2.61	Data Angkutan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	83
Tabel 2.62	Perusahaan Angkutan Penumpang AKDP dan AKAP di Kabupaten Bengkulu Selatan	83
Tabel 2.63	Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bengkulu Selatan	84
Tabel 2.64	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017-2020	86
Tabel 2.65	Realisasi Investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	87
Tabel 2.66	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	87
Tabel 2.67	Jumlah Website di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	89
Tabel 2.68	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	90
Tabel 2.69	Perkembangan Pemustaka di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	90
Tabel 2.70	Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	92
Tabel 2.71	Potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan	92
Tabel 2.72	Produksi Konsumsi Beras di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	93
Tabel 2.73	Luasan dan Proporsi Pemanfaatan Tahura Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	95
Tabel 2.74	Rasio Elektrifikasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.75	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	96
Tabel 2.76	Perkembangan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	97



Tabel 2.77	Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	97
Tabel 2.78	Pencapaian Indikator Kinerja Kesekretariatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020	99
Tabel 2.79	Perkembangan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	100
Tabel 2.80	Pencapaian Penyusunan Legislasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	101
Tabel 2.81	Pencapaian Penilaian Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020	102
Tabel 2.82	Perkembangan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	102
Tabel 2.83	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	106
Tabel 2.84	Tingkat Kemantapan Jalan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	108
Tabel 2.85	Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Di Kabupaten Bengkulu Selatan	109
Tabel 2.86	Kondisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bengkulu Selatan	110
Tabel 2.87	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	111
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	119
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	129
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	135
Tabel 3.4	Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	136
Tabel 3.5	Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	139
Tabel 3.6	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	141
Tabel 3.7	Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	149



Tabel 3.8	Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	157
Tabel 3.9	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021	158
Tabel 3.10	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	159
Tabel 3.11	Penutup Defisit Riil Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	162
Tabel 3.12	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2020	163
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	165
Tabel 3.14	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025	169
Tabel 3.15	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025	174
Tabel 3.16	Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025	177
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025	179
Tabel 4.1	Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	189
Tabel 4.2	Kondisi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	191
Tabel 4.3	Kondisi Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	193
Tabel 4.4	Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan	232
Tabel 5.1	Keselarsan Misi Pada RPJPD dengan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	259
Tabel 5.2	Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah	264
Tabel 5.3	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	275
Tabel 5.4	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas	284



Tabel 5.5	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Provinsi Bengkulu dan Agenda Pembangunan Nasional	286
Tabel 5.6	Korelasi Isu Strategis dengan perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	293
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	299
Tabel 6.2	Strategi Pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	318
Tabel 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	325
Tabel 6.4	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bengkulu Selatan	329
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	347
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	349
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	377
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026	378



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses dan Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan	5
Gambar 1.2	Integrasi dan Sinergi Dokumen Perencanaan dan Pembangunan	10
Gambar 1.3	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	11
Gambar 1.4	Keterkaitan Lingkup RTRW Dengan RPJMD	18
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Bengkulu Selatan	27
Gambar 2.2	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan	30
Gambar 2.3	Indeks Resiko Bencana Menurut Jenis Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	44
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan	45
Gambar 2.5	Gini Rasio Kabupaten Bengkulu Selatan	51
Gambar 2.6	Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan	52
Gambar 2.7	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan	53
Gambar 2.8	Angkatan Kerja Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	56
Gambar 2.9	Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan	57
Gambar 2.10	Indeks Resiko Bencana Menurut Potensi Ancaman Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	73
Gambar 2.11	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019	85
Gambar 2.12	Peta Batas Kawasan Tahura Geluguran Di Kabupaten Bengkulu Selatan	94
Gambar 2.13	Peta Kawasan Trans Kedurang	98
Gambar 2.14	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Selatan	107
Gambar 3.1	Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	121
Gambar 3.2	Trend Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	122
Gambar 3.3	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 – 2020 (dalam ribuan)	124
Gambar 3.4	Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	125



Gambar 3.5	Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	125
Gambar 3.6	Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	126
Gambar 3.7	Komposisi Belanja Daerah APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020	128
Gambar 3.8	Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	131
Gambar 3.9	Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	132
Gambar 3.10	Penerimaan Pembiayaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	133
Gambar 3.11	Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020 (dalam ribuan)	134
Gambar 3.12	Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	137
Gambar 3.13	Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 – 2020	138
Gambar 4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	190
Gambar 4.2	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020	191
Gambar 4.3	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	218
Gambar 4.4	Misi, Arah dan Agenda Pembangunan Nasional	227
Gambar 4.5	Isu Strategis Provinsi Bengkulu	230
Gambar 4.6	Potret Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan	244
Gambar 4.7	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan	245
Gambar 4.8	8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi	252
Gambar 5.1	Prioritas Pembangunan Daerah	279
Gambar 5.2	Program Prioritas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	280
Gambar 5.3	Program Prioritas Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi	281
Gambar 5.4	Program Prioritas Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan	282
Gambar 5.5	Program Prioritas Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri	282



Gambar 5.6	Program Prioritas Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	283
Gambar 6.1	Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025	296
Gambar 6.2	Fokus Tahapan Perencanaan Tahunan Selama Periode RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	297
Gambar 6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	324



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Dengan perencanaan pembangunan daerah yang terukur, efektif, efisien dan akuntabel, maka pembangunan daerah sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah dapat bersinergi dan mendukung pencapaian target



pembangunan nasional, untuk mendorong terwujudnya tujuan bernegara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, yang mendudukkan Gusnan Mulyadi, SE.MM dan H. Rifa'i, S.Sos. sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2021-2024, dan telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Provinsi Bengkulu.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berkewajiban menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, dan menetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik.

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan juga merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, serta penyesuaian dengan dokumen lainnya di tingkat daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2005-2025, serta mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 untuk perumusan kebijakan terkait pemanfaatan ruang. Dengan demikian, kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tetap selaras dengan kebijakan RPJMN tahun 2020-2024 dan Rancangan RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2021-2026 maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan lainnya.



Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menerapkan pendekatan-pendekatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 261 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti ketentuan dan tata cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Proses dimulai dengan persiapan penyusunan RPJMD yang meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) orientasi mengenai RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD); dan (e) penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Rancangan Teknokratik RPJMD disusun sebelum penetapan kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dimulai setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Proses ini merupakan penyempurnaan Rancangan Teknokratik RPJMD, yang meliputi penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran, penentuan strategi dan arah kebijakan, serta perumusan program pembangunan daerah. Rancangan Awal RPJMD kemudian dibahas dalam



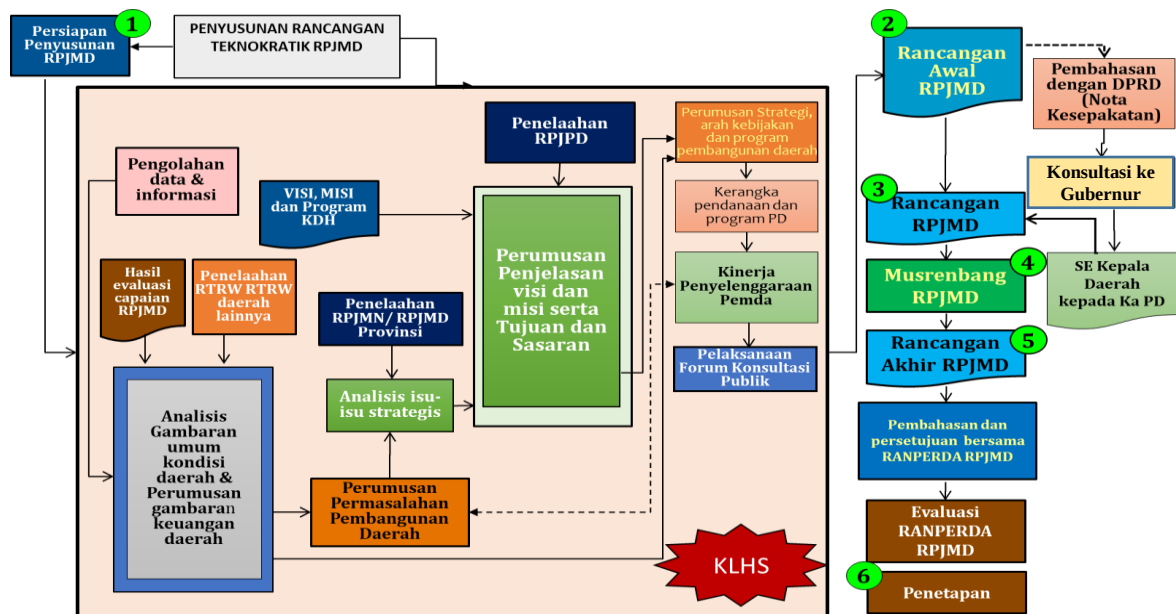
Forum Konsultasi Publik yang melibatkan stakeholder dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah untuk memperoleh masukan, guna penyempurnaan rancangan awal. Rancangan awal yang sudah direvisi berdasarkan masukan Forum Konsultasi Publik, selanjutnya dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan persetujuan.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah disetujui DPRD dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi Bengkulu untuk memperoleh masukan. Rancangan Awal RPJMD juga disampaikan kepada semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sekaligus untuk mendapatkan *feedback* atau masukan dari Perangkat Daerah. Seluruh masukan serta rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD hingga menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya dibahas dalam forum Musrenbang RPJMD.

Proses berikutnya adalah perumusan Rancangan Akhir RPJMD, yaitu proses penyempurnaan Rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan Akhir RPJMD ini menjadi bahan penyusunan sekaligus Lampiran Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. Rancangan Perda dibahas bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan rangkaian yang berkesinambungan dan tersistematis sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun proses dan tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana dijabarkan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.
Proses dan Tahapan Penyusunan
RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan. Renstra Perangkat Daerah juga memiliki jangka waktu lima tahun. Pada tingkat daerah, RPJMD dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan inilah yang kemudian menterjemahkan pembangunan jangka menengah ke dalam program dan kegiatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955



- Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja



- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu

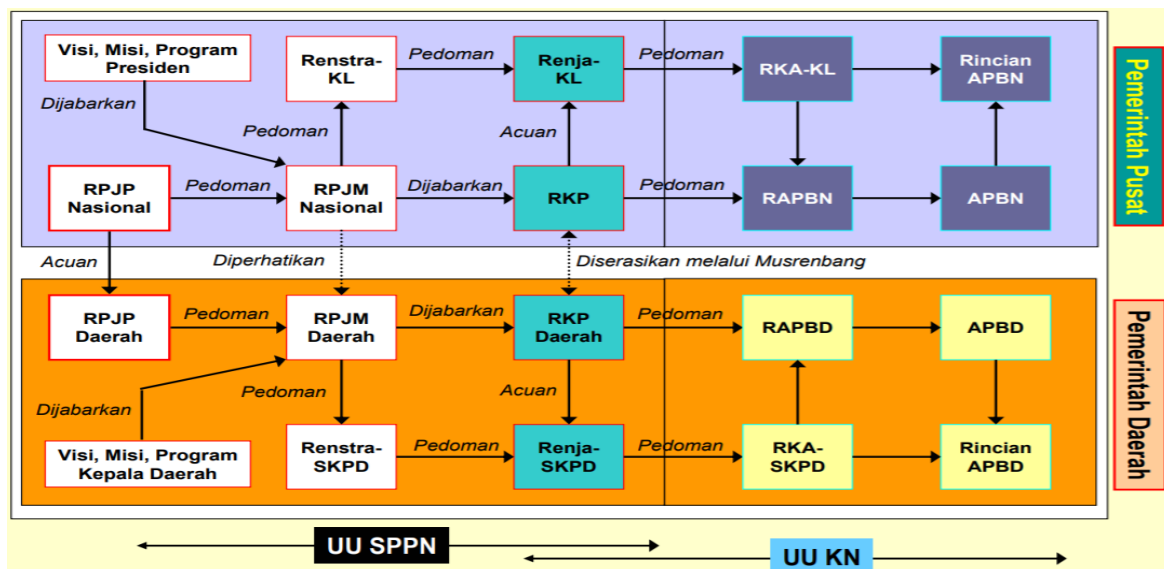
Tahun 2013, Nomor 15);

30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2021, Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus terintegrasi dan sinergi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

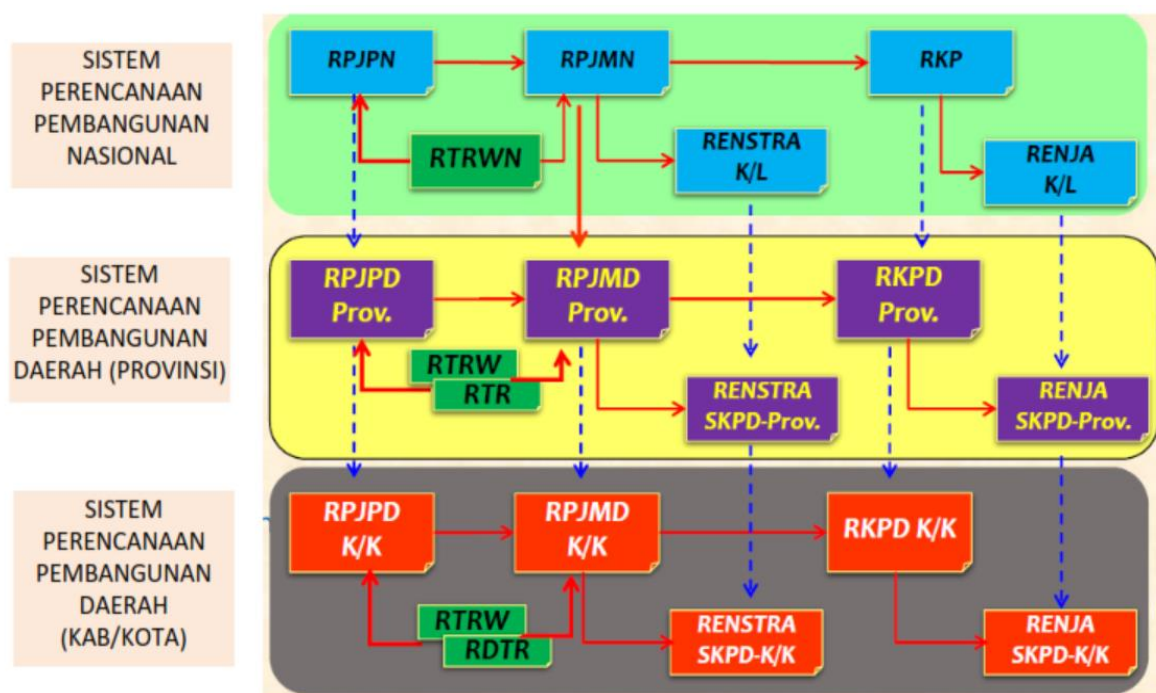
Gambar 1.2
Integrasi dan Sinergi Dokumen Perencanaan Pembangunan



Memenuhi amanat tersebut, penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu, berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2020-2024, RTRW Nasional Tahun 2008-2028, RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031. Dengan integrasi yang dibangun, diharapkan terwujud sinkronisasi dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 1.3
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Lainnya



Disamping itu, guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan penguatan integrasi serta koordinasi antarwilayah untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan, penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dokumen



perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan serta Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu yang secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Melalui sinkronisasi, integrasi dan koordinasi antarwilayah tersebut, diharapkan akan mampu menghasilkan kerjasama dan komitmen bersama untuk penguatan serta percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional.
2. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 juga memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, sebagai komitmen untuk percepatan pencapaian pembangunan Provinsi Bengkulu.
3. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 merupakan jabaran RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025 tahap IV.
4. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun.



5. Pada pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026, dokumen RPJMD ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPD memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah.
6. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah untuk menjadi bagian RKPD.
7. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 terkait dengan dokumen perencanaan daerah yang telah ada, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan 2011-2031. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, secara substansi, berikut adalah keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya:

1. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Rumusan prioritas pembangunan daerah berkomitmen untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas pembangunan secara nasional yang tertuang ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Keselarasan prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dengan RPJMN 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 1.1
Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
dengan RPJMN 2020-2024

Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Optimalisasi komoditas unggulan dan hilirisasi menuju kemandirian ekonomi
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan sumber ekonomi terpadu berbasis agroindustry
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia dan Pengentasan kemiskinan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pengembangan infrastruktur berkualitas dan berkeadilan berwawasan lingkungan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi

2. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Bengkulu. Maka prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan pada upaya untuk bisa menyumbangkan kontribusi maksimal terhadap pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu. Keselarasan prioritas pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 1.2
Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
dengan RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2026

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	Optimalisasi komoditas unggulan dan hilirisasi menuju kemandirian ekonomi
Natural Bengkulu (Pengembangan Pariwisata yang Integratif dan Kompetitif) dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan sumber ekonomi terpadu berbasis agroindustry
Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	Pembangunan Manusia dan Pengentasan kemiskinan
Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	Pengembangan infrastruktur berkualitas dan berkeadilan berwawasan lingkungan
Inovasi dan Tata Kelola Pemerintah	Transformasi tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi

3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 sangat terkait, dan merupakan pengejawantahan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025. Sehingga rumusan perencanaan pembangunan yang disusun harus selaras dan merupakan satu kesatuan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah pada tahun 2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.



Tabel 1.3
Keselarasn RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025

Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025	Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang Sejahtera, Maju, Mandiri dan Demokratis Berbasis Agroindustri dan Sumber Daya Manusia yang Tangguh	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)
MISI	
Misi 1: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing
Misi 6: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal	
Misi 7: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan	
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan	Misi 2: Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Misi 4: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	
Misi 4: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing



Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu	
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan tanggung jawab	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

4. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

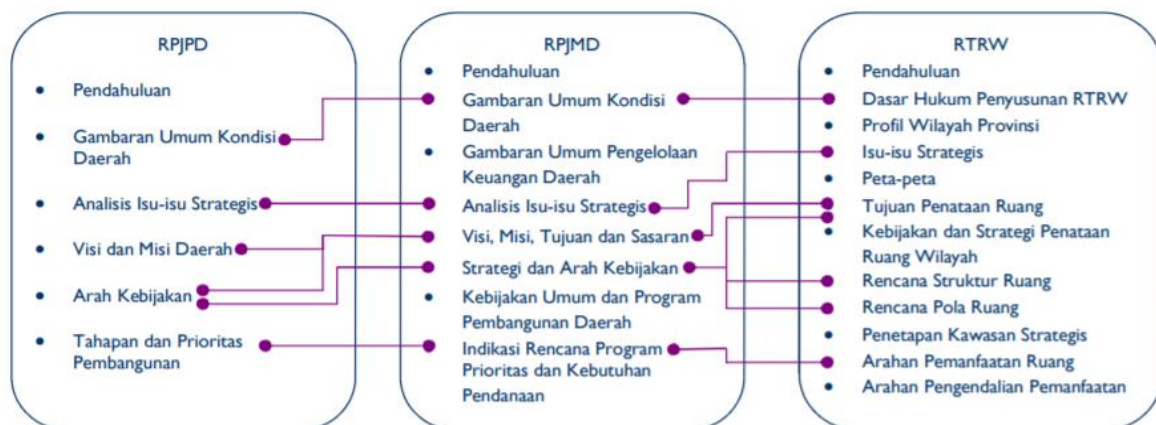
Rencana pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan disusun dengan mengakomodir program/kegiatan/kebijakan dari rencana pembangunan lainnya yang telah lebih dulu ditetapkan atau secara hierarki lebih tinggi. Keterpaduan rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi hal yang mutlak dilakukan demi pencapaian kualitas pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

RTRW memberikan arahan pembangunan yang berimplikasi pada keruangan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia. RTRW adalah acuan bagi pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang

memerlukan ruang melalui kegiatan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah.

RPJMD menguraikan kebijakan dan program yang membutuhkan ruang, disusun dengan memperhatikan sasaran nasional mengikuti skema yang disusun berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Sedangkan RTRW disusun memperhatikan kepentingan nasional yang tertuang dalam RTRW Nasional, dan RTRW Provinsi.

Gambar 1.4
Keterkaitan Lingkup RTRW dengan RPJMD



5. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 102 indikator sesuai dengan kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan

Tujuan 3 : Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung



- kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- Tujuan 4 : Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
- Tujuan 7 : Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua
- Tujuan 8 : Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- Tujuan 10 : Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara
- Tujuan 11 : Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- Tujuan 12 : Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- Tujuan 13 : Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- Tujuan 15 : Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati
- Tujuan 16 : Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-



institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat dari persandingan isu strategis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.4
Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 dengan KLHS Kabupaten Bengkulu Selatan

Isu Prioritas KLHS Kabupaten Bengkulu Selatan	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia
Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran	Kemiskinan dan Pengangguran
Memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang tangguh : jalan, jembatan, fasilitas umum, gedung perpustakaan dan kearsipan	Penyediaan infrastruktur dasar strategis dan prioritas
Pengembangan kawasan ekonomi regional	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha
	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	Kedaulatan dan Ketahanan Pangan
Pengelolaan dan penanganan kejadian bencana alam (banjir, banjir rob, Abrasi, gempa bumi, tanah longsong, kebakaran hutan, tsunami), dan perubahan iklim (<i>Climate change</i>)	Permasalahan pertanahan dan peningkatan pengelolaan lingkungan
Belum optimalnya pengelolaan terpadu Sumber daya alam dan lingkungan	
Rendahnya kepatuhan dan penegakan hukum	



Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis e-government.	Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026.

1.4.2. Tujuan

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD;
2. Menjadi pedoman atau acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan (RKPD) selama 5 (lima) tahun dari 2022-2026;
3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani sistematika sebagaimana tertuang dalam



Permendagri 86 tahun 2017, yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam lima tahun mendatang.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun ke depan

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab



sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja daerah (IKD).

Bab IX Penutup

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Bengkulu Selatan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi memberikan gambaran mengenai kondisi daerah yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada Kabupaten Bengkulu Selatan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk berdasarkan UU Darurat No. 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sebelum pemekaran adalah seluas 5.949,14 km². Kemudian pada Tahun 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami pemekaran yang ditandai dengan terbitnya UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan pasca pemekaran seluas 1.186,10 km² atau 19,93 % yang merupakan wilayah daratan, sedangkan luas wilayah lautan dengan panjang garis pantai 60 km dan dengan luas pengelolaan 4 mil, maka luas keseluruhan wilayah lautan, yaitu 384 km² atau 38.400 ha. Dengan demikian Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan, yaitu 157.100 ha atau 1.570,10 km².

Setelah pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 11 (sebelas) kecamatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut data kecamatan, ibu kota kecamatan dan luas wilayah kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.



Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Manna	Kayu Kunyit	33,17
2	Bunga Mas	Gindosuli	35,08
3	Kota Manna	Ibul	32,16
4	Pasar Manna	Pasar Bawah	5,84
5	Kedurang	Tanjung Alam	234,55
6	Kedurang Ilir	Lubuk Ladung	58,20
7	Seginim	Pasar Baru	61,52
8	Air Nipis	Suka Negeri	203,28
9	Pino	Masat	61,88
10	Ulu Manna	Simpang Pino	236,92
11	Pino Raya	Pasar Pino	223,50
Jumlah			1.186,10

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2021

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki 142 desa dan 16 kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan dalam lingkup Kabupaten Bengkulu Selatan, dimana masing-masing kecamatan memiliki jarak yang berbeda-beda ke Ibukota Kabupaten. Berikut data jumlah kelurahan dan desa dalam kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 2.2.
Jumlah Kelurahan dan Desa dalam Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Manna	8,8	1	17	18
2	Bunga Mas	16,4	-	10	10
3	Kota Manna	5	6	5	11
4	Pasar Manna	5,8	7	2	9
5	Kedurang	36	-	19	19
6	Kedurang Ilir	23,3	-	12	12
7	Seginim	21,5	1	21	22
8	Air Nipis	30,3	-	10	10
9	Pino	13,6	1	15	16
10	Ulu Manna	23,2	-	10	10
11	Pino Raya	9,6	-	21	21
Jumlah			16	142	158

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2021



Secara astronomi, Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 74 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 409'39"-4033' 34" Lintang Selatan dan antara 102047'45"-103017'18" Bujur Timur. Luas wilayah Bengkulu Selatan adalah berupa daratan seluas 1.186,10 km², yang apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Bengkulu hanya sebesar 5,95 persen dari luas Provinsi Bengkulu 19.919,33 km².

Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

Batas administratif Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kabupaten yang berbatasan langsung tersebut, telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, permasalahan terkait dengan batas daerah yang selama ini muncul dan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan terutama pada daerah yang berbatasan, seharusnya sudah tidak ada lagi. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang penetapan batas daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

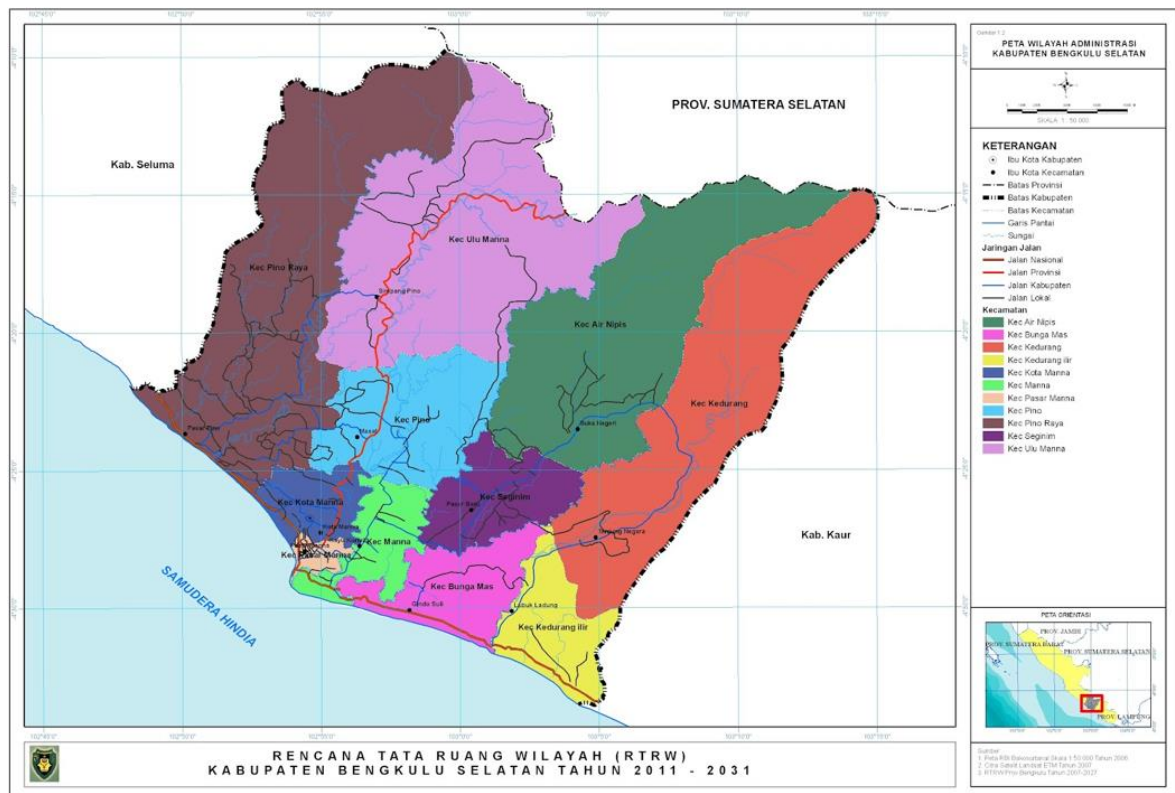
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi

Bengkulu Dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan Dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Dengan penetapan dan kepastian batas daerah tersebut, menjadi modal dasar bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan mendorong kemajuan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama pada wilayah yang berbatasan dengan daerah lain.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Secara geografis, Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di bagian selatan dari Provinsi Bengkulu, dengan ketinggian 74 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), daratan di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari:

- Ketinggian 0 m – 100 m sebesar 50,88%
- Ketinggian 100 m – 500 m sebesar 35,08%



- Ketinggian 500 m ke atas sebesar 14,04

Tingkat ketinggian wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Manna	52
2	Bunga Mas	41
3	Kota Manna	49
4	Pasar Manna	39
5	Kedurang	73
6	Kedurang Ilir	54
7	Seginim	63
8	Air Nipis	164
9	Pino	147
10	Ulu Manna	154
11	Pino Raya	33
Kabupaten Bengkulu Selatan		74

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2021

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki suhu rata-rata minimum 20,50°C, maksimum 35,40°C dengan tingkat kelembaban udara rata-rata 82,44-85,89%. Curah hujan di Kabupaten Bengkulu Selatan rata-rata 354,00 mm.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Bengkulu menetapkan Kawasan hutan Kabupaten Bengkulu Selatan seluas seluas ± 48.686 Ha atau 5,27 persen dari luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 Hektar.

Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari hutan lindung yaitu kawasan hutan lindung, suaka alam dan pelestarian alam, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi Terbatas. Adapun



data luasan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Luas dan Persentase Hutan menurut Fungsinya

No	Fungsi Hutan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase dari Luas Wilayah
1.	Hutan Lindung	32.756,20	27,62
2.	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	594,73	0,50
3.	Hutan Produksi Terbatas	14.244,64	12,01
4.	Hutan Produksi Tetap	1.704,23	1,44
5.	Hutan Lindung	32.756,20	27,62
Jumlah		49.299,80	41,56

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, 2021

Berdasarkan penetapan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu (dalam RTRWP Bengkulu), kawasan hutan meliputi kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas maupun taman nasional yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan, tanpa mengubah fungsi dan penggunaan ruangnya. Walaupun begitu, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Selatan, saat ini telah diajukan beberapa usulan peninjauan kembali dalam rangka melakukan pelepasan, perluasan maupun perubahan fungsi ruang yang ada saat ini merupakan kawasan lindung, hutan produksi maupun hutan produksi terbatas dalam rangka memaksimalkan fungsi dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun review atau pengajuan peninjauan kawasan hutan di dalam RTRWP Provinsi Bengkulu yang terkait dengan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rekomendasi Tim Terpadu Terhadap Usulan Review Kawasan Hutan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Kawasan Hutan	Luas Kawasan (Ha)	Usulan Perubahan (Ha)	Rekomendasi Perubahan (Ha)
1.	HL. Raja Mandara Reg. 32	20.727		
2.	HL. Bukit Riki Reg. 32A	4.370	APL. 519	Tidak diubah
3.	HL. Bukit Sanggul Reg. 37	7.982		
4.	HPT. Bukit Rabang Reg. 78	4.216.54	Tahura 101	Tahura 101
5.	HPT Peraduan Tinggii Reg. 79	9.158.42	APL 4.785	Tidak diubah

6.	HPT. Air Kedurang Reg. 81	1.192		
7.	HP. Air Bengkenang Reg 80	1.579	APL 1.927	APL. 222 Ha HP. 13537 Ha

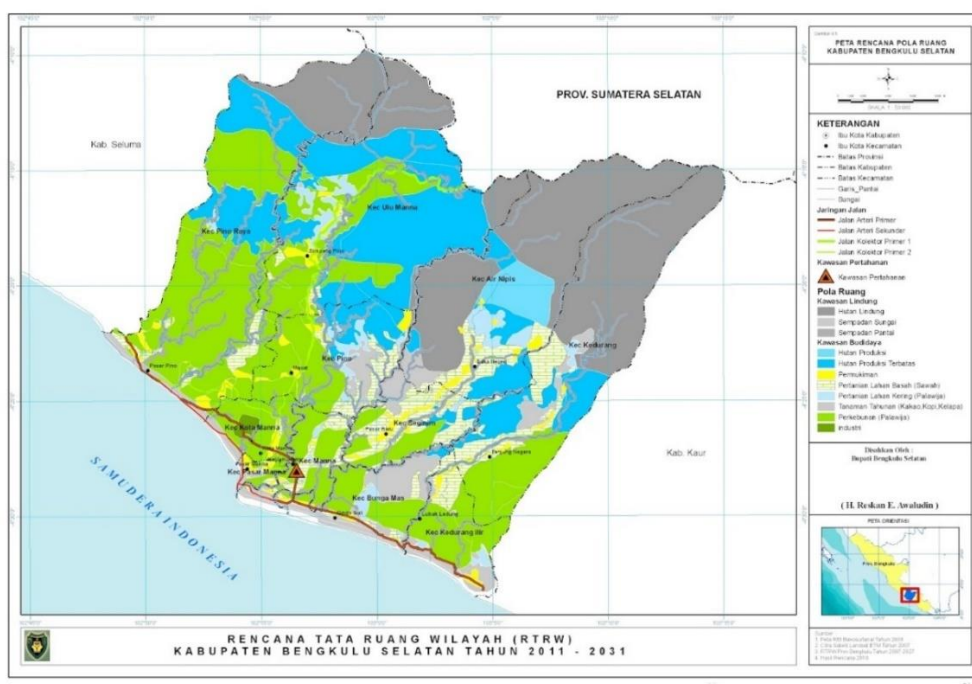
Sumber: RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

Dalam rencana pengembangan struktur ruang di Kabupaten Bengkulu Selatan, dilakukan penataan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Berkenaan dengan rencana pola ruang, perlu dilakukan evaluasi terhadap peruntukan ruang dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Hal ini penting mengingat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih terdapat kawasan yang harus ditata dan dikelola kembali, terutama keberadaan dan peruntukan hutan. Berikut ini Peta rencana pola ruang dan data mengenai persentase luas hutan menurut fungsinya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Gambar 2.2

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031



Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang peruntukan ruangnya untuk fungsi lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan ruang terbuka hijau. Sedangkan kawasan yang berfungsi sebagai ruang kawasan budidaya terdiri dari kawasan yang peruntukannya untuk hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Struktur ruang di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan direncanakan untuk rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten dengan tujuan dasar agar tercipta sistem ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Bila dijabarkan lebih lanjut pengertian produktif dan berkelanjutan dalam konteks struktur ruang dimaknai sebagai suatu sistem dan hubungan fungsional antar pusat perkotaan yang efektif, efisien, mendorong peningkatan potensi masing-masing pusat (kawasan) secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan alam.

Adapun rencana sistem perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun 2030 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2030

No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
1.	Manna (Kecamatan Kota Manna)	PKW	• Pusat Pemerintahan • Pusat Perdagangan dan jasa • Pusat Pelayanan Pendidikan, Kesehatan. • Permukiman perkotaan • Industri Pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga
2.	Pasar Bawah (Kecamatan Pasar Manna)	PKW	• Pariwisata • Permukiman perkotaan • Pengembangan sub sektor Perikanan • Industri pengolahan hasil Pertanian dan Rumah Tangga



No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
3.	Kayu Kunyit (Kecamatan Manna)	PKW	• Permukiman perkotaan • Pertambangan (golongan c) • Perkebunan dan sub sektor pertanian • Pariwisata • Industri pertanian dan pengolahan rumah tangga.
4.	Masat (Kecamatan Pino)	PKL	• Pusat Agro Industri • Pusat Agropolitan • Perkebunan • Pertanian • Permukiman perdesaan
5.	Simpang Pino (Kecamatan Ulu Manna)	PPK	• Pertanian • Perkebunan • Kawasan Hutan Konservasi • Perternakan • Pertambangan • Pariwisata • Permukiman perdesaa
6.	Lubuk Ladung (Kec. Kedurang Ilir)	PPK	• Pertanian • Agroindustri • Perkebunan • Perikanan • Pertambangan • Peternakan • Permukiman pedesaan
7.	Gindo Suli (kec. Bunga Mas)	PPL	• Perkebunan • Pariwisata buatan • Industri pengolahan hasil pertanian • Permukiman pedesaan
8.	Tanjung Negara (Kec. Kedurang)	PPL	• Pertanian • Perkebunan • Kawasan hutan konservasi • Peternakan • Perikanan darat • Permukiman pedesaan
9.	Pasar Baru (Kec. Seginim)	PPL	• Peternakan • Perikanan darat • Pertanian tanaman pangan • Perkebunan • Permukiman pedesaan
10.	Suka Negeri (Kec. Air Nipis)	PPL	• Perkebunan • Kehutanan • Pertanian • Perikanan darat • Permukiman pedesaan
11.	Pasar Pino (Kec. Pino)	PPL	• Perkebunan • Pertanian



No	Ibukota Kecamatan	Hirarki Fungsi	Fungsi Utama
	Raya)		• Perikanan • Peternakan • Kehutanan • Permukiman pedesaan

Sumber : RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

A. Pertanian

Sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian daerah, karena sektor pertanian menyumbang kontribusi terbesar pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 32,83 % atau sebesar Rp. 1.911 Milliar, meningkat dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 32,67% atau sebesar Rp. 1.864 Milliar.

Cakupan kegiatan pertanian meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Jasa Pertanian dan Perburuan. Sektor ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja yang utama, karena kurang lebih 46 persen penduduk bekerja pada sektor ini (Susenas, 2020).

Tabel 2.7
Luas Lahan Sawah Per Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Irigasi Teknis	Irigasi Setengah Teknis	Irigasi Sederhana	Irigasi Desa/ Non PU	Tadah Hujan	Pasang Surut	Lebak/ Rawa
1	Manna	-	-	104	67	359	16	-
2	Bunga Mas	-	-	25	137	407	18	-
3	Kota Manna	-	-	-	43	129	-	-
4	Pasar Manna	-	15	32	-	39	-	-
5	Kedurang	823	-	-	-	24	-	-
6	Kedurang Ilir	-	173	84	-	39	5	72
7	Seginim	1.796	335	66	-	2	-	-
8	Air Nipis	600	512	105	40	27	-	-
9	Pino	-	20	90	413	209	-	10
10	Ulu Manna	-	-	71	166	47	-	-
11	Pino Raya	-	85	96	292	690	-	85
	Jumlah	3.219	1.140	673	1/158	1.972	39	167

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020



Produk unggulan sektor pertanian yang pernah mengangkat nama Kabupaten Bengkulu Selatan adalah beras seginin dan beras kedurang. Untuk itu, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas pembangunan daerah guna mendorong pengembangan dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian terutama padi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan produksi padi sehingga dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah dan berkualitas. Adapun data produksi padi di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Hasil Produksi Padi Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Padi Sawah dan padi Ladang (Ton)	81.459	93.146	89.232	70.638	59.492
2	Produksi beras (produksi padi – 10%) x 63,20% (Ton)	46.334	53.255	50.755	40.179	33.839
3	Jumlah penduduk Tahun Laporan (estimasi) (Jiwa)	150.601	155.426	150.601	158.409	166.249
4	Kebutuhan per kapita per tahun (Kg)	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80
5	Jumlah kebutuhan beras (Ton)	17.289	17.843	17.289	18.185	19.085
6	Surplus beras (Ton)	29.045	35.966	33.466	21.994	14.754

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

Disamping pengembangan produksi padi sebagai produk unggulan, Pemerintah Daerah juga mengupayakan pengembangan komoditi jagung sebagai komoditi alternatif penyokong perekonomian masyarakat. Bahkan Pemerintah Daerah telah menetapkan sebagai program prioritas "Bengkulu Selatan sebagai sentra jagung nasional". Berbagai upaya terus diupayakan untuk peningkatan produktivitas jagung, mulai dari



membuka kran kerjasama dengan pihak swasta, dan hilirisasi produk jagung.

Tabel 2.9
Luas Lahan dan Produksi Jagung Per Kecamatan
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Panen Bersih (Ha)	Produksi (Ton)
1	Pino	235	583	576	2.892
2	Ulu Manna	274	480	472	2.373
3	Pino Raya	478	813	805	4.039
4	Manna	421	593	587	2.947
5	Bunga Mas	132	162	155	788
6	Kota Manna	80	118	112	573
7	Pasar Manna	81	136	130	662
8	Kedurang	265	369	363	1.827
9	Kedurang Ilir	495	820	414	4.084
10	Seginim	513	992	985	4.937
11	Air Nipis	592	601	594	2.983

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

B. Perkebunan

Perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama sebagai sumber utama pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto. Dari kondisi yang ada, diketahui bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu penyumbang peningkatan daya beli masyarakat, karena sebagian besar masyarakat Bengkulu Selatan bergerak pada sektor perkebunan.

Secara umum, sektor perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang merata di seluruh kecamatan. Bahkan untuk mendukung produktivitas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berdiri 2 (dua) perusahaan pengolahan kelapa sawit yaitu PT. Sinar Bengkulu Selatan dan PT. Bengkulu Sawit Lestari.

Adapun data luas areal perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:



Tabel 2.10
Luas Areal Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020 (Hektar)

No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Karet	Kopi Robusta	Kakao
1	Manna	1.433,00	133,00	119,50	68,00	67,00
2	Kota Manna	725,30	50,00	110,00	7,00	91,00
3	Kedurang	639,00	87,05	341,00	781,00	128,00
4	Bunga Mas	1.714,50	59,50	599,00	12,00	14,50
5	Pasar Manna	136,00	18,50	11,00	4,00	9,00
6	Kedurang Ilir	1.723,00	44,80	955,00	91,70	50,50
7	Seginim	383,00	125,00	121,00	101,00	93,00
8	Air Nipis	491,50	102,50	123,00	661,00	118,50
9	Pino	1.297,57	50,00	484,00	82,00	199,00
10	Pino Raya	5.572,00	181,00	398,50	227,00	120,00
11	Ulu Manna	933,00	83,00	925,00	672,50	182,00
Jumlah		15.047,87	934,35	4.187,00	2.707,20	1.072,50

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka Tahun 2021

Kelapa sawit masih menjadi komoditi perkebunan dengan luas terbesar mencapai 15.047,87 hektar, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan lebih banyak bergerak pada sektor perkebunan kelapa sawit, diikuti karet seluas 4.187,00 hektar, kopi seluas 2.707,20 hektar, kakao seluas 1.072,50 hektar dan kelapa seluas 934,35 hektar. Berikut data produksi perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 2.11
Produksi Perkebunan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020 (Ton)

No	Kecamatan	Kelapa Sawit	Kelapa Dalam	Karet	Kopi Robusta	Kakao
1	Manna	16.595,30	132,79	70,90	31,78	13,87
2	Kota Manna	8.368,87	40,21	51,49	3,75	29,89
3	Kedurang	6.641,10	49,89	197,43	628,71	80,20
4	Bunga Mas	23.794,05	70,51	560,62	2,44	7,47
5	Pasar Manna	1.659,20	24,30	4,42	1,92	2,50
6	Kedurang Ilir	17.422,14	42,12	669,31	55,03	23,28
7	Seginim	4.270,40	97,09	57,47	410,71	50,31
8	Air Nipis	3.885,00	79,44	34,22	580,30	41,21
9	Pino	15.439,50	59,10	286,79	30,08	77,35
10	Pino Raya	82.212,85	182,98	305,57	102,37	72,63
11	Ulu Manna	8.779,10	101,42	457,33	568,96	124,23
Jumlah		189.067,52	877,91	2.695,59	2.047,09	522,97

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020



Produksi perkebunan cenderung mengalami penurunan terutama pada komoditi kelapa sawit, dimana tercatat pada tahun 2019 produksi kelapa sawit mencapai 165.249,96 ton turun menjadi 96.946,46 ton pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh adanya aktivitas pelaksanaan program peremajaan kembali (*replanting*) kelapa sawit milik masyarakat, yang pada tahun 2019 mencapai luasan 329.633 hektar dan pada tahun 2020 mencapai luasan 409.640. Sampai akhir tahun 2020 total realisasi pelaksanaan program *replanting* sawit mencapai 739.274 hektar, dengan bibit sawit unggul bersertifikat.

Dengan *replanting* sawit yang telah dilakukan tersebut, diharapkan dalam rentang waktu 3 atau 4 tahun ke depan, produksi kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan bisa meningkat signifikan terutama dari sisi kualitas, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar.

C. Pertambangan dan Industri

Sektor pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan berkontribusi menyumbang PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan harga berlaku hanya sebesar 2,23 persen atau sebesar Rp. 129.717.000.000. Rendahnya peranan sektor pertambangan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan karena belum optimalnya eksploitasi disebabkan keterbatasan kewenangan dan regulasi yang mengatur.

Adapun potensi bahan galian pertambangan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Potensi Bahan Galian Pertambangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Bahan Galian	Lokasi
1.	Batu Gamping	Desa Batu Ampar, Kedurang Disekitar Air Bengkenang, Hulu Air Luwangan Pematang Gaung
2.	Batu Sarak/Batu Tulis	Desa Tanjung Tengah, Seginim Hulu Air Bengkenang Seginim
3.	Pasir Lempungan	Di Air Tebu Telur, Seginim (Desa Tj. Tengah)
4.	Posphat Guano	Gua Dekat Pertemuan Air Kedurang dan Air Cawang Alun, Hulu Air Kedurang



No	Bahan Galian	Lokasi
5.	Granit	Bukit Lekendi, Bukit Raja Mendara, Kec. Seginim, Pino, Kedurang
6.	Diorit	Sebelah Utara dan Timur, Bukit Raja Mendara
7.	Andesit	Bukit Raja Mendara (2.000 Ha)
8.	Marmer	Desa Sukarami Kec. Seginim
9.	Mineral Sulfida	Kec. Pino, Seginim dan Kedurang
10.	Batu Rijang	Hulu Air Bengkenang
11.	Mineral Ubahan	- Dijumpai di tempat-tempat penyelidikan di Kec. Pino, Seginim dan Kedurang - Air Purusan Bengkenang (Hulu Air Bengkenang)
12.	Batuan Piroklastik	Di sekitar Air Manna dekat Masat
13.	Biji Besi	Perbatasan Bengkulu Selatan – Lahat
14.	Minyak (Blok Bengkulu)	Kabupaten Bengkulu Selatan, Seluma, Kaur
15.	Emas	Seginim, Ulu Manna, Kedurang

Sumber : BSDA Kabupaten Bengkulu Selatan, 2019

Potensi yang sudah dilakukan eksploitasi meskipun belum maksimal adalah pada potensi batuan, dimana pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7 (tujuh) perusahaan pemegang izin usaha pertambangan yang aktif. Untuk peningkatan pembangunan daerah, kedepan potensi yang ada harus dioptimalkan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun harus tetap mengedepankan prinsip *sustainable development* serta kepentingan masyarakat, sehingga nantinya tidak akan memunculkan permasalahan.

D. Perikanan

Sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan yang mensupport pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan. Produksi perikanan yang ada dapat dikelompokkan menjadi perikanan tangkap, yang terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan umum di daratan serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya berpusat di Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim, sedangkan perikanan tangkap laut merupakan aktivitas kecamatan yang berada di sepanjang pesisir, diantaranya Kecamatan Manna, Bunga Mas, Kota Manna, Pasar Manna, Kedurang Ilir, dan Pino Raya.

Produksi perikanan tangkap laut dan perikanan budidaya, selama ini memenuhi permintaan pasar di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu



Selatan, dan juga pasar di daerah Pagar Alam, Lahat, dan sekitarnya. Berikut data produksi perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan:

Tabel 2.13
Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Uraian	2018		2019	
		Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
1	Perikanan Tangkap	1.820	75.923.616	2.046	63.105.079
2	Perikanan Budidaya	32.669	777.526.186	61.942	1.482.346.960

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2020, 2021

Pada sub sektor perikanan budidaya, beberapa komoditi yang dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya Nila, Lele, Ikan Mas, patin dan lain sebagainya. Wilayah yang menjadi penghasil produksi perikanan budidaya terbesar adalah Kecamatan Seginim, Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Kedurang, yang pada tahun 2013 telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Tabel 2.14
Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Komoditi	Potensi (Ton)	Nilai (000 Rp)
1.	Gurame	-	-
2.	Patin	4.539	86.363.660
3.	Lele	14.992	305.827.500
4.	Nila	15.807	331.336.700
5.	Ikan Mas	8.542	259.240.400

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2021

E. Peternakan

Sektor peternakan merupakan sub sektor unggulan dengan potensi yang sangat besar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Jenis-jenis ternak yang dikembangkan dan populasinya sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 2.15
Populasi dan Produksi Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Sapi		Kerbau		Kambing		Ayam Buras	
		Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)
1	Pino Raya	8.648	51,18	763	2,16	741	0,37	44.728	3,35
2	Pino	2.305	29,27	612	2,15	141	0,04	8.216	0,62
3	Ulu Manna	237	2,73	92	0,87	452	0,13	15.623	1,17
4	Air Nipis	482	13,85	68	0,63	1.8	0,53	17.417	1,31
5	Seginim	820	19,77	258	1,16	347	0,10	28.960	2,17
6	Manna	1.057	24,35	165	1,14	445	0,12	23.087	1,73
7	Bunga Mas	761	15,65	362	3,76	215	0,09	24.939	1,87
8	Kedurang	442	7,47	140	0,62	407	0,11	5.497	0,41
9	Kedurang Ilir	819	13,39	27	0,13	231	0,08	32.548	2,44
10	Kota Manna	574	8,67	72	0,78	331	0,10	75.019	5,63
11	Pasar Manna	432	3,376	78	2,65	83	0,01	13.279	1,00
Jumlah/Total (2020)		16.577	189,71	2.637	16,05	5.193	1,68	289.312	21.7
2019		15.372	179,72	2.693	11,77	19.257	5,72	295.775	44,31
2018		14.908	104,82	2.704	97,16	17.677	18,22	324.255	24,24
2017		13.056	47,25	3.182	35,16	17.522	10,56	297.267	44,31
2016		14.395	104,82	3.714	97,16	18.976	18,22	296.487	45,03



Lanjutan

No	Kecamatan	Ayam Petelur		Ayam Potong		Itik		Entok	
		Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)
1	Pino Raya	1.1	0,13	25.5	21,23	1.235	0,14	3.395	0,27
2	Pino	-	-	40	32,56	-	-	1.43	0,11
3	Ulu Manna	120	0,01	-	0,12	256	0,02	1.501	0,12
4	Air Nipis	2.486	0,12	18.757	15,76	4.011	0,33	4.136	0,33
5	Seginim	2.67	0,14	5.05	4,78	7.536	0,75	8.058	0,64
6	Manna	800	0,09	-	-	1.506	0,10	1.945	0,16
7	Bunga Mas	-	-	70.5	62,38	55	0,01	1.71	0,14
8	Kedurang	-	-	550	0,23	433	0,03	1.588	0,13
9	Kedurang Ilir	20	0,20	750	0,83	20	0,00	1.778	0,14
10	Kota Manna	4.05	0,15	8.1	6,13	418	0,03	1.331	0,11
11	Pasar Manna	-	-	-	-	-	-	1.441	0,12
Jumlah/Total (2020)		31.226	0,84	169.207	143,90	15.47	1,41	28.312	2,26
2019		40.025	1.7	239.899	190,72	23.651	1,54	28.312	2,26
2018		390.85	1.68	235.535	59,47	22.979	2,77	28.548	1,55
2017		5.569	0,03	91.946	31,18	24.965	1,83	28.302	2,52
2016		5.569	0.03	88.769	59,46	23.786	2,77	28.298	2,50

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021



F. Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup potensial untuk dibangun dan dikembangkan, sehingga memiliki daya jual dan daya saing yang tinggi. Banyak potensi pariwisata yang dimiliki, diantaranya wisata alam mulai pantai, danau, dan sungai; wisata buatan, wisata kuliner hingga wisata budaya. Adapun potensi wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.16
Potensi Wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Taman Merdeka	Jenderal Sudirman Kec. Kota Manna
4	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
5	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
6	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
7	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
8	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
9	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
10	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
11	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
12	Lubuk Supit	Desa Sukarami Kec. Air Nipis
13	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna
14	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
15	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
16	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
17	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
18	Telaga Rajak Besi	Kedurang
19	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
20	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
21	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
22	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
23	Danau Ulu Muara Danau	Desa Muara Danau Kecamatan Seginim
24	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
25	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2014-2025



Berdasarkan indikasi program penataan ruang bidang pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kerangka Acuan Kerja penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berbasis Tahun 2013, maka diprioritaskan untuk pengembangan:

1. Kawasan wisata bahari terpadu di Kecamatan Pasar Manna, dengan lokasi Pantai Pasar Bawah, Tebat Rukis dan Tebat Gelumpai.
2. Pengembangan Taman Wisata Alam Lubuk Tapi – Kayu Ajaran, dengan lokasi Air Terjun Geluguran dan Arung Jeram Air Manna
3. Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya meliputi Danau Ulu Air Seginim, Pantai Kedurang, Pantai Bengkenang dan Pantai Makhudum.

Dalam rangka mendukung Wonderfull Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah menetapkan event yang dilaksanakan setiap tahun, yaitu festival Ayik Manna. Disamping itu, potensi wisata berbasis budaya mulai dikembangkan, diantaranya Seni Bedinding Mutus Tari, Dundang Padi, Bimbang Adat, Kayiak Nari dan Malam Gegerit.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

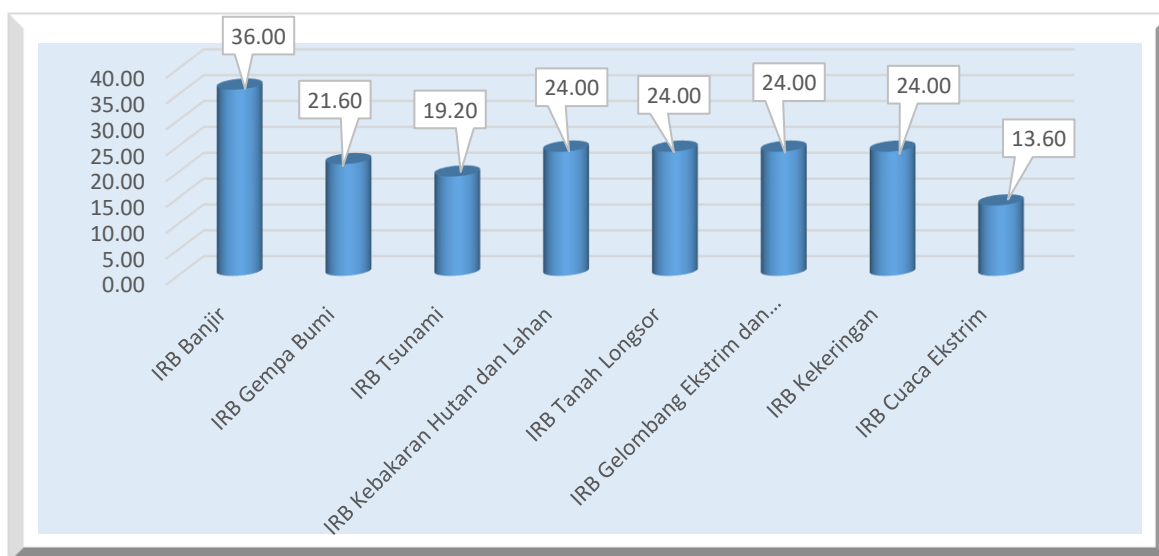
Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu yang memiliki kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana karena berada pada daerah rawan bencana (*ring of fire*). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kelas risiko tinggi dengan skor 186,40.

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya banjir, gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem dan gelombang ekstrem. Bahkan ada daerah yang setiap kali hujan deras melanda selalu terjadi longsor yaitu daerah sepanjang jalur jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan



dengan Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 2.3
Indeks Resiko Bencana Menurut Jenis Bencana
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020



Sumber: BNPB, Tahun 2020

Adapun potensi dan kejadian bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

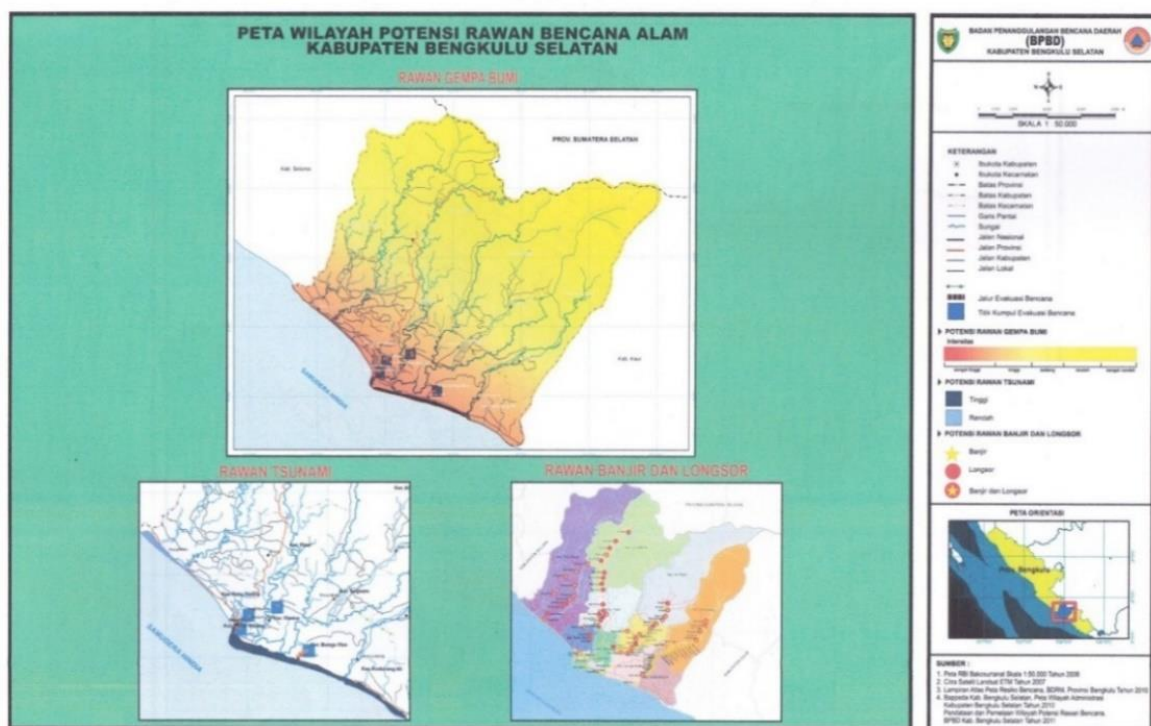
Tabel 2.17
Potensi dan Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Bencana		
		Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1	Manna	1	-	-
2	Kota Manna	1	-	-
3	Kedurang	4	-	1
4	Bunga Mas	-	-	-
5	Pasar Manna	1	1	-
6	Kedurang Ilir	1	-	-
7	Seginim	-	-	-
8	Air Nipis	1	9	-
9	Pino	1	-	-
10	Pino Raya	2	-	3
11	Ulu Manna	-	-	4
Jumlah		12	10	8

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan pengurangan risiko bencana menjadi prioritas pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mengurangi risiko bencana, diantaranya pemetaan daerah rawan bencana, pelaksanaan mitigasi bencana, pembangunan desa siaga bencana dan penguatan satgas tanggap darurat bencana.

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber : BPBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan rawan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Wilayah yang memiliki tingkat kerawanan gempa dan Tsunami paling tinggi adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai diantaranya Kecamatan Kedurang Ilir, Bunga Mas, Pasar Manna, Manna dan Pino Raya sedangkan wilayah yang rawan terhadap bencana banjir dan longsor diantaranya adalah Kecamatan Ulu Manna, Seginim.



2.1.4. Demografi

Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020 mencapai 166.249 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 mencapai 142.940 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk terjadi setiap tahun, dengan laju pertumbuhan per tahun sebesar 1,47 persen. Kepadatan penduduk per km² pada tahun 2020 tercatat sebesar 140.

Adapun kondisi jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan menurut kecamatan selama 5 (lima) tahun tercatat pada tabel berikut:

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Manna	13.964	14.074	14.184	14.290	16.303
2	Kota Manna	30.955	31.599	32.252	32.910	31.807
3	Kedurang	10.585	10.609	10.632	10.652	11.990
4	Bunga Mas	6.161	6.205	6.249	6.291	6.828
5	Pasar Manna	18.635	18.777	18.918	19.054	17.954
6	Kedurang Ilir	8.038	8.160	8.285	8.409	8.944
7	Seginim	15.816	15.900	15.983	16.063	17.174
8	Air Nipis	10.864	10.930	10.996	11.058	12.441
9	Pino	11.620	11.649	11.677	11.703	12.775
10	Pino Raya	19.675	19.858	20.041	20.220	21.938
11	Ulu Manna	7.618	7.666	7.713	7.759	8.095
Jumlah		153.930	155.427	156.930	158.409	166.249

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2021

Secara komposisi menurut umur, Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan lebih di dominasi oleh kelompok penduduk dengan umur 0-19 tahun, yang berarti masih dalam tahap usia sekolah. Hal ini penting menjadi perhatian, karena sangat tepat momentumnya untuk menanamkan pendidikan terutama pendidikan akhlak, agama dan ilmu pendidikan umum, sehingga pada saatnya menjadi manusia produktif.

Apabila dilihat komposisi penduduk Bengkulu Selatan menurut jenis kelamin pada usia produktif, dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan jumlah yang sama. Hal ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk pembangunan berbasis gender.



Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0 – 9	18,20	17,84	18,02
10 – 19	17,88	17,03	17,46
10 – 29	13,80	13,84	13,82
30 – 39	16,01	16,38	16,30
40 – 49	14,67	14,28	14,48
50 – 59	9,96	10,19	10,07
60 +	9,48	10,43	9,95

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

Dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020 sebesar 1,47 persen, dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 81,464 jiwa dan laki-laki sebanyak 84.785 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 104,08, maka hal ini menunjukkan setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104-105 penduduk laki-laki.

Tabel 2.20
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Manna	8.323	7.980	16.303	104,30
2	Bunga Mas	3.444	3.384	6.828	102,59
3	Kota Manna	16.107	15.700	31.807	106,62
4	Pasar Manna	8.947	9.007	17.954	101,77
5	Kedurang	6.187	5.803	11.990	99,33
6	Kedurang Ilir	4.613	4.331	8.944	106,51
7	Seginim	8.762	8.412	17.174	104,16
8	Air Nipis	6.406	6.035	12.441	106,15
9	Pino	6.488	6.287	12.774	103,20
10	Pino Raya	4.181	3.914	8.095	106,75
11	Ulu Manna	11.327	10.611	21.938	106,82
	Jumlah	84.785	81.464	166.249	104,08

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021



2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pelaksanaan pembangunan baik itu pembangunan dalam skala nasional maupun pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan salah satu indikatornya dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, karena aspek ini sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Berbagai indikator kesejahteraan masyarakat dapat dijabarkan ke dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 5.823,67 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 116,16 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5.707,51 miliar rupiah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 3.615,03 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 3.624,59 miliar rupiah pada tahun 2020. Artinya, selama tahun 2020 Bengkulu Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 0,26 persen, jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.21
PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	4.439,35	4.872,69	5.302,90	5.707,51	5.823,67
- ADHK 2010	3.127,26	3.281,69	3.444,03	3.615,03	3.624,59
PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	28.840	31.350	33.791	36.032	36.470
- ADHK 2010	20.316	21.114	21.946	22.821	22.699
- Laju Pertumbuhan	5,25	4,94	4,95	4,97	0,20

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021



Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Bengkulu Selatan didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Keuangan dan Asuransi. Peranan masing-masing sektor memberikan kontribusi pada pembentukan PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai berikut:

Tabel 2.22
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,36	34,30	33,30	32,67	32,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,29	15,96	16,67	17,05	16,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,79	11,19	11,53	11,49	11,33
Transportasi dan Pergudangan	5,43	5,50	5,57	5,81	6,09
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,05	5,81	5,54	5,27	5,73

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

B. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.



Nilai PDRB per kapita Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,84 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 36,47 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kemudian dari sisi PDRB atas dasar harga konstan 2010, nilai PDRB per kapita Bengkulu Selatan pada tahun 2020 mengalami kontraksi (penurunan). Hal ini karena perlambatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 yang dipengaruhi oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan penurunan produksi dari beberapa lapangan usaha yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel 2.23
PDRB Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB Perkapita (<i>Ribu Rupiah</i>)					
- ADHB	28.840	31.350	33.791	36.032	36.470
- ADHK 2010	20.316	21.114	21.946	22.821	22.699

Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021

C. Laju Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Pada Februari 2021 Kota Bengkulu mengalami inflasi sebesar 0,14 persen, angka ini lebih tinggi dibanding kondisi Februari 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,09. Laju inflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,54 persen lebih tinggi dari bulan Februari 2020 dengan laju inflasi sebesar 0,23 persen. Sedangkan inflasi dari tahun ke tahun pada Februari 2021 sebesar 2,59 persen lebih rendah dari bulan Februari 2020 sebesar 2,59 persen.



Tabel 2.24
Perkembangan Inflasi Tahun 2020-2021

No.	Inflasi	2020	2021
1	Bulanan (Februari)	0,09	0,14
2	Tahun Kalender (Januari 2021-Februari 2021)	0,23	0,54
3	Tahunan (Februari 2020-Februari 2021)	2,59	1,20

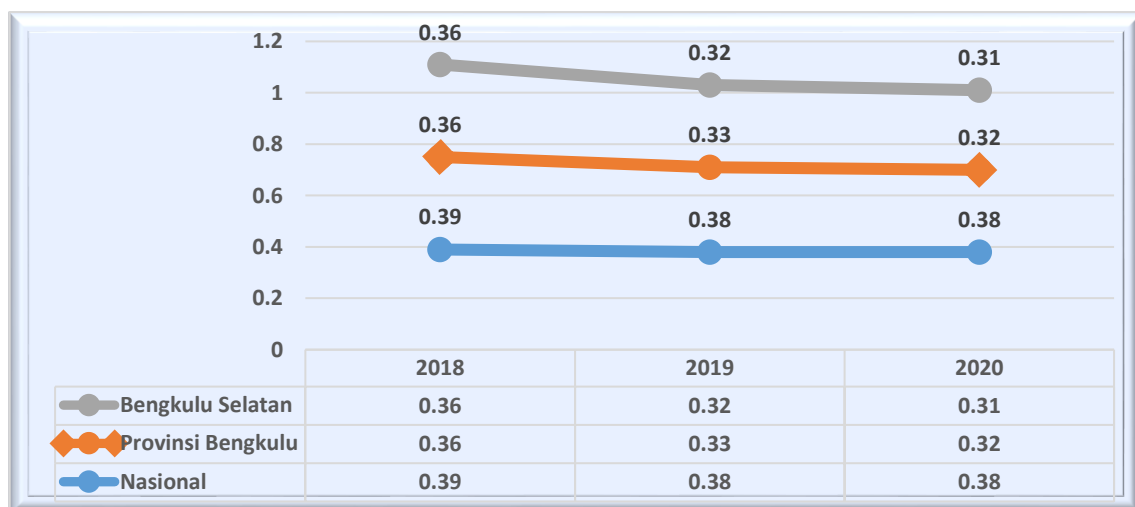
Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2021.

D. Indeks Gini

Indeks gini merupakan alat untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Gini ratio Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend positif selama tiga (3) tahun terakhir. Meskipun belum sempurna, namun hal ini mengindikasikan adanya perkembangan ke arah pemerataan.

Pada tahun 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,31. Angka ini meningkat 0,01 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 yang sebesar 0,32 dan menurun 0,05 poin dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2018 yang sebesar 0,36.

Gambar 2.5
Gini Rasio Kabupaten Bengkulu Selatan

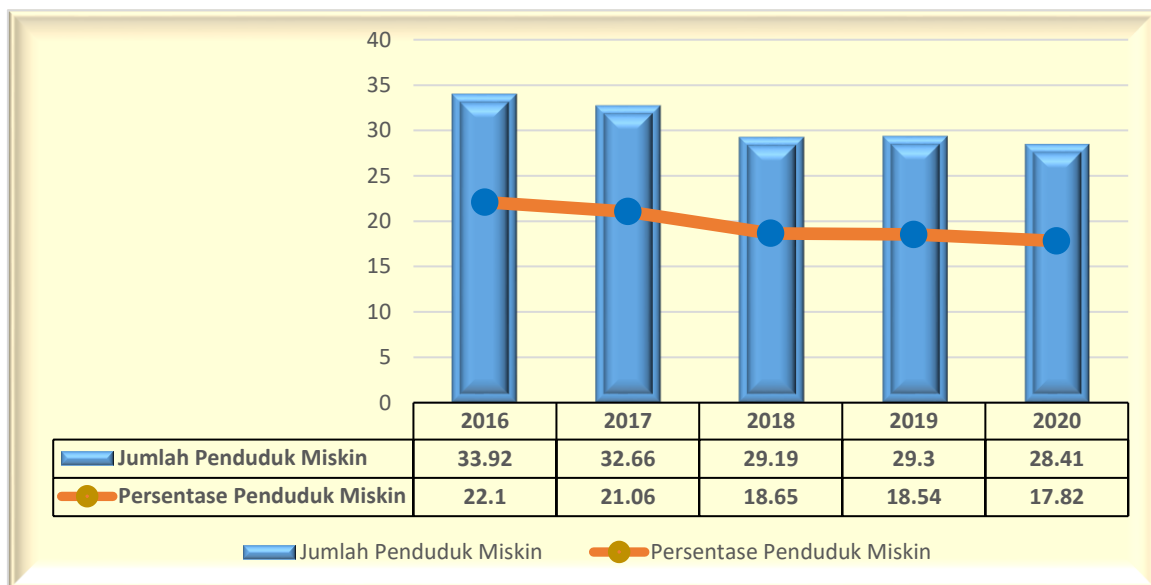


Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2021

E. Kemiskinan

Penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2020 sebanyak 28.410 jiwa, dengan persentase sebesar 17,82 persen. Angka ini mengalami penurunan dibanding tahun 2019, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 29.300 jiwa dengan persentase sebesar 18,54 persen.

Gambar 2.6
Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

Garis kemiskinan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar Rp. 377.823 menjadi Rp. 394.513 pada tahun 2020. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 3,29, mengalami penurunan sebesar 0,03 poin dari tahun 2019 sebesar 3,32. Hal ini mengindikasikan adanya pengurangan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020 sebesar 0,82 turun sebesar 0,01 poin menjadi 0,83 pada tahun 2019. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa terjadi penurunan ketimbangan pengeluaran antara penduduk miskin, meskipun tidak begitu signifikan, sehingga perlu dirumuskan program penanganan kemiskinan yang komprehensif, massif dan terkoordinasi dengan baik, agar penurunan angka kemiskinan dapat berhasil signifikan.



Tabel 2.25
Gambaran Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan	323.991	346.595	364.888	377.823	394.513
Jumlah Penduduk Miskin	33.92	32.66	29.19	29.3	28.41
Persentase Penduduk Miskin	22.1	21.06	18.65	18.54	17.82
Indeks Kedalaman Kemiskinan	4.64	3.32	2.61	3.32	3.29
Indeks Keparahan Kemiskinan	1.3	0.79	0.57	0.83	0.82

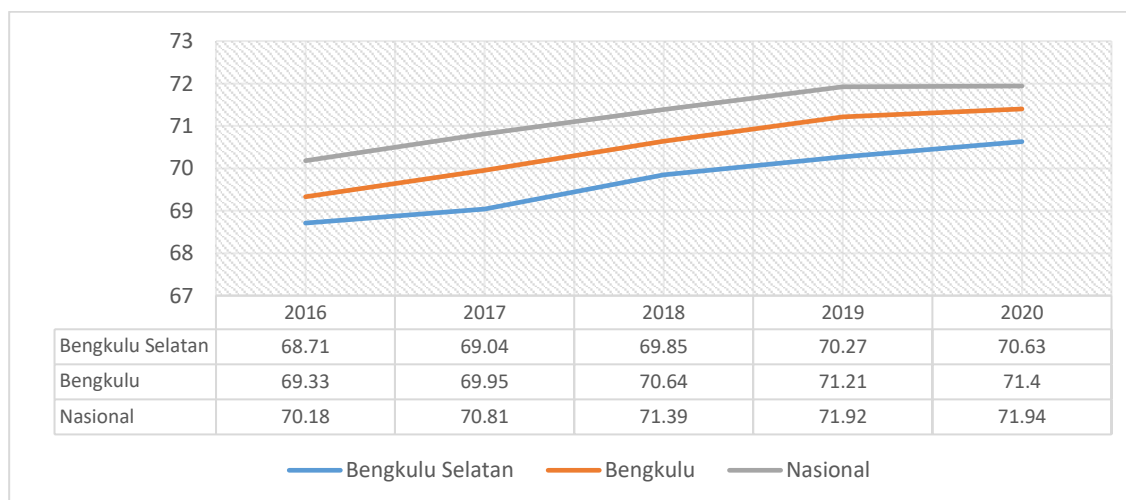
Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara itu maju, berkembang, atau terbelakang. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk dari empat komponen yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita.

Gambar 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, meskipun masih berada di bawah Provinsi Bengkulu. Hal ini memberikan gambaran bahwa upaya pembangunan manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan, sudah berada pada jalur yang semestinya, hanya saja masih membutuhkan akselerasi dan penguatan sehingga memiliki daya ungkit yang lebih. Apabila dibandingkan dengan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020, Kabupaten Bengkulu Selatan menempati peringkat kedua dengan 70,63 setelah Kota Bengkulu yang berada pada angka 80,36.

Tabel 2.26
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) Provinsi Bengkulu
Tahun 2016 – 2020

Kab/Kota	IPM					Pertumbuhan 2019-2020
	2016	2017	2018	2019	2020	
Provinsi Bengkulu	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	0,27
Bengkulu Selatan	68,71	69,04	69,85	70,27	70,63	0,51
Rejang Lebong	68,34	68,61	69,40	70,10	70,44	0,49
Bengkulu Utara	67,63	67,80	68,36	68,80	68,82	0,03
Kaur	64,95	65,28	66,20	66,78	66,99	0,31
Seluma	64,04	65,00	65,99	66,69	66,89	0,30
Mukomuko	66,52	67,07	67,47	68,12	68,45	0,48
Lebong	65,58	65,87	66,28	66,84	67,01	0,25
Kepahiang	66,35	66,60	67,14	67,67	68,17	0,74
Bengkulu Tengah	65,44	65,80	66,65	67,30	67,61	0,46
Kota Bengkulu	77,94	78,82	79,67	80,35	80,36	0,01

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2021.

G. Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 2,36 persen menjadi 3,52 persen pada tahun 2020. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang membawa dampak buruk terhadap ketenagakerjaan di Bengkulu Selatan. Banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang terpaksa berhenti karena tidak mampu bertahan di tengah pandemi, dan bahkan tidak sedikit tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).



Pada tahun 2020, angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 90.774 orang, bertambah 9.562 orang dari angka kerja pada tahun 2019 yaitu sebanyak 81.212 orang. Dari jumlah angka kerja tersebut, 87.582 orang bekerja dan sisanya sebanyak 3.192 orang menjadi pengangguran. Angka ini meningkat seratus persen dari angka pengangguran terbuka pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.916 orang.

Tabel 2.27
Ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2019-2020

Kegiatan Utama	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Angkatan Kerja	orang	81.212	90.774
- Bekerja	orang	79.296	87.582
- Pengangguran	orang	1.916	3.192
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,36	3,52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,37	70,11

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

Angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh tenaga kerja dengan kualifikasi yang masih rendah. Hal ini terlihat dari komposisi angkatan kerja dengan pendidikan SD sebanyak 27.140 orang, pendidikan SMP sebanyak 15.112 orang, pendidikan SMA sebanyak 30.378 orang dan Perguruan Tinggi sebanyak 14.952 orang.

Tabel 2.28
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

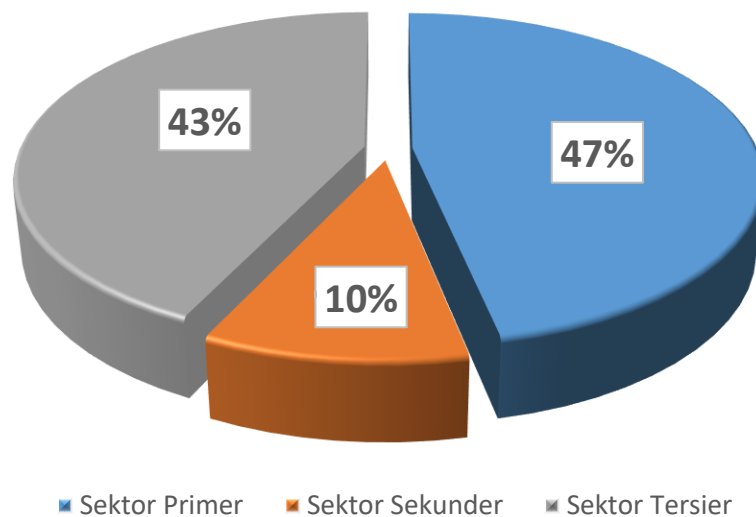
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
SD	27.140	499	27.639	98,19
SMP	15.112	431	15.543	97,23
SMA	30.378	1.495	31.873	95,31
Perguruan Tinggi	14.952	767	15.719	95,12
Jumlah	87.582	3.192	90.774	96,48

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021



Dengan kondisi Angkatan kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan yang masih rendah, menyebabkan banyak tenaga kerja menurut lapangan usaha utama didominasi oleh sektor primer sebanyak 46,79%, yaitu sektor yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian. Sedangkan 42,93% bekerja di sektor tersier dan 10,27% di sektor sekunder.

Gambar 2.8
Angkatan Kerja Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020



Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator yang mendukung pembangunan menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Program pembangunan daerah yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial berkaitan erat dengan upaya peningkatan kualitas manusia.

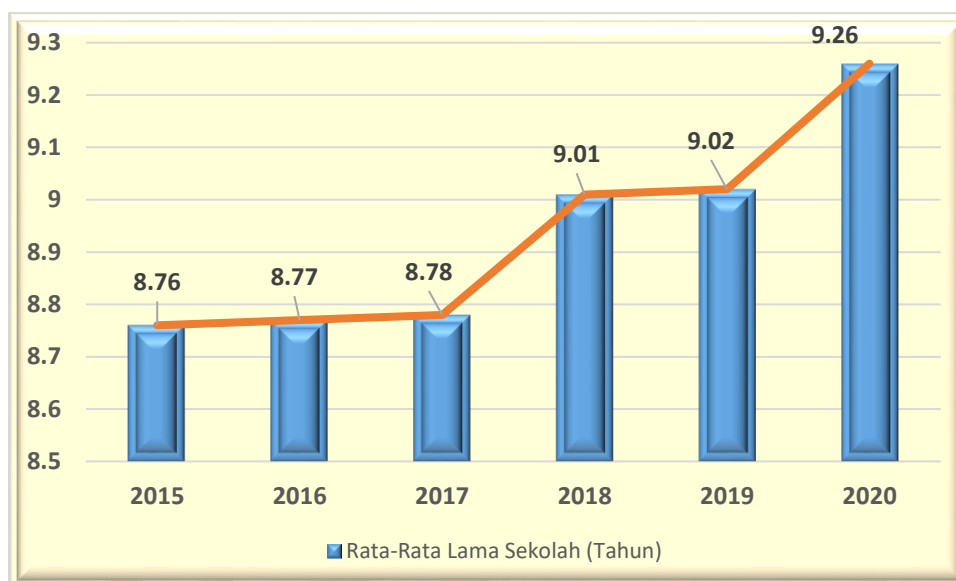
Salah satu indikator pelaksanaan pembangunan yang fokus pada kesejahteraan sosial adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/*Mean Years School* (MYS) adalah jumlah tahun yang



digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Standar UNDP (Badan Program Pembangunan PBB) adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend peningkatan yang konsisten selama 5 (lima) tahun.

Gambar 2.9
Rata-Rata Lama Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki seni budaya yang sangat beragam sebagai bukti kekayaan kearifan lokal, yang sangat berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan. Seni budaya yang ada menjadi salah satu modal untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dari sisi pembangunan karakter dan



kepribadian masyarakat yang berbudaya, beradab, berkarakter dan bertanggung jawab.

Pembangunan seni dan budaya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan serta memperkuat nilai-nilai seni budaya daerah, sehingga terbangun kehidupan sosial masyarakat yang mencerminkan ruh dari makna “sekundang setungguan”. Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan geliat yang positif, dimana terlihat dari banyaknya group seni yang tetap bertahan dan bahkan melahirkan karya.

Tabel 2.29
Jumlah Sanggar/Grup Kesenian di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

Grup Kesenian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sanggar Seni Budaya	Kelompok	15	15	15	15	15
Sanggar Seni Kreasi	Kelompok	12	12	12	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Selain karya seni budaya, Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki peninggalan cagar budaya bernilai penting yang bersejarah, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Cagar budaya yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 52 cagar budaya yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, diantaranya berupa situs bersejarah, megalitik, bangunan dan benda bekas perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia dan lain-lainnya.

Disamping pengembangan seni dan budaya, Kabupaten Bengkulu Selatan juga memiliki keseriusan dalam pengembangan olahraga, sebagai aktivitas fisik yang bersifat positif untuk menyehatkan jasmani dan rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi dan prestasi daerah.

Olahraga yang dikembangkan di Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi ke dalam dua kelompok yaitu olahraga prestasi dan olahraga tradisional. Terdapat beberapa cabang olahraga yang menjadi unggulan di Kabupaten Bengkulu Selatan, diantaranya adalah sepak takraw, bola



volley, bola basket, badminton, tenis meja dan silat. Untuk olahraga tradisional, yang diminati masyarakat adalah terompah panjang, hadang, engrang, catur, dan bakiak.

Tabel 2.30
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Organisasi Olahraga	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Olahraga Prestasi	Organisasi	5	5	5	5	5
Olahraga Tradisional	Organisasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan daerah yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Indikator aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3.1. Pelayanan Umum Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar.

A. Urusan Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan kualitas dan akses pendidikan menjadi prioritas guna peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kinerja pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang masih bersekolah menurut kelompok usia tanpa memperhatikan



jenjang pendidikan. APS dapat digunakan sebagai salah satu ukuran tercapainya tujuan pemerintah yakni kepastian penduduk untuk memperoleh pendidikan dasar. Peningkatan APS dapat menjadi salah satu indikator adanya keberhasilan di bidang pendidikan. Semakin tinggi APS maka semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan, meskipun bukan berarti meningkatnya APS juga menjadi indikator meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah usia 7-15 tahun di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend penurunan selama 2 (dua) tahun terakhir, baik untuk jenjang usia 7-12 tahun yaitu pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan jenjang usia 13-15 tahun yaitu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2.31
Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang Usia	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
7 – 12	%	100.00	100.00	100.00	99.94	99.53
13 – 15	%	99.23	99.67	100.00	99.07	98.52

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, diolah, 2021

Adapun sebaran angka partisipasi sekolah berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 2.32
Sebaran Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang Usia	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
5-6	47.68	43.49	25.75	49.44	17.82	27.93	31.07	33.54	n/a	n/a
7-12	100	100	100	100	100	100	99.87	100	100	99.05
13-15	100	98.45	99.34	100	100	100	98.13	100	100	97.03



Sumber: BPS Bengkulu Selatan, diolah, 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk jenjang usia 7-12 tahun pada tahun 2020, anak jenis kelamin laki-laki sepenuhnya (100%) telah dapat mengenyam pendidikan. Sedangkan untuk jenis kelamin perempuan masih terdapat 0,95 persen yang belum dapat mengenyam pendidikan.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD pada tahun 2019 sebesar 98,91 persen atau masih ada 1,09 persen anak yang tidak bersekolah. Angka tersebut kembali mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 98,80 persen atau masih ada 1,20 persen yang tidak bersekolah.

Sedangkan APM pada jenjang SMP menunjukkan trend penurunan seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. APM pada jenjang SMP pada tahun 2019 sebesar 67,00 persen dan pada tahun 2020 sebesar 66,63 persen. Hal tersebut menunjukkan, semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase penduduk usia sekolah yang bersekolah semakin berkurang. Dengan kata lain masih terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD	%	100.00	100.00	98.50	98.91	98.80
SMP	%	66.01	67.24	64.61	67.00	66.63

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, diolah, 2021

Adapun sebaran angka partisipasi murni berdasarkan jenis kelamin



sebagai berikut:

Tabel 2.34
Sebaran Angka Partisipasi Murni menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	2016		2017		2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	100	100	100	100	100	96.99	99.09	98.72	100	97.6
SMP	66.34	65.68	67.88	66.59	61.32	67.89	67.9	66.09	63.03	70.23

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, diolah, 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa APM jenjang SD pada tahun 2020, terdapat 3,4 persen anak perempuan yang tidak bersekolah, sedangkan anak laki-laki 100 persen bersekolah. Sedangkan untuk APM jenjang SMP, anak perempuan sebanyak 70,23 persen, lebih banyak melanjutkan sekolah daripada anak laki-laki sebesar 63,03 persen.

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Perkembangan APK Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.35
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
PAUD	%	71,79	70,72	74,52	75,12	91,21
SD	%	96,06	107,65	99,47	96,20	107,13
SMP	%	89,31	129	91,18	94,18	99,23

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP, selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang menempuh



pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

4. Rasio Guru Terhadap Siswa

Rasio guru terhadap siswa adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap siswa menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini, berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Rasio guru terhadap siswa jenjang pendidikan dasar di SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Rasio Guru Terhadap Siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD	Rasio	1:14	1:12	1:16	1:13	n/a*
SMP	Rasio	1:13	1:13	1:14	1:12	n/a

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, Tahun 2021

*n/a = data belum tersedia

Rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk jenjang SD dan SMP sudah relatif memadai, dimana rasio guru terhadap siswa pada jenjang SD sebesar 1:13. Hal ini berarti 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 13 siswa. Interpretasi yang sama juga untuk jenjang SMP dimana rasio sebesar 1:12, yang berarti 1 orang guru bertanggung jawab terhadap 12 siswa.

5. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS yang ditetapkan dalam satuan tahun, digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.37
Perkembangan Harapan Lama Sekolah
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	13.58	13.59	13.60	13.61

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2021

Angka HLS Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020 sebesar 13,61 tahun, artinya secara rata-rata menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal selama 13,61 tahun atau setara dengan Diploma 3.

6. Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian (asesmen) sekolah secara sistematis dan komprehensif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu serta menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Kondisi akreditasi sekolah di Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Akreditasi Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Jenjang / Akreditasi	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SD						
A	%	5,6	16,7	16,8	16,8	n/a
B	%	44,4	52,4	52,8	52,8	n/a
C	%	24,2	29,4	29,6	29,6	n/a
Belum	%	25,2	1,6	0,8	0,8	n/a
SMP						
A	%	17,1	19,4	19,4	19,4	n/a
B	%	28,6	50,0	52,8	52,8	n/a
C	%	28,6	22,2	22,2	22,2	n/a
Belum	%	25,7	8,3	5,6	5,6	n/a

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, Tahun 2020

*n/a = data belum tersedia

Berdasarkan data pada tabel di atas, masih banyak sekolah yang



status akreditasinya belum sempurna dan bahkan belum terakreditasi sampai dengan tahun 2019. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan.

B. Urusan Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup adalah banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang Kesehatan, karena pencapaian dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. AKB di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.39
Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
AKB/1.000 Kelahiran Hidup	Nilai	10	11	10	17	8

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 dan LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, 2020.



2. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani seseorang. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Selain fungsinya sebagai indikator keberhasilan program kesehatan, AHH juga dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai taraf kesehatan masyarakat.

Pada dasarnya AHH untuk jangka pendek relatif stabil, karena program pembangunan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan bukanlah program yang berdampak langsung (bersifat instant), sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat melihat dampaknya.

AHH memiliki hubungan yang erat dan positif dengan pembangunan sosial ekonomi. Bila pembangunan sosial ekonomi semakin baik, maka AHH juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, bila AHH tinggi maka dapat menjadi indikasi bahwa pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah semakin maju. Daerah yang kondisi sosial ekonominya di bawah rata-rata biasanya mempunyai AHH yang relatif rendah.

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Angka Harapan Hidup Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	Tahun	67,20	67,24	67,45	67,79	67,90

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, menunjukkan AHH di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2016 sampai 2020 terus meningkat hingga menjadi 67,90 pada tahun 2020. Kecenderungan kenaikan AHH di Bengkulu Selatan ini juga mengindikasikan peningkatan taraf kesehatan masyarakat selama tiga tahun terakhir.



3. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan dalam bidang kesehatan menjadi kebutuhan dan mutlak dipenuhi dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia guna mewujudkan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan dalam bidang kesehatan adalah baiknya layanan kesehatan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yaitu ketersediaan sarana prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.41
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016 – 2020

No	Fasilitas Kesehatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Sakit	Unit	1	2	2	2	2
2	Puskesmas	Unit	14	14	14	14	14
3	Puskesmas Pembantu	Unit	41	41	41	41	46
4	Poliklinik	Unit	4	8	9	6	8
5	Apotik	Unit	17	19	10	14	17

Sumber : Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

Ketersediaan tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang diiringi dengan pemerataan tenaga medis pada fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik dan paripurna. Adapun data jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut.

Tabel 2.42
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016–2020

No	Tenaga Medis	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter	Orang	67	59	67	108	73
2	Perawat	Orang	151	204	153	658	434
3	Bidan	Orang	199	328	458	576	521
4	Farmasi	Orang	45	12	13	90	112
5	Ahli Gizi	Orang	17	18	13	65	44

Sumber : Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2017-2021



C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja pembangunan daerah terkait dengan pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Jalan dalam kondisi mantap

Jalan menjadi kunci utama untuk menjamin terwujudnya konektivitas guna membuka akses dan keterhubungan baik antar daerah maupun antar wilayah (kecamatan) dalam Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun ruas jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan kewenangan sebagai berikut:

Tabel 2.43
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016–2020

No	Status Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Negara	Km	n/a	110,45	43,50	43,50	43,50
2	Provinsi	Km	n/a	139,75	139,75	139,75	139,75
3	Kabupaten	Km	n/a	1.292,00	1.278,47	1.280,97	1.280,97

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2020-2021

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Adapun data jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan menurut kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016–2020

No	Kondisi Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	Km	286,82	966,18	892,21	716,95	368,34
2	Sedang	Km	93,63	135,71	133,98	133,98	348,51
3	Rusak	Km	227,69	214,24	220,86	212,86	564,12
4.	Rusak Berat	Km	154,96	226,07	214,67	214,67	n/a

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2019-2021



Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.45
Tingkat Kemantapan Jalan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016–2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan dalam kondisi mantap	%	49.86	71.45	70.20	66.56	55.96

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2019-2021

D. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan daerah terkait pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2016-2020, dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sehat. Air minum yang layak adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Berikut data rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses terhadap layanan air minum layak.



Tabel 2.46
Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	%	39,24	67,27	49,54	65,85	45,78

Sumber : Provinsi Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2020 masih terdapat 54,22 persen Rumah Tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum memiliki akses terhadap air minum layak.

2. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%).

Adapun rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses sanitasi layak, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,58	76,45	76,36	68,02	72,02

Sumber : Provinsi Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun



2020, rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 72,02 persen, artinya masih ada 27,98 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak.

3. Rumah Tangga yang Menempati Rumah Layak Huni

Kebutuhan perumahan yang layak merupakan hal yang esensial bagi setiap manusia. Untuk memenuhi hal tersebut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 menyebutkan jika setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sehingga dalam upaya mewujudkan kebutuhan perumahan yang layak huni, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan juga berusaha untuk memberikan kemudahan terhadap perolehan rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia.

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu, kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses air minum dan sanitasi layak, serta memenuhi kriteria ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan dan semen/bata merah (BPS, 2019).

Rumah tangga di Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki akses terhadap hunian layak sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.48
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	2019	2020
1	Rumah Layak Huni	%	94,07	93,91
2	Rumah Tidak Layak Huni	%	5,93	6,69

Sumber : Provinsi Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021



E. Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan umum wajib pelayanan dasar urusan kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan kurun waktu tahun 2016-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kualitas kehidupan masyarakat yang berkualitas, salah satunya dibangun dari kualitas kententraman dan ketertiban umum yang terjaga dengan baik, serta perlindungan masyarakat yang terkelola secara optimal. Dalam upaya meningkatkan kualitas kententraman dan ketertiban umum, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan disupport oleh tenaga Satuan Polisi Pamong Praja yang berkompeten dan professional.

Tabel 2.49
Rasio Satuan Polisi Pamong Praja Per 1.000 Penduduk
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Polisi Pamong Praja	%	0.13	1.36	1.36	1.36	1.24

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Tahun 2021

Disamping Satuan Polisi Pamong Praja, upaya mewujudkan kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga didukung oleh personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas), dimana pada tahun 2020 tercatat terdapat 688 orang anggota Linmas.

2. Indeks Resiko Bencana

Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk daerah rawan bencana (*ring of fire*). Upaya peningkatan ketahanan daerah terhadap bencana terus dilakukan guna mengurangi resiko terjadinya bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerabilities*), dan kapasitas (*capacities*). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan

lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Kajian risiko bencana menghasilkan Indeks Risiko Bencana untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana. Kabupaten Bengkulu Selatan sendiri masuk dalam kategori daerah dengan indeks risiko bencana tinggi.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

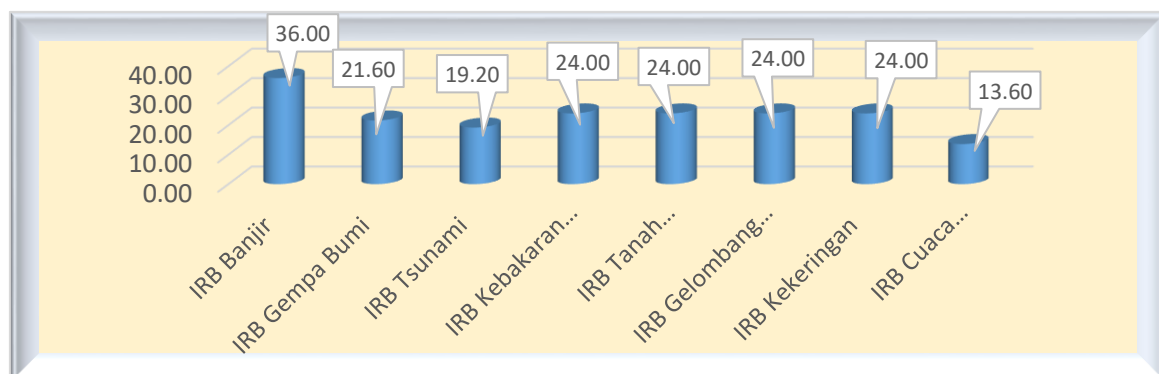
Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Risiko Bencana		186,40	186,40	186,40	186,40	186,40

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2021

Ancaman bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa potensi diantaranya banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan serta cuaca ekstrim.

Indeks risiko bencana menurut potensi ancaman bencana pada tahun 2020, sebagai berikut:

Gambar 2.10
Indeks Risiko Bencana Menurut Potensi Ancaman
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020



Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia, BNPB, Tahun 2021



F. Urusan Sosial

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, menjadi amanat bagi Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar urusan wajib bidang sosial terhadap masyarakat miskin atau masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) melalui bantuan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, Jaminan Sosial dan perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Adapun data PMKS di Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	12
2	Anak Terlantar	129
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	30
4	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	23
5	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	22
6	Lanjut usia terlantar	8.170
7	Penyandang Disabilitas	835
8	Tuna Susila	32
9	Pengemis	8
10	Pemulung	16
11	Kelompok Minoritas	15
12	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	36
13	Korban penyalahgunaan NAPZA	35
14	Korban tindak kekerasan	63
15	Pekerja Migran bermasalah	9
16	Korban bencana sosial	27
17	Fakir Miskin	67.525
Jumlah		76.987

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

2.3.2. Pelayanan Umum Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur kewenangan pemerintah tingkat kabupaten dalam urusan tenaga kerja, yakni meliputi (1) pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja (pelaksanaan pelatihan, pembinaan lembaga pelatihan, perizinan lembaga pelatihan, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil); (2) penempatan tenaga kerja (pengelolaan informasi pasar kerja, penerbitan izin LPTKS, perlindungan TKI); dan (3) hubungan industrial (pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial).



Untuk mengidentifikasi besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi di suatu wilayah, digunakan suatu ukuran yang disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	TPAK	%	n/a	72,09	71,77	70,08	70,11

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2020-2021

Berdasarkan data diatas, mengindikasikan bahwa 70,11 persen Angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan berpartisipasi di pasar kerja, sedangkan 29,89 persen beraktivitas pada sektor lain baik itu mengurus rumah tangga, masih sekolah, maupun memiliki kegiatan lainnya.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angkatan kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagian besar berpendidikan SMA, kemudian diikuti SD, SMP dan Perguruan Tinggi, sebagaimana dipaparkan pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2019-2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		2019	2020
1	SD	26,166	27,639
2	SMP	14,628	15,543
3	SMA	26,701	31,873
4	Perguruan Tinggi	13,717	15,719
Total		81,212	90,774

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021



B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator untuk melihat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah indeks pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Berikut data indeks pembangunan gender dan Indeks Pemberdayaan gender di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020.

Tabel 2.54
Indeks Pembangunan Gender Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender	%	93,88	93,74	94,08	94,05	94,14
2.	Indeks Pemberdayaan Gender	%	n/a	54,75	54,89	55,2	55,03

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2021

C. Urusan Ketahanan Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.



Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah. Dengan demikian, IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan.

Nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.55
Indeks Ketahanan Pangan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Ketahanan Pangan	%	n/a	n/a	71,55	72,44	74,54

Sumber: Laporan Badan Ketahanan Pangan, RI, Tahun 2020

D. Urusan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk berupaya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan untuk: a. melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan kewenangan, diantaranya



pengelolaan persampahan, pengendalian terhadap kerusakan lingkungan, penegakan dan penyelesaian permasalahan lingkungan, hingga melakukan pelestarian keanekaragaman hayati. Sebagai instrument untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dilakukan dengan menggunakan indeks yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

IKLH di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana tergambarakan pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	n/a	60,54	69,86

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2021

E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang wajib dimiliki oleh Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas.

Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kualitas baik menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana pada tahun 2019 dengan indeks 3,56 dan meningkat pada tahun 2020 sehingga indeks pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi 3,64 dengan kategori Baik.

Progress rekam dan capaian kepemilikan e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:



Tabel 2.57
Capaian Perekaman e-KTP di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perekaman e-KTP	%	86,28	98,9	98,21	99,04	103,3

Sumber: Disdukcapil Provinsi Bengkulu, Tahun 2021

F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dan mengamanatkan percepatan pembangunan desa guna membangun masyarakat desa yang adil dan makmur, melindungi dan memberdayakan masyarakat desa, menjaga dan mengatur kewenangan desa, dan memaksimalkan pelayanan masyarakat. Instrument untuk menilai pencapaian implementasi dari undang-undang desa tersebut adalah melalui Indeks Desa Membangun (IDM).

Indeks Desa Membangun (IDM) mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Berdasarkan capaian IDM, Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk ke dalam kabupaten dengan status berkembang.

Berikut data indeks desa membangun di kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.58
Indeks Desa Membangun di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Desa Membangun	%	n/a	n/a	n/a	0,6486	0,6575

Sumber: Peringkat Status IDM Tahun 2020, Kemendes, Tahun 2021

Berdasarkan data IDM di atas, secara nasional Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada ranking 191 dengan kategori sebagai



daerah Berkembang. Capaian IDM tersebut tidak terlepas dari support capaian IDM desa dan kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tahun 2020, dari 142 jumlah seluruh desa yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat 8 Desa yang sudah berstatus Maju yaitu Desa Penandingan, Desa Ulak Lebar, Desa Sukarami, Desa Palak Bengkerung, Desa Batu Lambang, Desa Batu Kuning, Desa Tumbuk Tebing, dan Desa Pasar Pino. Sedangkan 134 desa lainnya berstatus Berkembang.

Berikut capaian IDM Kabupaten Bengkulu Selatan menurut Kecamatan pada tahun 2020.

Tabel 2.59
Indeks Desa Membangun Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Ranking Nasional	Skor IDM	Kategori
1	Pasar Manna	552	0.7361	Maju
2	Air Nipis	1,546	0.6929	Berkembang
3	Kota Manna	2,522	0.6692	Berkembang
4	Manna	2,766	0.6636	Berkembang
5	Pino Raya	2,858	0.6614	Berkembang
6	Pino	2,962	0.6592	Berkembang
7	Kedurang Ilir	3,015	0.6581	Berkembang
8	Ulu Manna	3,471	0.6476	Berkembang
9	Bunga Mas	3,603	0.6445	Berkembang
10	Seginim	3,607	0.6443	Berkembang
11	Kedurang	3,649	0.6429	Berkembang

Sumber: Peringkat Status IDM Tahun 2020, Kemendesa, Tahun 2021

G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan sasaran Pasangan Usia Subur dan capaian pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*). CPR merupakan Angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat kontrasepsi pada saat pencacahan.

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, agar terwujud



keluarga sejahtera, maju dan bahagia. Disamping itu, sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah terkait pencapaian program Keluarga Berencana (KB). Di Kabupaten Bengkulu Selatan, peserta program Keluarga Berencana cukup tinggi dengan akseptor KB aktif sebagaimana data berikut:

Tabel 2.60
Akseptor KB Aktif di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Akseptor KB Aktif	Jiwa	20.712	25.650	24.370	21.548	22.690

Sumber: Provinsi Bengkulu Dalam Angka, Tahun 2017-2021

Cukup tingginya akseptor KB aktif mempengaruhi pencapaian *Total Fertility Rate* (TFR) di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya, yang berguna untuk membandingkan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, menjadi dasar penyusunan program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Pada tahun 2019, TFR Kabupaten Bengkulu Selatan tercatat 2,33 dan pada tahun 2020 menjadi 2,38, yang artinya bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia subur.

H. Urusan Perhubungan

Dalam rangka mendukung tercapainya konektivitas jaringan khususnya dalam hal ketersediaan sarana prasarana transportasi, perlu terus dikembangkan pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur perhubungan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan akses konektivitas baik



dengan daerah lain maupun antar wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga memudahkan transportasi dan mobilisasi masyarakat serta memberikan *value added* menuju tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sarana transportasi darat yaitu ketersediaan jaringan jalan menjadi sarana transportasi utama di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penggunaan moda angkutan jalan. Berikut data angkutan umum di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 2.61
Data Angkutan Umum di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang	2,248	3,227	3,575	3,941	2,890
2	Mobil Bus	38	26	19	31	19
3	Mobil Barang	1,397	1,676	1,694	1,733	1,229
4	Sepeda Motor	25,572	27,567	27,694	27,168	21,827
5	Kendaraan Khusus dan Lainnya	14	25	30	-	-
Jumlah		29,269	32,521	33,012	32,873	25,965

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

Pelayanan transportasi darat untuk masyarakat dilayani oleh perusahaan transportasi darat AKDP dan AKAP sebagai berikut:

Tabel 2.62
Perusahaan Angkutan Penumpang AKDP dan AKAP
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Perusahaan	Jurusan/Trayek	Jenis Kendaraan
PO. Putra Rafflesia	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. San Travel	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Bengkulu Kito	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Krui Putra	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Sriwijaya	Bengkulu-Manna-Jakarta	Bus
PO. Lubuk Tapi Ekspres	Manna- Palembang	Bus
PO. Sinar Sekundang	Manna - Palembang	Bus

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2021



I. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sudah menjadi keharusan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, menuju terwujudnya *good government* dan *clean governance*.

Pembangunan TIK menjadi syarat utama untuk mendorong penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi Pemerintah Daerah, sehingga sistem layanan pemerintahan dapat terintegrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat semakin prima.

Dengan pembangunan TIK yang terintegrasi, maka keterbukaan informasi publik dapat diwujudkan melalui transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan keluasan akses masyarakat terhadap informasi pelayanan publik. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, 40 (empat puluh) organisasi perangkat daerah sudah memiliki website dengan domain *bengkuluselatankab.go.id*.

Berikut capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 2.63
Kinerja Pemerintah Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator	Satuan	Tahun	
			2019	2020
1	Indeks SPBE	Nilai	2,32	2,27
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65	70

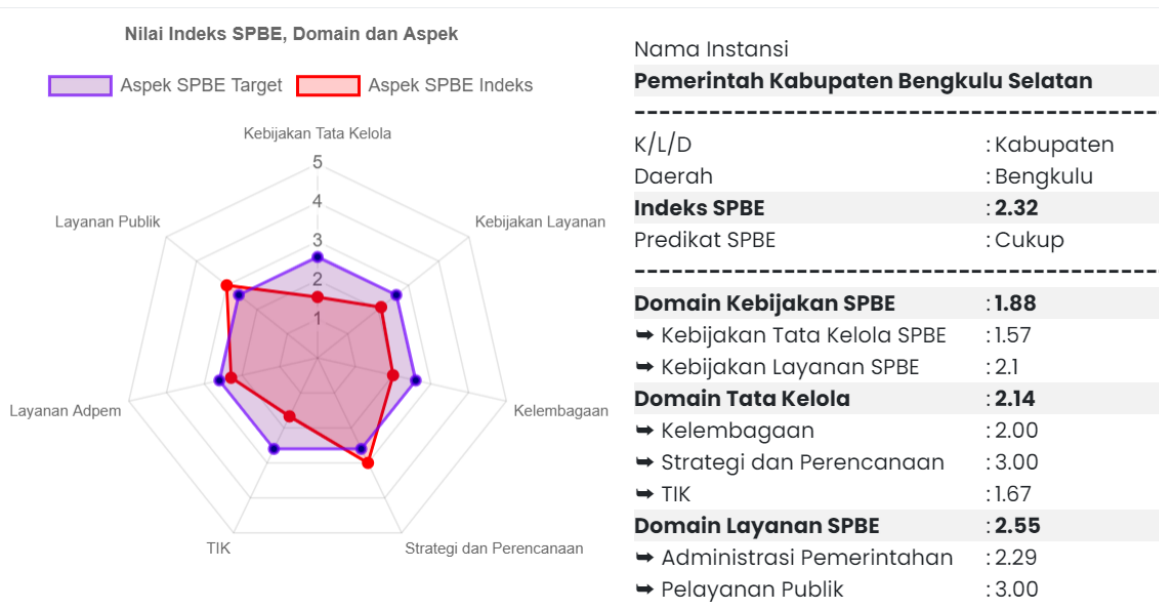
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

Pada penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dimulai pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan nilai 2,32 dengan kategori cukup. Berdasarkan evaluasi, SPBE Kabupaten Bengkulu Selatan masih rendah, dimana penilaian domain Kebijakan SPBE mendapatkan nilai 1,88, domain tata kelola nilai 2,14 dan domain layanan SPBE nilai 2,55. Capaian nilai SPBE tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan nilai 2,27.

Gambar 2.11
Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2019



Hasil Evaluasi SPBE 2019



Sumber: Kementerian PAN RB, tahun 2020

J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Apalagi ditengah kondisi pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19), dimana aktivitas ekonomi masyarakat banyak yang terdampak dan akhirnya gulung tikar. Koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, sehingga peningkatan kualitas pelayanan terhadap pengembangan usaha mikro pada tingkat daerah menjadi suatu prioritas. Sejalan dengan itu, cara-cara baru, inovasi, kreatifitas dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan terhadap usaha mikro menjadi suatu keharusan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Secara umum persoalan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro antara lain: (1) kurangnya kesadaran pelaku usaha mikro dalam izin



usaha; (2) kurangnya pemahaman tentang perencanaan bisnis (*Business Plan*); (3) produk belum memenuhi standar mutu (PIRT, Packaging, Merek, Sertifikasi Halal, Komposisi Produk, Masa Produk dan Registrasi Produk); (4) Belum memiliki catatan transaksi usaha; (5) terbatasnya akses teknologi dan pemasaran; (6) sulitnya terhadap akses pembiayaan; (7) terbatasnya tenaga pendampingan terhadap pelaku usaha.

Perkembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana data berikut:

Tabel 2.64
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi	Unit	138	96	90	83
2	UKM	Unit	298	391	446	596

Sumber: Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2021

K. Urusan Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif-tidaknya iklim penanaman modal di daerah. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor. Selain itu, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung, kualitas aparat pelayanan dan adanya kesamaan persepsi antara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor.

Penanaman modal di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2017 realisasi investasi Rp. 33.911.700.000 meningkat menjadi Rp. 627.880.000.000 pada tahun



2020. Kondisi ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah mulai terbangun dengan kondusif. Perkembangan investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Realisasi Investasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Investasi	Miliar Rupiah	130	33	40	235	627

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik, Tahun 2021

L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pada hakekatnya, kegiatan olahraga merupakan miniatur kehidupan. Hal ini dapat dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terdapat aspek-aspek yang berkaitan dengan tujuan, perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, kekuatan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas. Semua aspek ini merupakan aspek-aspek yang berada dalam diri manusia baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Berdasarkan nilai yang terkandung dalam olahraga tersebut, maka sudah selayaknya olahraga ditempatkan pada posisi penting dan dikelola secara profesional.

Perkembangan olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Organisasi Olahraga	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Olahraga Prestasi	Organisasi	5	5	5	5	5
Olahraga Tradisional	Organisasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2021



M. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, dimana pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik, sedangkan Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan data statistik sektoral.

Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan statistik dengan melakukan pengumpulan data sektor melalui produsen data yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam pengumpulan dan pengolahan data sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan, kebijakan dan program/kegiatan, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik yang kemudian dituangkan dalam dokumen Bengkulu Selatan Dalam Angka (BSDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan dokumen lainnya.

N. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini menjadi penting, karena pengamanan informasi pada era digital sekarang ini sudah menjadi kebutuhan. Era keterbukaan dan terkoneksi sistem jaringan di Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadikan informasi rentan terhadap potensi serangan siber. Insiden siber merupakan kejadian yang



mengganggu berjalannya sistem elektronik, misalnya serangan virus, pencurian data, informasi pribadi, hak kekayaan intelektual perusahaan, *web defacement* dan gangguan akses terhadap layanan elektronik.

Persiapan terhadap kejadian insiden siber akan memperkecil kerugian akibat pencurian informasi atau gangguan pada layanan dan insiden siber berkembang menjadi lebih luas. Pemulihan sistem dan data elektronik yang terdampak insiden perlu dilakukan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat melanjutkan proses bisnis dan kegiatannya. Pengamanan persandian perlu ditingkatkan terutama terhadap website milik pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan

Tabel 2.67
Jumlah Website Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Website	Sistem	1	1	40	40	40

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2021

O. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis pada kearifan lokal masyarakat Bengkulu Selatan. Kebijakan yang diambil adalah peningkatan pelestarian terhadap cagar budaya melalui pengelolaan warisan budaya dan peningkatan pelestarian nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya. Adapun salah satu program yang dilaksanakan setiap tahun adalah pemeliharaan cagar budaya yang merupakan peninggalan-peninggalan pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Festival Ayiak Manna, serta promosi wisata berbasis budaya, diantaranya Seni Bedinding Mutus Tari, Dundang Padi, Bimbang Adat, Kayiak Nari dan Malam Gegerit.

Data dan informasi perkembangan kebudayaan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:



Tabel 2.68
Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

Grup Kesenian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Sanggar Seni Budaya	Kelompok	15	15	15	15	15
Sanggar Seni Kreasi	Kelompok	12	12	12	12	12
Cagar Budaya	Unit	52	52	52	52	52

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2021

P. Urusan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan dilaksanakan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terutama dari sisi penguatan minat baca masyarakat. Perpustakaan merupakan sumber informasi dan literasi untuk memperkaya khasanah dan ilmu pengetahuan. Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Salah satu indikator meningkatnya minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Perkembangan tingkat kunjungan pemustaka pada perpustakaan di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Perkembangan Pemustaka di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pemustaka/ Pengunjung Perpustakaan	Orang	9.243	6.290	8.830	1.741	1.320

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2021

Penurunan tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan disebabkan beberapa kondisi diantaranya belum memiliki Gedung perpustakaan yang representatif, serta belum optimalnya layanan literasi berbasis digitalisasi yang disediakan di perpustakaan.



Q. Urusan Kearsipan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta pendampingan dan monitoring penerapan penggunaan sistem pola baru yang dikembangkan dengan sistem aplikasi kearsipan berbasis IT.

Kinerja pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2019, berdasarkan hasil pengawasan kearsipan pada Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh ANRI menunjukkan hasil masih sangat kurang dengan nilai 9,71.

Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya belum adanya SDM Tenaga Pengelola Arsip/Arsiparis; belum adanya program/aplikasi dalam pengelolaan arsip; Ketersediaan sarana prasarana kearsipan masih belum memadai, dan belum adanya Ruang Simpan Arsip/Depo.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah pesisir yang langsung berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah barat. Kondisi ini memberikan dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat karena menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Potensi perikanan sangat besar baik itu perikanan laut maupun perikanan darat (budidaya). Sentra perikanan budidaya di Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Seginim, Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Kedurang. Bahkan 3 kecamatan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan minapolitan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35/Kepmen-Kp/2013 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan.



Perkembangan Produksi Perikanan Di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.70
Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Laut	Ton	1.536,99	1.585,94	1.600,94	1.625,49	1.631,49
Perikanan budidaya	Ton	16.839,6	16.871,3	12.121,2	9.490,03	10.671,9

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

B. Urusan Pariwisata

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup potensial untuk dibangun dan dikembangkan, sehingga memiliki daya jual dan daya saing yang tinggi. Banyak potensi pariwisata yang dimiliki, diantaranya wisata alam mulai pantai, danau, dan sungai; wisata buatan, wisata kuliner hingga wisata budaya. Adapun potensi wisata di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.71
Potensi Pariwisata di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
1	Pantai Wisata Pasar Bawah	Kel. Pasar Bawah, Kec. Pasar Manna
2	Air Terjun Geluguran	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
3	Taman Merdeka	Jenderal Sudirman Kec. Kota Manna
4	Muara Kedurang	Desa Tanjung Aur, Kec. Bunga Mas
5	Tebat Rukis	Kel. Tanjung Mulia, Kec. Pasar Manna
6	Air Terjun Tiga Tingkat	Desa Batu Aji, Kec. Ulu Manna
7	Goa Suruman	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
8	Danau Ulu Seginim	Desa Tanjung Beringin, Kec. Seginim
9	Pantai Mengkudum	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
10	Bendungan Air Nipis	Desa Plk Bengkerung, Kec. Air Nipis
11	Arung Jeram Air Manna	Kec. Ulu Manna – Pino
12	Lubuk Supit	Desa Sukarami Kec. Air Nipis
13	Sirkuit Balap	Pagar Dewa, Kec. Kota Manna



No	Nama Lokasi / Potensi Wisata	Lokasi
14	Pantai Bengkenang	Desa Ketaping, Manggul, Kec. Manna
15	Tebat Gelumpai	Desa Batu Lambang, Kec. Pasar Manna
16	Air Terjun Cawang	Desa Batu Ampar, Kec. Kedurang
17	Keramat Bujang Bandan	Kedurang
18	Telaga Rajak Besi	Kedurang
19	Tebat Besar	Desa Merambung, Kec. Pino
20	Air Terjun Padang Lakaran	Desa Pasar Pino, Kec. Pino Raya
21	Tebat Niniak	Desa Selali, Kec. Pino Raya
22	Danau Ilir	Maras, Keban Jati, Air Nipis
23	Danau Ulu Muara Danau	Desa Muara Danau Kecamatan Seginim
24	Pantai Ketaping	Desa Ketaping, Kec. Manna
25	Wisata Pancur Mas	Desa Selali, Kec. Pino Raya

Sumber : Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2014-2025

C. Urusan Pertanian

Bidang pertanian menjadi salah satu sektor prioritas dan unggulan yang mampu berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebesar 32 persen. Sektor pertanian juga menjadi sektor primer dimana sebagian besar masyarakat Bengkulu Selatan atau sebesar 46,79 persen menjadikan pertanian sebagai sumber mata pencaharian.

Data produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.72
Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi padi sawah dan padi lading	Ton	81.459	93.146	89.232	70.638	59.492
2	Produksi beras (produksi padi – 10%) x 63,20%.	Ton	46.334	53.255	50.755	40.179	33.839
3	Kebutuhan per kapita per tahun	Kg	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80
4	Jumlah kebutuhan beras	Ton	17.289	17.843	17.289	18.185	19.085

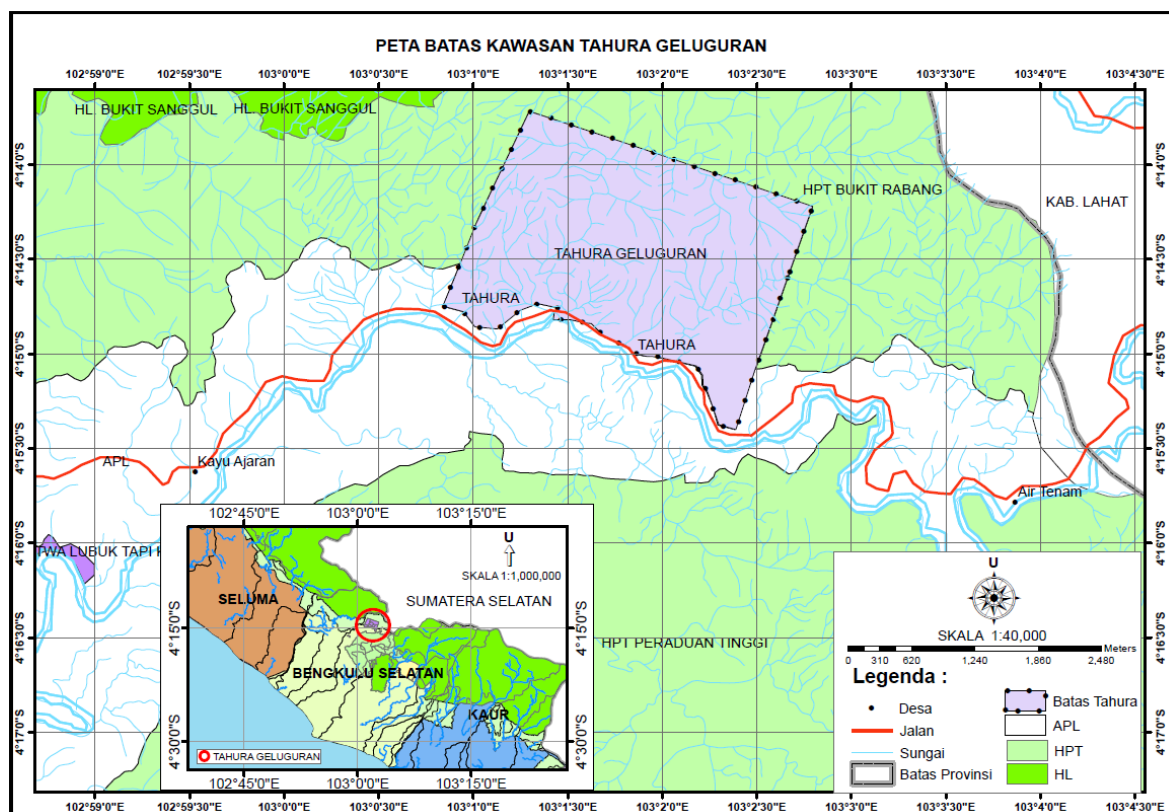
5	Surplus beras	Ton	29.045	35.966	33.466	21.994	14.754

Sumber: Dinas Pertanian, Tahun 2020

D. Urusan Kehutanan

Urusan pilihan kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pengelolaan taman hutan rakyat. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat taman hutan rakyat (Tahura) Geluguran terletak di Kecamatan Ulu Manna, yang ditetapkan dengan keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: SK.643/Menhut-II/2011 tanggal 10 November 2011 dengan Luas : 586,55 Ha.

Gambar 2.12
Peta Batas Kawasan Tahura Geluguran
Di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020

Dalam rangka optimalisasi dan pengembangan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Geluguran, dilakukan pengalokasian dan penyusunan



blok Kawasan Tahura, sehingga kedepannya dapat lebih dilakukan percepatan dalam pembangunan dan pemanfaatannya.

Adapun luas dan proporsi taman hutan rakyat (Tahura) Geluguran, sebagai berikut:

Tabel 2.73
Luasan dan Proporsi Pemanfaatan Tahura
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020

NO	BLOK	LUAS (Ha)	PERSENTASE
1	Perlindungan	149,27	25,45 %
2	Pemanfaatan	77,67	13,24 %
3	Lainnya	359,61	61,31 %
	a. Khusus	101,85	17,36 %
	b. Tradisional	134,44	22,93 %
	c. Rehabilitasi	59,60	10,16 %
	d. Koleksi	63,72	10,86 %
JUMLAH TOTAL		586,55	100 %

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020

E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan Energi dan Sumber Daya Mineral bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Namun mengingat urusan ini bersinggungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar untuk penyediaan kehidupan masyarakat yang baik, aman dan sejahtera, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan komunikasi dan koordinasi percepatan pelayanan energi dan sumber daya mineral.

Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Bengkulu Selatan, dititikberatkan pada penyediaan kebutuhan listrik. Hal ini karena ketersediaan pasokan listrik merupakan salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada berbagai sektor perekonomian (industri, perdagangan, dan sebagainya). Pengukuran ketersediaan pasokan listrik salah satunya dapat diketahui melalui nilai Rasio Elektrifikasi (RE),



yang merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga yang sudah teraliri listrik dengan total rumah tangga.

Tabel 2.74
Rasio Elektrifikasi Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Elektrifikasi	%	99,00	99,30	100,00	99,99	99,87

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu, 2021

F. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan menyumbang kontribusi yang cukup besar terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebesar 16,33 persen. Besaran kontribusi sektor perdagangan tersebut menjadi kontribusi terbesar kedua setelah sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Perkembangan kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perdagangan Besar dan Eceran	%	15,29	15,96	16,67	17,05	16,33

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

Perkembangan sektor perdagangan secara kasat mata dapat dilihat dari bertumbuhnya pusat-pusat dan aktivitas perdagangan masyarakat. Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 15 pasar yang tersebar 11 kecamatan.



G. Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian menjadi salah satu motor penggerak perekonomian, karena pengembangan industri diharapkan dapat berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah. beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong tumbuh kembangnya perindustrian, antara lain membangun pusat pertumbuhan kegiatan industri, melakukan pembinaan baik dari sisi manajerial maupun kompetensi SDM guna penguatan nilai tambah.

Terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan, sektor perindustrian (industri pengolahan) masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan, dikarenakan belum tumbuhnya inovasi, kreatifitas dan nilai tambah produk.

Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Perkembangan Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Pengolahan (<i>manufacturing</i>)	%	3,25	3,32	3,31	3,26	3,15

Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

Perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Unit	374	369	369	470	470

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, 2020.



2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Unsur Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis. Sekretariat Daerah berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan dan percepatan pencapaian indikator kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, capaian kinerja Pemerintah Daerah masih rendah, begitu juga dengan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang masih belum optimal.

Pencapaian indikator kinerja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi dan tata Kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.78
Pencapaian Indikator Kinerja Kessekretariat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2019		2020	
			Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	40,03	C	41,16	C
2.	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	57,44	CC	58,35	CC

Sumber: Kementerian PAN RB Republik Indonesia, 2021

Pencapaian nilai reformasi birokrasi dan SAKIP yang belum optimal, berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terlihat dari masih rendahnya penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, dimana pada tahun 2017, nilai pelayanan publik Pemerintah Bengkulu Selatan sebesar 30,25 dengan kategori merah. Selanjutnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 60,11 dengan kategori kuning dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 menjadi 76,61 masih dengan kategori kuning.

Kinerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, berdasarkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah



(EKPPD), menunjukkan hasil penilaian yang baik, yang mengindikasikan bahwa pencapaian target indikator kinerja program/kegiatan sudah baik.

Perkembangan pencapaian nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.79
Perkembangan Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai EKPPD	Poin	2,9320	3,0533	3,0919	3,0791	3,2268

Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan, Setda, 2021

B. Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, bahwa DPRD memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah fungsi legislasi, yaitu bersama kepala daerah membuat Peraturan Daerah, yang menjadi arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Penguatan Fungsi Legislasi, sesuai ketentuan pada pasal 95 ayat (1) PP Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD disebutkan bahwa; "DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda".

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pada pasal 24 PP Nomor 37 tahun 2005 dikemukakan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD
2. Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan diantaranya rapat, kunjungan kerja, penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah, peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme, dan koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.



Tabel 2.80
Pencapaian Penyusunan Legislasi di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda	Raperda					

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan sinkronisasi, integrasi dan pembangunan yang tepat sasaran. Perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan dari sisi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.



Tabel 2.81
Pencapaian Penilaian Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2019-2020

Indikator	Satuan	Tahun	
		2019	2020
Nilai Perencanaan Kinerja	Angka	20,13	20,29
Nilai Pengukuran Kinerja	Angka	13,96	13,99

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

B. Unsur Keuangan

Fungsi penunjang urusan keuangan ditunjukkan untuk menjamin peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam di bidang pengelolaan keuangan daerah. Kinerja urusan keuangan menggambarkan bagaimana kualitas pengelolaan keuangan daerah dijalankan.

Salah satu indikator yang digunakan menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Berikut data pencapaian kualitas pengelolaan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.82
Perkembangan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas laporan Keuangan	Nilai	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

C. Unsur Kepegawaian

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan dukungan sumber daya manusia ASN yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja. Indikator untuk menilai profesionalitas ASN adalah Indeks Profesionalitas ASN, sebagai metode composite index



yang digunakan untuk mengukur kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja ASN.

ASN yang profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan tata Kelola pegawainya semakin baik, efektif dan efisien. Indeks profesionalitas ASN penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam pendidikan, pengalaman, pelatihan teknis dan kepemimpinannya agar disesuaikan dengan rencana pengembangan SDM yang jelas.

Berdasarkan penilaian yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), angka indeks profesionalitas ASN Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2019 sebesar 53,0 dengan kategori sangat rendah. Hal ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, kualifikasi dan manajemen tata Kelola kepegawaian daerah sehingga berimplikasi positif pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.

D. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan bertujuan untuk percepatan peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan iklim inovasi, guna mendorong pemecahan persoalan serta tantangan yang dihadapi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen mendorong berbagai upaya yang mencurahkan daya upaya hasil pikir dan kajian dengan memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan dalam sistem inovasi daerah.

Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Inovasi dalam pembangunan diharapkan dapat memicu tumbuhnya kreativitas dan improvisasi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan pembangunan.

Pada tahun 2020, indeks daya saing Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada urutan 85 secara nasional dengan nilai 2.1410 kategori Sedang. Sedangkan indeks inovasi daerah Kabupaten Bengkulu Selatan



berada pada urutan 149 secara nasional dengan nilai 668 kategori inovatif.

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

A. Inspektorat

Penyelenggaraan urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *clean governance*, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian utama untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Peran dan fungsi APIP antara lain melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) serta tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Maturitas SPIP Kabupaten Bengkulu Selatan masih berada pada level 2 (berkembang) dengan skor 2,850. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi, sehingga keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi dengan unit lainnya.

Efektivitas pengendalian SPIP belum dilakukan evaluasi secara mendalam dan tersistematis, sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Keterlibatan dan tindakan pimpinan dalam menangani kelemahan masih belum dinilai konsisten.



2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Salah satu yang menjadi fokus kinerja Badan Kesbangpol adalah pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (Ormas), untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam pembangunan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan pengertian ini bahwa dapat dijelaskan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya merupakan bagian dari Ormas. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait keberadaan organisasi masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setiap Ormas di Indonesia wajib mendaftarkan diri ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing.

Pendaftaran Ormas dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan setelah terdaftar, Ormas tersebut akan mendapatkan pembinaan dan pengawasan, sehingga mampu melaksanakan peran penting dalam rangka pemberdayaan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.

Pada tahun 2020, terdapat 67 organisasi kemasyarakatan yang terdaftar dan mendapatkan pembinaan serta pengawasan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan.



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan bagi masyarakat dengan tetap terbuka pada persaingan dan perubahan yang ada.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator-indikator berikut:

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Analisis kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh gambaran tersebut adalah melalui produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita.

Tabel 2.83
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	4.439,35	4.872,69	5.302,90	5.707,51	5.823,67
- ADHK 2010	3.127,26	3.281,69	3.444,03	3.615,03	3.624,59
PDRB Perkapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	28.840	31.350	33.791	36.032	36.470
- ADHK 2010	20.316	21.114	21.946	22.821	22.699
- Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK)	5,25	4,94	4,95	4,97	0,20

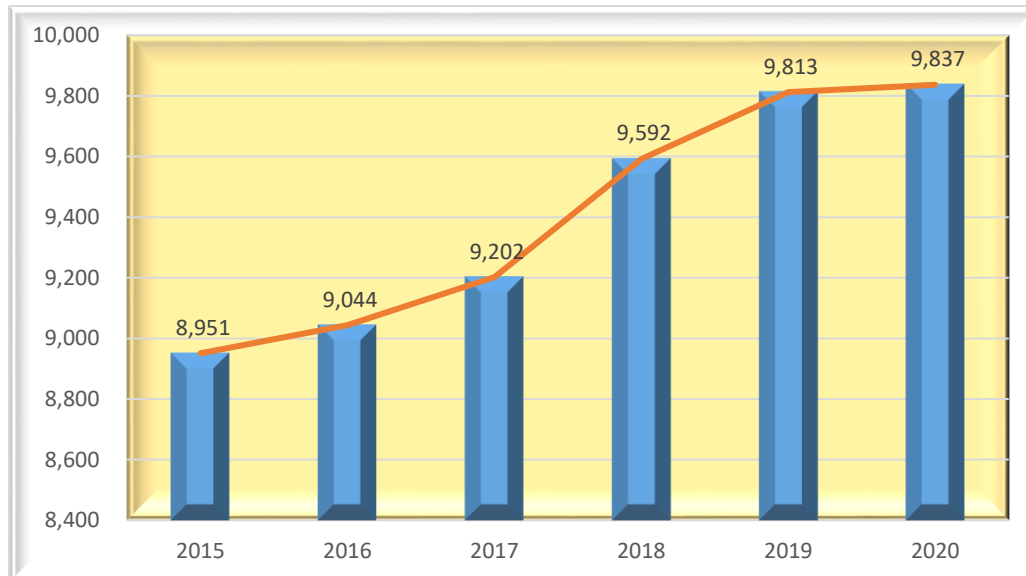
Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2021

B. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Gambaran pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.14
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat
Di Kabupaten Bengkulu Selatan



	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bengkulu Selatan	Ribu Rupiah	8,951	9,044	9,202	9,592	9,813	9,837

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2021

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan kunci yang mampu menjadi pemicu percepatan pembangunan serta sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ketersediaan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas di semua sektor potensial, diyakini akan menjadikan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi kabupaten yang semakin maju dan sejahtera.

Infrastruktur jalan, yang menunjang peningkatan konektivitas dan kualitas mobilitas ekonomi dalam rangka pemerataan kesejahteraan masyarakat terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Kabupaten Bengkulu Selatan dilalui jalan nasional yang menghubungkan dengan kabupaten dalam Provinsi Bengkulu maupun Provinsi Sumatera Selatan.



Tabel 2.84
Tingkat Kemantapan Jalan Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan dalam kondisi mantap	%	49.86	71.45	70.20	66.56	55.96

Sumber : Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, Tahun 2019-2021

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk energi listrik, selain di support dari PLN Manna dengan produksi listrik mencapai 128.203.509 KWh, juga terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Batu Balai dengan kapasitas 2 X 1,1 MW.

Selain infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan fokus kepada pembangunan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, antara lain:

1. Pengembangan Pasar Kutau menjadi Pasar Tradisional Modern dan pusat kuliner Bengkulu Selatan;
2. Pengembangan kawasan sentra industri sebagai pusat ekonomi masyarakat;
3. Pembangunan infrastruktur pengembangan food estate matai;
4. Pengembangan akses jalan/jembatan menuju sentra produksi Muara Danau;
5. Pembangunan konektivitas dan jalur ekonomi Ulu Manna – Air Nipis;
6. Pengembangan akses jalur Manna – Pagar Alam – Lahat (Mapala) sebagai jalur ekonomi, transportasi, evakuasi, distribusi logistik serta pertahanan dan keamanan.

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu sektor yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah adalah capaian realisasi investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten Bengkulu Selatan. Peningkatan capaian investasi dipengaruhi oleh kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan investor dalam berinvestasi. Perkembangan realisasi investasi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:



Tabel 2.85
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Ekonomi
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

PMDN		2016		2017		2018		2019		2020	
		Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Investasi (Rp. Juta)
Sektor Primer	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan			1	5,000.0	2	20,000.0	2	11,196.0	2	163,305.0
	Pertambangan					1	3,500.0				
	Total (Sektor)			1	5,000.0	3	23,500.0	2	11,196.0	2	163,305.0
Sektor Sekunder	Industri Makanan	5	121,521.7	1	0.0			4	116,680.0	6	2,016.3
	Total (Sektor)	5	121,521.7	1	0.0			4	116,680.0	6	2,016.3
Sektor Tersier	Listrik, Gas dan Air	1	0.0	4	5,911.7	4	164.8	3	65.4	3	140.2
	Konstruksi					1	1,520.0	1	0.0	1	5,098.7
	Perdagangan dan Reparasi			7	16,900.0	5	2,964.0	5	3,224.9	13	3,214.8
	Hotel dan Restoran					6	9,149.8	1	105.0	1	100.0
	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	2	3,500.0								
	Jasa Lainnya	2	5,300.0	5	6,100.0	5	3,550.0	7	104,045.0	12	454,005.0
	Total (Sektor)	5	8,800.0	16	28,911.7	21	17,348.6	17	107,440.3	30	462,558.7
Total		10	130,321.7	18	33,911.7	24	40,848.6	23	235,316.3	38	627,880.0

Sumber: https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik, tahun 2021



2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Semakin baik kualitas SDM akan dapat mendorong pencapaian pembangunan atau pelaksanaan program pembangunan dengan lebih baik lagi. Kualitas SDM berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja, yang ditentukan salah satunya oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tenaga kerja di Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2020 masih di dominasi tenaga kerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 35,11 persen, disusul dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar sebesar 30,45 persen. Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan Perguruan Tinggi sebesar 17,32 persen.

Tabel 2.86
Kondisi Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun	
		2019	2020
1	SD	32.22	30.45
2	SMP	18.01	17.12
3	SMA	32.88	35.11
4	Perguruan Tinggi	16.89	17.32

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2021

2.5. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD merupakan bagian penting dari siklus perencanaan yang berfungsi untuk memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan pada tahun rencana dan sebagai kontrol terhadap pencapaian target RPJMD.



Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan daerah	Capaian Kinerja					Interprestasi
		2016	2017	2018	2019	2020	
I	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1.1	Kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi						
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	5,25	4,94	4,95	4,97	0,26	Baik
1.1.2	Laju Inflasi	n/a	n/a	n/a	0,59	0,15	Baik
1.1.3	PDRB Per Kapita						
	- ADHB	28.840	31.350	33.791	36.032	36.470	Baik
	- ADHK	20.316	21.114	21.946	22.821	22.699	Baik
1.1.4	Indeks Gini	68.7	70	70.6	70.27	71.8	Baik
1.1.5	Persentase Penduduk Miskin	22.1	21.06	18.65	18.54	17.82	Cukup
1.1.6	Indeks Pembangunan Manusia	68.71	69.04	69.85	70.27	70.63	Baik
1.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka	n/a	2.6	3.09	2.36	3.52	Baik
1.2	Kesejahteraan Sosial						
	Pendidikan						



	Angka Melek Huruf	98.89	71.01	98.89	99.9	100	Baik
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8.77	9:12	9:29	9.45	9.62	Baik
II	PELAYANAN UMUM						
2.1	Pelayanan Urusan Wajib						
	Pendidikan						
	Pendidikan Dasar						
2.1.1	Angka Partisipasi Sekolah	99.00	98.70	100	100	100	Baik
2.1.2	Rasio Guru Terhadap Siswa	0.05	0.06	0.08	0.07	0.08	Baik
	- SD	1:14	1:12	1:16	1:13	n/a*	Baik
	- SMP	1:13	1:13	1:14	1:12	n/a	Baik
2.1.3	Jumlah Sekolah Terakreditasi	20	3	3	3	2	Kurang
	Kesehatan						
	Rasio Posyandu per satuan Balita	1 : 71	1 : 69	1 : 65	1 : 60	1 : 55	Baik
	Rasio Puskesmas, poliklinik, Pustu per satuan Penduduk	1 : 1359	1 : 1355	1 : 1350	1 : 1340	1 : 1330	Baik
	Rasio Dokter Per satuan Penduduk	0.034	0.037	0.039	0.043	0.046	Baik
	Rasio Tenaga Medis persatuan Penduduk						
	Bidan	0.206	0.211	0.216	0.221	0.226	Baik
	Perawat	0.277	0.282	0.287	0.292	0.297	Baik



	Pelayanan Urusan Pilihan						
	Pertanian						
	Prouktifitas Padi atau Bahan Pangan utama lokal lainnya per hektar			8.00			Cukup
	Distribusi sektor pertanian terhadap PDRB	35.36	34.3	33.3	32.67	32.83	Baik
	Kehutanan						
	rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Kurang
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
	Kemampuan Ekonomi Daerah						
	Angka Konsumsi RT per Kapita	63.32	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan	45.89	n/a	n/a	n/a	n/a	
	9 Sektor PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (%)						
	Pertanian	35.36	34.3	33.3	32.67	32.83	Baik
	Pertambangan dan Penggalan	2.42	2.35	3.29	2.25	2.23	Baik
	Industri Pengolahan	3.25	3.32	3.31	3.26	3.15	Baik
	Listrik	0.08	0.08	0.09	0.09	0.1	Baik
	Konstruksi	5.29	5.37	5.51	5.66	5.61	Baik
	Perdagangan	15.29	15.96	16.67	17.05	16.33	Baik
	Informasi dan Komunikasi	2.68	2.73	2.78	2.89	2.97	Baik
	Keuangan	6.05	6.81	5.54	5.27	5.73	Baik
	Jasa Lainnya	0.61	0.64	0.67	0.69	0.68	Baik

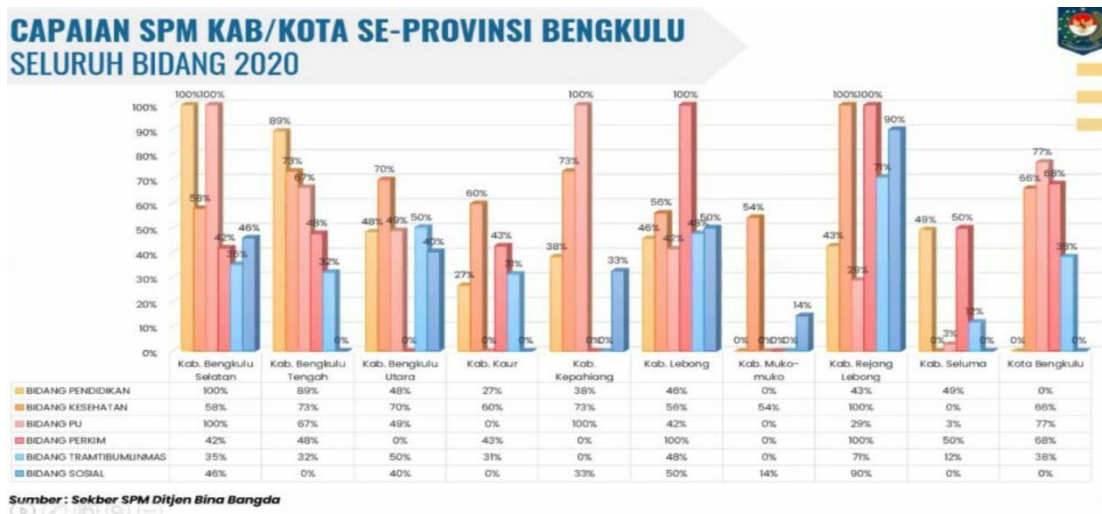


2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah memprioritaskan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Hal ini dilakukan sebagai implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam pelaksanaan SPM, Pemerintah daerah mengintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, RKPD, dan APBD.

Pelaksanaan SPM, dilakukan untuk memenuhi pelayanan dasar pada beberapa bidang, antara lain: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, serta SPM Bidang Sosial. Capaian SPM Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020, yaitu Bidang Pendidikan tercapai 100 persen, Bidang Kesehatan tercapai 58 persen, Bidang Pekerjaan Umum tercapai 100 persen, Bidang Perumahan tercapai 42 persen, Bidang Trantibumlinmas tercapai 35 persen dan Bidang Sosial tercapai 46 persen.

Berikut capaian SPM seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020





BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Hak dan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka pengelolaan keuangan daerah dilakukan mencakup keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Hal itu diimplementasikan pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan dan realisasinya, maupun pada efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.



Kebijakan tersebut tergambarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mempunyai fungsi antara lain:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kinerja keuangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2021 dilakukan analisis, untuk mengetahui kapasitas penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, khususnya menyusun proyeksi target kinerja keuangan 5 (lima) tahun kedepan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan



diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan merujuk dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, sedangkan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1.1. Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah, meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. pendapatan transfer, meliputi: transfer Pemerintah Pusat, dan transfer antar-daerah.
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 1,064,869,273,653.44, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 979,397,906,447.79. Kemudian Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp. 1,044,239,358,811.43. Namun apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan pendapatan justru berkinerja negatif sebesar 0,23% .

Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
1.	PENDAPATAN	1,064,869,273,653.44	979,397,906,447.79	931,635,077,006.35	1,032,789,773,957.65	1,044,239,358,811.43	(0.23)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	51,964,150,882.80	55,759,673,751.57	81,896,328,868.69	59,817,350,830.00	86,565,743,036.44	17.98
1.1.1	Pendapatan pajak daerah	5,355,614,999.80	6,838,630,000.00	7,766,270,000.00	10,059,490,000.00	8,318,562,000.00	13.37
1.1.2	Hasil retribusi daerah	1,985,066,600.00	2,378,728,920.00	2,393,754,900.00	2,281,913,300.00	1,131,255,400.00	(8.66)
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3,428,172,010.00	3,226,064,331.57	2,570,493,871.69	3,428,172,000.00	2,150,687,236.44	(7.53)
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	41,195,297,273.00	43,316,250,500.00	69,165,810,097.00	44,047,775,530.00	74,965,238,400.00	24.67
1.2	DANA PERIMBANGAN	870,789,443,000.00	761,172,811,000.00	725,543,761,000.00	813,787,904,000.00	798,139,097,834.00	(1.76)
1.2.1	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	16,519,177,000.00	18,026,072,000.00	14,270,127,000.00	15,883,433,000.00	18,490,706,578.00	4.00
1.2.2	Dana alokasi umum	564,137,639,000.00	554,227,555,000.00	554,227,555,000.00	574,689,745,000.00	525,650,342,000.00	(1.65)
1.2.3	Dana alokasi khusus	290,132,627,000.00	188,919,184,000.00	157,046,079,000.00	223,214,726,000.00	253,998,049,256.00	1.04
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	142,115,679,770.64	162,465,421,696.22	124,194,987,137.66	159,184,519,127.65	159,534,517,940.99	4.79
1.3.1	Pendapatan hibah	31,482,112,074.42	-	-	22,569,400,000.00	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah	18,604,508,696.22	18,604,508,696.22	26,801,058,137.66	26,801,058,127.65	48,559,322,940.99	31.31



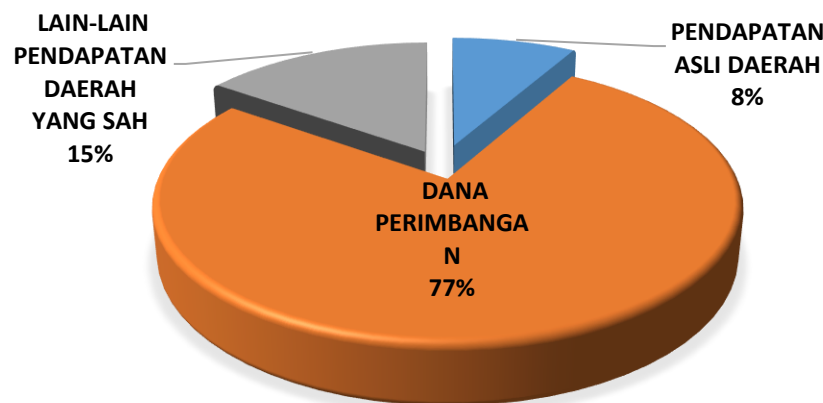
	lainnya						
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	92,029,059,000.00	110,746,649,000.00	97,393,929,000.00	109,814,061,000.00	110,975,195,000.00	5.52
1.3.5	Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	31,929,930,000.00	-	-	-	
1.3.6	Pendapatan lainnya	-	1,184,334,000.00	-	-	-	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020



Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa struktur APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dibentuk oleh pendapatan yang didominasi oleh pendapatan dari dana transfer sebesar 77 %, baik itu bersumber dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang sebagai pembentuk struktur APBD sebesar 15% dan diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah yang hanya menyumbang sebesar 8%.

Gambar 3.1.
Komposisi Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020



Sumber: BPKAD, Tahun 2020

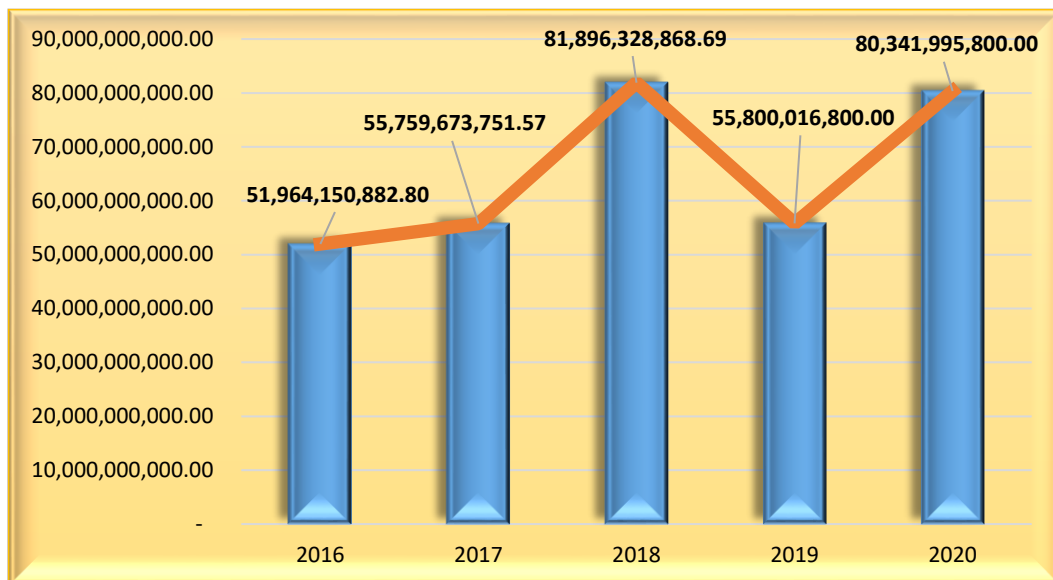
a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi yang berada dalam wilayah dan dimiliki oleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa suatu daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dari tahun 2016-2020 menunjukkan trend yang fluktuatif sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.2.
Trend Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD, Tahun 2020

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, memberikan cakupan sumber Pendapatan Asli Daerah yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

1) Pajak daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, dilakukan dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah



Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan Pajak Parkir.

2) **Retribusi Daerah**

Pengelolaan pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020, terdiri dari; Retribusi jasa umum, Retribusi jasa usaha, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin trayek, dan Retribusi izin usaha perikanan

3) **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

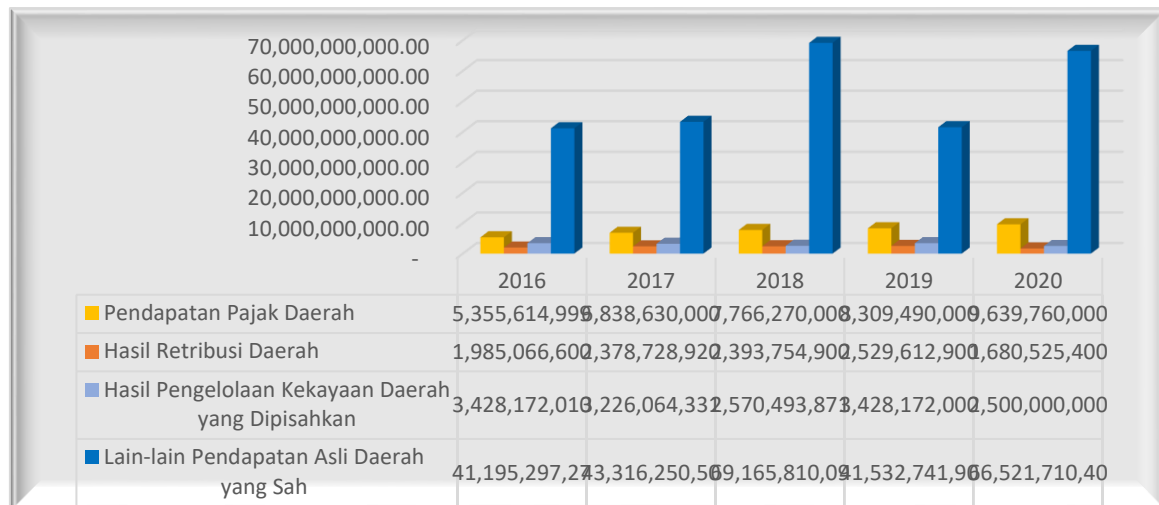
Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD pada Bank Bengkulu.

4) **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan asli daerah ini berasal dari beberapa sumber, diantaranya pendapatan jasa kapitasi JKN, Pendapatan BLUD, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Penerimaan jasa giro Kas Daerah, Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain PAD yang sah lainnya.

Sumber PAD terbesar disumbang dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dimana pada tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 82,80%, disusul pendapatan dari pajak daerah sebesar 12%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 3,11% dan Retribusi daerah sebesar 2,09%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.3.
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020 (dalam ribuan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020

b. Dana Perimbangan

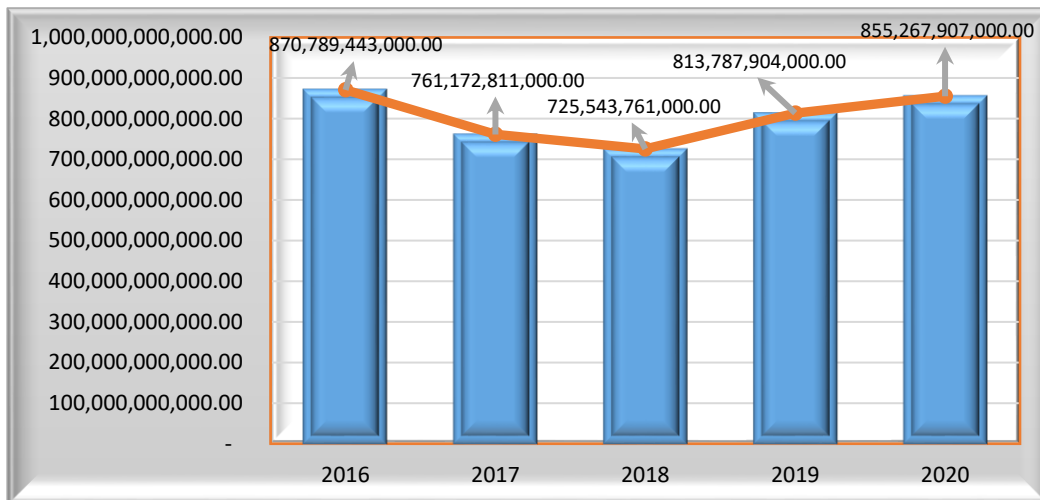
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Terhadap postur APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, dana perimbangan menjadi komponen pembentuk APBD yang sangat dominan mencapai 79,43%. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020, pendapatan

yang berasal dari Dana Perimbangan menunjukkan trend peningkatan pada 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

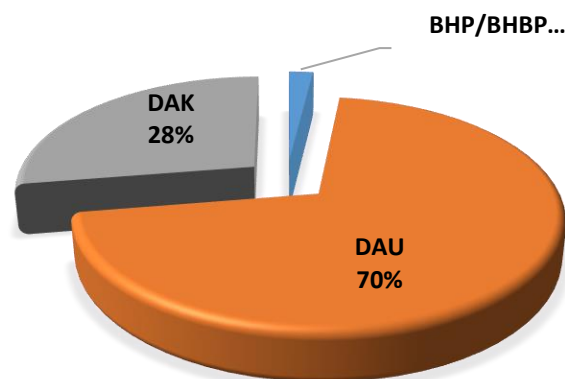
Gambar 3.4.
Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2020

Pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan atau dana transfer dari Pemerintah didominasi oleh Dana Alokasi Umum sebesar 70%, disusul Dana Alokasi Khusus sebesar 28% dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 2 %. Secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.5.
Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2020



c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersumber dari lain-lain penerimaan yang sah, diantaranya dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu alokasi Dana Desa untuk 142 desa, pendapatan dari hibah, dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.6.
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2020

3.1.1.2. Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang



merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta belanja langsung yaitu belanja yang dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan target kinerja pembangunan daerah.

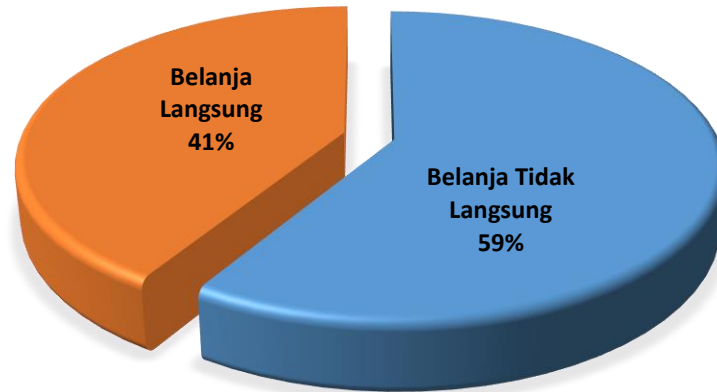
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Terkait belanja penyelenggaraan urusan wajib, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komposisi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan masih di dominasi oleh Belanja Tidak Langsung yang diperuntukkan untuk mendanai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduka, sebesar 59%. Sedangkan Belanja Langsung untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah hanya sebesar 41%.



Gambar 3.7.
**Komposisi Belanja Daerah APBD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2020**



Sumber: BPKAD, Tahun 2020.

Adapun rincian gambaran belanja daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
2.	BELANJA	1,078,352,404,325.98	983,651,934,894.80	941,480,257,016.53	1,066,616,844,103.59	1,071,915,325,995.26	0.18
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	617,131,046,201.98	572,828,937,068.80	578,436,810,980.72	606,521,929,157.59	637,281,674,865.67	0.93
2.1.1	Belanja pegawai	448,411,962,914.72	384,143,385,668.80	406,521,530,080.72	415,782,033,357.59	403,062,601,765.67	(2.32)
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja hibah	18,791,000,000.00	8,123,600,000.00	9,186,400,000.00	13,097,414,500.00	42,827,300,000.00	56.47
2.1.5	Belanja bantuan sosial	368,000,000.00	9,517,000,000.00	5,095,000,000.00	4,782,775,000.00	3,315,000,000.00	600.72
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kpd prop/kab/kota dan pemerintah desa dan partai politik	148,860,083,287.26	170,844,951,400.00	157,133,880,900.00	171,859,706,300.00	167,820,773,100.00	3.44
2.1.8	Belanja tidak terduga	700,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	1,000,000,000.00	20,256,000,000.00	526.04
2.2	BELANJA LANGSUNG	461,221,358,124.00	410,822,997,826.00	363,043,446,035.81	460,094,914,946.00	434,633,651,129.59	(0.34)
2.2.1	Belanja pegawai	43,234,872,985.00	63,895,261,373.00	33,558,929,500.00	37,867,448,756.00	41,665,184,000.00	5.79
2.2.1	Belanja barang dan jasa	173,812,997,380.00	180,570,224,696.00	227,265,290,760.81	247,733,965,543.00	217,497,649,456.59	6.64
2.2.1	Belanja modal	244,173,487,759.00	166,357,511,757.00	102,219,225,775.00	174,493,500,647.00	175,470,817,673.00	0.21

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020



a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung ialah belanja daerah yang dianggarkan dan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan.
Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundangundangan yang terkait;
- 6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan



mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Belanja tidak langsung yang sebesar 59% membentuk postur APBD Kabupaten Bengkulu Selatan, didominasi oleh belanja pegawai sebesar 40,64%, disusul Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 16,05% dan diikuti belanja hibah 1,67%, belanja bantuan sosial 0,43% dan belanja tidak terduga 0,07%.

Gambar 3.8.
Perkembangan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, tahun 2020.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok

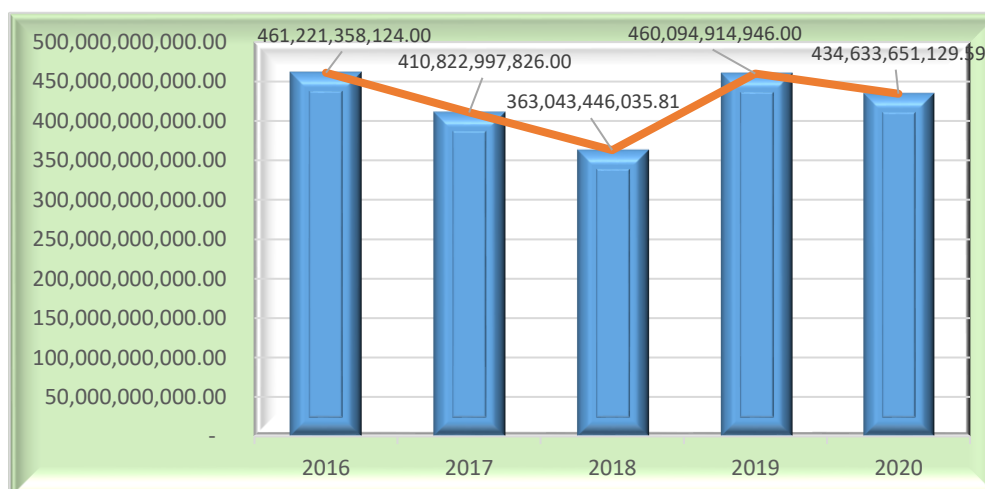


belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja langsung untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang teralokasikan pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 41,15%, masih didominasi untuk belanja barang dan jasa sebesar 59%, sedangkan untuk belanja barang modal yang menambah asset daerah sebesar 32% dan disusul belanja pegawai hanya 9%, dikarenakan adanya kebijakan tidak diperbolehkannya honorarium pada setiap kegiatan.

Gambar 3.9.
Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD, tahun 2020.



3.1.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah, yang terdiri dari; penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

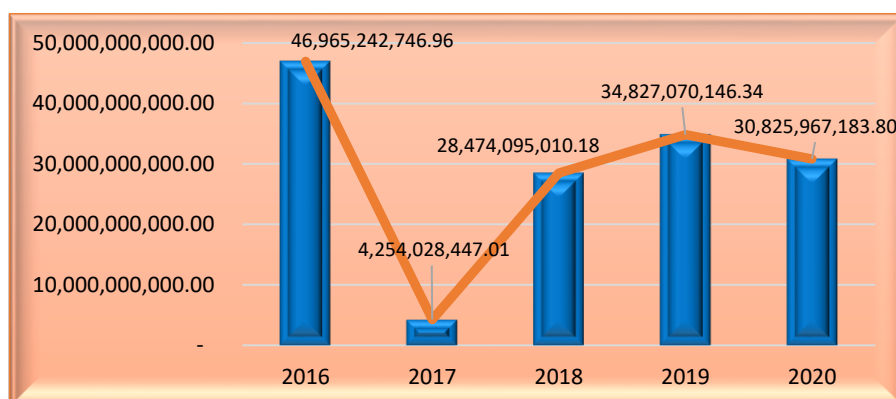
Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu tahun 2016-2020 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Gambar 3.10.
Penerimaan Pembiayaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPKAD, tahun 2020.

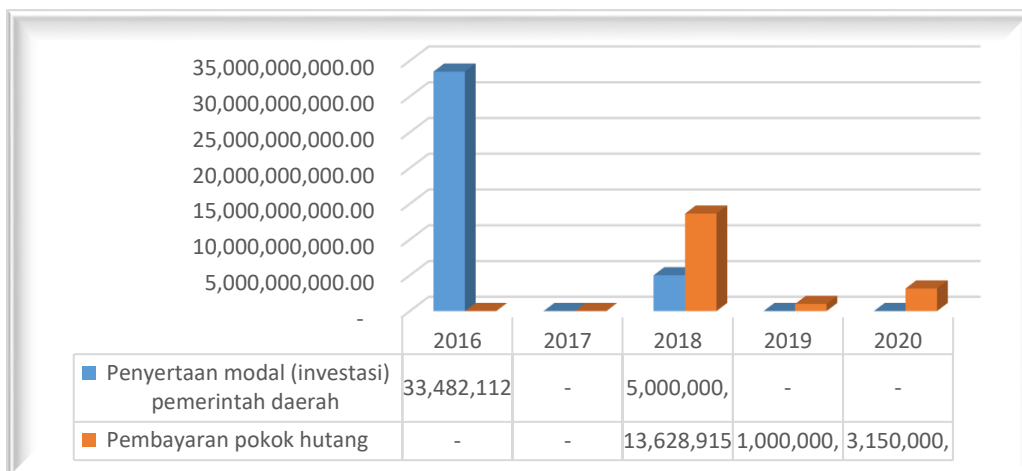


b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) dan Pembayaran pokok hutang.

Selama kurun waktu Tahun 2016-2020, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha.

Gambar 3.11.
Pengeluaran Pembiayaan APBD Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020 (dalam ribuan)



Sumber: BPKAD, diolah tahun 2020.

Penerimaan pembiayaan dalam APBD Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besaran SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Bengkulu Selatan kurun waktu Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	RATA-RATA
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	%
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	46,965,242,746.96	4,254,028,447.01	28,474,095,010.18	34,827,070,146.34	30,825,967,183.80	122.31
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	46,965,242,746.96	4,254,028,447.01	28,474,095,010.18	34,827,070,146.34	30,825,967,183.80	122.31
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	33,482,112,074.42	-	18,628,915,000.00	1,000,000,000.00	3,150,000,000.00	5.09
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	33,482,112,074.42	-	5,000,000,000.00	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	-	-	13,628,915,000.00	1,000,000,000.00	3,150,000,000.00	30.58
3.2.5	Pengembalian dana ke pusat	-	-	-	-	-	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	13,483,130,672.54	4,254,028,447.01	9,845,180,010.18	33,827,070,146.34	27,675,967,183.80	72.10

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020



3.2. Analisis Keuangan Daerah

3.2.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi “kesehatan fiskal” Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2020 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang.

Gambaran pendapatan per kapita Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4.
Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per Kapita (Rp)
2016	1,064,869,273,653	153,900	6,919,229
2017	979,397,906,448	155,400	6,302,432
2018	931,635,077,006	156,930	5,936,628
2019	1,032,789,773,958	158,400	6,520,137
2020	1,044,239,358,811	166,240	6,281,517

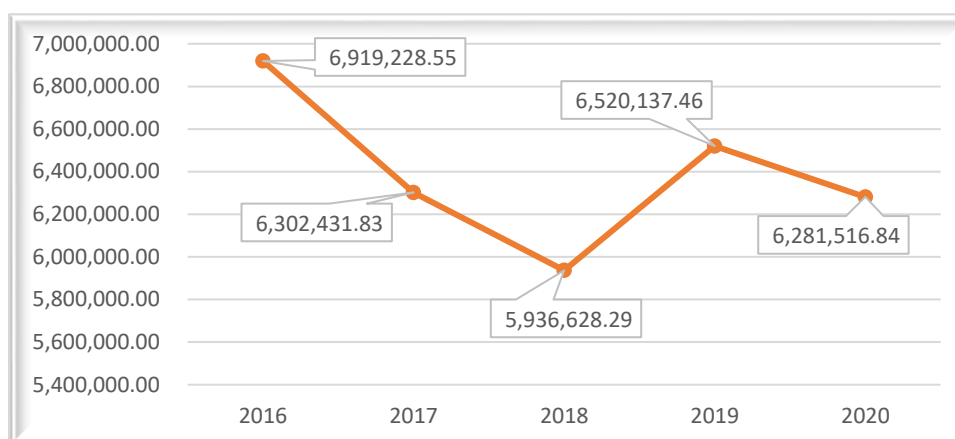
Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2020

Pendapatan daerah per kapita Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukan kondisi penurunan yaitu 6,919,229 pada tahun 2016 menjadi 6,302,432 pada tahun 2017, dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 5.936.628. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi sebesar 6.520.137, namun dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang terpukul akibat pandemi Covid-19 kembali pendapatan per

kapita menurun menjadi 6.281.517.

Dengan peningkatan pertumbuhan penduduk sebesar 1,47%, tentunya kondisi ini harus diimbangi dengan meningkatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik.

Gambar 3.12
Pendapatan Daerah Per Kapita Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: Hasil Analisa, 2020

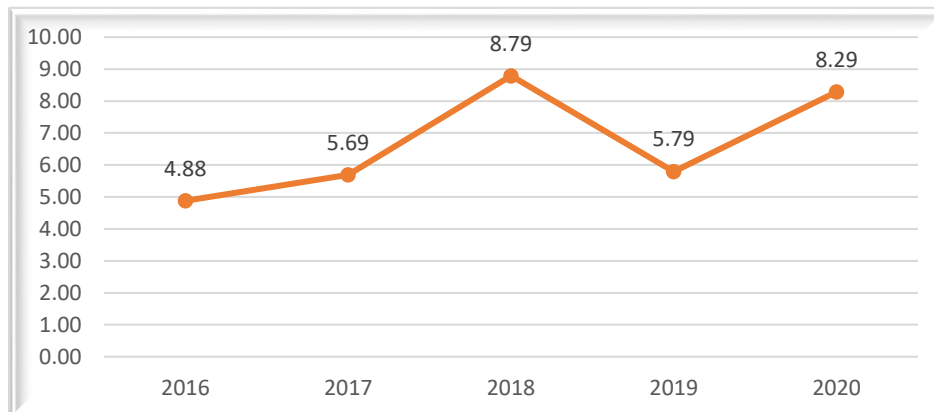
2. Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.

Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat rendah, dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 8,29 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan pembangunan daerah, memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap pendapatan yang bersumber dari Pemerintah melalui dana transfer maupun dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.



Gambar 3.13
Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: Hasil Analisa, 2020

3. Ruang Fiskal

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, dan Belanja Bunga) dibagi dengan total pendapatannya.

Ruang fiskal Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat terbatas karena pendapatan daerah yang kecil, bahkan cenderung mengalami penurunan, namun sebagian besar anggaran harus digunakan untuk belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. Salah satu pos yang menyedot anggaran terbesar adalah belanja pegawai dengan alokasi sebesar 40,76 persen.

Gambaran ruang fiskal APBD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.5
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan	DAK	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	Pendapatan Hibah	Belanja Pegawai	Ruang Fiskal
2016	1,064,869,273,653.44	290,132,627,000.00	92,029,059,000.00	31,482,112,074.42	448,411,962,914.72	0.19
2017	979,397,906,447.79	188,919,184,000.00	110,746,649,000.00		384,143,385,668.80	0.30
2018	931,635,077,006.35	157,046,079,000.00	97,393,929,000.00		406,521,530,080.72	0.29
2019	1,032,789,773,957.65	223,214,726,000.00	109,814,061,000.00	22,569,400,000.00	415,782,033,357.59	0.25
2020	1,044,239,358,811.43	253,998,049,256.00	110,975,195,000.00		403,062,601,765.67	0.26

Sumber: Hasil analisis Bappeda, 2020



3.2.2. Neraca Daerah

Neraca daerah disajikan untuk menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Gambaran neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6.
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	780,298,867.01	26,164,016,976.38	31,936,021,488.94	24,254,504,090.24	1,969,125,503.48	789.80
Kas di Bendahara Penerimaan	-	90,985,000.00	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran	55,763,542.00	305,382,050.00	131,530,500.00	-	-	-
Kas di BLUD	2,182,792,373.00	1,657,706,766.00	2,153,867,509.00	3,846,910,977.00	622,074,936.00	0.16
Kas di Bendahara Kapitasi JKN	604,560,665.00	346,989,017.80	378,212,159.40	116,330,033.56	41,270,038.56	(41.84)
Kas di Bendahara Dana BOS	630,613,000.00	464,668,197.00	227,438,489.00	2,616,387,964.00	229,154,201.00	220.44
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
Piutang Pendapatan	5,005,810,715.00	15,197,963,888.00	26,036,016,623.03	36,164,351,935.73	35,034,690,769.37	77.67
Piutang Lainnya	6,037,875,499.20	652,571,891.00	652,571,891.00	1,627,609,766.00	1,431,263,868.00	12.04
Penyisihan Piutang	(3,476,849,551.34)	(5,225,428,482.18)	(6,366,173,478.85)	(6,264,679,927.60)	(7,450,989,353.10)	22.37
Beban Dibayar Dimuka	210,542,208.34	196,858,316.66	193,261,100.98	298,935,074.98	175,812,516.68	1.29
Persediaan	5,802,455,331.00	16,634,697,546.00	5,840,932,647.00	7,388,428,796.00	7,067,931,939.92	35.99
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	975,037,875.00	975,037,875.00	975,037,875.00	-	-	-
Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	18,808,900,524.21	57,461,449,041.66	62,158,716,804.50	70,048,778,709.91	39,120,334,419.91	45.55
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Jangka Panjang Non Permanen						
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	-	-
Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
Deposito Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-	-	-	-	-
Investasi Jangka Panjang Permanen						-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	46,352,112,074.42	46,352,112,074.42	51,352,112,074.42	52,352,112,074.42	52,352,112,074.42	3.18
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	46,352,112,074.42	46,352,112,074.42	51,352,112,074.42	52,352,112,074.42	52,352,112,074.42	3.18
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	46,352,112,074.42	46,352,112,074.42	51,352,112,074.42	52,352,112,074.42	52,352,112,074.42	3.18
ASET TETAP						
Tanah	158,952,786,606.00	148,038,041,638.00	147,660,717,998.00	148,396,530,498.00	151,030,452,548.00	(1.21)
Peralatan dan Mesin	210,998,992,224.52	210,308,080,321.47	224,457,150,438.47	272,562,290,905.46	290,774,063,214.96	8.63
Gedung dan Bangunan	467,077,378,713.61	448,493,617,050.62	473,097,385,496.62	538,174,629,522.54	606,714,530,542.54	7.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	656,109,606,997.94	725,212,676,597.93	776,314,072,397.94	829,458,917,949.94	875,470,399,218.94	7.49
Aset Tetap Lainnya	31,260,926,252.76	12,444,429,120.68	15,157,420,222.55	15,792,575,145.55	15,217,734,033.55	(9.46)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	20,927,790,970.00	31,337,053,844.00	31,508,133,844.00	22,636,635,180.00	28,619,413,787.00	12.14
Akumulasi Penyusutan	(524,111,746,066.73)	(567,538,804,721.00)	(649,607,008,077.25)	(730,369,882,055.43)	(783,899,887,481.37)	10.63
JUMLAH ASET TETAP	1,021,215,735,698.10	1,008,295,093,851.70	1,018,587,872,320.33	1,096,651,697,146.06	1,183,926,705,863.62	3.84
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	549,440,000.00	350,378,165.00	295,434,165.00	580,756,835.00	680,783,335.00	15.47
Aset Lain-lain	96,201,651,302.48	87,830,337,860.98	88,164,753,864.98	91,999,346,768.98	55,027,902,582.50	(11.04)
JUMLAH ASET LAINNYA	96,751,091,302.48	88,180,716,025.98	88,460,188,029.98	92,580,103,603.98	55,708,685,917.50	(10.93)
JUMLAH ASET	1,183,127,839,599.21	1,200,289,370,993.76	1,220,558,889,229.22	1,311,632,691,534.36	1,331,107,838,275.45	3.02



URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
KEWAJIBAN						-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	8,165,881.00	-	-
Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
Utang Beban	344,843,564.00	727,482,236.00	449,054,379.00	421,910,766.00	4,198,922,493.00	240.46
Utang Jangka Pendek Lainnya	1,237,439,500.00	19,032,317,281.00	6,295,704,157.00	9,684,500,374.00	4,297,392,738.00	342.33
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,582,283,064.00	19,759,799,517.00	6,744,758,536.00	10,114,577,021.00	8,496,315,231.00	279.23
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	1,582,283,064.00	19,759,799,517.00	6,744,758,536.00	10,114,577,021.00	8,496,315,231.00	279.23
EKUITAS	1,181,545,556,535.21	1,180,529,571,476.76	1,213,814,130,693.22	1,301,518,114,513.36	1,322,611,523,044.45	2.89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,183,127,839,599.21	1,200,289,370,993.76	1,220,558,889,229.22	1,311,632,691,534.36	1,331,107,838,275.45	3.02

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2020



3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016-2021, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kedepan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

3.3.1. Kebijakan Pendapatan

Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kurun waktu tahun 2016-2021, arah kebijakan pendapatan



daerah Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dana transfer dari Pemerintah Pusat, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan memanfaatkan sistem informasi dan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
2. Melakukan update terhadap regulasi pajak daerah sebagai dasar dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan penguatan dan pemantapan kelembagaan serta manajemen dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
5. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
6. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan asset pemerintah daerah secara professional dan akuntabel;
8. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan Instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat;
9. Penguatan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
10. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
11. Meningkatkan kapasitas SDM pemungut Pajak, serta menyediakan sarana dan prasarana pemungut pajak yang memadai;
12. Melakukan inovasi dalam pemungutan pajak daerah.
13. Meningkatkan deviden BUMD dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
14. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.



3.3.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah merupakan kebijakan yang diarahkan pada upaya membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2021-2026 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan outcome yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas penggunaan anggaran.

Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung yang diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan Pendidikan, kesehatan dan peningkatan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaran urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
3. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran, dan jumlah personilnya;
4. Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;



5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD;
6. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
7. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dengan mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
8. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan;

3.3.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi; SILPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Terkait dengan kebijakan pengeluaran pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penyertaan modal pada badan usaha milik daerah dan/atau badan



usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal, dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya;

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh, dan berkembang

3.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Bengkulu Selatan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya, yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

3.4.1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Alokasi belanja pada APBD Kabupaten Bengkulu Selatan yang diarahkan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan, dilaksanakan melalui pos rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja terhadap anggaran belanja selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.7
Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
5	BELANJA	929,492,321	889,460,503	812,806,983	747,598,746	784,346,376	732,620,135	894,757,138	843,420,241	904,094,553	862,076,007
5 . 1	BELANJA OPERASI	684,618,833	684,573,476	646,249,472	619,508,415	681,627,150	637,076,538	719,263,637	686,009,801	708,367,735	674,298,586
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	491,646,836	475,936,007	399,245,895	392,592,409	407,779,480	393,700,511	418,104,413	403,295,644	408,265,512	391,226,082
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	348,876,568	345,382,648	305,202,715	302,453,631	305,087,279	300,545,180	309,492,430	305,800,654	309,908,038	302,045,986
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	97,240,395	86,534,131	75,457,671	71,464,975	95,141,871	86,144,741	100,245,103	89,686,504	87,057,064	78,513,555
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,608,000	1,484,321	2,926,000	2,463,500	5,765,380	5,746,476	5,487,500	5,451,500	5,790,500	5,422,928
5 . 1 . 1 . 04	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	223,000	186,424	386,285	386,230	350,000	336,180	350,000	303,895	250,000	228,611
5 . 1 . 1 . 05	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	352,841	349,003								
5 . 1 . 1 . 06	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	111,159	110,965	170,715	100,066	207,000	79,483	207,000	35,575	57,000	9,325
5 . 1 . 1 . 07	Belanja Uang Lembur	650,065	611,959	666,909	620,674						
5 . 1 . 1 . 08	Honorarium PNS	33,766,719	32,622,116			28,350	27,000	707,880	686,705	3,455,310	3,386,668
5 . 1 . 1 . 09	Honorarium Non PNS	7,740,244	7,599,142								
5 . 1 . 1 . 11	Belanja Pegawai BLUD	996,945	979,398	14,435,600	15,103,333	1,199,600	821,450	1,614,500	1,330,810	1,747,600	1,619,010
5 . 1 . 1 . 12	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	80,900	75,900								
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	173,812,997	190,421,930	229,362,977	211,976,756	259,566,270	230,768,242	283,279,034	266,051,107	253,959,923	238,161,154
5 . 1 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11,876,579	11,535,738	12,003,151	11,349,293	13,481,179	12,961,325	14,507,180	14,186,664	10,786,178	10,491,787
5 . 1 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8,630,064	6,295,648	10,181,647	6,378,798	11,309,637	10,322,110	13,566,201	10,608,080	5,823,277	4,976,181
5 . 1 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24,201,416	22,078,620	26,214,013	22,401,440	34,481,413	29,926,583	44,348,448	38,518,088	50,167,024	46,204,606
5 . 1 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	274,600	267,939	297,105	294,805	315,416	241,518	291,477	258,932	176,924	89,104
5 . 1 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12,080,886	11,539,040	13,297,284	12,961,804	9,374,936	8,240,753	7,951,492	7,471,180	7,081,773	6,789,656
5 . 1 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6,233,014	5,999,691	6,500,590	6,189,065	7,321,874	6,931,581	7,860,395	7,522,548	5,680,444	5,479,403



KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
5.1.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	863,035	721,387	738,077	660,062	936,463	774,559	1,115,134	1,006,270	589,062	547,710
5.1.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	162,250	151,650	180,900	176,600	157,571	157,571	252,700	231,600	99,437	96,216
5.1.2.09	Belanja Sewa Alat Berat					10,863	10,863	25,000	10,000		
5.1.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	638,327	566,802	742,440	705,737	858,585	734,005	944,308	931,425	654,165	640,061
5.1.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10,272,159	9,403,315	11,194,798	10,100,797	13,144,212	12,137,770	13,335,214	12,346,980	10,652,054	9,884,085
5.1.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	528,500	460,841	353,400	349,032	380,500	379,652	690,188	688,908	341,981	341,961
5.1.2.13	Belanja Pakaian Kerja	350,550	338,634	73,376	73,316	214,500	64,440	469,463	319,315	68,884	53,739
5.1.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	324,175	302,525	466,675	438,999	389,700	384,196	619,650	618,241	160,431	152,418
5.1.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47,928,033	46,920,732	53,770,149	52,558,634	57,466,986	55,718,906	59,777,480	58,139,069	37,107,949	36,135,979
5.1.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	48,500	48,500	63,000	58,500	64,500	41,100	0	0		
5.1.2.18	Belanja Pemeliharaan	8,300,065	8,198,164	8,655,170	8,291,365	3,896,683	3,752,115	4,831,695	4,751,775	5,178,809	5,010,415
5.1.2.19	Belanja Jasa Konsultansi	2,724,616	2,119,015	1,922,835	1,397,495	1,933,700	1,579,080	2,538,460	2,462,041	2,855,291	2,839,625
5.1.2.20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,119,720	1,117,297	1,906,100	1,858,127	3,971,201	3,965,701	16,306,933	16,181,467	16,220,114	16,735,939
5.1.2.21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	69,325	64,205	40,245	40,245	79,489	79,489	75,144	75,144	81,824	81,824
5.1.2.22	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	90,000	90,000	120,000	120,000	90,000	90,000	40,000	0		
5.1.2.23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2,096,317	1,776,842	2,297,388	2,176,235	1,752,914	1,579,976	2,228,736	2,119,664	418,402	387,701
5.1.2.24	Belanja Honorarium Non Pegawai					5,400	5,400	333,950	324,500	44,450	44,450
5.1.2.25	Belanja Honorarium PNS			28,962,220	27,635,660	5,897,665	5,640,400	6,944,102	6,555,693	4,173,825	3,783,063
5.1.2.26	Belanja Honorarium Non PNS			4,831,630	4,813,955	8,048,975	7,944,275	9,037,980	8,469,343	10,934,430	11,056,153
5.1.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	199,150	188,200	590,950	441,029	419,025	385,600	1,463,350	1,418,625	1,111,503	1,104,550
5.1.2.28	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS			0	0						
5.1.2.29	Belanja Barang Dana BOS	6,481,500	29,108,458	8,287,093	7,648,894	27,262,138	25,864,503	18,496,434	17,366,908	16,883,642	14,099,872
5.1.2.32	Belanja Honorarium Koordinasi Aparat			460,800	460,800	478,800	459,200	630,900	557,450	786,500	785,590



KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
5 . 1 . 2 . 33	Belanja Honorarium Tim yang Dibentuk Bupati			129,000	105,450	3,366,545	3,176,235	3,550,557	3,315,565	3,788,435	3,622,495
5 . 1 . 2 . 34	Belanja Honorarium Satpol PP/Tim Patroli/PPL			351,450	321,200						
5 . 1 . 2 . 35	Belanja Honorarium Petugas Kesehatan/Paramedis			5,269,266	5,024,905	6,867,313	6,224,765	6,249,043	6,024,853	6,870,859	6,656,025
5 . 1 . 2 . 37	Belanja Honorarium Staf Bupati/Wakil Bupati/Sesda/Asisten			786,390	766,350	788,300	784,990	692,500	648,750	678,000	665,900
5 . 1 . 2 . 38	Belanja Upah Harian/Mingguan/Bulanan/Borongan			8,001,996	7,861,911	6,847,982	6,713,049	8,106,037	7,873,305	9,185,775	9,004,184
5 . 1 . 2 . 39	Belanja jasa tenaga ahli/struktur/narasumber	2,666,690	2,411,240	3,105,760	2,775,010	5,211,995	4,540,342	5,450,672	5,104,054	7,744,183	6,522,184
5 . 1 . 2 . 40	Belanja Honor jasa moderator	25,600	17,800	26,000	26,000	32,050	24,650	39,450	36,950	67,540	57,840
5 . 1 . 2 . 41	Belanja Pengembangan sumber daya manusia	73,320	73,320	45,600	45,600	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
5 . 1 . 2 . 42	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25,554,605	28,626,325	17,447,480	15,440,532	32,064,161	18,307,940	29,540,763	29,034,938	36,518,696	32,954,328
5 . 1 . 2 . 43	Pelayanan Medical Chek-up			49,000	29,112	20,000	0	20,000	0	0	0
5 . 1 . 2 . 44	Belanja Operasional PAUD/TK					579,600	579,600	726,600	679,485	713,400	675,000
5 . 1 . 2 . 45	Belanja Operasional Pendidikan Kesetaraan							177,400	149,300	243,100	119,550
5 . 1 . 2 . 47	Belanja Bunga BLUD									27,563	27,563
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	18,791,000	17,909,612	8,123,600	7,113,200	9,186,400	7,615,286	13,097,415	12,354,150	42,827,300	42,011,950
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	1,264,000	594,000			1,125,000	1,053,000	860,000	830,000		
5 . 1 . 5 . 04	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat			1,696,000	1,460,000					940,000	439,500
5 . 1 . 5 . 05	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	17,527,000	17,315,612	6,427,600	5,653,200	8,061,400	6,562,286	12,237,415	11,524,150	41,887,300	41,572,450
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	368,000	305,928	9,517,000	7,826,050	5,095,000	4,992,500	4,782,775	4,308,900	3,315,000	2,899,400
5 . 1 . 6 . 02	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	368,000	305,928	9,517,000	7,826,050	5,095,000	4,992,500	4,782,775	4,308,900		
5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat									3,315,000	2,899,400
5 . 2	BELANJA MODAL	244,173,488	204,887,027	166,357,512	128,090,331	102,219,226	95,543,598	174,493,501	157,410,440	175,470,818	172,479,948



KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
5.2.1	Belanja Modal Tanah			2,286,000	1,779,020	788,593	563,628	429,896	429,896	95,125	95,125
5.2.1.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan					150,643	0				
5.2.1.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan			1,440,000	1,436,532						
5.2.1.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung			846,000	342,488	637,950	563,628	429,896	429,896	95,125	95,125
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28,448,591	25,354,763	36,976,087	29,052,241	18,875,013	14,410,378	59,566,580	50,902,146	48,595,558	50,864,060
5.2.2.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	28,050	0	132,595	0	123,000	121,000	1,350,000	0	0	0
5.2.2.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	1,823,475	1,805,975	38,500	38,500	774,800	766,695	54,480	42,000		
5.2.2.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8,658,157	7,692,225	3,758,688	3,327,832	2,414,400	1,331,165	2,357,247	1,696,178		
5.2.2.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			40,000	40,000						
5.2.2.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor			183,000	0						
5.2.2.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin			4,200	4,200						
5.2.2.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin			0	0						
5.2.2.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	77,415	57,000			31,800	11,800	719,500	708,510	12,500	11,000
5.2.2.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	4,325	2,325	21,800	21,800	613,650	611,250	0	0	116,803	115,555
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	15,920	15,000	15,376	10,310	5,750	5,750	2,800	2,800	19,000	18,010
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	384,399	357,324	639,410	229,720	959,107	819,866	620,916	606,257	569,292	482,527
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4,050,169	3,012,934	3,807,632	3,195,860	2,976,281	2,289,582	3,885,675	3,288,475	2,490,670	1,944,228



KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	3,647,211	4,083,839	5,355,012	4,375,716	3,412,386	2,848,983	4,632,646	4,478,836	2,109,450	1,878,619
5 . 2 . 2 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	315,098	188,068	472,716	331,087	755,201	643,076	388,742	331,672	320,503	191,134
5 . 2 . 2 . 18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	2,322,109	1,324,036	461,448	396,691	630,163	567,895	234,050	171,275	431,188	412,067
5 . 2 . 2 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	115,550	115,280	155,550	140,690	136,300	124,885	456,130	315,755	812,293	420,896
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	13,940	12,440	14,050	14,030	14,220	12,720	4,000	0	12,002	12,000
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	6,278,766	6,050,889	21,021,007	16,086,200	5,577,855	3,837,782	37,781,311	33,232,178	27,961,897	25,208,282
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan			70,800	70,620	100,000	99,000	10,000	3,000	1,162,143	3,281,829
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	30,000	0			15,000	0				
5 . 2 . 2 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	279,291	235,600	200,000	200,000			5,333,179	4,763,395	6,435,741	10,933,077
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	3,040	3,030								
5 . 2 . 2 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan			95,800	95,800						
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	125,174	125,000	0	0						
5 . 2 . 2 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika							1,206,674	747,631		
5 . 2 . 2 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api							0	0		
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	276,500	273,798	488,504	473,185			529,230	514,185	143,597	66,464



KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20,719,712	18,702,093	37,949,301	27,336,254	26,481,708	25,473,789	59,138,126	52,435,971	69,873,733	68,715,399
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20,437,094	18,421,921	34,255,892	23,934,768	25,927,406	24,922,294	59,138,126	52,435,971	69,873,733	68,715,399
5 . 2 . 3 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal			3,637,200	3,347,568	317,112	314,670				
5 . 2 . 3 . 05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan					183,430	183,430				
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	282,617	280,172	56,209	53,918	53,760	53,395	0	0	0	0
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	189,655,998	155,795,825	87,212,549	68,018,502	54,829,801	53,863,188	53,314,293	52,784,848	52,906,101	48,865,471
5 . 2 . 4 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	132,061,995	99,377,681	45,845,758	34,979,633	35,137,567	34,800,568	38,227,444	37,829,381	38,691,468	36,799,127
5 . 2 . 4 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	5,105,807	4,945,282	5,644,646	4,184,073	2,251,134	2,230,223	5,391,204	5,369,089	309,500	303,013
5 . 2 . 4 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	29,753,620	29,700,355	21,311,752	15,984,343	7,414,158	7,104,541	6,586,760	6,479,108	6,265,440	5,499,180
5 . 2 . 4 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	220,526	218,965								
5 . 2 . 4 . 06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	3,683,680	3,325,985	5,808,296	4,375,856	4,251,042	4,250,877	3,108,885	3,107,270	6,455,985	6,262,452
5 . 2 . 4 . 07	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5,925,759	5,914,970								
5 . 2 . 4 . 09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	353,631	353,376					0	0	543,254	0
5 . 2 . 4 . 11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air	8,474,694	7,918,273	4,798,098	4,690,598	5,775,900	5,476,979			0	0



KODE	URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)	ANGGARAN (Ribu Rupiah)	REALISASI (Ribu Rupiah)
	Minum/Air Bersih										
5 . 2 . 4 . 12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2,485,580	2,480,298	3,780,000	3,780,000						
5 . 2 . 4 . 13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	706	0							318,098	0
5 . 2 . 4 . 15	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	85,000	84,976								
5 . 2 . 4 . 21	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1,505,000	1,475,663	24,000	24,000	0	0	0	0	322,357	1,700
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,349,188	5,034,346	1,933,575	1,904,314	1,244,111	1,232,614	2,044,605	857,580	4,000,300	3,939,892
5 . 2 . 5 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	4,811,688	4,699,676	1,875,000	1,852,265	1,150,000	1,140,543	486,170	486,161	950,000	949,924
5 . 2 . 5 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan			0	0						
5 . 2 . 5 . 04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	0	46,975	40,449	82,261	80,686	702,850	48,026	2,511,000	2,465,665
5 . 2 . 5 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya			11,600	11,600	11,850	11,385	548,000	19,910	539,300	524,303
5 . 2 . 5 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	537,500	334,670					3,500	0		
5 . 2 . 5 . 08	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi			0	0			304,085	303,483		

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



3.4.2. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisa terhadap proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur bermanfaat untuk mengetahui seberapa besar alokasi dana pada APBD yang terserap untuk membiayai kebutuhan aparatur, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan untuk alokasi pemenuhan kebutuhan aparatur.

Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3.8
Realisasi dan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Pegawai	435,026,889,787.00	391,971,735,319.00	393,673,510,562.00	402,608,939,017.00	387,839,414,735.00
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	345,382,647,766.00	302,453,630,555.00	300,545,180,433.00	305,800,654,349.00	302,045,986,126.00
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	86,534,131,220.00	71,464,975,400.00	86,144,741,300.00	89,686,504,402.00	78,513,554,794.00
1.3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,484,321,438.00	2,463,500,000.00	5,746,476,000.00	5,451,500,000.00	5,422,927,826.00
1.4	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	186,423,745.00	386,230,297.00	336,180,129.00	303,895,014.00	228,610,584.00
1.5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	349,002,773.00				
1.6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	110,964,845.00	100,066,467.00	79,482,700.00	35,575,252.00	9,325,405.00
1.10	Belanja Pegawai BLUD	979,398,000.00	15,103,332,600.00	821,450,000.00	1,330,810,000.00	1,619,010,000.00
2	Belanja Barang dan Jasa	190,421,929,602.90	211,976,755,800.20	230,768,241,764.90	266,051,106,549.62	238,161,153,640.07
	Total Belanja	625,448,819,389.90	603,948,491,119.20	624,441,752,326.90	668,660,045,566.62	626,000,568,375.07

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



Gambaran proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dengan total pengeluaran, ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2021

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase
1	Tahun Anggaran 2016	625,448,819,389.90	922,942,615,068.32	67.77
2	Tahun Anggaran 2017	603,948,491,119.20	747,598,746,403.73	80.79
3	Tahun Anggaran 2018	624,441,752,326.90	751,249,049,962.28	83.12
4	Tahun Anggaran 2019	668,660,045,566.62	844,420,240,724.53	79.19
5	Tahun Anggaran 2020	626,000,568,375.07	865,226,007,450.07	72.35

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

3.4.3. Analisa Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap realisasi belanja serta pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Gambaran tentang pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2016-2020, disajikan pada tabel dibawah ini.



Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Tahun					Tingkat Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp.)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
1	BELANJA	889,460,502,993.90	747,598,746,403.73	732,620,135,396.90	843,420,240,724.53	862,076,007,450.07	(0.15)
2	BELANJA OPERASI	684,573,475,864.90	619,508,415,119.20	637,076,537,826.90	686,009,800,566.62	674,298,585,875.07	(0.17)
3	Belanja Pegawai	475,936,006,787.00	392,592,409,319.00	393,700,510,562.00	403,295,644,017.00	391,226,082,235.00	(4.45)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan	345,382,647,766.00	302,453,630,555.00	300,545,180,433.00	305,800,654,349.00	302,045,986,126.00	(3.13)
5	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	86,534,131,220.00	71,464,975,400.00	86,144,741,300.00	89,686,504,402.00	78,513,554,794.00	(1.30)
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1,484,321,438.00	2,463,500,000.00	5,746,476,000.00	5,451,500,000.00	5,422,927,826.00	48.39
7	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	186,423,745.00	386,230,297.00	336,180,129.00	303,895,014.00	228,610,584.00	14.96
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	349,002,773.00					(25.00)
9	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	110,964,845.00	100,066,467.00	79,482,700.00	35,575,252.00	9,325,405.00	(39.85)
10	Belanja Pegawai BLUD	979,398,000.00	15,103,332,600.00	821,450,000.00	1,330,810,000.00	1,619,010,000.00	357.80
11	Belanja Hibah	17,909,611,600.00	7,113,200,000.00	7,615,285,500.00	12,354,150,000.00	42,011,950,000.00	62.27
12	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD	594,000,000.00		1,053,000,000.00	830,000,000.00		(55.29)
13	Belanja Hibah kepada Kelompok		1,460,000,000.00			439,500,000.00	(25.00)



NO	URAIAN	Tahun					Tingkat Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp.)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
	Masyarakat						
14	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	17,315,611,600.00	5,653,200,000.00	6,562,285,500.00	11,524,150,000.00	41,572,450,000.00	71.27
15	Belanja Bantuan Sosial	305,927,875.00	7,826,050,000.00	4,992,500,000.00	4,308,900,000.00	2,899,400,000.00	593.88
16	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	305,927,875.00	7,826,050,000.00	4,992,500,000.00	4,308,900,000.00		577.06
17	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat					2,899,400,000.00	0.00
18	BELANJA TAK TERDUGA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297,473,222.00	0.00
19	Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297,473,222.00	0.00
20	Belanja Tak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297,473,222.00	0.00
21	TRANSFER	148,794,336,689.26	170,813,398,800.00	157,133,880,900.00	171,858,791,335.00	167,731,311,900.00	3.44
22	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	148,794,336,689.26	170,813,398,800.00	157,133,880,900.00	171,858,791,335.00	167,731,311,900.00	3.44
23	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	147,532,652,489.26	169,694,930,700.00	155,983,880,900.00	170,708,791,335.00	166,531,334,800.00	3.48
24	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	147,532,652,489.26	169,694,930,700.00	155,983,880,900.00	170,708,791,335.00	166,531,334,800.00	3.48
25	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,261,684,200.00	1,118,468,100.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,199,977,100.00	(1.05)
26	Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai politik	1,261,684,200.00	1,118,468,100.00	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	1,199,977,100.00	(1.05)
27	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33,482,112,074.42		18,628,914,565.38	1,000,000,000.00	3,150,000,000.00	5.09
28	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	33,482,112,074.42		5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	(70.00)
29	Penyertaan Modal pada BUMD	33,482,112,074.42		5,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	(70.00)



NO	URAIAN	Tahun					Tingkat Pertumbuhan (%)
		2016 (Rp.)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
30	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			13,628,914,565.38		3,150,000,000.00	(25.00)
31	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat			13,628,914,565.38		3,150,000,000.00	(25.00)

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



3.5. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Adapun penutup defisit riil Kabupaten Bengkulu Selatan selama kurun waktu 2016-2020 dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
		(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)
1	Realisasi Pendapatan	1,029,025,737	943,262,825	914,271,238	1,009,159,429	1,004,992,977
	<i>Dikurangi realisasi:</i>					
2	Belanja Daerah	1,038,254,840	918,412,145	889,754,016	1,015,279,032	1,029,807,319
3	Pengeluaran Pembiayaan	33,482,112		18,628,915	1,000,000	3,150,000
	Defisit Riil	(42,711,214)	24,850,680	5,888,307	(7,119,603)	(27,964,343)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	46,965,243	3,623,415	28,938,763	37,945,570	30,825,967
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan	4,254,028	21,227,264	(23,050,456)	30,825,967	2,861,625

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun



anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Tabel 3.12
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2018-2020

No	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil					
		2018		2019		2020	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Defisit Riil	24,517,221,704.54		(6,119,602,962.54)		(24,814,342,504.76)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	28,938,763,007.18	118.03	34,827,070,146.34	569.11	30,825,967,183.80	124.226
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			3,118,500,000.00			
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
6	Penerimaan Piutang Daerah						
B	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan	28.938.763.007,18		34.827.070.146,34		30.825.967.183,80	

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021

3.6. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan mengarahkan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kerangka pendanaan sebagai bagian dari formulasi kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran serta alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada



kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal, dirumuskan dengan mempertimbangkan data realisasi penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya.

Proyeksi pendapatan dan belanja disusun dengan nilai perkiraan yang terukur secara rasional dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi, yang direncanakan dapat dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.6.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Adapun komponen sumber pendapatan daerah, meliputi: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil; serta 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 melihat dari tren realisasi pendapatan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan memperhitungkan regulasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Bengkulu dan aspek-aspek lainnya.



Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

Kode/Uraian		Realisasi Tahun Anggaran 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				2022	2023	2024	2025	2026
4.	PENDAPATAN DAERAH	1,004,992,976,845.31	0.49	948,377,249,800.00	948,377,249,800.00	957,861,022,298.00	967,344,794,796.00	976,828,567,294.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	86,145,400,985.68	0.49	57,574,577,800.00	57,574,577,800.00	58,150,323,578.00	58,726,069,356.00	59,301,815,134.00
4.1.01	Pendapatan pajak daerah	9,420,358,876.00	0.49	7,866,062,000.00	7,866,062,000.00	7,944,722,620.00	8,023,383,240.00	8,102,043,860.00
4.1.02	Hasil retribusi daerah	1,087,468,340.00	0.49	1,789,650,400.00	1,789,650,400.00	1,807,546,904.00	1,825,443,408.00	1,843,339,912.00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2,150,687,236.44	0.49	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,525,000,000.00	2,550,000,000.00	2,575,000,000.00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	73,486,886,533.24	0.49	45,418,865,400.00	45,418,865,400.00	45,873,054,054.00	46,327,242,708.00	46,781,431,362.00
4.2	DANA PERIMBANGAN PENDAPATAN DANA TRANSFER	910,050,426,859.63	0.49	868,233,272,000.00	868,233,272,000.00	876,915,604,720.00	885,597,937,440.00	894,280,270,160.00
4.2.01	Pendapatan transfer pemerintah pusat	896,303,190,240.00	0.49	848,628,790,000.00	848,628,790,000.00	857,115,077,900.00	865,601,365,800.00	874,087,653,700.00
4.2.02	Pendapatan transfer antar daerah	13,747,236,619.63	0.49	19,604,482,000.00	19,604,482,000.00	19,800,526,820.00	19,996,571,640.00	20,192,616,460.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8,797,149,000.00	0.49	22,569,400,000.00	22,569,400,000.00	22,795,094,000.00	23,020,788,000.00	23,246,482,000.00
1.3.1	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	8,797,149,000.00	0.49	22,569,400,000.00	22,569,400,000.00	22,795,094,000.00	23,020,788,000.00	23,246,482,000.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan strategi dan kebijakan agar pendapatan daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Guna mendorong peningkatan pendapatan daerah pada 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan, sebagai berikut:

1. Arah kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan: menerapkan sistem daring penerimaan pajak daerah dan membenahi manajemen data penerimaan PAD.
 - b. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah termasuk prosedur dan mekanismenya.
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - d. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
 - e. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
 - g. Meningkatkan dan pengembangan asset pemerintah daerah secara profesional.
2. Arah kebijakan untuk meningkatkan dana perimbangan
 - a. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh pasal 21.
 - b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama



- antara pusat daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
- c. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah bersama Instansi/lembaga terkait di tingkat kabupaten dan provinsi.
3. Arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional
- a. Meningkatkan peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
 - b. Penguatan kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
 - c. Memantapkan kelembagaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan infrastruktur.
 - d. Mengembangkan jejaring dengan dunia usaha maupun pihak donor untuk mendapatkan bantuan pembiayaan non APBN/APBD.

3.6.1.2. Proyeksi Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalokasikan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang



tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dapat digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 3.14
Proyeksi Belanja Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025

Kode/Uraian		Realisasi Tahun Anggaran 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
5.	BELANJA	862,076,007,450.07	0.49	979,324,356,040.00	979,324,356,040.00	989,117,599,600.40	998,910,843,160.80	1,008,704,086,721.20
5.1.	BELANJA OPERASI	674,298,585,875.07	0.49	695,976,834,442.00	695,976,834,442.00	702,936,602,786.42	709,896,371,130.84	716,856,139,475.26
5.1.01	Belanja pegawai	391,226,082,235.00	0.49	445,485,379,057.00	445,485,379,057.00	449,940,232,847.57	454,395,086,638.14	458,849,940,428.71
5.1.02	Belanja barang dan jasa	238,161,153,640.07	0.49	227,379,019,185.00	227,379,019,185.00	229,652,809,376.85	231,926,599,568.70	234,200,389,760.55
5.1.03	Belanja bunga		0.49	1,197,709,100.00	1,197,709,100.00	1,209,686,191.00	1,221,663,282.00	1,233,640,373.00
5.1.04	Belanja hibah	42,011,950,000.00	0.49	19,740,127,100.00	19,740,127,100.00	19,937,528,371.00	20,134,929,642.00	20,332,330,913.00
5.1.05	Belanja bantuan social	2,899,400,000.00	0.49	2,174,600,000.00	2,174,600,000.00	2,196,346,000.00	2,218,092,000.00	2,239,838,000.00
5.2.	BELANJA MODAL	172,479,948,353.00	0.49	111,777,309,998.00	111,777,309,998.00	112,895,083,097.98	114,012,856,197.96	115,130,629,297.94
5.2.1	Belanja modal tanah	95,125,000.00	0.49	27,125,470,393.00	27,125,470,393.00	27,396,725,096.93	27,667,979,800.86	27,939,234,504.79
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	50,864,060,411.00	0.49	27,125,470,393.00	27,125,470,393.00	27,396,725,096.93	27,667,979,800.86	27,939,234,504.79
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	68,715,399,208.00	0.49	39,845,365,105.00	39,845,365,105.00	40,243,818,756.05	40,642,272,407.10	41,040,726,058.15
5.2.4	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	48,865,471,337.00	0.49	44,804,374,500.00	44,804,374,500.00	45,252,418,245.00	45,700,461,990.00	46,148,505,735.00
5.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya	3,939,892,397.00	0.49	2,100,000.00	2,100,000.00	2,121,000.00	2,142,000.00	2,163,000.00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15,297,473,222.00	0.49	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,545,000,000.00	4,590,000,000.00	4,635,000,000.00
5.3.01	Belanja tidak terduga	15,297,473,222.00	0.49	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,545,000,000.00	4,590,000,000.00	4,635,000,000.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	167,731,311,900.00	0.49	167,070,211,600.00	167,070,211,600.00	168,740,913,716.00	170,411,615,832.00	172,082,317,948.00
5.4.01	Belanja bantuan keuangan	167,731,311,900.00	0.49	167,070,211,600.00	167,070,211,600.00	168,740,913,716.00	170,411,615,832.00	172,082,317,948.00

Sumber : BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



Belanja daerah tahun 2021-2025 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebijakan Belanja langsung Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan sosial, dan peningkatan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban;
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
3. Meningkatkan efisiensi pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran, dan jumlah personilnya.

Kebijakan Belanja tidak langsung Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021–2026 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
 - a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
 - b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.



- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta PNSD.
 - d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD.
 - e. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
2. Belanja Bunga
- Penganggaran terhadap kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang atas pinjaman daerah untuk percepatan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.
3. Belanja Subsidi
- Belanja subsidi diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu untuk peningkatan produktivitas dan kinerja sebagai upaya penguatan kemandirian perekonomian daerah.
4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
- Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.
5. Belanja Bagi Hasil Pajak
- a. Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada tahun anggaran rencana.
 - b. Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah kabupaten/kota



kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

7. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.



3.6.1.3. Proyeksi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 3.15
Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025

Kode/Uraian		Realisasi Tahun Anggaran 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30,825,967,183.80	0.49	31,947,106,240.00	31,947,106,240.00	32,266,577,302.40	32,586,048,364.80	32,905,519,427.20
6.1.01	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	30,825,967,183.80	0.49	31,947,106,240.00	31,947,106,240.00	32,266,577,302.40	32,586,048,364.80	32,905,519,427.20
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,150,000,000.00	0.49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00	1,030,000,000.00
6.2.01	Penyertaan modal		0.49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00	1,030,000,000.00
6.2.02	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	3,150,000,000.00	0.49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00	1,030,000,000.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Ke depan, diharapkan proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik serta sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 5% dari total APBD.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi :

- a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program). Kebijakan yang dilakukan pengeluaran anggaran harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan;
- b. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo.

3.6.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

3.6.2.1. Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus



dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya.

Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2021-2025 diproyeksikan sebagai berikut:



Tabel 3.16
Proyeksi Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2025

Uraian		Data Dasar Tahun Anggaran 2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Proyeksi (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026
A	BELANJA OPERASI	674,298,585,875.07	0.49	695,976,834,442.00	695,976,834,442.00	702,936,602,786.42	709,896,371,130.84	716,856,139,475.26
1	Belanja pegawai	391,226,082,235.00	0.49	445,485,379,057.00	445,485,379,057.00	449,940,232,847.57	454,395,086,638.14	458,849,940,428.71
2	Belanja hibah	42,011,950,000.00	0.49	19,740,127,100.00	19,740,127,100.00	19,937,528,371.00	20,134,929,642.00	20,332,330,913.00
3	BELANJA TRANSFER	167,731,311,900.00	0.49	167,070,211,600.00	167,070,211,600.00	168,740,913,716.00	170,411,615,832.00	172,082,317,948.00
4	Belanja bantuan keuangan	167,731,311,900.00	0.49	167,070,211,600.00	167,070,211,600.00	168,740,913,716.00	170,411,615,832.00	172,082,317,948.00
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	3,150,000,000.00	0.49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00	1,030,000,000.00
1	Penyertaan modal		0.49	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00	1,020,000,000.00	1,030,000,000.00
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	2,861,624,679.04		696,976,834,442	696,976,834,442	703,946,602,786	710,916,371,131	717,886,139,475.26

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



3.6.2.2. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, perhitungan proyeksi sisa lebih perhitungan anggaran, perhitungan proyeksi belanja tidak langsung dan perhitungan proyeksi pengeluaran pembiayaan dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2021-2026 untuk mendanai pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, sebagaimana tersajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.17
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	948,377,249,800.00	948,377,249,800.00	957,861,022,298.00	967,344,794,796.00	976,828,567,294.00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	31,947,106,240.00	31,947,106,240.00	32,266,577,302.40	32,586,048,364.80	32,905,519,427.20
	Total Penerimaan	980,324,356,040.00	980,324,356,040.00	990,127,599,600.40	999,930,843,160.80	1,009,734,086,721.20
	Dikurangi					
4	Total belanja Wajib dan					717,886,139,475.26
	Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	696,976,834,442.00	696,976,834,442.00	703,946,602,786.42	710,916,371,130.84	291,847,947,245.94
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	283,347,521,598.00	283,347,521,598.00	283,347,521,598.00	286,180,996,813.98	289,014,472,029.96

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



3.6.2.3. Kebijakan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran sebagai kapasitas riil yang dimiliki daerah untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian indikator kinerja utama Pemerintah Daerah. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasian penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan skala prioritas (*money follow program*) dan proyek prioritas (*major project*) yang telah ditetapkan.

Kapasitas riil keuangan daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dialokasikan kedalam prioritas sebagai berikut:

Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;

Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah, dan

Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

3.6.2.4. Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk membangun daerahnya, termasuk mengelola aset, mengatur usaha daerah dan meningkatkan pendapatan di daerah. Namun pembangunan yang cenderung membutuhkan alokasi dana yang besar, sedangkan sumber-sumber penerimaan daerah terbatas, maka menuntut Pemerintah Daerah untuk bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui inovasi-inovasi kebijakan yang tepat dan terarah guna mendorong keberhasilan pembangunan.

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Dana APBN yang masuk ke Pemerintah daerah terdiri dari dana:



Transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah, dan Dana Insentif Daerah (DID).

Beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan agar pemanfaatan dana transfer ke daerah dapat terwujud di antaranya :

Pertama, Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publi antar daerah.

Kedua, Dana transfer khusus (Dana Alokasi Khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik (pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan) serta afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi. Sedangkan DAK non-fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Penghasilan Guru (TPG), dan bantuan operasional kesehatan untuk Puskesmas.

Ketiga adalah pemberian dana insentif kepada daerah untuk memacu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, dan pelayanan pemerintahan umum. Pemerintah Daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

2) Pendanaan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Pendanaan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu menjadi salah satu sumber dari pendanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan bantuan keuangan dari Provinsi Bengkulu.



3) Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Salah satu sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang berpotensi untuk digali dan dimanfaatkan secara optimal adalah dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang. Penyelenggaraan Program TJSL dilakukan melalui pendekatan :

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama;
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Peran perusahaan dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada tahun 2021-2026 akan diarahkan untuk :

- a. Pembangunan Sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan



kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;

- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan Kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional;
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
- g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong komitmen perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan upaya-upaya antara lain:

- a. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim Forum CSR/TJSLP;
- d. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program



prioritas pembangunan melalui CSR/TJSPL.

- e. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSPL.

4) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1. Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2. Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3. Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4. Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu



relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.

5. Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1. Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2. Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3. Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4. Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5. Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

Pendanaan Pembangunan melalui KPBU memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas proyek dengan pelibatan badan usaha yang memungkinkan adanya pembagian risiko dan menjamin ketepatan waktu dan anggaran (on schedule-on budget).
2. Menjamin kualitas pelayanan karena performance diperjanjikan dalam kontrak.
3. KPBU memiliki perlindungan hukum yang baik karena regulasinya jelas dan governance terjaga melalui mekanisme KPBU yang melibatkan pemangku kepentingan (Bappenas dalam pemilihan proyek, Kementerian Keuangan dalam pemberian fasilitas fiskal, LKPP dalam proses pengadaan, BKPM dalam menjajaki minat dan nilai pasar, Kementerian Dalam Negeri dalam pemberian rekomendasi Availability Payment/AP Daerah, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dalam debottlenecking, dan PT. PII dalam pemberian penjaminan Pemerintah), serta best practice KPBU sudah ada di



berbagai negara dan berbagai sektor.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (full cost recovery) atau kelayakan marginal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur system pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7) infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melalui skema pendanaan KPBU dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri

1. Kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (transportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika),
2. Kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, dan
3. Kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).



5) Pinjaman Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional, maka Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk: 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Tantangan dan ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Oleh karena itu tahap identifikasi masalah sangat berperan penting dalam proses perencanaan sebelum melakukan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder/pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum sesuai dengan target kinerja yang diharapkan. Berdasarkan evaluasi pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana telah digambarkan pada Bab II, terdapat beberapa permasalahan yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

4.1.1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan masih tinggi, bahkan menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai kabupaten termiskin ketiga se-Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2016 angka kemiskinan mencapai angka 22,1 persen, turun menjadi 21,06 persen



pada tahun 2017, 18,65 persen pada tahun 2018, dan terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai angka 17,82 persen. Meskipun secara trend selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi penurunan, namun masih belum signifikan mengentaskan Kabupaten Bengkulu Selatan dari kemiskinan.

Berikut gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel 4.1
Kondisi Kemiskinan Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Garis Kemiskinan	323.991	346.595	364.888	377.823	394.513
2	Jumlah Penduduk Miskin	33.92	32.66	29.19	29.3	28.41
3	Persentase Penduduk Miskin	22.1	21.06	18.65	18.54	17.82
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	4.64	3.32	2.61	3.32	3.29
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	1.3	0.79	0.57	0.83	0.82

Sumber: BPS Bengkulu Selatan, Tahun 2021

b. Pertumbuhan Ekonomi Cenderung Melambat

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, ekonomi Bengkulu Selatan tumbuh sebesar 5,32 persen dan selanjutnya mengalami kontraksi hingga pada tahun 2018 mencapai angka 4,95 persen. Pada tahun 2019, terjadi pertumbuhan walaupun tidak begitu signifikan yaitu sebesar 5,99 persen. Namun pada tahun 2020, pada saat terjadi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid) 19 melanda Indonesia termasuk Kabupaten Bengkulu Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga menyentuh angka 0,26 persen.

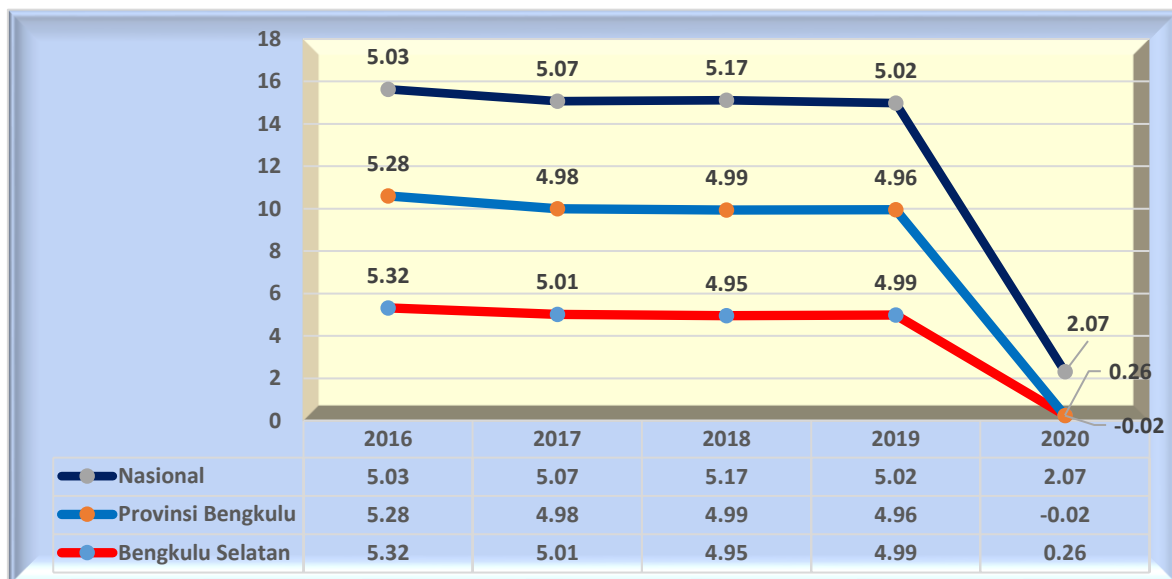
Dengan kondisi ekonomi yang terkontraksi hingga pada angka 0,26 persen, namun masih menunjukkan kinerja positif apabila dibandingkan



dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang berkontraksi hingga -0,02 persen.

Berikut gambaran kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan.

Gambar 4.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



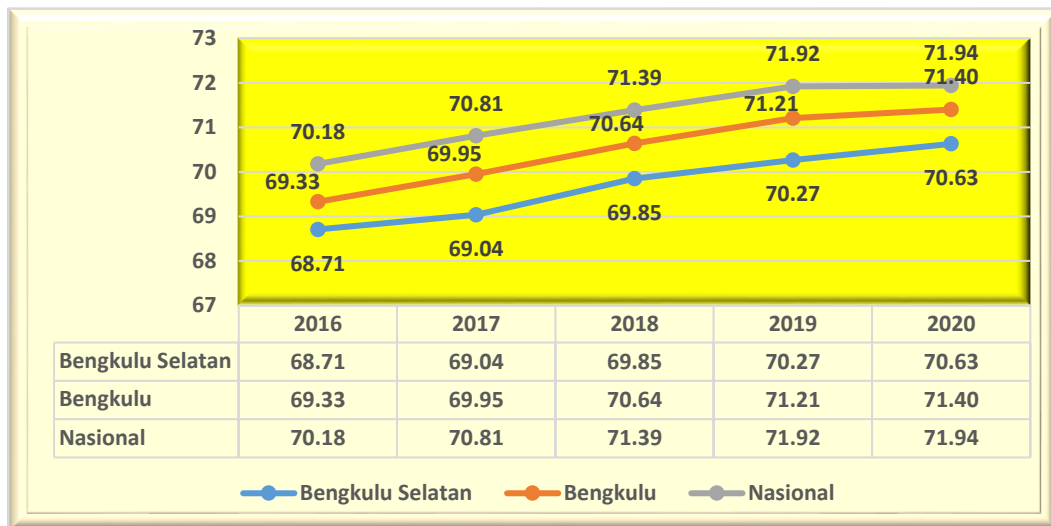
Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

c. Pembangunan Manusia Belum Optimal

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu modal pembangunan yang sangat strategis untuk terus dilakukan pengembangan, maka kebijakan yang tepat untuk peningkatan kualitasnya pun sangat dibutuhkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan, selama kurun waktu 2016-2020 terus menunjukkan trend pertumbuhan. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar 70,63 persen yang menempatkan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi kabupaten dengan capaian IPM tertinggi kedua se-Provinsi Bengkulu, meskipun capaiannya masih dibawah IPM Provinsi sebesar 71,40 persen dan Nasional sebesar 71,94 persen.

Kondisi capaian IPM Kabupaten Bengkulu Selatan kurun waktu 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam gambar berikut:

Gambar 4.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, Tahun 2021

d. Pemenuhan Infrastruktur Dasar Belum Optimal

Pemenuhan infrastruktur dasar di Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar, yaitu akses air minum layak, sanitasi layak dan perumahan layak. Belum seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan layanan dan akses terhadap rumah layak huni, sanitasi layak dan air minum layak.

Tabel 4.2
Kondisi Pemenuhan Infrastruktur Dasar
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	23,75	31,92	30,97	47,74	45,78
2	RT Dengan Akses Sanitasi Layak	80,58	76,45	76,36	68,02	72,02
3	RT dengan akses rumah layak huni	30,94	32,79	49,35	36,77	46,00

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, Tahun 2021



e. Konektivitas dan Pengembangan Infrastruktur Strategis Masih Terbatas

Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada posisi strategis yang menghubungkan Provinsi Lampung melalui Kabupaten Kaur dan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabupaten Lahat. Posisi strategis tersebut dapat dikembangkan menjadi potensi pengembangan sektor jasa dan perdagangan. Namun kondisi infrastruktur untuk menunjang konektivitas terutama yang menghubungkan antara Kabupaten Bengkulu Selatan menuju Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabupaten Lahat, masih belum memadai meskipun status jalan adalah jalan nasional.

Kebutuhan akan pengembangan infrastruktur jalan yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan melalui Kabupaten Lahat sangat penting, mengingat jalan tersebut memiliki beberapa fungsi strategis, antara lain; sebagai akses perdagangan, akses pengembangan pariwisata, akses pengembangan pendidikan, jalur evakuasi, jalur distribusi logistik dan jalur pertahanan keamanan.

Disamping itu, beberapa kebutuhan infrastruktur untuk konektivitas di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan masih ada yang harus dibangun dan ditingkatkan, antara lain konektivitas Kecamatan Ulu Manna dan Kecamatan Air Nipis sebagai jalur ekonomi, serta beberapa infrastruktur lainnya.

f. Hilirisasi Komoditas Unggulan dan Pengembangan Pariwisata Masih Belum Optimal

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi yang sangat besar pada sektor pertanian dan pariwisata. Namun potensi tersebut belum dikembangkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil sektor pertanian terutama beras banyak yang masuk ke daerah lain, begitu juga hasil produksi perikanan budidaya dan produksi pertanian lainnya. Sedangkan pada masanya, Kabupaten Bengkulu Selatan dikenal dengan produk beras segininim dan beras kedurang yang



terkenal.

Tabel 4.3
Kondisi Pemenuhan Infrastruktur Dasar
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi padi sawah dan padi ladang	ton	81.459	93.146	89.232	70.638	59.492
2	Produksi beras (produksi padi – 10%) x 63,20%	ton	46.334	53.255	50.755	40.179	33.839
3	Jumlah penduduk tahun Laporan (asumsi)	jiwa	150.601	155.426	150.601	158.409	166.249
4	Kebutuhan per kapita per tahun	kg	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80
5	Jumlah kebutuhan beras	ton	17.289	17.843	17.289	18.185	19.085
6	Surplus beras	ton	29.045	35.966	33.466	21.994	14.754

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pertanian, Tahun 2020

Begitu pun dengan potensi pariwisata masih banyak yang belum dibangun dan dikembangkan dengan baik, diantaranya arung jeram di Kecamatan Ulu Manna, danau ilir di Kecamatan Seginim, Pantai di Kecamatan Pasar Manna dan Bunga Mas, serta masih banyak lagi.

4.1.2. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

4.1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya masyarakat Bengkulu Selatan yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.

Namun demikian, pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan antara lain:



- a. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah, dimana pada tahun 2020 tercatat 9,26 tahun yang artinya secara rata-rata masyarakat Bengkulu Selatan yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,26 tahun atau hanya menamatkan SMP.
- b. Masih banyak sekolah dengan akreditasi rendah dan bahkan belum terakreditasi. Pada tahun 2019 sebanyak 0,8% jenjang Sekolah Dasar dan 5,6% jenjang Sekolah Menengah Pertama yang belum terakreditasi
- c. Akses terhadap layanan pendidikan masih belum optimal, dimana pada tahun 2019 masih ada siswa yang putus sekolah jenjang SD sebanyak 14 dan jenjang SMP sebanyak 6 siswa.
- d. Masih banyak sarana dan prasarana sekolah yang kondisinya sudah rusak sehingga tidak memadai untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).
- e. Kualifikasi tenaga pendidik masih belum optimal, yang ditandai masih adanya guru yang belum tersertifikasi. Pada tahun 2019 guru SD sebanyak 35,1% dan guru SMP sebanyak 39,9% dari jumlah guru yang ada.
- f. Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus.
- g. Kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajib belajar belum optimal.
- h. serta pemberantasan buta aksara belum optimal. Masih perlunya pengembangan pendidikan karakter anak sejak usia dini untuk peningkatan daya saing siswa guna mengantisipasi pengaruh globalisasi.

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:



- a. Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- b. Masih ditemukannya kasus stunting di Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
- d. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- e. Masih belum memadainya kualitas pelayanan sumber daya Kesehatan (tenaga Kesehatan, sarana dan prasarana serta obat-obatan);
- f. Belum optimalnya upaya peningkatan angka harapan hidup (AHH);
- g. Belum optimalnya unit pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan;
- h. Belum optimalnya pelayanan kesehatan rumah sakit, yang disebabkan oleh system informasi rumah sakit belum transformasi ke arah digitalisasi;
- i. Belum optimalnya jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a. Konektivitas infrastruktur jalan belum optimal untuk mendukung transportasi dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. Kualitas dan kapasitas jalan belum optimal sehingga banyak terjadi kerusakan yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan;
- c. Belum memadainya cakupan pelayanan air minum sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan;
- d. Belum optimalnya cakupan pelayanan air limbah sesuai dengan target tujuan pembangunan berkelanjutan;
- e. Masih cukup banyak jaringan irigasi yang dalam kondisi rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan dari keseluruhan jaringan irigasi yang ada;



- f. Masih cukup tinggi potensi terjadinya bencana alam tanah longsor dan banjir pada lokasi rawan bencana;
- g. Pengendalian terhadap rencana pemanfaatan ruang belum optimal dilaksanakan, sehingga Alih Fungsi Lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang masih terjadi.

D. Permukiman dan Perumahan Rakyat

Beberapa permasalahan pada urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Belum memadainya akses sumber air minum layak, dimana pada tahun 2019, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak hanya sebesar 47.74%;
- b. Belum memadainya akses sanitasi layak, dimana pada tahun 2019, Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak hanya sebesar 40.84%;
- c. Masih banyak rumah tangga yang menghuni rumah layak huni, data tahun 2019 sebesar 46.0%;
- d. Masih belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh sesuai dengan 7 indikator kumuh yang telah ditetapkan.

E. Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengupayakan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi, antara lain:

- a. Masih tingginya potensi gangguan keamanan, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum, yang membutuhkan upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu;
- b. Tingginya risiko bencana, yang memerlukan upaya mitigasi lebih



- optimal;
- c. Belum optimalnya penegakan perda secara konsisten;
 - d. Fungsi deteksi dini terhadap potensi terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih belum optimal;
 - e. Tingkat kesiapsiagaan dan adaptasi masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana (kebakaran dan bencana lainnya) masih belum optimal.

F. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, sejahtera, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS;
- b. Belum optimalnya pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
- c. Diperlukan penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- d. Belum optimalnya upaya pemberdayaan terhadap lansia dan difabel.

4.1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

A. Ketenagakerjaan

Sebagai implikasi dari globalisasi dan transformasi kemajuan teknologi informasi, kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi menjadi permasalahan tersendiri yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan kualitas dan



produktivitas tenaga kerja harus selalu dilakukan, agar tenaga kerja mampu bersaing menghadapi tantangan globalisasi.

Beberapa tantangan dan permasalahan terkait penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan, antara lain:

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih belum optimal yaitu sebesar 70,11% pada tahun 2020;
- b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2020, penduduk berumur 15 tahun keatas yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran terbuka) sebanyak 3.192 ;
- c. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah. Berdasarkan tingkat Pendidikan, 36 % tenaga kerja yang ada dengan kualifikasi Pendidikan SD kebawah, disusul SMA sebesar 23% dan SMP 18 %;
- d. Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan gender di Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tahun 2019 sudah cukup tinggi mencapai angka 70,27 %, namun dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih rendah;
- b. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan perlu diupayakan peningkatannya di berbagai bidang;
- c. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan yang layak terhadap anak;



- d. Belum optimalnya kapasitas, SDM dan penguatan terhadap lembaga yang bergerak dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak;
- e. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

C. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Permasalahan yang biasanya menjadi isu di bidang pangan antara lain: (1) Skor Pola Pangan Harapan masih rendah, dan (2) Rata-rata konsumsi ikan masyarakat masih relatif rendah jika dibandingkan dengan standar *World Health Organization (WHO)* yaitu 36 /kapita/tahun.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan, antara lain:

- a. Ketersediaan pangan yang belum merata dan masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan;
- b. Konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
- c. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih tergolong rendah;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi;
- e. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras.

D. Pertanian

Dalam pelaksanaan pembangunan, tentunya membutuhkan adanya kepastian status lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan aset daerah.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, diantaranya:

- a. Belum selesainya permasalahan status lahan perkantoran padang panjang (ex. Lapter II) yang berakibat terkendalanya pembangunan;



- b. Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
- c. Masih belum tuntasnya penyelesaian penetapan batas wilayah administratif antar kabupaten.

E. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi permasalahan pokok dalam urusan lingkungan hidup.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, diantaranya:

- a. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran oleh limbah domestik, dan industry;
- b. Meningkatnya kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lahan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan ketersediaan ruang terbuka hijau publik sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Belum optimalnya pengelolaan sampah skala lingkungan maupun skala kota. Hal ini disebabkan karena pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah masih belum optimal sehingga reduksi sampah dari sumbernya masih sangat kecil;
- e. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan belum berjalan secara sinergis sehingga pelaksanaannya menjadi kurang efektif dan efisien.
- f. Meningkatnya emisi gas rumah kaca;

F. Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan



administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

- a. Belum seluruhnya masyarakat Bengkulu Selatan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik, diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;
- b. Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan;
- c. Kompetensi SDM dalam hal memberikan pelayanan masih belum merata, yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat;
- d. Aksesibilitas jaringan komunikasi data di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum merata sehingga menghambat proses perekaman data;
- e. Sarana berupa peralatan perekaman/pencetakan banyak yang rusak dan tidak layak operasi;
- f. Ketergantungan logistik perekaman dan pencetakan (blanko KTP EL) masih tersentralisasi, sehingga keterlambatan pengadaan dan distribusi ke daerah akan mengganggu kecepatan proses di daerah.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup, sehingga masyarakat semakin terberdayakan dan desa semakin maju.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020, Kabupaten Bengkulu Selatan termasuk kabupaten yang statusnya berkembang, dengan nilai IDM sebesar 0.6575, berada pada ranking 191 dari 434 kabupaten/kota di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain:

- a. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk pengelolaan dan



- pembangunan di desa;
- c. Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
 - d. Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.
 - e. Masih belum optimalnya infrastruktur dasar dan ekonomi dalam mendukung perekonomian perdesaan antara lain: 1) belum seluruh desa memiliki BUMDes; 2) masih adanya desa blankspot; dan 3) belum optimalnya pemanfaatan potensi desa untuk mendorong OVOP (One Village One Product);
 - f. BUMDes belum optimal difungsikan sebagai katalis perekonomian desa, yang salah satu faktornya adalah ketersediaan SDM dengan kemampuan yang memadai;
 - g. Lemahnya pengelolaan profil desa dan kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya yang ada. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya.

Permasalahan yang masih perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Belum optimalnya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi;
- b. Belum optimalnya keterpaduan program dalam upaya pengendalian kependudukan;
- c. Masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kesertaan ber-KB;



- d. Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga).

I. Perhubungan

Penyelenggaraan bidang perhubungan, memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah.

Beberapa permasalahan pada urusan bidang perhubungan diantaranya:

- a. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi
- b. Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat wilayah perkotaan, perdesaan dan kawasan strategis lainnya;
- c. Belum terpenuhinya standarisasi keselamatan transportasi
- d. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan provinsi (terminal tipe B).

J. Komunikasi dan Informasi

Perkembangan global memasuki era revolusi industri 4.0 mendorong semakin meningkatnya kompetisi dalam bidang teknologi informasi. *Internet of Things* sudah menjadi kebutuhan mutlak untuk mengejar ketertinggalan. Untuk itu, dibutuhkan adopsi dan adaptasi terhadap kemajuan yang ada sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi menuju kemajuan.

Pemanfaatan aplikasi informatika dan laman daring (website) yang didukung infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Daerah, diantaranya:

- a. Kebijakan internal dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan



- Berbasis Elektronik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, belum dilaksanakan dengan baik;
- b. Belum semua sistem informasi pembangunan e-Government lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
 - c. Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, dan komunikasi;
 - d. Masih adanya wilayah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang belum terkoneksi jaringan telekomunikasi (blankspot);
 - e. Adanya keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana teknologi, informasi dan komunikasi (TIK);
 - f. Belum adanya standar keamanan informasi;
 - g. Belum optimalnya pemberdayaan dan peran aktif masyarakat serta keterbukaan informasi publik yang berkelanjutan;
 - h. Belum terlaksanannya implementasi interoperabilitas e-government dan terjangkaunya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi;
 - i. Website Perangkat Daerah sebagai media informasi dan komunikasi masih banyak yang belum aktif.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pemberdayaan koperasi dan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan harus dilakukan agar mampu menyelaraskan struktur perekonomian, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan koperasi serta usaha kecil dan menengah (KUKM), yaitu:

- a. Akses pembiayaan dan akses sumber daya koperasi dan UMKM masih terbatas dan rendah;
- b. Tingkat produktivitas koperasi dan UKM belum maksimal;
- c. Belum optimalnya upaya pendampingan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UKM;
- d. Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UKM, dikarenakan



kualitas produk KUKM belum mampu bersaing dengan kualitas produk industri besar;

- e. Inovasi pengembangan nilai jual dan nilai tambah produk KUKM belum secara optimal tergali;
- f. Sinergi peran pemerintah, pelaku usaha dan stakeholder lainnya dalam menumbuhkembangkan koperasi, dan UKM terutama industri kreatif belum terbangun dengan baik;

L. Penanaman Modal

Investasi daerah menjadi salah satu sumber pembangunan daerah, yang diharapkan dapat berkontribusi positif sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya penumbuhan investasi, yaitu:

- a. Ketersediaan infrastruktur, kepastian hukum, kebijakan investasi, dan ketersediaan SDM penunjang investasi masih belum memadai;
- b. Realisasi investasi belum optimal;
- c. Investasi masih terkendala pada regulasi yang mengatur penataan potensi dan daya saing wilayah;
- d. Komitmen Pemerintah Daerah dan promosi untuk membangun iklim investasi yang kondusif masih belum optimal;

M. Kepemudaan dan Olahraga

Peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan daerah serta meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bengkulu Selatan harus terus dilakukan.

Beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga, antara lain:

- a. Masih banyaknya pemuda yang tidak memiliki aktivitas produktif terutama terkait dengan upaya pengembangan kompetensi diri;
- b. Daya serap dan daya saing pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja masih belum optimal;
- c. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam organisasi dan aktivitas



- membangun kepemimpinan;
- d. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat provinsi, nasional dan bahkan internasional;
 - e. Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga yang sesuai standar;
 - f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kegiatan olahraga;
 - g. Masih belum memadainya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan;
 - h. Belum optimalnya pola pembinaan dan pembibitan atlet dalam rangka mencetak prestasi atlet daerah di bidang olah raga.

N. Statistik

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembangunan daerah secara terintegrasi. Pengelolaan data dan informasi masih memiliki kelemahan diantaranya validitas data dan informasi, belum *link and match* antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan statistik yaitu:

- a. Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi statistik sektoral disebabkan masih rendahnya komitmen Perangkat Daerah dalam men-supply data;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas SDM pengelola statistik sektoral;
- c. Belum terbentuknya regulasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan statistik sektoral;
- d. Belum efektifnya pengelolaan data statistik dalam system portal satu data;



- e. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan statistik sektoral sehingga berdampak pada masih rendahnya data terolah spasial dan aspasia;
- f. Masih lemahnya analisa data statistik sektoral sehingga pemanfaatan data tersebut menjadi kurang efektif dan berdaya guna;
- g. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan statistik sektoral.

O. Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi menjadi kebutuhan yang harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Ruang lingkup Persandian tidak hanya sekedar pengiriman dan penerimaan surat melalui radiogram atau sejenisnya saja, tetapi lebih luas lagi ke arah pengamanan informasi sehingga dokumen-dokumen rahasia pemerintahan tidak bocor yang dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan persandian, antara lain:

- a. Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan system keamanan informasi (*security awarness*);
- b. Belum optimalnya pelaksanaan pengamanan informasi baik jaringan maupun aplikasi pemerintahan (e-government);
- c. Belum adanya Security Operating Centre (SOC) yang dapat memonitor lalu lintas data/informasi;
- d. Belum terbangunnya system pengamanan dokumen-dokumen penting dari pemalsuan;
- e. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi, seperti perangkat pendukung kontra penginderaan, dan Jamming;
- f. Pengamanan aset-aset dan ruangan pimpinan yang perlu disterilkan dari upaya-upaya penyadapan informasi oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab masih belum dilakukan;



- g. Keterbatasan sumber daya manusia persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

P. Kebudayaan

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kekayaan yang berasal dari keberagaman suku dan adat-istiadatnya, dengan nilai-nilai keunikan masing-masing. Kekayaan tersebut harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah.

Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Mulai melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan pemuda, seiring dengan semakin kuatnya pengaruh budaya asing;
- b. Terbatasnya ruang publik yang didukung kondisi sarana prasarana untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan;
- c. Pengelolaan cagar budaya untuk menjadi destinasi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal masih belum maksimal;
- d. pengembangan dan pelestarian budaya belum dilakukan secara terpadu;
- e. Belum optimalnya peran pemerintah, tokoh budayawan, organisasi seni budaya, pelaku seni budaya dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya dalam mendorong pengembangan pelestarian budaya terutama budaya lokal;
- f. Belum optimalnya perlindungan dan apresiasi serta promosi terhadap budaya lokal;

Q. Perpustakaan

Perpustakaan menjadi salah satu simpul strategis untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, karena di perpustakaan masyarakat dapat berkegiatan untuk pengembangan kompetensi dan kualitas masyarakat.

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan, permasalahan yang masih dihadapi, antara lain:



- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat;
- b. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai fungsional pustakawan, dan tenaga pengelola perpustakaan;
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- d. Keragaman dan kekayaan buku koleksi perpustakaan masih perlu ditingkatkan;
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih belum memenuhi standar.

R. Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, untuk menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, diantaranya:

- a. Belum optimalnya upaya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. Belum optimalnya ketersediaan SDM pengelola kearsipan bila dibandingkan dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan;
- c. Sarana dan prasarana pengolahan dan pelestarian arsip belum memadai;
- d. Pengelolaan arsip pada perangkat daerah masih belum tertib sesuai dengan standar pengelolaan kearsipan.

4.1.2.3. Pelayanan Umum Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan.



Pangsa pasar perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sampai ke beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk perikanan budidaya, setiap hari distribusi ikan mencapai lebih kurang 15 , dengan komoditi unggulan ikan nila dan ikan lele.

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat petani nelayan. Namun terdapat beberapa permasalahan yang menjadi menjadi kendala dalam pengembangan produk kelautan dan perikanan, antara lain:

- a. Belum adanya sarana dan prasarana untuk pengolahan produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan (hilirisasi);
- b. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap disebabkan masih masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll);
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi pangan sehat dengan mengkonsumsi ikan;
- d. Belum optimalnya upaya pendampingan, pembimbingan dan pemberdayaan untuk nelayan;
- e. Kualitas dan kapasitas serta kompetensi nelayan masih terbatas, terutama terkait dengan penguasaan teknologi oleh nelayan;
- f. Masih terbatasnya akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan.

B. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengembangkan sektor pariwisata, sehingga kedepan diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan bagi pemuda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

Namun dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang menjadi



kendala, diantaranya:

- a. Arah kebijakan terkait pengembangan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan dengan baik;
- b. Belum terbangunnya kerjasama lintas sektoral dalam upaya pengembangan Pariwisata daerah;
- c. Belum tergalinya secara optimal potensi pariwisata yang berbasis budaya (kearifan) lokal;
- d. Belum terbangunnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan kepariwisataan secara terpadu/sinergis dari hulu ke hilir;
- e. Masih rendahnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan secara regular, namun hanya pada moment-moment tertentu;
- f. Masih belum memadainya infrastruktur menuju destinasi wisata maupun amenities pariwisata;
- g. Masih belum memadainya kualitas, kuantitas dan kapasitas SDM dan lembaga pengelola sektor pariwisata, serta masih rendahnya dukungan dari masyarakat;
- h. Pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan publikasi untuk menunjang promosi sektor pariwisata masih belum optimal.

C. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi off-farm upaya peningkatan kesejahteraan petani perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan sektor pertanian, yaitu:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan teknologi tepat guna;
- b. Belum optimalnya upaya pembinaan terhadap petani untuk peningkatan produktivitas pertanian;
- c. Masih rendahnya upaya diversifikasi dan peningkatan daya saing produk pertanian;



- d. Belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir.
- e. Masih tingginya potensi munculnya wabah penyakit yang menyerang tanaman maupun hewan;
- f. Dukungan sarana dan prasarana penunjang produksi pertanian masih belum maksimal;
- g. Belum optimalnya pengembangan inovasi dalam upaya pengembangan produksi pertanian.

D. Kehutanan

Secara geografis, Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan langsung dengan kawasan hutan nasional. Disamping itu, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki taman hutan raya yang cukup potensial untuk dikembangkan sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan kehutanan, antara lain:

- a. Upaya pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya belum optimal;
- b. Jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih cukup banyak; dan
- c. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.

E. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam upaya pengembangan sektor perdagangan, antara lain:

- a. Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, yang diharapkan



dapat mendorong terbangunnya struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;

- b. Belum optimalnya promosi dan pengembangan produk lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur pasar belum memadai;
- d. Fluktuasi Inflasi yang masih cukup tinggi;
- e. Belum optimalnya pengembangan kebijakan di sektor perdagangan yang berorientasi pada penerapan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (TPMSE);
- f. Masih lemahnya pengendalian perizinan usaha perdagangan
- g. Belum adanya kebijakan penggunaan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

F. Perindustrian

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian, karena mampu menyerap tenaga kerja serta menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah.

Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri, antara lain:

- a. Masih rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah yang sesuai dengan standar dan kebutuhan pasar;
- b. Belum optimalnya inovasi teknologi dalam pengembangan industri;
- c. Masih rendahnya kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia pelaku Industri kecil menengah;
- d. Masih terbatasnya akses permodalan untuk pengembangan industri;
- e. Masih terbatasnya akses dan jaringan pemasaran produk industri kecil menengah.

G. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran.

Secara umum permasalahan pada bidang transmigrasi, sebagai



berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan kompetensi transmigran;
- b. Persepsi penerimaan masyarakat lokal terhadap transmigran;
- c. Pengawasan dan pendataan transmigrasi lokal; dan
- d. Penguatan sistem dan pengelolaan transmigrasi.

4.1.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan transparan serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan.

Meskipun perencanaan di Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan predikat terbaik ketiga dalam gelaran PPD tahun 2020 tingkat Provinsi Bengkulu, namun terdapat permasalahan meliputi:

- a. Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan kebutuhan pembangunan yang selalu berkembang;
- b. Belum adanya aparatur dengan kualifikasi khusus sebagai tenaga fungsional perencana;
- c. Tingkat ketersediaan data dan informasi sebagai modal awal dalam penyusunan perencanaan masih sangat minim;
- d. Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- e. Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feedback dalam proses pembangunan daerah.

B. Keuangan

Efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, upaya untuk peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari Pendapatan asli daerah harus benar-benar dioptimalkan. Hal tersebut karena kontribusi PAD dalam membentuk postur APBD Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat rendah (8%).

Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan keuangan,



antara lain:

- a. Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- c. Belum optimalnya pelaksanaan sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku;
- d. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Belum optimalnya penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah yang disebabkan karena kesadaran wajib pajak masih rendah.

C. Kepegawaian

Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, harus disupport dengan sumber dana manusia ASN yang, memiliki integritas, profesional, dan netral, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktik KKN.

Secara umum permasalahan dalam upaya penyelenggaraan urusan kepegawaian, antara lain:

- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan manajemen ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- b. Sistem penilaian kinerja ASN yang belum akurat sebagai instrument untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN;
- c. Belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Pendistribusian pegawai yang belum optimal sehingga berpengaruh pada pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat;
- e. Masih banyaknya PNS yang terlibat masalah hukum;
- f. Masih sering terjadinya pelanggaran disiplin oleh ASN;
- g. Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis aplikasi belum diterapkan dengan baik;

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan unsur penunjang pembangunan yang sangat strategis, karena hasil-hasil penelitian dan pengembangan dapat menjadi guidance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah.



Secara umum permasalahan terkait dengan penelitian dan pengembangan, diantaranya:

- a. Belum terbangunnya kerangka kebijakan dan kondisi yang kondusif untuk pengembangan dan penerapan inovasi daerah;
- b. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- c. Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
- d. Belum adanya aparatur yang secara khusus memiliki kompetensi sebagai fungsional peneliti;
- e. Masih lemahnya pemahaman perangkat daerah dan kreativitas ASN tentang pentingnya pengembangan inovasi daerah;
- f. Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukung daya saing daerah.

4.1.2.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Penerapan sistem pengawasan internal yang independen, berintegritas, profesional, dan sinergis, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian intern pemerintah daerah telah menunjukkan peningkatan, yang ditunjukkan dengan kapabilitas APIP mencapai level 3.

Permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pengawasan, antara lain:

- a. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah;
- c. Belum seluruh perangkat daerah mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja baik;
- d. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi dari lembaga yang berwenang melakukan audit dan pemeriksaan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan perangkat daerah belum efektif;



- f. Belum ada Perangkat daerah yang menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan daerah ke depan.

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, sebagai berikut:

4.2.1. Isu Strategis Internasional

4.2.1.1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam rangka melanjutkan upaya pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015, maka berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, disepakati *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 target, yang dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu: pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Gambar 4.3.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 dijelaskan bahwa 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai pada tahun 2030, adalah:

1. Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang



- sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
 5. Kesenjangan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
 6. Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
 7. Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
 9. Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
 10. Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
 11. Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
 13. Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
 14. Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
 15. Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi



lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pencapaian SDGs, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen untuk menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan merumuskan isu strategis, sebagai berikut:

1. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
2. Perluasan aksesibilitas layanan pendidikan, dan kesehatan;
3. Pemantapan infrastruktur dan mitigasi bencana;
4. Kesenjangan kesejahteraan masyarakat

4.2.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yaitu tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia: satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara



lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Berdasarkan aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Namun demikian, peluang-peluang tersebut tentunya harus diikuti dengan kesiapan Pemerintah termasuk pemerintah daerah untuk menggenjot peningkatan kualitas dan kapasitas baik sumber daya manusia (tenaga kerja) maupun produk.

4.2.2. Isu Strategis Nasional dan Daerah

4.2.2.1. RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, memiliki sasaran pembangunan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan



terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 memuat visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi:

***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong***

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Dalam upaya pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran



Visi Indonesia 2045, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam rangka menjamin pencapaian RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden, maka ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi,



inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
 - b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
- Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui:
- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
 - c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
 - d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
 - e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
- Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;



- c. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan; dan
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Moderasi beragama; dan
 - d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Melalui:
- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
 - d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber



daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

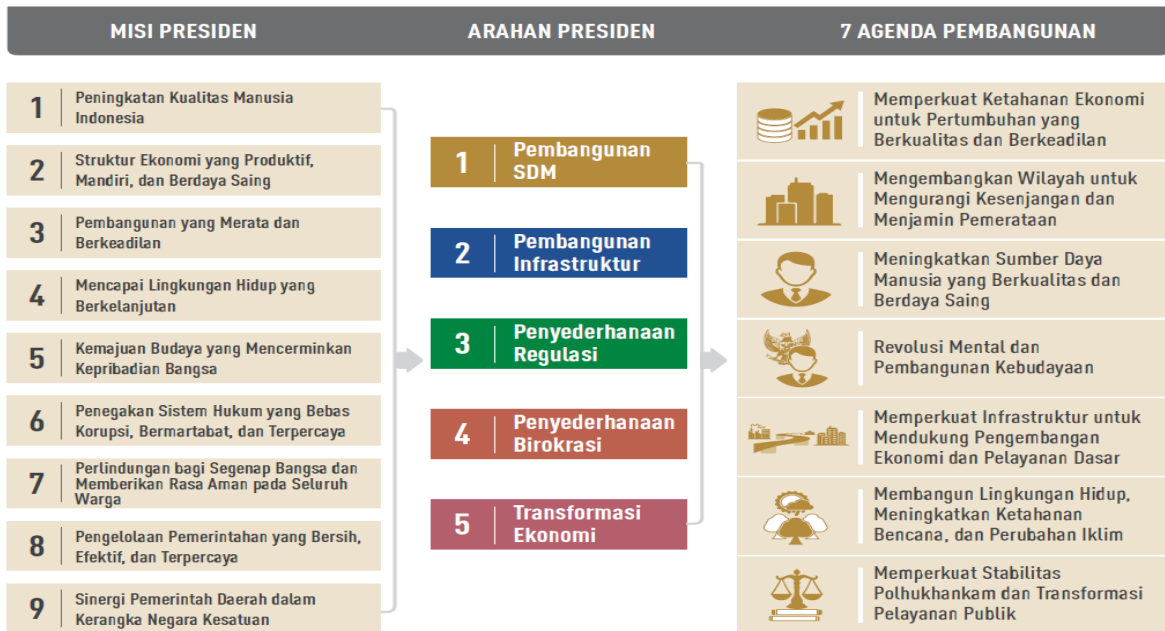
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata Kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, disertai 5 arahan dan 7 agenda pembangunan nasional sebagaimana gambar berikut:

Gambar: 4.4
Misi, Arah dan Agenda Pembangunan Nasional



4.2.2.2. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pada tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan bencana non alam yaitu *Corona Virus Disease* atau Covid-19 menjadi pandemi global. Virus dengan cepat menyebar di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Bahkan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terjadi di seluruh provinsi yaitu 34 provinsi, termasuk Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan, hingga sempat ditetapkan sebagai zona merah.

Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut.

Komitmen percepatan penanganan Covid-19 juga dilakukan di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan diterbitkan dan dilakukannya beberapa kebijakan yang selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, antara lain:



1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 360-234 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Surat Edaran Bupati Bengkulu Selatan Nomor 800/228/bIII/BKPSDM/2020 Tanggal 01 April 2020 tentang Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Instruksi Bupati Bengkulu Selatan Nomor 900/305/BPKAD/2020 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Menindaklanjuti Pengurangan Transfer ke Daerah;
4. Surat Edaran Bupati Bengkulu Selatan Nomor 460/154/Tahun 2020 Tentang Tindak Lanjut Pencegahan dan Pemulihan Dampak Virus Covid 19 di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. Berdasarkan pola penyebaran Covid-19, tekanan besar pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, jaminan kesehatan (*health security*), dan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi dan upaya pencegahan dan kuratif Covid-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit terhambat.

Dari sisi ekonomi, Covid-19 memberikan tekanan yang besar terhadap hampir semua sendi-sendi aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat (*physical distancing*). Investasi diperkirakan terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Tidak hanya itu, sektor keuangan juga menurun produktivitasnya, seiring dengan kemungkinan meningkatnya *non performing loan* (NPL) dan *volatilitas* di



pasar keuangan. Berbagai gangguan tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan, dimana pada tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan hanya 0,26 persen.

4.2.2.3. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur DR. drh. H. Rohidin Mersyah, MMA dan Wakil Gubernur DR. H. Rosjonsyah, S.IP.M.Si. yaitu: **Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Hebat**.

Adapun penjelasan dari visi Bengkulu Maju, Sejahtera dan Hebat adalah sebagai berikut:

#Bengkulu Maju

Mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis dan pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berintegritas. Menjadikan Provinsi Bengkulu sejajar dengan provinsi-provinsi maju di Indonesia

#Bengkulu Sejahtera

Mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta kebijakan pembangunan yang adil serta kemudahan akses. Menjamin rasa aman dan nyaman dalam keberagaman, toleransi yang kuat dengan landasan keimanan dan ketaqwaan.

#Bengkulu Hebat

Mewujudkan Bengkulu yang memiliki keunggulan komparatif & kompetitif yang didukung dengan kebanggaan terhadap potensi yang dimiliki, optimisme dan rasa percaya diri masyarakat, berintegritas serta bermartabat. Mendorong serta melibatkan kaum muda untuk berpartisipasi dalam pembangunan (SDM maupun Infrastruktur)

Untuk menjamin pencapaian visi yang ada, dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif;

2. Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan;
3. Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik;
4. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, toleransi dan religius; dan
5. Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara terpadu

Isu strategis Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing ekonomi;
2. Kemiskinan, kesejahteraan dan daya saing SDM;
3. Pengembangan konektivitas serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Peningkatan kinerja birokrasi;
5. Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif; dan
6. Pemulihan kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi Ccovid-19.

Gambar 4.5

Isu Strategis Provinsi Bengkulu



Sumber: Bappeda Provinsi Bengkulu, Tahun 2021



4.2.2.4. Penelaahan Terhadap RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan

Isu strategis pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Tata Pemerintahan yang Baik
2. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah rawan bencana
3. Peningkatan sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang
5. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dasar
6. Pertumbuhan Ekonomi yang semakin meningkat
7. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Visi RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang Sejahtera, Maju, Mandiri Dan Demokratis Berbasis Agroindustri dan Sumber Daya Manusia yang Tangguh"

Adapun misi yang dirumuskan untuk menjamin pelaksanaan visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, professional dan tanggung jawab;
3. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan;
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri;
5. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu;
6. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religious dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal; dan



7. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.

Misi yang telah diuraikan tersebut, dilaksanakan dan dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan sasaran pokok serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan

Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi I Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat	1. Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenis jalur dan jenjang pendidikan 2. Peningkatan kompetensi dasar tenaga pendidik dalam upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang Tangguh 3. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah
	Meningkatkan aksesibilitas yang merata bagi seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas	1. Peningkatan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan mendapatkan pelayanan Kesehatan 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen Kesehatan 3. Peningkatan upaya kesehatan pada komunitas khusus (ibu, bayi, balita, lansia dan kelompok miskin) 4. Peningkatan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk hidup sehat demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Meningkatkan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor strategis	1. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha 2. Peningkatan kualitas tenaga kerja, kesejahteraan dan kemandirian tenaga kerja yang berwawasan wirausaha melalui pendidikan dan keterampilan teknis sehingga mampu bersaing di era global 3. Peningkatan produktivitas dan daya saing sumber daya lokal dan produk unggulan daerah 4. Pengurangan tingkat pengangguran terbuka dengan peningkatan keterampilan kerja melalui Lokal Latihan Kerja (LLK) sebagai sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pemuda putus sekolah.
	Peningkatan kualitas SDM termasuk peran perempuan dalam pembangunan daerah	1. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dengan penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan. 2. Peningkatan proporsionalitas, partisipasi dan peran serta kaum perempuan di dalam politik dan pemerintahan yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip rekrutmen dan kaderisasi yang baik. 3. Pemberdayaan perempuan dengan peningkatan wawasan, keterampilan dan pendampingan 4. Peningkatan keluasan aksesibilitas perempuan terhadap peningkatan pendidikan dan kesehatan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	1. Pengelolaan sumber daya alam dengan senantiasa memperhatikan keserasian dan keseimbangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	(sustainable development)	2. Penerapan prinsip-prinsip <i>sustainable development</i> yaitu pembangunan yang dilakukan harus efisien dan bertanggung jawab atas lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya terbatas termasuk Sumber Daya Alam
Misi II Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan tanggung jawab	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah	1. Pengembangan kualitas aparatur pemerintahan yang diarahkan untuk mewujudkan sosok aparatur yang profesional, berakhlak mulia dan berkarakter 2. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas aparatur 3. Pengembangan manajemen aparatur yang baik dan bertanggung jawab dengan mendorong pola pengembangan karir yang mengarah pada profesionalisme, standar kompetensi dan kesejahteraan aparatur
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan umum	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada profesionalisme, efisiensi dan efektifitas urusan birokrasi 2. Penetapan Standar Pelayanan minimal (SPM) dan prosedur standar operasional (SOP) untuk mencapai kinerja pelayanan yang optimal 3. Pengembangan Sistem Informasi manajemen daerah yang memadai melalui pembangunan perangkat daerah yang selaras dan sinergis 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima yang diarahkan untuk meningkatkan kepuasan



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
		masyarakat melalui identifikasi kebutuhan masyarakat sehingga layanan yang diberikan benar-benar riil sesuai kebutuhan masyarakat
	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik dan berwibawa	1. Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh system administrasi yang terintegrasi, efektif dan efisien. 2. Pemberdayaan aparatur pemerintah yang mumpuni dan bersih, serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai
Misi III Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan	Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju	1. Peningkatan indikator kemajuan daerah yang meliputi laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. 2. Mengembangkan ekonomi yang tercermin pada tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi diseluruh daerah terutama sektor industri dan sektor pertanian
	Meningkatnya produktivitas masyarakat dengan dukungan keleluasaan akses terhadap pembangunan	1. Peningkatan peluang masyarakat untuk beraktivitas dan berusaha meningkatkan taraf hidupnya melalui penguasaan teknologi dan informasi 2. Peningkatan kesempatan masyarakat dalam berpartisipasi aktif terhadap pembangunan serta turut menikmati hasil pembangunan
Misi IV Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi,	Meningkatnya akses secara merata bagi masyarakat terhadap sarana dan prasarana	1. Pembangunan insfrastruktur diarahkan pada pemerataan aksesibilitas antar wilayah dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan Agroindustry	kebutuhan dasar (listrik, air bersih, pemukiman, transportasi dan lain sebagainya) di seluruh wilayah terutama yang berbasis agroindustry	- pengentasan kemiskinan 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 3. Pemerataan pendapatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah
	Tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dalam rangka mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditas unggulan daerah berbasis agroindustry	1. Pembangunan sarana dan prasarana (produksi, distribusi dan pasar) yang terintegrasi sehingga akan melahirkan kemajuan ekonomi daerah secara berkelanjutan berbasis agroindustry 2. Peningkatan aksesibilitas dari Kawasan andalan dan kawasan budidaya lainnya ke tujuan-tujuan pemasaran yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan berbasis agroindustry
	Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah	1. Pengembangan kreativitas masyarakat dan peningkatan prestasi masyarakat di segala aspek kehidupan 2. Peningkatan kualitas pemuda terutama pada bidang iptek, ekonomi, sosial budaya dan politik, serta bidang olahraga yang difokuskan pada peningkatan budaya olah raga dan prestasi olahraga
	Berkembangnya kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustry	1. Pembangunan dan pengembangan Kawasan ekonomi baru melalui upaya penciptaan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustry 2. Penyusunan masterplan percepatan, perluasan dan pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan berbasis agroindustry



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Misi V Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu	Berkembangnya sistem agroindustri terpadu	1. Pembangunan sektor pertanian yang diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah 2. Mengembangkan produktivitas pertanian untuk menghasilkan produk-produk pertanian secara modern 3. Pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya alam khususnya pertanian yang dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian unggulan	1. Pembangunan sektor industri diarahkan untuk memperkuat basis industri pertanian yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal, nasional maupun internasional 2. Pengembangan sektor-sektor strategis sebagai motor penggerak kegiatan pertanian agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh
Misi VI Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan local	Terwujudnya karakter masyarakat yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan saling toleransi antar individu	1. Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan yang diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 2. Penciptaan kerukunan hidup beragama, baik kerukunan intern umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama 3. Pembentukan jati diri masyarakat yang berbudi pekerti luhur, beretika, beradab dan mempunyai toleransi yang tinggi antar individu dalam masyarakat
	Berkembangnya kegiatan pelestarian norma dan nilai-nilai budaya daerah	1. Optimalisasi peran serta tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama dalam membina kehidupan sosial yang aman, damai, solider harmonis dan



Misi	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah	agamis 2. Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur dalam rangka peningkatan kualitas budaya masyarakat. 3. Melestarikan dan mengapresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional lokal. 4. Pembinaan kehidupan sosial yang maju dan mandiri
Misi VII Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan norma, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku	1. Membangun ketertiban masyarakat melalui pembinaan, bimbingan dan kemasyarakatan. 2. Menciptakan situasi yang kondusif untuk memperlerat tali persaudaraan diantara masyarakat 3. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebersamaan, saling toleransi antar individu serta hamonisasi dalam kehidupan bermasyarakat	1. Peningkatan budaya dan kesadaran politik untuk generasi muda dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan, kesetiakawanan dan solidaritas 2. Pendidikan politik yang diarahkan pada terwujudnya kesadaran berpolitik masyarakat dan terjaminnya hak-hak politik secara proporsional dalam koridor hukum

4.2.2.5. Penelaahan Terhadap Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan secara parallel dan bersama-sama dengan tujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar



dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Penyusunan RPJMD harus memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan.

KLHS dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai acuan dan masukan dalam perumusan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah, sehingga dapat diupayakan penyempurnaan kebijakan, rencana program dan kegiatan untuk meminimalisir adanya perencanaan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS sebagai sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar, yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD, memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

4.2.2.6. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan



perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui *financial technology (fin-tech)*, dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*.

Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan, dimana pekerjaan yang ada akan mulai tergantikan oleh otomatisasi. Kondisi ini harus diantisipasi dan dilakukan adaptasi secara intensif dan massif untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

4.2.2.7. Kerja Sama Antar Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Adapun yang menjadi objek kerja sama antar daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, serta tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama untuk penguatan ekonomi, inovasi, transformasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Daerah mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) sebagai formulasi untuk mengatasi permasalahan dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki daerah.



Selain itu, kerja sama antar daerah juga dianggap sangat bermanfaat bagi daerah karena adanya *sharing of experiences* yang memungkinkan daerah dapat berbagi pengalaman, sehingga daerah dapat meniru atau mengadopsi kebijakan dan/atau strategi dalam menangani permasalahan atau mengelola sumberdaya yang dimiliki, bisa *sharing of benefits* yang memungkinkan daerah dapat berbagi keuntungan melalui pengelolaan sumberdaya yang sama, serta *sharing of burdens* dimana daerah dapat bersama-sama menanggung biaya secara proporsional sehingga tidak ada daerah yang terbebani.

Kerja sama antar daerah yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa konsep, antara lain kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain, kerja sama daerah dengan lembaga lain seperti perguruan tinggi, lembaga yang berbadan hukum, lembaga pemberdayaan dan kerja sama daerah dengan lembaga swasta/bisnis.

A. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain

Kerja sama daerah dengan daerah lain difokuskan untuk percepatan pembangunan perekonomian daerah, penguatan inovasi daerah, percepatan transformasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu bentuk kerja sama yang dibangun dalam rangka percepatan pembangunan daerah adalah Kerja Sama Regional Manna – Pagar Alam – Lahat (MAPALA), yang bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, memperluas kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercapai kemandirian dan kemajuan daerah.

Dalam upaya mendorong kemajuan dan peningkatan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, yang secara administratif berbatasan langsung, yaitu Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam. Kerja sama yang dibangun fokus pada pengembangan sektor pertanian, perdagangan, pariwisata dan infrastruktur.



Adapun argumentasi yang mendasari perlunya dibangun kerjasama trilateral yang disebut Kerja Sama Regional Manna – Pagar Alam – Lahat (MAPALA), antara lain:

1. Karena adanya saling ketergantungan dalam aktivitas ekonomi

Aktivitas ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa setiap hari terjadi pertukaran komoditi diantara tiga wilayah, salah satunya adalah komoditi produksi perikanan (budidaya dan tangkap) dari Kabupaten Bengkulu Selatan didistribusikan sampai ke Kota Pagar Alam dan Kabupaten Lahat, dan begitu pun sebaliknya komoditi sayur sayuran dari Kota Pagar Alam masuk ke pasar di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Perbedaan dalam kepemilikan sumber daya

Ketiga daerah memiliki sumber daya yang berbeda satu sama lain, diantaranya adalah potensi pariwisata. Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki pantai dan laut serta hasil yang dikandungnya, Kota Pagar Alam yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki wisata alam Gunung Dempo dengan perkebunan tehnya dan Kabupaten Lahat memiliki potensi geolitikum terbesar. Dengan potensi yang berbeda, apabila dikemas dengan baik maka akan memiliki nilai jual yang lebih baik.

3. Kebutuhan spesialisasi dengan maksud meningkatkan nilai tambah suatu daerah

Konektivitas Manna-Pagar Alam-Lahat belum memadai karena kualitas dan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan yang belum standar dan kurang aman. Jalur Manna-Pagar Alam-Lahat merupakan jalur strategis yang harus ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya, karena memiliki fungsi spesial, yaitu disamping untuk mobilitas ekonomi dan transportasi, yang terpenting sebagai jalur distribusi logistik dan pertahanan keamanan serta mitigasi bencana.

4. Kondisi geografis dan karakteristik yang berbeda.

Ketiga wilayah memiliki kondisi geografis dengan karakteristik yang berbeda, sehingga berpotensi untuk dikembangkan menjadi peluang pengembangan ekonomi daerah.



Dengan kerjasama yang dibangun, Pemerintah Daerah meyakini akan mendapatkan beberapa manfaat, antara lain:

1. Kekuatan dari masing-masing daerah dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya daripada kalau ditangani sendiri-sendiri.
2. Berpeluang dapat mencapai kemajuan yang lebih tinggi, karena masing-masing daerah akan mentransfer kepandaian, ketrampilan, dan informasi untuk saling mendukung upaya memajukan daerah.
3. Masing-masing daerah dapat lebih berdaya, karena memiliki posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu memperjuangkan kepentingannya kepada struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Bila suatu daerah secara sendiri memperjuangkan kepentingannya, mungkin kurang diperhatikan, tetapi apabila dibingkai ke dalam suatu forum kerjasama daerah, maka suaranya akan lebih diperhatikan.
4. Dapat memperkecil atau mencegah terjadinya konflik. Dengan kerjasama, daerah-daerah yang semula bersaing ketat dalam upaya pengembangan daerahnya, dapat bersikap lebih toleran dan saling mendukung untuk bersama-sama memajukan daerah.

B. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Kerja sama daerah dengan pihak ketiga difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, sehingga kebijakan yang diambil dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal untuk menjamin terwujudnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Beberapa kerja sama daerah dengan pihak ketiga salah satunya dilakukan dengan lembaga akademisi (perguruan tinggi) dalam rangka penyusunan kebijakan daerah. Pemerintah daerah berupaya membangun kerja sama dengan pihak ketiga lainnya guna mendorong penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan

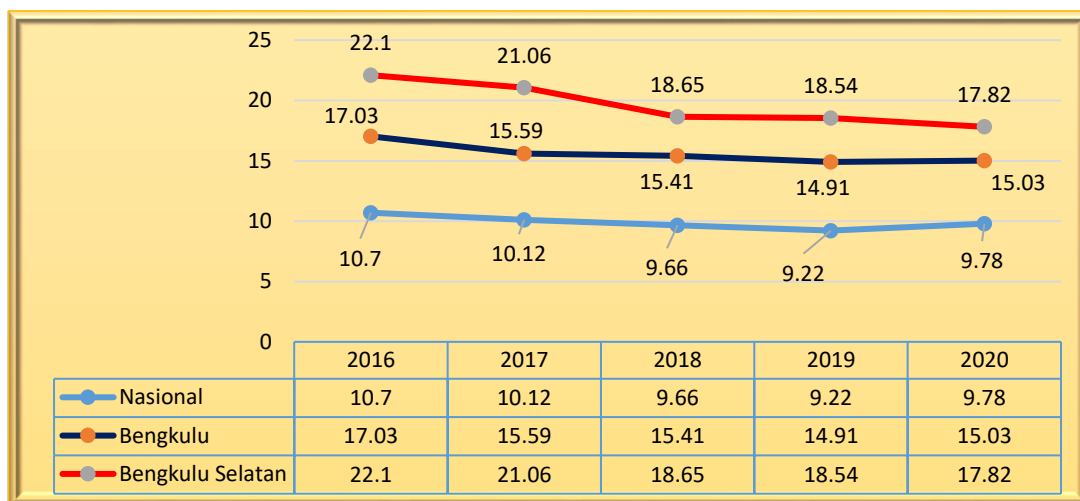
Berdasarkan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di atas serta memperhatikan tujuan SDGs, tujuh agenda pembangunan

nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu, dapat diinventarisasi beberapa isu strategis untuk dijadikan sebagai basis pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

A. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*). Penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 28,41 ribu atau 17,82 persen, membaik dibandingkan tahun 2019 (18,54 persen), meskipun angka ini masih di atas capaian nasional yaitu sebesar 9,78 persen dan Provinsi Bengkulu sebesar 15,03 persen.

Gambar 4.6
Potret Kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2021

Sebaran penduduk miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi di wilayah pedesaan, khususnya pada kelompok sasaran antara lain; (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit atau penggarap, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga



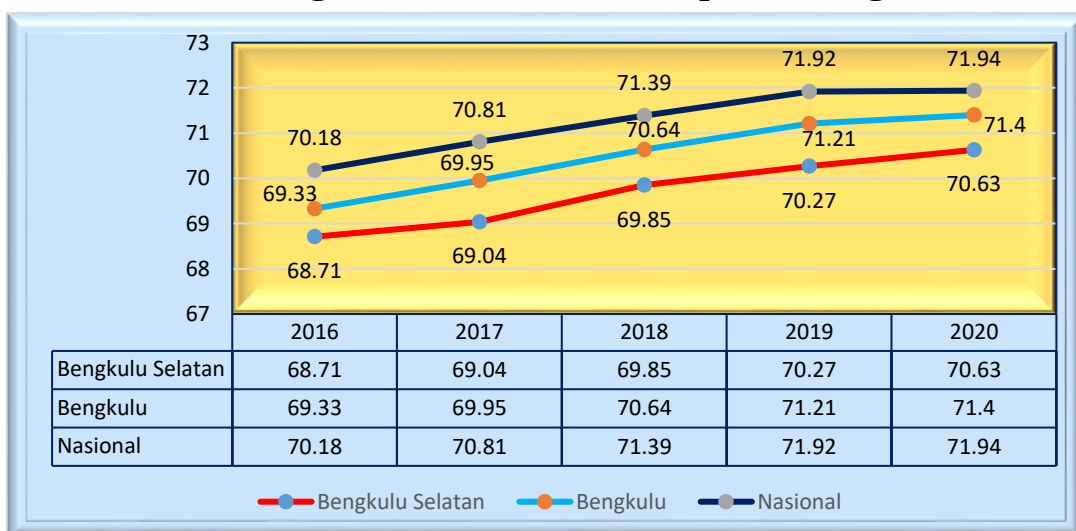
(*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan.

B. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Gambar 4.7
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bengkulu Selatan



Sumber: Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Angka, 2020

Sampai dengan tahun 2020, IPM Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan trend peningkatan, yang menempatkan Bengkulu Selatan pada posisi terbaik kedua setelah Kota Bengkulu, yaitu



sebesar 70,63, meskipun angka tersebut masih dibawah IPM Provinsi Bengkulu sebesar 71,4 dan angka nasional sebesar 71,94.

Namun dari sisi kualitas pelayanan dan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan pembangunan bidang sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah. Pada sektor pendidikan, masih diperlukan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana yang memadai serta kualitas transformasi pengetahuan untuk peserta didik. Dari sisi kesehatan, masih banyak ditemukan layanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang tidak berjalan optimal, sarana prasarana tidak memadai dan kualitas tenaga kesehatan yang masih perlu peningkatan. Sedangkan pada bidang sosial, masih banyak permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ancaman terhadap pembangunan sumber daya manusia yang saat ini tengah menggejala adalah serangan yang merusak moral, etika dan budaya serta melemahkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia. Banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ancaman peredaran NAPZA yang bahkan telah menempatkan Indonesia termasuk Bengkulu “darurat narkoba” dan lain sebagainya.

Isu pentingnya yang harus menjadi perhatian bersama adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai moral dan budaya ke dalam perilaku masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan. Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas adat dan budaya yang bersumber dari kearifan lokal melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi serta kreatifitas seni budaya maupun sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat.

C. Penyediaan infrastruktur dasar strategis dan prioritas

Infrastruktur dasar strategis dan prioritas masih menjadi permasalahan di Kabupaten Bengkulu Selatan, diantaranya pada



penyediaan infrastruktur yang berkualitas, aman dan nyaman, terutama infrastruktur yang mendukung terwujudnya konektivitas, baik antar wilayah dalam Kabupaten Bengkulu Selatan maupun yang menghubungkan antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan kabupaten atau provinsi lain.

D. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha

Nilai PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2019 mencapai 5.701,4 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 398,51 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 5.302,9 milyar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 3.444,03 milyar rupiah pada tahun 2018 menjadi 3.616,0 milyar rupiah pada tahun 2019. Artinya, selama tahun 2019 Bengkulu Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Bengkulu Selatan didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Bengkulu Selatan.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Bengkulu Selatan pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 32,60 persen. Angka ini menurun dari 36,64 persen di tahun 2015. Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,07 persen (naik dari 14,71 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,50 persen (naik dari 10,30



persen di tahun 2015). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,81 persen (naik dari 5,36 persen di tahun 2015) dan lapangan usaha konstruksi sebesar 5,67 persen.

Beberapa kondisi yang masih menjadi prioritas untuk diintervensi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, antara lain:

a. Sektor Pertanian

Pertanian merupakan sektor unggulan yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi dan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Bengkulu Selatan. Persoalan terjadi saat ini adalah belum tumbuhnya inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian serta semakin berkurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor lain.

Persoalan pembangunan sektor pertanian, antara lain: sebagian besar masyarakat yang bekerja di sektor pertanian adalah petani usia tua, sedangkan tenaga kerja usia muda tidak memiliki ketertarikan. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi serta transportasi dan komunikasi masih banyak menjadi kendala. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar, dimana sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya menyebabkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan rendah.

b. Sektor Perdagangan dan Jasa

Secara geografis, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki posisi strategis yang menghubungkan jalur perekonomian dari Provinsi Lampung, Provinsi Sumatra Selatan dan Kota Bengkulu.



Kondisi tersebut menjadi keuntungan tersendiri yang berpotensi untuk dikembangkan dalam mendukung penguatan perekonomian daerah. Hal ini ditunjukkan dengan mulai menggeliatnya aktivitas perekonomian sektor perdagangan dan jasa.

c. Sektor Industri Pengolahan

Perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi, seiring dengan telah ditetapkan implementasi revolusi industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi).

Kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk melakukan intervensi intensif diantaranya adalah fokus pada peningkatan kompetensi SDM, peningkatan kualitas produk industri serta pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah produk industri.

d. Investasi

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor (*business friendly*), karena dengan demikian akan mampu menarik investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi lokal di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah. Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor, agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi.



Permasalahan investasi yang dihadapi Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pada belum optimalnya kecepatan pelayanan perijinan, promosi investasi, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi yang belum optimal, didukung dengan pelayanan birokrasi yang belum efisien dan penggunaan teknologi belum optimal.

E. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengembangan usaha pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki, yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan. Pengembangan sektor pariwisata ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*Eco-Socio Tourism*), dengan dukungan potensi sektor budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata.

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya.

Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kabupaten Bengkulu Selatan, ada beberapa permasalahan yang harus diperbaiki, antara lain:



- a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif
- b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.
- c. Permasalahan lainnya adalah permodalan dan pemasaran produk, Sumber Daya Manusia (SDM), Bahan baku, infrastruktur dan teknologi.

F. Kedaulatan dan Ketahanan Pangan

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang berpotensi terjadinya krisis pangan pada akhir tahun 2020 hingga awal tahun 2021. Untuk itu, diperlukan penguatan produksi pertanian guna menjamin penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, namun produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan.

G. Penyelesaian sengketa lahan dan tapal batas antar kabupaten

Salah satu kondisi yang menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan adalah masih belum jelasnya status lahan yang ditempati oleh Pemerintah Daerah untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan belum jelasnya status tersebut, Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan pembangunan sarana prasarana untuk menunjang peningkatan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Disamping itu, permasalahan tapal batas dengan Kabupaten Seluma masih belum tuntas. Meskipun sudah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 dan sudah *clear*, namun faktanya dari pihak Kabupaten Seluma masih belum menerima dengan baik, sehingga kondisi ini menghambat rencana pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan.

H. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), dengan melakukan intervensi terhadap 8 (delapan) area perubahan yaitu:

Gambar 4.8
8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi



Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan indikasi masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020, yaitu nilai Reformasi Birokrasi masih C, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih CC dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dari BPK masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tata kelola pemerintahan yang baik dibangun dengan komponen-komponen meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur serta



kelembagaan yang optimal menjadi syarat mutlak bagi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, karena aparatur menjadi subjek pelaksanaan manajemen pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja dibangun dengan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan daerah. Pada proses perencanaan dimulai dengan menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan lima tahun kedepan, yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan ke dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah.

5.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pilkada serentak tahun 2020.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan, maka visi Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

**Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju
Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS**

Penjelasan Visi:

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas



kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan *added value* (nilai tambah),
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.



Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gog royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula **“CINTA BS”**.

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

C = **C**erdas
I = **I**ntegritas
N = **i**Novatif
T = **T**auladan
A = **A**gamis
BS = **B**erdaya **S**aing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.



5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Bengkulu Selatan 2021-2026, “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS” tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) misi yang dibingkai dalam label: “*Melah Beghiluak*”.

Label “*Melah Beghiluak*” yang membingkai empat misi untuk mewujudkan visi Bengkulu Selatan 2021-2026 tersebut, menunjukkan sikap Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk benar-benar mewujudkan pembangunan di Bengkulu Selatan, dengan membangun semangat gotong royong, demokrasi dan menumbuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pembangunan.

4 (empat) misi untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS” adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan



norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (*inklusif*), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang



ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun *open government* melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

5.3. Keselarasan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 Dengan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025

Mengingat RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang sejalan dengan perencanaan pembangunan periode terakhir dari RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, maka perencanaan pembangunan yang disusun harus selaras, konsisten dan berkesinambungan. Adapun keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Keselarasan Misi Pada RPJPD dengan Misi RPJMD
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

RPJPD TAHUN 2005-2025	RPJMD TAHUN 2021-2026
Misi 1: Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya



RPJPD TAHUN 2005-2025	RPJMD TAHUN 2021-2026
berasas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	saing
Misi 6: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal	
Misi 7: Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan	
Misi 3: Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, produktif dan memiliki keleluasaan akses terhadap pembangunan	Misi 2: Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
Misi 4: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	
Misi 4: Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan ekonomi baru, dan komoditas unggulan dengan pendekatan agroindustri	Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing
Misi 5: Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan yang Mandiri Berbasis Agroindustri Terpadu	
Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan tanggung jawab	Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi



5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan kebijakan strategis dan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang telah terpetakan sebelumnya.

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan, secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan Provinsi Bengkulu, serta isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program seluruh perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih, juga merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah, dan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, yang merupakan tolok ukur keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, serta seluruh perangkat daerah.



Tujuan dan sasaran sebagai pengejawantahan secara operasional dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, diuraikan sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

Tujuan : Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Misi 2: Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tujuan : Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan

Sasaran :

1. Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan
2. Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan
3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
4. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing

Sasaran:

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan daerah
2. Meningkatnya kualitas daya serap tenaga kerja
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah



4. Terkendalinya inflasi daerah
5. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat
6. Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tujuan dan sasaran dirumuskan secara *Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time bound* (SMART) sehingga mampu memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun gambaran hubungan tujuan dan sasaran Kepala Daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 5.2.
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Murni	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan	Angka Partisipasi Murni SD	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rata-rata lama sekolah		Persentase Kelulusan	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Angka Partisipasi Murni SMP	Pendidikan	
							Persentase Kelulusan SD	Pendidikan	
							Persentase Kelulusan SMP	Pendidikan	
							Rata-rata nilai Ujian (SD)	Pendidikan	
							Rata-rata nilai Ujian (SMP)	Pendidikan	
				Meningkatnya minat baca masyarakat	Cakupan layanan perpustakaan	Meningkatnya aktivitas literasi masyarakat	Cakupan layanan perpustakaan	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Kesehatan	Dinas Kesehatan



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
							Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Kesehatan	
							Angka Kesakitan	Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas pengendalian jumlah penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas PPKBP3A
				Meningkatnya daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
					Prestasi olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah prestasi olahraga tingkat Provinsi/ Nasional yang dimenangkan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan masyarakat	Indeks kerukunan umat beragama		Badan Kesbangpol
					Indeks Demokrasi	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang baik	Indeks Demokrasi		Bagian Kesra Setda
									Badan Kesbangpol



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
					Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban		Satpol PP dan Damkar
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya kualitas ketenaga kerjaan	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	Ketenaga kerjaan	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
				Meningkatnya kemandirian PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh manfaat, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Meningkatnya layanan dan jaminan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh manfaat, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Sosial	Dinas Sosial
				Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun		Dinas PMD
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya akses, kualitas hidup, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Meningkatnya kualitas pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas PPKBP3A



MISI II : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase pemenuhan infrastruktur (dasar dan strategis) daerah	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur strategis yang memadai	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur strategis daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik		
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi yang berdaya saing	Persentase pemenuhan infrastruktur transportasi	Meningkatnya kualitas pelayanan dan pemenuhan infrastruktur transportasi	Persentase infrastruktur penunjang layanan transportasi sesuai standar	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap air minum layak	Persentase RT dengan akses air minum jaringan dan non jaringan perpipaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses dan kualitas permukiman yang memadai dan berkelanjutan	Persentase kawasan permukiman yang berkualitas dan layak huni	Meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
				Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur dasar daerah	Persentase cakupan akses layanan sanitasi layak	Meningkatnya kualitas dan akses masyarakat terhadap sanitasi yang layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya akses perumahan yang berkualitas dan layak huni	Persentase rumah layak huni	Meningkatnya kualitas dan akses rumah layak huni	Persentase rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya pengelolaan Sumber daya hutan yang berkelanjutan	Indeks tutupan lahan	Kehutanan	
	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



MISI III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah sektor pertanian	Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah Produksi pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
						Meningkatnya kesejahteraan petani	Nilai Tukar Usaha Petani	Pertanian	Dinas Pertanian
				Meningkatnya daya saing perekonomian daerah sektor Perikanan	Nilai Tukar Usaha Nelayan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Perikanan	Dinas Perikanan
						Meningkatnya Nilai Tambah Produk Olahan Perikanan	Nilai Produksi Olahan Perikanan	Perikanan	Dinas Perikanan
				Meningkatnya daya saing perekonomian daerah sektor perdagangan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Perdagangan	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro
				Meningkatnya daya saing perekonomian daerah sektor industri pengolahan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Perindustrian	Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro
				Meningkatnya daya saing perekonomian daerah sektor pariwisata	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Wisatawan	Pariwisata	Dinas Pariwisata
							Rata-rata lama tinggal	Pariwisata	Dinas Pariwisata



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Realisasi investasi	Meningkatnya investasi daerah	Jumlah PMA/PMDN	Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi	Jumlah PMA/PMDN	Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
					Realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Realisasi investasi	Penanaman Modal	Dinas PMPTSP
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
							Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Pangan	

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas perencanaan dan	Nilai perencanaan dan pengukuran	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	Perencanaan	Bappeda Litbang



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
pemerintahan daerah				pengukuran kinerja	kinerja	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	Perencanaan	Bappeda Litbang
				Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai komponen laporan kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai komponen laporan kinerja	Penunjang	Bagian Ortala Setda
					Nilai Laporan Penyelenggara n Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggara n Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Penunjang	Bagian Tata Pemerintahan
					Cakupan layanan kearsipan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah	Persentase layanan kearsipan sesuai standar	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya kualitas pengawasan, evaluasi dan pengendalian atas kinerja pemerintah daerah	Nilai komponen evaluasi kinerja	Meningkatnya kualitas kinerja keuangan daerah	Nilai komponen evaluasi kinerja	Pengawasan	Inspektorat
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Keuangan	BPKAD



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
				Meningkatnya kualitas pengawasan, evaluasi dan pengendalian atas kinerja pemerintah daerah	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Meningkatnya kualitas kinerja keuangan daerah pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan	Pengawasan	Inspektorat
			Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Kepegawaian	BKPSDM
			Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas implementasi SPBE	Indeks SPBE	Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK dan layanan pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Komunikasi dan Informatika	Dinas Kominfo
			Indeks Inovasi Daerah	Terwujudnya iklim inovasi daerah yang kondusif dan kompetitif	Indeks Inovasi Daerah	Terwujudnya iklim inovasi daerah yang kondusif dan kompetitif	Indeks Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan	Bappeda Litbang
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat / nilai pelayanan public	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai pelayanan publik	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Cakupan layanan administrasi kependudukan	Kependudukan	Dinas Dukcapil
						Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan layanan pencatatan sipil	Kependudukan	Dinas Dukcapil



Tujuan Kepala Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Bidang Urusan	OPD Penanggung Jawab
				Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu	Nilai pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu	Nilai survey kepuasan masyarakat	Penanaman Modal	Dinas PMPTSP



Tujuan dan sasaran kepala daerah merupakan target kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2021-2026 sebagaimana dituangkan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.3
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)
Berlandaskan CINTA-BS

No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
					2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Tujuan 1.1: Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,23	70,63	70,95	71,27	71,38	71,67	71,98	71,98
		Sasaran 1.1.1: Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,61	13,79	13,89	13,90	13,97	14,05	14,05
			Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,02	9,26	9,26	9,29	9,39	9,49	9,60	9,60
		Sasaran 1.1.2: Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	67,79	67,9	67,91	67,95	68,09	68,22	68,26	68,26
		Sasaran 1.1.3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	Persen	18,54	17,82	17,8	17,62	17,20	16,83	16,40	16,40
			Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,19	91,00	91,01-92,00	92,01-93,00	93,01-94,00	94,01-95,00	95,01-96,00	95,01-96,00



No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target						Kondisi Akhir
					2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Tujuan 2.1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase pemenuhan infrastruktur (dasar dan strategis) daerah	Persen	70,46	68,37	70,50	72,25	74,46	77,15	80,00	80,00	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	n/a	69,96	69,96-70,03	70,04-71,03	71,04-72,03	72,04-73,03	73,04-74,03	73,04-74,03	
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	186	130	130	125	120	115	110	110	
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur strategis yang memadai	Persen	66,43	55,96	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	76-80	
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai	Persen	57,88	58,90	59-62	63-68	69-72	73-78	78-85	78-85	
		Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	n/a	69,96	67,77	68,24	68,72	68,81	68,92	68,92	



No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
					2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Sasaran 2.1.4: Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	186	130	130	125	120	115	110	110
3	Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.99	0.26	1.83	3.05	4.23	4.68	4.97	4.97
		Sasaran 3.1.1: Meningkatkan pertumbuhan sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Persen	3,12	0,32	1.34	1.55	2.07	3.01	3,50	3,50
		Sasaran 3.1.2: Meningkatkan pertumbuhan investasi daerah	Realisasi investasi	Milliar	235	627	631	634	637	640	643	643
		Sasaran 3.1.3: Meningkatkan ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,44	74,54	74,54-75,00	75,00-76,50	76,50-78,00	78,00-79,50	79,50-81,00	79,50-81,00



No	Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan Dan Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
					2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	CC	B	B	BB	A	A
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	53	53	53-60	61-70	71-75	76-80	81-90	81-90
			Indeks SPBE	Nilai	2,32	2,27	2,28-2,60	2,61-2,85	2,86-3,50	3,51-4,00	4,00-4,50	4,00-4,50
			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	60,00-65,00	60,00-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00	80,01-85,00	80,01-85,00
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai pelayanan public	Nilai	NA	3,61	3,61-3,65	3,66-3,70	3,71-4,00	4,01-4,50	4,51-5,00	4,51-5,00

5.5. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas

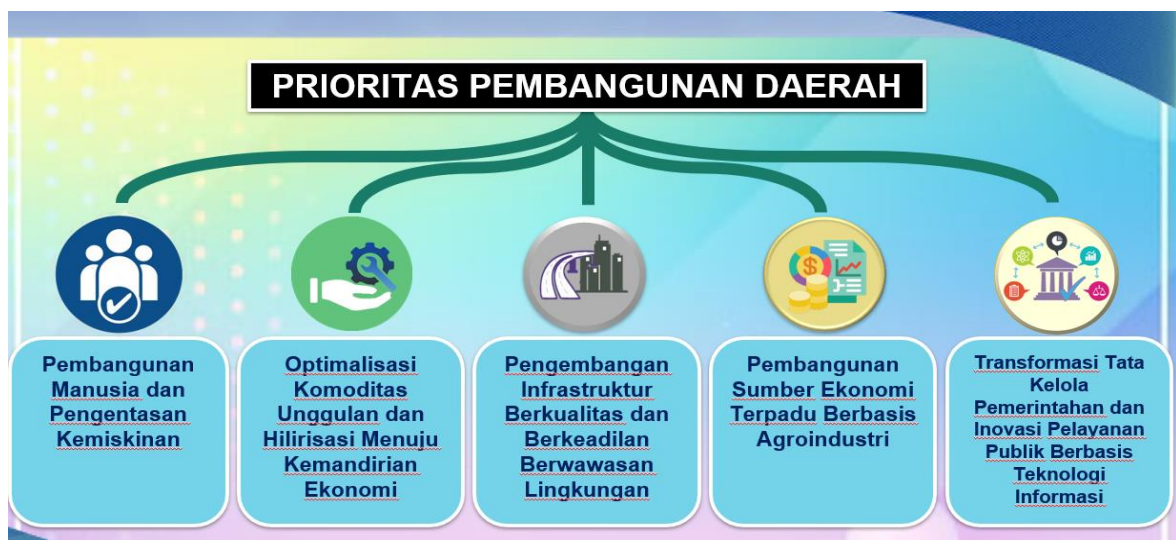
RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 memuat rumusan prioritas pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan unggulan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah, pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, yang ditetapkan berpedoman pada pencapaian target kinerja RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan, hasil evaluasi kinerja RPJMD, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan tujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah, agar pencapaian visi dan misi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun rumusan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 5.1
Prioritas Pembangunan Daerah

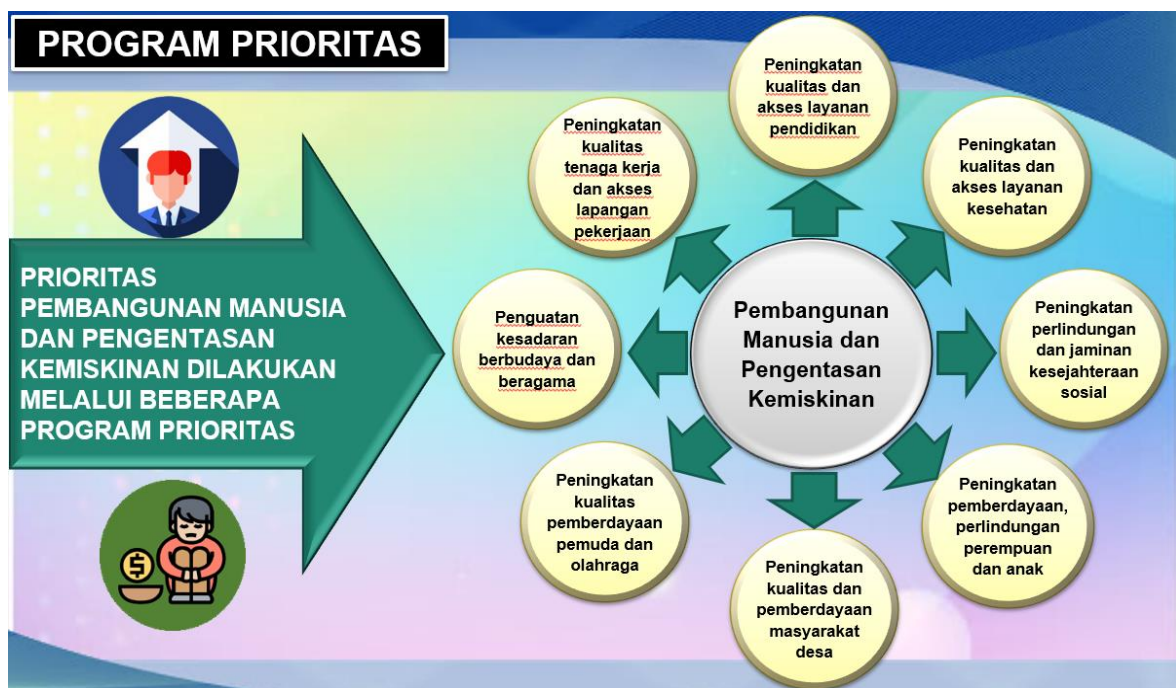


A. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah, karena dengan SDM yang berkualitas maka pelaksanaan pembangunan daerah akan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, peningkatan kualitas SDM akan berkorelasi positif pada upaya pengentasan kemiskinan, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat akan dapat terwujud dengan baik.

Untuk melaksanakan prioritas pembangunan pembangunan tersebut, disusun program prioritas untuk pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, sebagai berikut:

Gambar 5.2
Program Prioritas Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan



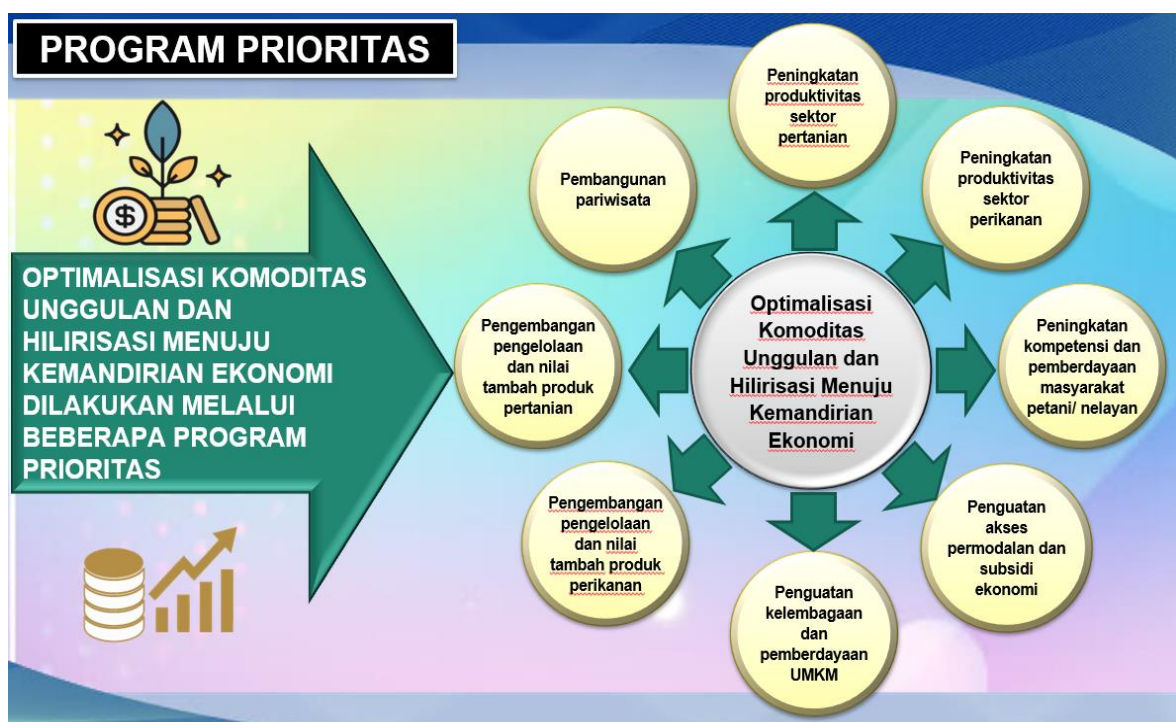
B. Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki potensi daerah yang sangat banyak, yang apabila dilakukan pengelolaan dan pengembangan dengan baik melalui hilirisasi, akan dapat memberikan nilai tambah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dimiliki

oleh Kabupaten Bengkulu Selatan diantaranya sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, perikanan dan masih banyak sektor yang lainnya.

Untuk optimalisasi produk unggulan daerah dan hilirisasi guna mewujudkan kemandirian ekonomi, dirumuskan program prioritas sebagai berikut:

Gambar 5.3
Program Prioritas Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi



C. Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas di Kabupaten Bengkulu Selatan masih belum sepenuhnya optimal, terutama infrastruktur dasar terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat Bengkulu Selatan dan infrastruktur strategis untuk mendorong terwujudnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus fokus pada upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur melalui program-program prioritas antara lain:

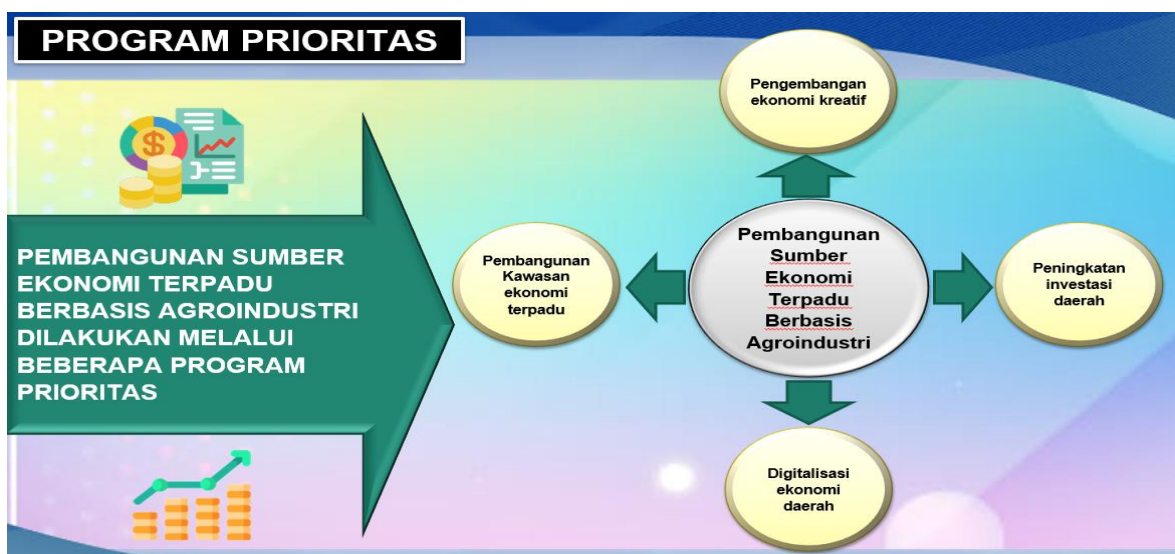
Gambar 5.4
Program Prioritas Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan



D. Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri

Dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi perlu dilakukan secara terpadu berbasis kawasan dengan memperhatikan potensi unggulan daerah. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergerak pada sektor pertanian. Untuk itu pembangunan perlu mengedepankan upaya pengembangan sektor unggulan melalui program-program prioritas, antara lain:

Gambar 5.5
Program Prioritas Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri

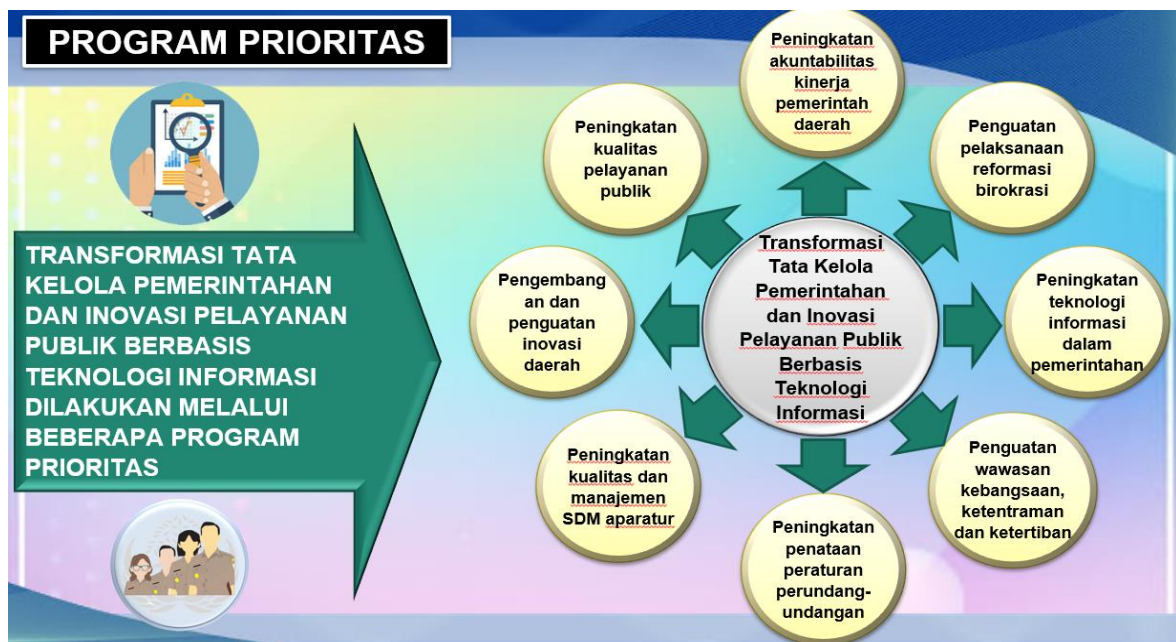


E. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik ditengah semakin majunya globalisasi pada era revolusi industri 4.0 sudah menjadi tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut harus menjadi prioritas untuk mewujudkan *good government* dan *clean governance* sehingga kualitas pelayanan publik semakin prima, yang akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Program prioritas yang dirumuskan untuk mewujudkan transformasi tata Kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan public berbasis teknologi informasi, antara lain:

Gambar 5.6
Program Prioritas Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi



Adapun keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, Isu Strategis, prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pemerintah daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.4
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas

NO	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas
1	Kemiskinan dan Pengangguran	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan 2. Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan 3. Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial 4. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak 5. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat desa 6. Peningkatan kualitas pemberdayaan pemuda dan olahraga 7. Penguatan kesadaran berbudaya dan beragama 8. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan akses lapangan pekerjaan
2	Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	1. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan 2. Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan 3. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak 4. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat desa 5. Peningkatan kualitas pemberdayaan pemuda dan olahraga 6. Penguatan kesadaran berbudaya dan beragama
3	Kedaulatan dan Ketahanan Pangan	Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi	1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian 2. Peningkatan produktivitas sektor perikanan 3. Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat petani/ nelayan 4. Penguatan akses permodalan dan subsidi ekonomi 5. Penguatan kelembagaan dan



NO	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas
			pemberdayaan UMKM 6. Pengembangan pengelolaan dan nilai tambah produk perikanan 7. Pengembangan pengelolaan dan nilai tambah produk pertanian 8. Pengembangan pariwisata
4	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi	1. Penguatan akses permodalan dan subsidi ekonomi 2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM 3. Pengembangan pengelolaan dan nilai tambah produk perikanan 4. Pengembangan pengelolaan dan nilai tambah produk pertanian 5. Pengembangan pariwisata
5	Penyediaan infrastruktur dasar strategis dan prioritas	Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan	1. Peningkatan penyediaan infrastruktur strategis yang memadai 2. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai 3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Peningkatan kualitas penataan infrastruktur perkotaan 5. Peningkatan akses dan kualitas layanan kebutuhan dasar 6. Peningkatan konektivitas untuk mendukung ekonomi 7. Peningkatan ketahanan dan kesiap-siagaan terhadap resiko bencana
6	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri	1. Pengembangan ekonomi kreatif 2. Peningkatan investasi daerah 3. Digitalisasi ekonomi daerah 4. Pembangunan Kawasan ekonomi terpadu
7	Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 2. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Peningkatan teknologi informasi dalam pemerintahan 4. Penguatan wawasan kebangsaan, ketentraman dan



NO	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas
			ketertiban 5. Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan 6. Peningkatan kualitas dan manajemen SDM aparatur 7. Pengembangan dan penguatan inovasi daerah 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
8	Penyelesaian sengketa lahan dan tapal batas antar kabupaten	Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi	1. Penguatan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maka keterkaitan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Dengan Provinsi Bengkulu dan Agenda Pembangunan Nasional

No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional
1.	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Percepatan pengentasan Kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3) 2. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)
2.	Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan	Pengembangan Infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan serta perluasan konektivitas untuk pemerataan	1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2) 2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN 5)



No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026	Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026	Keterkaitan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional
			3. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)
3.	Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi	Penguatan Ketahanan dan Transformasi Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)
4.	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Inovasi dan tata kelola Pemerintahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)
5.	Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri	Bengkulu Natural (Pengembangan pariwisata yang integratif dan kompetitif) dan ekonomi kreatif	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta memenuhi janji yang disampaikan kepada masyarakat Bengkulu Selatan pada saat kampanye, Bupati telah menetapkan prioritas daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026. Masing-masing prioritas daerah diikuti dengan program unggulan (*major project*) yang diharapkan dapat memberikan akselerasi bagi percepatan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa program unggulan (*major project*) yang digadagadag menjadi motor penggerak pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:



**Mewujudkan Optimalisasi Pengembangan
Komoditas Unggulan dan Hilirisasi
yang Berdaya Saing**

Kegiatan unggulan:

1. Penguatan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan pariwisata
 - a. Pengembangan dan penciptaan nilai tambah produk unggulan daerah melalui *re-marking* beras segininim dan beras kedurang
 - b. Pengembangan inovasi untuk penguatan hilirisasi produk unggulan daerah
 - c. Penataan destinasi dan pengembangan daya tarik pariwisata unggulan
2. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi
 - a. Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk UMKM
 - b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM
 - c. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi sebagai sendi perekonomian daerah
3. Transformasi digitalisasi perdagangan besar dan eceran, jasa dan industri kreatif
 - a. Pengembangan Kios Sekundang sebagai simpul penguatan ekonomi masyarakat dan etalase produk UMKM berbasis digital
 - b. Penguatan kemudahan berusaha untuk mendorong tumbuhnya iklim investasi daerah
 - c. Penumbuhan talenta muda yang bergerak pada industri kreatif



**Mewujudkan Infrastruktur Dasar
Dan Strategis yang Berkualitas dan
Berkeadilan**

Kegiatan unggulan:

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan
 - a. Peningkatan kualitas dan konektivitas antar daerah

- b. Pengembangan konektivitas antar kecamatan
- c. Pembangunan dan peningkatan akses menuju kawasan sentra produksi
- d. Pembangunan dan peningkatan kawasan sentra produksi Matai
- 2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan strategis
 - a. Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah, pelayanan kesehatan, dan pelayanan perlindungan sosial lainnya.
 - b. Pembangunan Pasar Tradisional Modern sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat
 - c. Pemenuhan dan peningkatan kualitas infrastruktur keselamatan jalan
 - d. Pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi
- 3. Infrastruktur TIK untuk mendukung Transformasi Digital
 - a. Membangun jaringan telekomunikasi untuk mengatasi masih adanya blankspot
 - b. Membangun koneksi internet di seluruh perangkat daerah dan area publik
 - c. Membangun jaringan radio sebagai media komunikasi alternatif



**Mewujudkan Masyarakat yang
Sejahtera, Tenteram, Harmonis dan
Agamis**

Kegiatan unggulan:

- 1. Peningkatan perlindungan dan pemberdayaan serta jaminan kesejahteraan sosial
 - a. Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan jaminan kesehatan semesta
 - b. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)



2. Peningkatan rasa aman, tenteram dan damai di tengah-tengah masyarakat
 - a. Penegakan perda dan hukum sesuai kewenangan Pemerintah Daerah,
 - b. Meningkatkan sinergi, konsolidasi dan kerjasama dalam upaya menekan angka kriminalitas
 - c. Menumbuhkan semangat got royong
 - d. Penguatan upaya mitigasi bencana
3. Penguatan nilai-nilai agama dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat
 - a. Penguatan pemberdayaan kelembagaan MUI, BMA dan stakeholder pembangunan masyarakat lainnya
 - b. Pembangunan *Islamic center* sebagai pusat peradaban Islam di Bengkulu Selatan
 - c. Melestarikan adat istiadat sebagai kekayaan daerah yang berdaya saing



**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi
yang berkelanjutan dan Inklusif**

Kegiatan unggulan:

1. Penguatan sektor unggulan pembentuk PDRB Kabupaten Bengkulu Selatan
 - a. Pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi pada sektor pertanian, salah satunya melalui PATEN
 - b. Pengembangan inovasi untuk peningkatan produksi pada sektor perikanan
 - c. Pengembangan kawasan agrominapolitan sebagai kawasan mandiri dan produktif

2. Pengembangan industri pengolahan sebagai penguat pondasi ekonomi
 - a. Menumbuhkan kawasan industri berbasis kearifan lokal
 - b. Memberdayakan UMKM
3. Pembangunan Kerjasama Antar Daerah untuk mendukung penguatan perekonomian daerah
 - a. Peningkatan kualitas dan konektivitas sebagai jalur transportasi dan mobilitas ekonomi masyarakat
 - b. Pengembangan inovasi dan transformasi teknologi
 - c. Penguatan kelembagaan kerjasama sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata dan sektor potensial lainnya.



**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih dan Melayani Didukung
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing**

Kegiatan unggulan:

1. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Penguatan implementasi reformasi birokrasi dan SAKIP secara intensif dan massif di seluruh perangkat daerah
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
 - c. Penguatan kualitas pengawasan
 - d. Penguatan implementasi pusat data terintegrasi
2. Penguatan Inovasi dan Daya Saing Daerah
 - a. Penumbuhan iklim inovasi daerah
 - b. Penguatan kelembagaan dan pengembangan inovasi daerah
 - c. Penguatan inovasi dan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Transformasi digitalisasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Pembangunan *e-government* (SPBE) melalui transformasi digital (pemanfaatan aplikasi) pada tata kelola pemerintahan



- b. Membangun *Manna Command Center* sebagai pusat pengendali *e-government* (SPBE) Bengkulu Selatan
- c. Pengembangan dan implementasi pusat data dan informasi pemerintahan terintegrasi

5.6. Korelasi Isu Strategis dengan Perumusan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

Perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah, selain memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, juga didukung dan berkorelasi dengan isu strategis yang telah ditetapkan. Berikut ini gambaran sinergitas isu strategis dengan perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini.



Tabel 5.6
Korelasi Isu Strategis dengan perumusan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Isu Strategis	Misi	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
Kemiskinan dan Pengangguran	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing	Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia			2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	
			3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	
Penyediaan infrastruktur dasar strategis dan prioritas	Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan
			2. Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan	
			3. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	



Isu Strategis	Misi	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Prioritas Pembangunan
			4. Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	
Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha (Sektor Pertanian, Perdagangan dan Jasa, dan Sektor Industri Pengolahan serta Investasi)	Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan daerah	Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi
Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	
Kedaulatan dan Ketahanan Pangan			Meningkatnya kemandirian dan kemapanan ekonomi masyarakat	Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri
Tata kelola pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Terkendalinya inflasi daerah	
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga berimbas positif mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah yang terukur dan proporsional. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

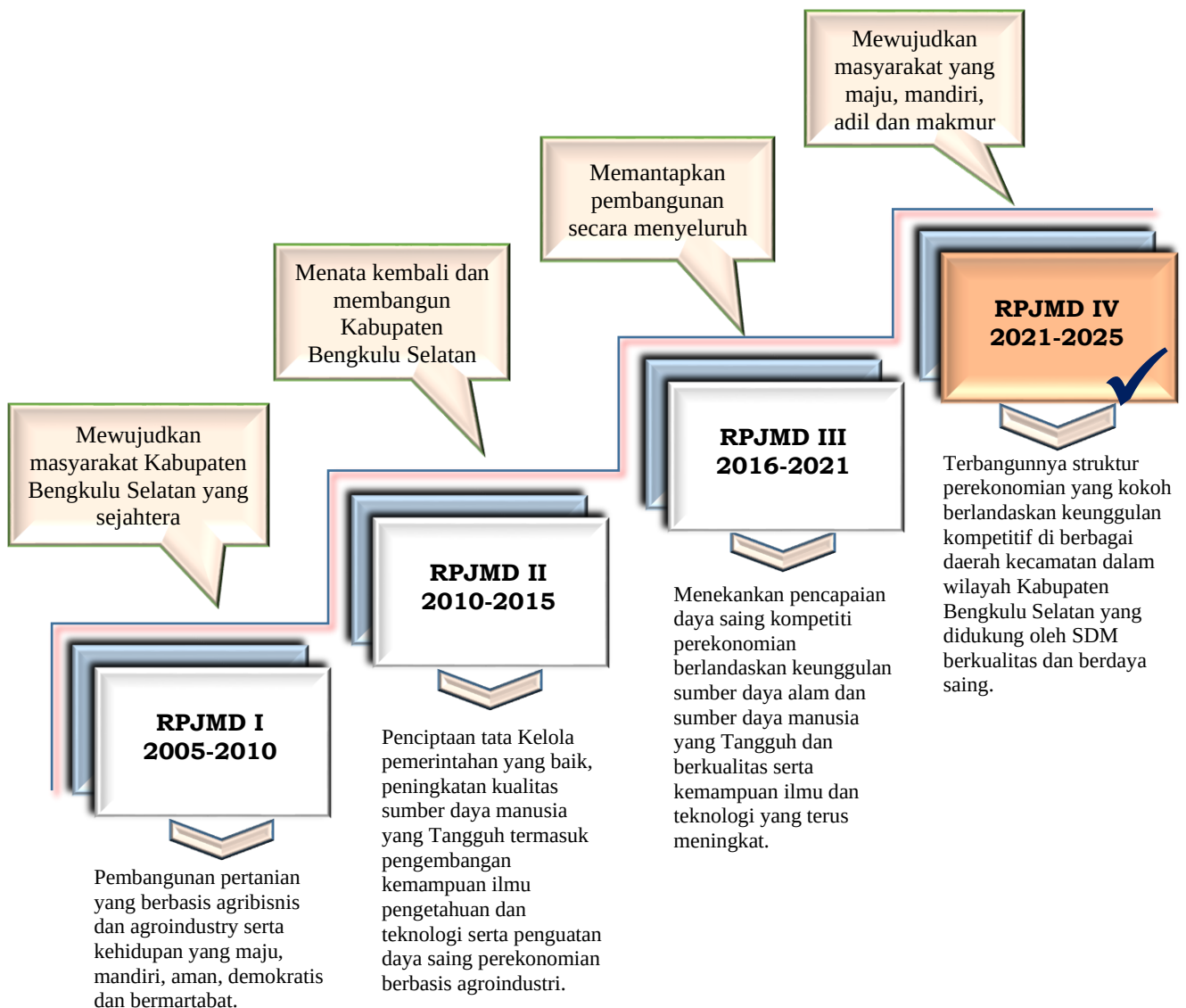
Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama 5 tahun kedepan. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan *consecutive process* dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Strategi dirumuskan dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal, yang kemudian dijabarkan dalam arah kebijakan sebagai bentuk pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026 merupakan tahap pembangunan lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa RPJMD Tahun 2021-2025 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan

masyarakat yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 disajikan pada Gambar 6.1 berikut.

Gambar 6.1
Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025

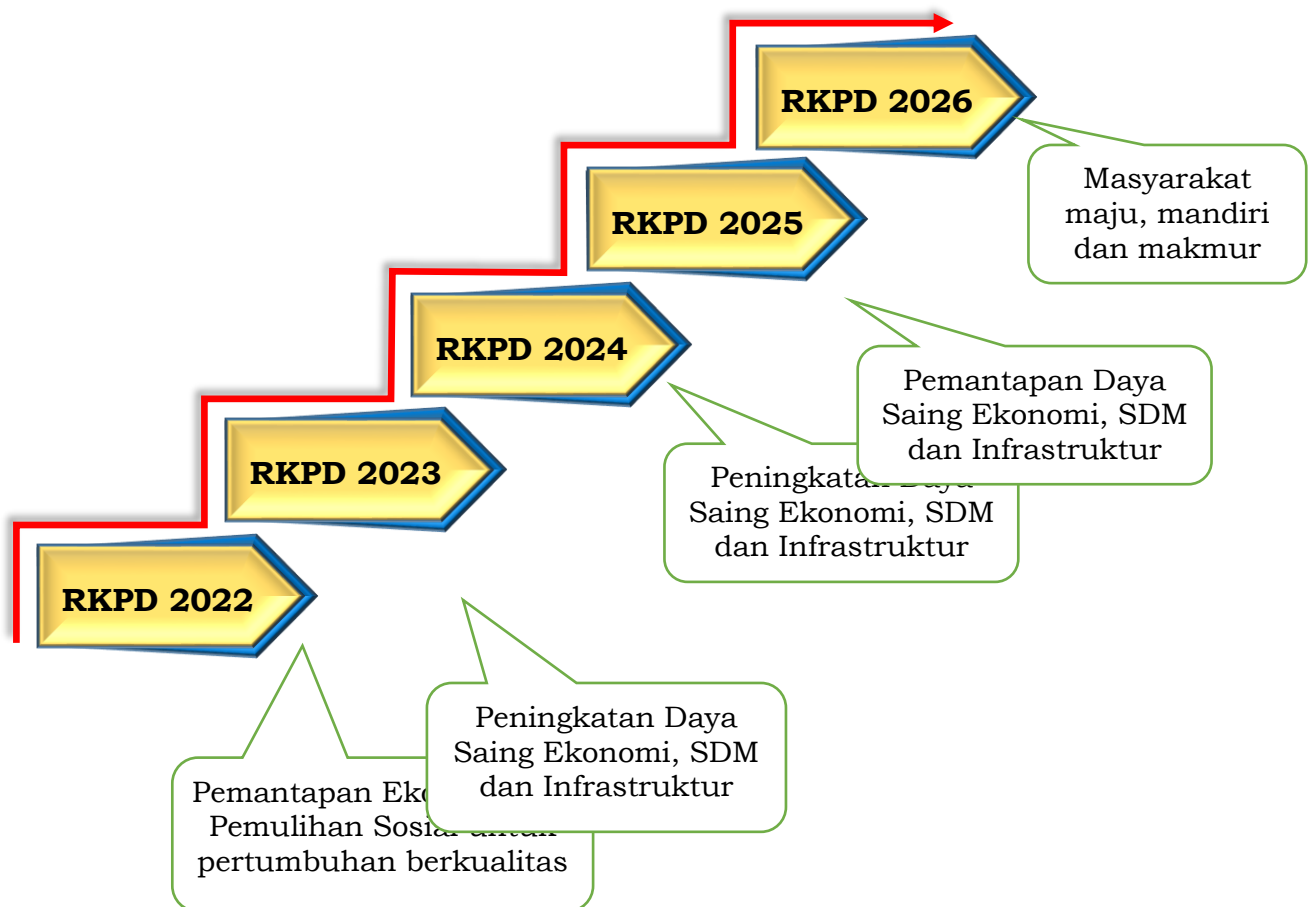


Sumber: RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025

Selanjutnya pada tahapan pembangunan jangka menengah ke-4, untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh, mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai daerah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, disusun tahapan pembangunan jangka pendek yang akan menjadi fokus/tema pembangunan dalam RKPD pada periode 2021-2026.

Fokus/Tema pembangunan jangka pendek sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.2
Fokus Tahapan Perencanaan Tahunan Selama Periode RPJMD
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026





6.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022-2026

Visi : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing				
Tujuan 1.1: Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Strategi 1.1.1.1: Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan daya saing Pendidikan	1) Peningkatan pembinaan dan pengembangan kualitas pembelajaran sekolah 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 3) Peningkatan akreditasi sekolah 4) Peningkatan kualitas penyediaan dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah 5) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam Pendidikan 7) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan sesuai standar pelayanan minimal 8) Pembangunan karakter, adab, kreativitas, inovasi dan prestasi siswa melalui penguatan muatan lokal	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan



		Strategi 1.1.1.2: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan non formal dan informal	1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan penguatan kelembagaan sekolah non formal 2) Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelatihan pada Lembaga non formal	
		Strategi 1.1.1.3: Peningkatan kualitas dan akses layanan literasi masyarakat	2) Meningkatkan layanan perpustakaan yang lebih luas dan berkualitas 3) Revitalisasi perpustakaan dan pengembangan taman bacaan 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pemustaka 5) Peningkatan kualitas dan kuantitas bahan bacaan	
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Strategi 1.1.2.1: Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan daya saing layanan kesehatan	1) Peningkatan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 2) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan 3) Peningkatan akreditasi dan standarisasi fasilitas kesehatan dasar dan rujukan 4) Meningkatkan ketersediaan sumber daya kesehatan yang berkualitas 5) Penyediaan jaminan pelayanan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat 6) Peningkatan kualitas manajemen RSUD Hasanuddin Damrah berbasis teknologi informasi 7) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit secara intensif 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas	



			promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	
		Strategi 1.1.2.2: Peningkatan kualitas kesejahteraan dan ketahanan keluarga	1) Penguatan upaya pengendalian angka kelahiran pada usia remaja 2) Peningkatan perlindungan perkawinan anak dibawah umur 3) Peningkatan kualitas hidup anak dan remaja melalui pembinaan pendidikan dan penyediaan akses informasi 4) Peningkatan kepesertaan ber-KB pada Pasangan Usia Subur 5) Peningkatan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
		Strategi 1.1.2.3: Penguatan karakter, prestasi dan inovasi Pemuda serta Peningkatan prestasi olahraga	1) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba, dan minuman keras 2) Mendorong penguatan daya saing pemuda melalui aktualisasi nilai budaya dan wawasan kebangsaan 3) Peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri, kreatif, berkompeten dan profesional 4) Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan yang produktif, untuk meningkatkan peran dalam pembangunan 5) Peningkatan kualitas penjangkaran dan pembinaan olahraga 6) Penyediaan sarana prasarana olahraga sesuai standar	
		Strategi 1.1.2.4:	1) Meningkatkan peran lembaga-	



		Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan	lembaga sosial, agama, adat, dan kemasyarakatan dalam pembentukan karakter masyarakat 2) Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya dan cagar budaya	
	Sasaran 1.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Strategi 1.1.3.1: Peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat	1) Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak 2) Memperkuat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan pemenuhan hak anak 3) Meningkatkan perlindungan, jaminan sosial dan kesehatan bagi masyarakat miskin 4) Penguatan budaya got royong, kerukunan dan saling toleransi	
		Strategi 1.1.3.2: Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja	1) Meningkatkan sertifikasi dan standarisasi kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja 2) Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan kesejahteraan ketenagakerjaan 3) Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar	
		Strategi 1.1.3.3: Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan dalam pembangunan	1) Meningkatkan peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan ketahanan keluarga 2) Meningkatkan upaya pencegahan, penanganan, dan penguatan lembaga	



			layanan perempuan dan anak korban kekerasan	
Misi 2: Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
Tujuan 2.1: Meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan	Strategi 2.1.1.1: Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan/jembatan	1) Peningkatan kualitas melalui rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kabupaten 2) Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan sesuai standar pelayanan minimal 3) Peningkatan fasilitas keselamatan jalan berkualitas	Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan
		Strategi 2.1.1.2: Pembangunan sistem pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak	1) Meningkatkan kapasitas prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 2) Meningkatkan kualitas layanan air minum perkotaan dan perdesaan 3) Meningkatkan alternatif sumber air minum yang aman bagi masyarakat	
		Strategi 2.1.1.3: Peningkatan kualitas dan kapasitas layanan keselamatan transportasi	1) Meningkatkan kapasitas infrastruktur keselamatan jalan raya 2) Meningkatkan kualitas layanan transportasi penumpang 3) Meningkatkan kualitas kendaraan umum laik jalan	
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan	Strategi 2.1.2.1: Peningkatan penyediaan sanitasi sebagai sarana dan prasarana dasar lingkungan pemukiman	1) Pembangunan dan peningkatan kualitas sanitasi di lingkungan permukiman 2) Meningkatkan kualitas penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan	



			3) Pembangunan infrastruktur permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana	
		Strategi 2.1.2.2: Menurunkan jumlah rumah tidak layak huni	1) Pemberian bantuan subsidi pembangunan rumah layak huni melalui kegiatan bedah rumah 2) Melakukan verifikasi dan validasi secara mendetail terhadap data RTLH	
	Sasaran 2.1.3: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Strategi 2.1.3.1: Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan	1) Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan 2) Meningkatkan konservasi air tanah 3) Meningkatkan ketertiban Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4) Meningkatkan pemantauan usaha/ kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan	
		Strategi 2.1.3.1: Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	1) Mengoptimalkan sosialisasi terhadap wawasan lingkungan 2) Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 3) Meningkatkan pantauan pada perusahaan dalam menaati dokumen lingkungan 4) Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara	
		Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	1) Meningkatkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 2) Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 3) Meningkatkan pemeliharaan taman kota dan perindang jalan	



	Sasaran 2.1.4: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Strategi 2.1.4.1: Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1) Melakukan pengurangan risiko bencana melalui pencegahan dan peningkatan kesiapsiagaan bencana 2) Peningkatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana 3) Peningkatan desa tangguh bencana 4) Penyediaan sarana prasarana dan alokasi anggaran untuk penanganan bencana	
Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing				
Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya laju pertumbuhan sektor unggulan daerah	Strategi 3.1.1.1: Penguatan dan pengembangan sektor unggulan daerah	1) Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pariwisata 2) Peningkatan kualitas dan daya saing perdagangan melalui transformasi digital 3) Penguatan pengembangan dan pembinaan kawasan budidaya perikanan 4) Penguatan nilai tambah produk melalui pengolahan pasca panen 5) Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang	Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Strategi 3.1.2.1: Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing	1) Peningkatan kualitas layanan perizinan yang responsive, mudah dan cepat melalui pelayanan terintegrasi secara elektronik 2) Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan 3) Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan	



			penanaman modal dan perizinan	Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri
		Strategi 3.1.2.2: Meningkatkan kualitas koordinasi pengendalian inflasi daerah	1) Menjamin ketersediaan pasokan dan distribusi 2) Penguatan koordinasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan 3) Menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah	
		Strategi 3.1.2.3: Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah	1) Meningkatkan daya saing UMKM melalui pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku ekonomi kreatif 3) Penyediaan ameniti berkualitas, serta peningkatan kualitas atraksi pariwisata dan ekonomi kreatif 4) Membangun dan mengembangkan destinasi serta produk pariwisata 5) Peningkatan kuantitas dan kualitas atraksi pariwisata dalam rangkaian festival 6) Membangun Kawasan ekonomi berbasis agroindustri 7) Pengembangan desa wisata 8) Peningkatan produksi pertanian dengan mengembangkan kawasan berbasis pertanian melalui adopsi teknologi tepat guna	
		Strategi 3.1.2.4: Meningkatkan pendampingan dan pembinaan usaha mikro	1) Mendorong pengembangan industri olahan, industri kreatif dan industri mikro lainnya 2) Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha	



			mikro 3) Meningkatkan akses pasar produk Industri Kecil Menengah	
		Strategi 3.1.2.5: Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat	1) Mengembangkan BUMDes Potensial dan produktif 2) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan penguatan kelembagaan BUMDes	
	Sasaran 3.1.3: Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Strategi 3.1.3.1: Meningkatkan ketahanan pangan daerah	1) Mendorong keragaman pola konsumsi dan meningkatkan kewaspadaan pangan 2) Meningkatkan kualitas pengolahan produk budidaya peternakan, perikanan dan pertanian 3) Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam	Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				
Tujuan 4.1: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Strategi 4.1.1.1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif	1) Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan. 2) Peningkatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 3) Peningkatan Pengelolaan Satu Data	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi



			Pembangunan. 4) Menjamin implementasi intervensi 8 area perubahan secara massif 5) Keterbukaan informasi publik, transparansi, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan 6) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata laksana Pemerintahan 7) Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja 8) Peningkatan kualitas sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa	Informasi
		Strategi 4.1.1.2: Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1) Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan, pengukuran perencanaan dan evaluasi perencanaan 2) Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai basis perencanaan dan penganggaran selanjutnya 3) Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP 4) Peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan pemerintah desa	
		Strategi 4.1.1.3: Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah	1) Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 2) Peningkatan dan Penguatan profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	



		Strategi 4.1.1.4: Peningkatan kualitas pengelolaan dan kemandirian keuangan daerah	1) Meningkatkan kualitas Tata kelola keuangan daerah, dan Laporan Keuangan Daerah 2) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel 3) Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui optimalisasi potensi sumber-sumber Pendapatan 4) Menjamin penyusunan LKPD yang berkualitas dan tepat waktu	
		Strategi 4.1.1.5: Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah	1) Peningkatan integritas, professional dan kompetensi Aparatur 2) Meningkatkan kinerja dan disiplin ASN 3) Peningkatan kualitas manajemen pengembangan karir aparatur 4) Mengoptimalkan Pengawasan Melekat 5) Meningkatkan Tunjangan ASN Berbasis Kinerja	
		Strategi 4.1.1.6: Pembangunan iklim inovasi dan penguatan daya saing daerah	1) Penyediaan dan penguatan regulasi tentang pengembangan inovasi daerah 3) Pengembangan kegiatan Riset Berbasis Kebutuhan 4) Meningkatkan Kualitas dan kompetensi SDM Peneliti 5) Inventarisasi Permasalahan yang Membutuhkan Litbang dan Inovasi	
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Strategi 4.1.2.1: Menciptakan pelayanan publik yang terpadu,	1) Peningkatan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik	



		cepat, mudah dan inklusif	2) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Publik. 3) Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis SPBE	



6.1.1. Strategi Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Guna mendorong pencapaian visi pembangunan daerah, telah dirumuskan misi sebagai langkah strategis untuk perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya, dalam rangka memberikan panduan dalam pencapaian misi, disusun strategi pada masing-masing misi, sehingga dapat menjadi panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut

1. Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

Misi pertama yaitu mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, sejahtera dan berdaya saing, memiliki tujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing. Misi pertama ini menjadi motor penggerak pada upaya mencapai masyarakat Bengkulu Selatan yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi dengan semangat CINTA BS.

Untuk mewujudkan SDM yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing, akan dilaksanakan pembangunan dengan sasaran, pertama: meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, kedua: meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan ketiga: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sasaran yang pertama yaitu meningkatnya derajat pendidikan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan akses dan kualitas serta pemerataan layanan pendidikan yang terstandarisasi, meningkatkan kualitas baik dari sisi kualifikasi, kompetensi serta kesejahteraan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, dan meningkatkan akses dan kualitas literasi guna meningkatkan minat baca masyarakat.

Pada sasaran yang kedua yaitu meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan akses dan



kualitas serta pemerataan layanan kesehatan yang terstandarisasi, dan meningkatkan kualitas fasilitas dan tenaga kesehatan. Disamping itu, guna mendorong pencapaian angka harapan hidup yang tinggi, strategi yang juga dirumuskan adalah meningkatkan kualitas pembangunan keluarga sejahtera melalui pengendalian pertumbuhan penduduk, penciptaan ketentraman dan ketertiban serta daya saing pemuda.

Pada sasaran yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat strategi yang dilakukan adalah mendorong penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kemandirian PMKS, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pencapaian misi pertama ini, dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan beberapa program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan
2. Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan
3. Peningkatan perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial
4. Peningkatan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak
5. Peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat desa
6. Peningkatan kualitas pemberdayaan pemuda dan olahraga
7. Penguatan kesadaran berbudaya dan beragama
8. Peningkatan kualitas tenaga kerja dan akses lapangan pekerjaan

2. Misi II : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi Kedua yaitu memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, memiliki tujuan meningkatnya pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan. Misi kedua ini menjadi motor penggerak pada mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui penyediaan infrastruktur dasar dan strategis yang memadai dan berkualitas, namun tetap memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.



Untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, akan dilaksanakan pembangunan dengan sasaran, pertama: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan, kedua: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan, ketiga: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan keempat: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

Pada sasaran yang pertama yaitu meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis, strategi yang dilakukan adalah meningkatkan pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan dan infrastruktur strategis lainnya secara berkelanjutan, pembangunan dan pengembangan layanan air minum yang berkualitas dan terintegrasi, serta peningkatan kualitas dan kapasitas layanan keselamatan transportasi.

Pada sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan, strategi yang dilakukan adalah pembangunan dan peningkatan pemenuhan sanitasi yang layak sebagai sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, dan melakukan pembangunan terhadap rumah tidak layak huni.

Pada sasaran yang ketiga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, strategi yang dilakukan adalah Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan, Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup, dan Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik.

Pada sasaran yang keempat yaitu Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana, strategi yang dilakukan adalah Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.

Pencapaian misi kedua ini, dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu Pengembangan Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan Berwawasan Lingkungan, dengan beberapa program prioritas, yaitu:



1. Peningkatan penyediaan infrastruktur strategis yang memadai
2. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
4. Peningkatan kualitas penataan infrastruktur perkotaan
5. Peningkatan akses dan kualitas layanan kebutuhan dasar
6. Peningkatan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
7. Peningkatan ketahanan dan kesiap-siagaan terhadap resiko bencana

3. Misi III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

Misi Ketiga yaitu membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. Misi ketiga ini menjadi motor penggerak pada upaya mewujudkan kemandirian dan kemantapan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing, sehingga dapat mendorong terciptanya akselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing, akan dilaksanakan pembangunan dengan sasaran, pertama: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, kedua: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, dan ketiga: Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

Pada sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah, strategi yang dilakukan adalah memberikan Penguatan dan pengembangan sektor unggulan daerah, Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah dan Meningkatkan pendampingan serta pembinaan usaha mikro.

Pada sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah, strategi yang dilakukan adalah Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing, Meningkatkan kualitas koordinasi pengendalian inflasi daerah, dan Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Perdesaan dalam menggerakkan perekonomian.



Pada sasaran yang ketiga untuk Meningkatnya ketahanan pangan daerah, strategi yang dilakukan adalah Meningkatkan ketahanan pangan daerah, melalui pemberdayaan masyarakat secara produktif.

Pencapaian misi ketiga ini, dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu Optimalisasi Komoditas Unggulan dan Hilirisasi Menuju Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Sumber Ekonomi Terpadu Berbasis Agroindustri, dengan beberapa program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan produktivitas sektor perikanan
3. Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan masyarakat petani/ nelayan
4. Penguatan akses permodalan dan subsidi ekonomi
5. Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan UMKM
6. Pengembangan pengelolaan dan nilai tambah produk perikanan
7. Pengembangan pengelolaan dan nilai tambah produk pertanian
8. Pengembangan pariwisata
9. Pengembangan ekonomi kreatif
10. Peningkatan investasi daerah
11. Digitalisasi ekonomi daerah
12. Pembangunan Kawasan ekonomi terpadu

4. Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Misi Keempat yaitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. Misi keempat ini digadang-gadang menjadi motor penggerak pada upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, transparan dan professional yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Bengkulu Selatan.

Untuk mewujudkan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis



teknologi informasi, akan dilaksanakan pembangunan dengan sasaran, yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Pada sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, strategi yang dilakukan adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Penguatan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah, Peningkatan kualitas pengelolaan dan kemandirian keuangan daerah, Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah serta Pembangunan iklim inovasi dan penguatan daya saing daerah.

Pada sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, strategi yang dilakukan adalah Menciptakan pelayanan publik yang terpadu, cepat, mudah dan inklusif berbasis teknologi informasi.

Pencapaian misi keempat ini, dilakukan melalui pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi, dengan beberapa program prioritas, yaitu:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
2. Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Peningkatan teknologi informasi dalam pemerintahan
4. Penguatan wawasan kebangsaan, ketentraman dan ketertiban
5. Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan
6. Peningkatan kualitas dan manajemen SDM aparatur
7. Pengembangan dan penguatan inovasi daerah
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

6.1.2. Pengarusutamaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan daerah, dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif



dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara efektif dan efisien serta akuntabel. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan yang masih tersendat.

A. Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Di Indonesia, komitmen untuk mendukung pencapaian SDGs tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59



Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dirumuskan beberapa strategi yang menjadi kebijakan daerah, yaitu:

Tabel 6.2
Strategi Pencapaian TPB/SDGs
Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022-2026

No	Tujuan TPB/SDGs	Strategi Pencapaian Target TPB/SDGs
1.	Tanpa Kemiskinan	1. Optimalisasi pemberian bantuan sosial melalui program jaminan perlindungan sosial 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program ekonomi produktif terutama pada sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, dll) yang disupport dengan inovasi 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pembinaan dan pelatihan untuk mendorong tumbuhan kemampuan berusaha masyarakat
2.	Tanpa Kelaparan	1. Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan dan meningkatkan pilihan makanan sehat; 2. Meningkatkan produksi sektor pertanian terutama yang didukung inovasi pertanian; 3. Memperkuat promoso perubahan sosial dan perilaku dalam konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan diet; 4. Memperluas penyediaan makanan untuk masyarakat yang rentan melalui program perlindungan sosial, termasuk perluasan makanan sumber protein serta makanan untuk bayi dan anak kecil; 5. Percepatan pengurangan stunting
3.	Kehidupan Sehat dan	1. Meningkatkan kesejahteraan dan



No	Tujuan TPB/SDGs	Strategi Pencapaian Target TPB/SDGs
	Sejahtera	pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan; 2. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; dan 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (<i>universal health coverage</i>) dan penguatan kualitas pelayanan kesehatan
4.	Pendidikan Berkualitas	1. Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan dasar melalui program BOSDA 2. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik 3. Meningkatkan ketersediaan sarana-prasana yang memadai
5.	Kesetaraan Gender	1. Mewujudkan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi Kabupaten Layak Anak 2. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
6.	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1. Mengupayakan penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman dilaksanakan dengan kebijakan peningkatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas penyelenggara untuk penyediaan air minum layak maupun aman; 2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam layanan pengelolaan sanitasi; 3. Melaksanakan pembangunan untuk penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku.
7.	Energi Bersih dan terjangkau	1. Membangun koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu (sesuai



No	Tujuan TPB/SDGs	Strategi Pencapaian Target TPB/SDGs
		kewenangan) terkait upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat (rasio elektrofikasi) 2. Meningkatkan kinerja dan iklim investasi untuk penyediaan energi bersih dan terjangkau
8.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	1. Mendorong penguatan pembinaan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan; 2. Mempercepat penerapan inovasi sektor ekonomi diantaranya kios sekundang, CPO mini, dan lain-lain. 3. Meningkatkan nilai tambah pada produk unggulan daerah melalui hilirisasi
9.	Industri, inovasi dan infrastruktur	1. Meningkatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan 2. Meningkatkan nilai tambah pada sektor industri pengolahan 3. Membangun dan mengembangkan pemanfaatan infrastruktur TIK; 4. Mengembangkan iklim inovasi daerah untuk penguatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi
10.	Berkurangnya kesenjangan	1. Membangun koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan daerah 2. Memperkuat pelaksanaan program jaminan dan perlindungan sosial 3. Meningkatkan konektivitas melalui penyediaan infrastruktur yang memadai 4. Melakukan pembangunan berbasis kawasan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan
11.	Kota dan komunitas berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan limbah dan pengurangan sampah kabupaten; 2. Meningkatkan upaya mitigasi bencana guna menciptakan daerah tangguh



No	Tujuan TPB/SDGs	Strategi Pencapaian Target TPB/SDGs
		bencana 3. Mempercepat penanganan kawasan kumuh
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup agar melalui penanganan sampah dan limbah yang lebih baik
13.	Penanganan perubahan iklim	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAD-GRK dan adaptasi; 2. Peningkatan upaya mitigasi untuk peningkatan ketahanan bencana dan iklim
14.	Ekosistem Laut	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan praktek perikanan berkelanjutan kepada masyarakat nelayan, 2. Membangun koordinasi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu sesuai kewenangan
15.	Ekosistem daratan	1. Meningkatkan upaya penanganan dan Pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup; 2. Meningkatkan koordinasi dalam upaya menjaga kawasan hutan
16.	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	1. Meningkatkan kesadaran, ketentraman dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Melestarikan dan mengembangkan budaya-budaya yang bersumber dari kearifan lokal 3. Memperkuat peran dan fungsi serta kelembagaan lembaga-lembaga agama dan adat

B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.



Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Dalam rangka percepatan pemenuhan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 2 tahun 2018 dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018, maka SPM yang diterapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar
3. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan
4. Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil
5. Melaksanakan pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin
6. Melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
7. Melaksanakan pelayanan kesehatan balita
8. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
9. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia produktif;
10. Melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
11. Melaksanakan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
12. Melaksanakan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
13. Melaksanakan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan berat
14. Melaksanakan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
15. Melaksanakan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.



16. Memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari
17. Menyediakan pelayanan pengolahan air limbah domestik
18. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
19. Melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
20. Memberikan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
21. Memberikan pelayanan informasi rawan bencana
22. Melaksanakan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
23. Melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
24. Melaksanakan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
25. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
26. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
27. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
28. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
29. Melaksanakan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi *guidance* dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya, sehingga program pembangunan daerah dapat berjalan pada *track*-nya sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2021-2026 sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah



Secara rinci, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut:



Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan SDM, Infrastruktur Dan Sektor Unggulan Daerah Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Hilirisasi Komoditi Unggulan didukung SDM dan Infrastruktur Berkualitas	Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan	Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat didukung Kemandirian Ekonomi dan SDM Berdaya Saing	Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kabupaten Bengkulu Selatan Sejahtera, Maju, dan Mandiri



1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan untuk **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Pembangunan SDM, Infrastruktur Dan Sektor Unggulan Daerah Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berdaya Saing”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial akibat pandemi Covid-19;
- b. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
- c. Pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- d. Pengembangan sektor unggulan menuju daya saing ekonomi daerah;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan strategis
- f. Pemantapan transformasi digital tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi guna percepatan pembangunan e-government
- g. Peningkatan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada **“Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Hilirisasi Komoditi Unggulan didukung SDM dan Infrastruktur Berkualitas”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Hilirisasi komoditi unggulan untuk penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi;
- e. Penguatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi



- f. Peningkatan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan pada **“Peningkatan Kesejahteraan dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkelanjutan”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- e. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
- f. Peningkatan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan pada **“Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat didukung Kemandirian Ekonomi dan SDM Berdaya Saing”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;



- d. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- e. Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.
- f. Peningkatan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan pada **“Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kabupaten Bengkulu Selatan Sejahtera, Maju, dan Mandiri”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan;
- d. Penguatan daya saing dan pemantapan ketahanan ekonomi daerah yang inklusif dan mandiri;
- e. Penguatan implementasi reformasi birokrasi secara berkualitas dengan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel menuju Bengkulu Selatan berwibawa.
- f. Peningkatan sinergitas dan integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan desa

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 tahun merupakan program teknis yang akan dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Bengkulu Selatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	MISI I : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING																	
	Tujuan 1.1: Mewujudkan sumber daya manusia yang sejahtera, berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,63	70,63	70,95		71,27		71,38		71,67		71,98		71,98		
	Sasaran 1.1.1: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,61	13,79		13,89		13,90		13,97		14,05		14,05		
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,26	9,26	9,26		9,29		9,39		9,49		9,60		9,60		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah SD Terakreditasi A 50 %	%		50%	50%	39,755,851	50%	39,755,851	55%	40,153,410	55%	40,554,944	60%	40,960,493	0.6	40,960,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Sekolah SMP Terakreditasi A 50 %	%		50%	50%		50%		55%		55%		60%		0.6		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Siswa Lulus SD 100%	%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Lulusan Siswa SMP 100%	%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Rata-rataUjian Nasional (UN) SD 7,00	Angka		7	7		7		8		8		8		8		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP 8,00	Angka		8	8		8		9		9		9		9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kurikulum yang Tersusun 100%	Angka	1	1	1	110,000	1	110,000	1	111,100	2	112,211	2	113,333	2	113,333	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpeta dan Terdistribusi sesuai kebutuhan 100%	%	100	100	100	412,500	100	412,500	100	416,625	100	420,791	100	424,999	100	424,999	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Diberikan Izin	%	100	100	100	165,000	100	165,000	100	166,650	100	168,317	100	170,000	100	170,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Gemar Membaca	%		70	70	330,935	75	330,935	78	334,244	80	337,587	81	340,963	81	340,963	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Sasaran 1.1.2: Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	67,9	67,9	67,91		67,95		68,09		68,22		68,26		68,26	Dinas Kesehatan	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Angka Kesakitan Menurun	%		60	60	45,218,515	50	45,218,515	40	45,670,700	30	46,127,407	15	46,588,681	15	46,588,681	Dinas Kesehatan
		Presentase Kepuasan Masyarakat Meningkat	%		60	60		70		80		85		90		90		Dinas Kesehatan
		persentase cakupan kunjungan antenatal dan penerapan standar 10T	%		90	90		92		95		98		100		100		Dinas Kesehatan
		persentase cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	%		91	91		93		95		98		100		100		Dinas Kesehatan
		angka kematian ibu dan bayi rendah	%		3	3		2		2		2		2		2		Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (sd 14%/Desa)	%		16	16		15		14		14		14		14		Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Bumil KEK dan Anemia (sd 10%)	%		12	12		11		10		10		10		10		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi dan Lansia (45-85%)	%		45	45		55		65		75		85		85		Dinas Kesehatan
		Persentase Posyandu Aktif (51%-90%)	%		51	51		60		70		80		90		90		Dinas Kesehatan
		Cakupan Pengukuran Kebugaran Bagi Pekerja (15-35%)	%		60	60		70		80		85		90		90		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa Stop BABS dan Cakupan Penghunanan air Minum (62%-80%)	%		60	60		70		80		90		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kel Sehat	%		80	80		100		120		140		158		158		Dinas Kesehatan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Persentase penyakit tidak menular dan kesehatan yang ditangani	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		persentase Calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Tercapainya IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 95% dan UCI (United Child immunization) di wilayah puskesmas(80 %)	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Tidak terjadi KLB	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase penyakit menular langsung dan tidak langsung yang ditangani	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan	%		100	100	614,069	100	614,069	100	620,210	100	626,412	100	632,676	100	632,676
		Persentase SDM yang Terstandarisasi	%		70	70		80		90		100		100		100		Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentasi mutu pelayanan kefarmasian meningkat	%		75	75	629,525	75	629,525	80	635,820	83	642,178	94,5	648,600	94,5	648,600	Dinas Kesehatan
		Persentase TPM dan DAM memenuhi Standar Kesehatan	%		62	62	70	70		72		74		76		76		Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Lembaga yang Berpartiisi dalam Promkes	Angka		4	4	1,069,181	6	1,069,181	10	1,079,873	13	1,090,672	15	1,101,578	15	1,101,578	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa yang Menegakkan GERMAS	%		50	50		55		60		65		70		70		Dinas Kesehatan
	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah persentase penurunan angka pertumbuhan penduduk			2,31	2,31	30,000	2,3	30,000	2,29	30300	2,27	30603	2,26	30909.03	2,26	30909.03	Dinas PPKBPPPA
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kesertaan ber KB			44	44	3.228.329	44	3.228.329	44	3260612.29	44	3293218.413	44	3326150.597	44	3326150.597	Dinas PPKBPPPA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Jumlah Ketersediaan Alokon di atas kebutuhan Alokon dan kepuasan akseptor peserta KB aktif	Faskes		20	20		22		24		25		26		26	Dinas PPKBPPPA	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase jumlah keluarga yang statusnya pra sejahtera	%		20	20	43,304	40	43,304	60	43737.04	80	44174.4104	100	44616.1545	100	44616.1545	Dinas PPKBPPPA
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	Orang		230	230	1,050,000	238	1,050,000	240	1,060,500	243	1,071,105	290	1,081,816	290	1,081,816	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat pelajar	Cabang Olahraga		8	8	900,000	12	900,000	16	909,000	20	918,090	22	927,271	22	927,271	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus kepanduan yang aktif dan produktif	%		70	70	900,000	80	900,000	90	909,000	100	918,090	100	927,271	100	927,271	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kegiatan Keagamaan	%		85	85	6,394,929	90	6,394,929	90	6,458,878	95	6,523,467	95	6,588,702	95	6,588,702	Bagian Kesra
		Persentase kegiatan Evaluasi Kesejahteraan sosial yang dilaksanakan	%		85	85		90		90		95		95		95		Bagian Kesra
		Persentase kegiatan kemasyarakatan yang terealisasi	%		85	85		90		90		95		95		95		Bagian Kesra
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						8,323,514		8,323,514		8,406,749		8,490,817		8,575,725		8,575,725	Satpol PP dan Damkar
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran gangguan trantibum yang terselesaikan	%		90	90	475,000	90	475,000	90	479,750	90	484,548	90	489,393	90	489,393	Satpol PP dan Damkar
		Cakupan penegakan perda dan perkara	%		90	90		90		90		90		90		90		Satpol PP dan Damkar
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan dan Sarpras Pemadam Kebakaran	%		75	75	250,000	75	250,000	75	252,500	75	255,025	75	257,575	75	257,575	Satpol PP dan Damkar
	Sasaran 1.1.3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	%	17,82	17,8	17,8		17,62		17,20		16,83		16,40		16,40		
Indeks Pembangunan Gender		Angka	91,00	91,01-92,00	91,01-92,00		92,01-93,00		93,01-94,00		94,01-95,00		95,01-96,00		95,01-96,00			
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan tenaga kerja					25,410		25,410		25,664		25,921		26,180		26,180	Dinas Nakertrans	



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdidik			20	20	25,027	20	25,027	20	25,277	20	25,530	20	25,785	20	25,785	Dinas Nakertrans
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%		71,5	71,5	35,047	71,56	35,047	71,59	35,397	80	35,751	80,01	36,109	80,01	36,109	Dinas Nakertrans
	Program Hubungan Industrial	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha	%		5	5	102,025	5	102,025	4	103,045	4	104,076	3	105,116	3	105,116	Dinas Nakertrans
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan diberdayakan	%		75	75	374,916	60	374,916	60	378,665	60	382,452	60	386,276	60	386,276	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dan mendapatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap jumlah PMKS	%		80	80	211,723	80	211,723	80	213,840	80	215,979	80	218,138	80	218,138	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase keluarga miskin yang mendapat jaminan sosial	%		56	56	165,000	65	165,000	75	166,650	85	168,317	95	170,000	95	170,000	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan bencana	%		100	100	152,882	100	152,882	100	154,411	100	155,955	100	157,514	100	157,514	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah makam pahlawan yang di kelola dengan baik	Angka	1	1	1	37,002	1	37,002	1	37,372	1	37,746	1	38,123	1	38,123	Dinas Sosial
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan kualitas adminitrasi Desa	%		20	20	1,055,000	20	1,055,000	20	1,065,550	20	1,076,206	20	1,086,968	20	1,086,968	Dinas PMD
		Persentase Peningkatan Aparatur Bumdes dan Perencanaan Desa	%		15	15		15		20		25		25		25		Dinas PMD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa	%		15	15	460,000	15	460,000	20	464600	25	469246	25	473938.46	25	473,938	Dinas PMD
		Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasvarakatan	%		20	20		20		20		20		20		20		Dinas PMD



Kod e	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Diskriminasi terhadap perempuan menurun	%	50	50	350,000	60	350,000	70	353500	80	357035	90	360605.35	90	360605.35	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan kasus tindak lanjut atas kasus kekerasan perempuan	Kasus	20	20	31,500	18	31,500	16	31815	15	32133.15	10	32454.4815	10	32454.4815	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	65	65	33,200	75	33,200	80	33532	90	33867.32	95	34205.9932	95	34205.9932	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kasus Kekerasan Terhadap Anak	Kasus	7	7	63,999	10	63,999	12	64638.99	15	65285.3799	18	65938.2337	18	65938.2337	Dinas PPKBPPPA	
		MISI II : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR BERKEADILAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN																	
		Tujuan 2.1: Meningkatkan pemerataan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase pemenuhan infrastruktur (dasar dan strategis) daerah	Persen	70,46	68,37	70,50		72,25		74,46		77,15		80,00		80,00		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	n/a	69,96	69,96-70,03		70,04-71,03		71,04-72,03		72,04-73,03		73,04-74,03		73,04-74,03		
			Indeks Resiko Bencana	Indeks	186	130	130		125		120		115		110		110		
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur strategis yang memadai	Persen	66,43	55,96	56-60		61-65		66-70		71-75		76-80		76-80		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase layanan jaringan irigasi	%		50	50	6,800,000	55	6,800,000	60	6,868,000	65	6,936,680	70	7,006,047	70	7,006,047	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik	Meter		2.500	2.500	3,650,000	2.500	3,650,000	2.500	3,686,500	2.500	3,723,365	2.500	3,760,599	2.500	3,760,599	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang Layak	Unit		2	2	500,000	2	500,000	2	505,000	2	510,050	2	515,151	2	515,151	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pelayanan berfungsi baik	Unit		2	2	5,050,000	2	5,050,000	2	5,100,500	2	5,151,505	2	5,203,020	2	5,203,020	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah bangunan pelayanan berfungsi baik	Unit		10	10	2,252,626	10	2,252,626	10	2,275,152	10	2,297,904	10	2,320,883	10	2,320,883	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi Mantap dan jembatan dalam kondisi baik	%		55	55	29,650,000	56,60	29,650,000	58	29,946,500	59,50	30,245,965	61	30,548,425	61	30,548,425	Dinas PUPR



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase layanan kualitas Jasa Konstruksi	%		100	100	400,000	100	400,000	100	404,000	100	408,040	100	412,120	100	412,120	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan terhadap Tata Ruang Kabupaten	%		100	100	400,000	100	400,000	100	404,000	100	408,040	100	412,120	100	412,120	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan Angkutan umum	%		30	30	579,000	40	579,000	50	584,790	60	590,638	70	596,544	70	596,544	Dinas Perhubungan
		Persentase Angka Pelanggaran Lalu Lintas	%		50	50		40		30		20		10		10	-	Dinas Perhubungan
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%		50	50		55		60		65		70		70	-	Dinas Perhubungan
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan pemukiman transmigrasi pada Tahap Kemandirian	Kawasan		1	1	23,784.00	1	23,784.00	1	24,022	1	24,262	1	24,505	1	24,505	Dinas Nakertrans
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase persebaran penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kawasan		1	1	24,998.00	1	24,998.00	1	25,248	1	25,500	1	25,755	1	25,755	Dinas Nakertrans
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan pemukiman transmigrasi pada Tahap Kemandirian	Kawasan		1	1	40,574.00	1	40,574.00	1	40,980	1	41,390	1	41,803	1	41,803	Dinas Nakertrans
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan	Persentase pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai	Persen	57,88	58,90	59-62		63-68		69-72		73-78		78-85		78-85	-	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki SR (Sambungan Rumah) Sumber Daya Air Bersih	SR		1.000	1.000	8,097,374	700	8,097,374	1.000	8,178,348	1.200	8,260,131	1.500	8,342,733	1.500	8,342,733	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang memiki sanitasi Layak dan Sesuai Standar	SR		1.900	1.900	4,593,292	1.200	4,593,292	1.100	4,639,225	1.000	4,685,617	1.000	4,732,473	1.000	4,732,473	Dinas PUPR
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyelesaian rumah tidak layak huni	%		10	10	168,982	15	168,982	20	170,672	20	172,379	20	174,102	20	174,102	Dinas Perkim	
Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang layak dan berkualitas	%		60	60	2,640,000	70	2,640,000	80	2,666,400	90	2,693,064	100	2,719,995	100	2,719,995	Dinas Perkim	



Kod e	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Layak	%		60	60	1,500,000	70	1,500,000	80	1,515,000	90	1,530,150	100	1,545,452	100	1,545,452	Dinas Perkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengentasan kawasan kumuh	%		60	60	200,000	70	200,000	80	202,000	90	204,020	100	206,060	100	206,060	Dinas Perkim
	Sasaran 2.1.3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	n/a	69,96	67,77		68,24		68,72		68,81		68,92		68,92		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase pencapaian target PPLH					244,973		244,973		247,423		249,897		252,396	0	252,396	Dinas LHK
		Prosentase pencapaian program pemerintah, dan program swasta berorientasi TPB														0		Dinas LHK
		Presentase penurunan pelanggaran ketentuan perizinan														0		Dinas LHK
		Presentase SDM LH kelompok masyarakat yang kompeten														0		Dinas LHK
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemar					110,402		110,402		111,506		112,621		113,747	0	113,747	Dinas LHK
		Indeks Pencemar														0		Dinas LHK
		Indeks Pencemar														0		Dinas LHK
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase tutupan lahan KEHATI	%		80	80	163,979	83	163,979	87	165,619	90	167,275	95	168,948	95	168,948	Dinas LHK
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Presentase tutupan lahan tahura	%		75	75	149,998	78	149,998	80	151,498	83	153,013	85	154,543	85	154,543	Dinas LHK
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase limbah B3 yang dikelola	%		30	30	55,578	50	55,578	60	56,134	70	56,695	90	57,262	90	57,262	Dinas LHK
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase pemenuhan ketentuan perizinan	%		100	100	49,916	100	49,916	100	50,415	100	50,919	100	51,429	100	51,429	Dinas LHK
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat	Presentase pengakuan	%		70	70	59,289	80	59,289	80	59,882	100	60,481	100	61,086	100	61,086	Dinas LHK



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Presentase pemberdayaan	%		50	50		60		70		80		100		100		Dinas LHK
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase terselesaikannya penanganan kasus lingkungan			100	100	58,167	100	58,167	100	58,749	100	59,336	100	59,930	100	59,930	Dinas LHK
	Program Pengelolaan Persampahan	Presentase pengurangan volume sampah Kab	%		80	80	553,706	80	553,706	80	559,243	80	564,835	80	570,484	80	570,484	Dinas LHK
		Presentase hasil pengumpulan			30	30		50		60		70		90		90		Dinas LHK
	Sasaran 2.1.4: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	186	130	130		125		120		115		110		110		
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Mitigasi dan Bencana alam dan non alam yang tertanggulangi	%		75	75	999,162	75	999,162	80	1,009,154	80	1,019,245	90	1,029,438	90	1,029,438	BPBD
		Efektivitas kinerja tim penanggulangan bencana	Tim		13	13		13		13		13		13		13		BPBD
		Persentase penanganan bangunan / insfrastruktur rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	%		70	70		75		80		80		85		85		BPBD
		Jumlah laporan data risiko bencana yang tersedia dan tertanggulangi	Data		10	10		15		20		25		30		30		BPBD
		Jumlah infrastruktur/bangunan yang tertangani pasca bencana kabupaten/kota	Unit		6	6		8		10		10		15		15		BPBD
		Persentase kecepatan penanganan bencana dan Jumlah logistik yang terpenuhi untuk korban bencana	%		75	75		80		90		95		100		100		BPBD



Kod e	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Targe t	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	MISI III : MEMBANGUN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING																	
	Tujuan 3.1: Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.99	0.26	1.83		3.05		4.23		4.68		4.97		4.97		
	Sasaran 3.1.1: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Persen	3,12	0,32	1.34		1.55		2.07		3.01		3,50		3,50		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi	%				1,644,950		1,644,950		1,661,400		1,678,013		1,694,794		1,694,794	Dinas Pertanian
		Populasi (Ekor) dan produksi () ternak (Ruminansia Besar, Ruminansia kecil dan Unggas)	Ekor														Dinas Pertanian	
		Ketersedian Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan	%														Dinas Pertanian	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktifitas	%				4,280,000		4,280,000		4,322,800		4,366,028		4,409,688		4,409,688	Dinas Pertanian
		Produktivitas sektor peternakan	%														Dinas Pertanian	
		Persentase ketersediaan prasarana pertanian	%														Dinas Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan	%				400,000		400,000		404,000		408,040		412,120		412,120	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana Pertanian	Rasio				550,000		550,000		555,500		561,055		566,666		566,666	Dinas Pertanian
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Izin Usaha yang Dikeluarkan					150,000		150,000		151,500		153,015		154,545		154,545	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang naik kelas.					642,250		642,250		648,673		655,159		661,711		661,711	Dinas Pertanian
		Jumlah kelompok tani yang naik kelas.																Dinas Pertanian



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Persentase kelompok tani ternak yang dibina dan produktif	%														Dinas Pertanian	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentasi nelayan yang di berikan jaminan asuransi	%		75	75	651,744	75	651,744	80	658,261	85	664,844	90	671,492	90	671,492	Dinas Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tingkat Kesejahteraan Para Pengusaha Pembudidaya Ikan	%				1,421,889		1,421,889		1,436,108		1,450,469		1,464,974		1,464,974	Dinas Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentasi Penurunan pelanggaran penggunaan alat tangkap tidak rama lingkungan	%				70,000		70,000		70,700		71,407		72,121		72,121	Dinas Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentasi data dan informasi yang terapdet untuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%				310,000		310,000		313,100		316,231		319,393		319,393	Dinas Perikanan
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi kometmen perizinan dan pendaftaran perusahaan	Badan Usaha		20	20	41,000	20	41,000	20	41,410	20	41,824	20	42,242	20	42,242	Dinas Perindagkop UM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan ditata	Pasar		3	3	165,000	3	165,000	3	166,650	3	168,317	3	170,000	3	170,000	Dinas Perindagkop UM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisiensi variasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting antar waktu	Koefisien		<3	<3	179,500	<3	179,500	<3	181,295	<3	183,108	<3	184,939	<3	184,939	Dinas Perindagkop UM
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	tertib ukur alat UTTP dan BDKT di masyarakat	UTTP		120	120	73,100	150	73,100	170	73,831	200	74,569	250	75,315	250	75,315	Dinas Perindagkop UM
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah kawasan industri yang dibangun dan dikembangkan	Kawasan		1	1	400,000	1	400,000	1	404,000	1	408,040	1	412,120	1	412,120	Dinas Perindagkop UM
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM memiliki Izin Usaha Industri (IUI)	IKM		87	87	7,600	100	7,600	100	7,676	100	7,753	100	7,830	100	7,830	Dinas Perindagkop UM
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	sistem informasi industri(data base industri)	System		1	1	88,500	1	88,500	1	89,385	1	90,279	1	91,182	1	91,182	Dinas Perindagkop UM



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah KSP/USP yang memiliki izin lengkap	KSP/USP		5	5		7		10		13		15		15		Dinas Perindagkop UM
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dan aktif serta akuntabel	Koperasi		10	10	27,000	15	27,000	17	27,270	20	27,543	22	27,818	22	27,818	Dinas Perindagkop UM
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah KSP/USP sehat	KSP/USP		10	10	11,300	10	11,300	10	11,413	10	11,527	10	11,642	10	11,642	Dinas Perindagkop UM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang memiliki SDM yang handal	Koperasi		17	17	70,500	17	70,500	17	71,205	17	71,917	18	72,636	18	72,636	Dinas Perindagkop UM
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Koperasi		17	17	7,200	17	7,200	17	7,272	17	7,345	18	7,418	18	7,418	Dinas Perindagkop UM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang Akuntabel dan berdaya saing	UMKM		120	120	106,750	150	106,750	170	107,818	200	108,896	230	109,985	230	109,985	Dinas Perindagkop UM
	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang produktif	%				332,000		332,000		335,320		338,673		342,060		342,060	Dinas Perindagkop UM
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi yang dikembangkan	Destinasi		5	5	349,102	4	349,102	10	352,593	7	356,119	6	359,680	6	359,680	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata						135,000		135,000		136,350		137,714		139,091		139,091	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						100,000		100,000		101,000		102,010		103,030		103,030	Dinas Pariwisata
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Realisasi investasi	Milliar	235	627	631		634		637		640		643		643		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Inesor	Badan Usaha		1	1	60,000.00	1	60,000.00	1	60,600	1	61,206	1	61,818	1	61,818	Dinas PMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi investasi	%		80	80	205,000.00	85	205,000.00	87	207,050	89	209,121	90	211,212	90	211,212	Dinas PMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi	Milliar		405	405	90,000.00	409	90,000.00	413	90,900	417	91,809	421	92,727	421	92,727	Dinas PMPTSP
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data penanaman modal yang terealisasi	%		25	25	75,000.00	30	75,000.00	35	75,750	40	76,508	45	77,273	45	77,273	Dinas PMPTSP
	Sasaran 3.1.3: Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,44	74,54	74,54-75,00		75,00-76,50		76,50-78,00		78,00-79,50		79,50-81,00		79,50-81,00		Dinas Ketahanan Pangan



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase desa mandiri pangan	%		18	18	500,000.00	23	500,000.00	28	505,000	33	510,050	38	515,151	38	515,151	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas harga pangan di tingkat produsen/konsumen	%		100	100	685,000.00	100	685,000.00	100	691,850	100	698,769	100	705,756	100	705,756	Dinas Ketahanan Pangan
			Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%		52	52		50		48		45		40		40		Dinas Ketahanan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%		12	12	130,000.00	12	130,000.00	12	131,300	12	132,613	12	133,939	12	133,939	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%		80	80	50,000.00	80	50,000.00	80	50,500	80	51,005	80	51,515	80	51,515	Dinas Ketahanan Pangan
MISI IV : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI																			
		Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	CC		B		B		BB		A		A		
		Sasaran 4.1.1: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B		B		BB		BB		A		A		
			Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
			Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	53	53	53-60		61-70		71-75		76-80		81-90		81-90		
			Indeks SPBE	Nilai	2,32	2,27	2,28-2,60		2,61-2,85		2,86-3,50		3,51-4,00		4,00-4,50		4,00-4,50		
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	60,00-65,00	60,00-65,00		65,01-70,00		70,01-75,00		75,01-80,00		80,01-85,00		80,01-85,00			
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	Angka		20,29	20,29	655,000	23	655,000	25	661,550	30	668,166	30	674,847	30	674,847	Bappeda Litbang
			Persentase penyusunan perencanaan berbasis teknologi informasi	%		85	85		90		100		100		100		100		Bappeda Litbang
			Nilai Pengukuran Kinerja	Angka		13,99	13,99		15		20		25		25		25		Bappeda Litbang
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD dan RENSTRA OPD	%		100	100	1,010,000	100	1,010,000	100	1,020,100	100	1,030,301	100	1,040,604	100	1,040,604	Bappeda Litbang
			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan OPD dengan visi misi Kepala Daerah pada RPJMD	%		100	100		100		100		100		100		100		Bappeda Litbang



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah	%		90	90		90		90		90		90		90		Bappeda Litbang
		Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%		90	90		90		90		90		90		90		Bappeda Litbang
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	%		20	20	350,000	20	350,000	20	353,500	25	357,035	25	360,605	25	360,605	Bappeda Litbang
		Persentase peningkatan indeks inovasi daerah	%		65	65		70		75		80		85		85		Bappeda Litbang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Kebijakan dibidang Administrasi Umum (Nilai RB, Nilai SAKIP, Nilai AKIP Setda, Opini LHP BPK (WTP), Indeks Profesionalisme ASN, dll)	%		100	100	29,642,309	100	29,642,309	100	29,938,732	100	30,238,119	100	30,540,501	100	30,540,501	Sekretariat Daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai LPPD, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesejahteraan Rakyat)	%		100	100	6,394,929	100	6,394,929	100	6,458,878	100	6,523,467	100	6,588,702	100	6,588,702	Sekretariat Daerah



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan (Inflasi Daerah, Peningkatan UMKM, Peningkatan PAD, Nilai Tukar Nelayan, Indeks Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran, Persentase Rumah Layak Huni, Cakupan Layanan Air Bersih, Realisasi Investasi)	%		75	75	3,781,398	80	3,781,398	85	3,819,212	90	3,857,404	95	3,895,978	95	3,895,978	Sekretariat Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor				24,987,107		24,987,107		25,236,978		25,489,348		25,744,241		25,744,241	Sekretariat DPRD
Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP		%															Sekretariat DPRD	
Persentase Tingkat Kepuasan ASN		%																Sekretariat DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	%				13,963,857		13,963,857		14,103,496		14,244,531		14,386,976		14,386,976	Sekretariat DPRD
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Dinamis & Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Yang Terkelola Sesuai Dengan Standar ANRI	%		50	50	163,000	50	163,000	65	164,630	75	166,276	85	167,939	85	167,939	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Persyaratan Level Kapabilitas APIP	%		40	40	6,147,673	40	6,147,673	40	6,209,150	40	6,271,241	40	6,333,954	40	6,333,954	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yg menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai standar	%		70	70	664,225	75	664,225	80	670,867	85	677,576	90	684,352	90	684,352	Inspektorat



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Pesentase Penyelesaian Tindak Lanjut yang di TL hasil temuan Pengawasan Internal dan Eksternal	%		60	60		65		70		75		80		80		Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yg menyusun Dokumen Kinerja Rencana Aksi	%		40	40	403,579	40	403,579	40	407,615	40	411,691	40	415,808	40	415,808	Inspektorat
Pemenuhan Persyaratan Level Maturitas SPIP		Level SPIP		2	2		3		3	-	3	-	4	-	4	-	Inspektorat	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Perda Tentang APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan					3,548,302		3,548,302		3,583,785		3,619,623		3,655,819		3,655,819	BPKAD
		Penetapan Perda Tentang Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan																BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh BMD Terinventarisasi dengan Baik					852,940		852,940		861,469		870,084		878,785		878,785	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	%		97	97	891,710	98	891,710	98	900,627	98	909,633	98,50	918,730	98,50	918,730	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan administrasi kepegawaian	%		100	100	1,076,357	100	1,076,357	100	1,087,121	100	1,097,992	100	1,108,972	100	1,108,972	BKPSDM
		Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100		BKPSDM
		Persentase penempatan pejabat sesuai kompetensi/kualifikasi	%		80	80		85		90		95		100		100		BKPSDM



Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator (Tujuan/Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
		Persentase Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	%		75	75		85		90		95		100		100		BKPSDM
		Persentase ASN yang memiliki kinerja dengan predikat baik	%		75	75		85		90		95		100		100		BKPSDM
		Jumlah Penurunan kasus pelanggaran disiplin	%		2	2		4		6		8		10		10		BKPSDM
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	%		80	80	205,000	85	205,000	90	207,050	100	209,121	100	211,212	100	211,212	Dinas Kominfo
	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Skor		2,6	2,6	299,483	2,7	299,483	2,8	302,478	2,9	305,503	3,0	308,558	3,0	308,558	Dinas Kominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Statistik Sektor yang tersedia guna Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	%		40	40	35,000	60	35,000	80	35,350	85	35,704	98	36,061	98	36,061	Dinas Kominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks		1	1	100,000	2	100,000	3	101,000	4	102,010	5	103,030	5	103,030	Dinas Kominfo
	Sasaran 4.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai pelayanan publik	Nilai	NA	3,61	3,61-3,65		3,66-3,70		3,71-4,00		4,01-4,50		4,51-5,00		4,51-5,00		
	Program Pendaftaran Penduduk						200,000		200,000		202,000		204,020		206,060		206,060	Dinas Dukcapil
	Program Pencatatan Sipil						150,000		150,000		151,500		153,015		154,545		154,545	Dinas Dukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						50,000		50,000		50,500		51,005		51,515		51,515	Dinas Dukcapil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan						100,000		100,000		101,000		102,010		103,030		103,030	Dinas Dukcapil
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Percepatan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan	%		80	80	205,000.00	85	205,000.00	87	207,050	89	209,121	90	211,212	90	211,212	Dinas PMPTSP



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Pada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat, namun disisi lain tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama 5 tahun kedepan cenderung stagnan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah masih dipengaruhi oleh kondisi ketidakpastian ekonomi global dan nasional akibat pandemi Covid-19.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2025 tertuang dalam tabel berikut:



Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022-2026

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	PROYEKSI				
		2022	2023	2024	2025	2026
4.	KAPASITAS RIIL KEUANGAN	948,377,249,800.00	967,344,794,796.00	986,691,690,691.92	1,006,425,524,505.76	1,026,554,034,995.87
5.	BELANJA	979,324,356,040.00	998,910,843,160.80	1,018,889,060,024.02	1,039,266,841,224.50	1,060,052,178,048.99
5.1.	BELANJA OPERASI	695,976,834,442.00	709,896,371,130.84	724,094,298,553.46	738,576,184,524.53	753,347,708,215.02
5.1.01	Belanja pegawai	445,485,379,057.00	454,395,086,638.14	463,482,988,370.90	472,752,648,138.32	482,207,701,101.09
5.1.02	Belanja barang dan jasa	227,379,019,185.00	231,926,599,568.70	236,565,131,560.07	241,296,434,191.28	246,122,362,875.10
5.1.03	Belanja bunga	1,197,709,100.00	1,221,663,282.00	1,246,096,547.64	1,271,018,478.59	1,296,438,848.16
5.1.04	Belanja hibah	19,740,127,100.00	20,134,929,642.00	20,537,628,234.84	20,948,380,799.54	21,367,348,415.53
5.1.05	Belanja bantuan sosial	2,174,600,000.00	2,218,092,000.00	2,262,453,840.00	2,307,702,916.80	2,353,856,975.14
5.2.	BELANJA MODAL	111,777,309,998.00	114,012,856,197.96	116,293,113,321.92	118,618,975,588.36	120,991,355,100.13
5.2.01	Belanja modal peralatan dan mesin	27,125,470,393.00	27,667,979,800.86	28,221,339,396.88	28,785,766,184.81	29,361,481,508.51
5.2.02	Belanja modal gedung dan bangunan	39,845,365,105.00	40,642,272,407.10	41,455,117,855.24	42,284,220,212.35	43,129,904,616.59
5.2.03	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	44,804,374,500.00	45,700,461,990.00	46,614,471,229.80	47,546,760,654.40	48,497,695,867.48
5.2.04	Belanja modal aset tetap lainnya	2,100,000.00	2,142,000.00	2,184,840.00	2,228,536.80	2,273,107.54
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4,500,000,000.00	4,590,000,000.00	4,681,800,000.00	4,775,436,000.00	4,870,944,720.00
5.3.01	Belanja tidak terduga	4,500,000,000.00	4,590,000,000.00	4,681,800,000.00	4,775,436,000.00	4,870,944,720.00
5.4.	BELANJA TRANSFER	167,070,211,600.00	170,411,615,832.00	173,819,848,148.64	177,296,245,111.61	180,842,170,013.85
5.4.01	Belanja bantuan keuangan	167,070,211,600.00	170,411,615,832.00	173,819,848,148.64	177,296,245,111.61	180,842,170,013.85

Sumber: BPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan, 2021



Selanjutnya berdasarkan kerangka pendanaan yang telah dirumuskan, disusun indikasi rencana program prioritas untuk memetakan program-program yang diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berisi program-program pilihan, untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Indikasi rencana program diikuti dengan pagu indikatif sebagai gambaran kebutuhan pendanaan untuk memastikan program-program tersebut dapat berjalan dengan optimal. Program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 terdiri dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta prioritas pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026, dituangkan dalam tabel berikut:



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
		URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Nilai		C	B	233,522,910	B	233,522,910	BB	235,858,139	A	238,216,720	A	240,598,888	A	240,598,888	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah SD Terakreditasi A 50 %	%		50%	50%	39,755,851	50%	39,755,851	55%	40,153,410	55%	40,554,944	60%	40,960,493	0.6	40,960,493	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Sekolah SMP Terakreditasi A 50 %	%		50%	50%		50%		55%		55%		60%		0.6		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Siswa Lulus SD 100%	%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Lulusan Siswa SMP 100%	%		100%	100%		100%		100%		100%		100%		1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Nilai Rata-rataUjian Nasional (UN) SD 7,00	Angka		7	7		7		8		8		8		8		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN) SMP 8,00	Angka		8	8		8		9		9		9		9		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah Kurikulum yang Tersusun 100%	Angka	1	1	1	110,000	1	110,000	1	111,100	2	112,211	2	113,333	2	113,333	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpeta dan Terdistribusi sesuai kebutuhan 100%	%	100	100	100	412,500	100	412,500	100	416,625	100	420,791	100	424,999	100	424,999	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Diberikan Izin	%	100	100	100	165,000	100	165,000	100	166,650	100	168,317	100	170,000	100	170,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase SDM Budaya Terbina	%		100	100	880,000	100	880,000	100	888,800	100	897,688	100	906,665	100	906,665	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pelaku Seni Budaya terbina	%		100	100	195,000	100	195,000	100	196,950	100	198,920	100	200,909	100	200,909	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dikelola	%		100	100	195,000	100	195,000	100	196,950	100	198,920	100	200,909	100	200,909	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				JUMLAH					275,236,261		275,236,261		277,988,624		280,768,510		283,576,195		283,576,195	
			URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS KESEHATAN																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Nilai		C	B	106,923,454	B	106,923,454	BB	107,992,689	BB	109,072,615	A	110,163,342	A	110,163,342	Dinas Kesehatan
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Presentase Angka Kesakitan Menurun	%		60	60	45,218,515	50	45,218,515	40	45,670,700	30	46,127,407	15	46,588,681	15	46,588,681	Dinas Kesehatan
			Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentase Kepuasan Masyarakat Meningkat	%		60	60		70		80		85		90		90	Dinas Kesehatan	
				persentae cakupan kunjungan antenatal dan penerapan standar 10T	%		90	90		92		95		98		100		100	Dinas Kesehatan	
				persentase cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	%		91	91		93		95		98		100		100	Dinas Kesehatan	
				angka kematian ibu dan bayi rendah	%		3	3		2		2		2		2		2	Dinas Kesehatan	
				Persentase Balita Pendek dan Sangat Pendek (sd 14%/Desa)	%		16	16		15		14		14		14		14	Dinas Kesehatan	
				Persentase Balita Gizi Buruk, Presentase Bumil KEK dan Anemia (sd 10%)	%		12	12		11		10		10		10		10	Dinas Kesehatan	
			Persentase Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan	%		45	45		55		65		75		85		85		Dinas Kesehatan	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
				Usia Reproduksiif dan Lansia (45-85%)																
				Persentase Posyandu Aktif (51%-90%)	%		51	51	60		70		80		90		90		Dinas Kesehatan	
				Cakupan Pengukuran Kebugaran Bagi Pekerja (15-35%)	%		60	60	70		80		85		90		90		Dinas Kesehatan	
				Persentase Desa Stop BABS dan Cakupan Penghunakan air Minum (62%-80%)	%		60	60	70		80		90		100		100		Dinas Kesehatan	
				Persentase Desa/Kel Sehat	%		80	80	100		120		140		158		158		Dinas Kesehatan	
				Persentase penyakit tidak menular dan kesehatan yang ditangani	%		100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
				persentase Calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan	%		100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
				Tercapainya IDL(Imunisasi Dasar Lengkap) 95% dan UCI (United Child immunization) di wilayah puskesmas(80 %)	%		100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
				Tidak terjadi KLB	%		100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
				'Persentase penyakit menular langsung dan tidak langsung yang ditangani	%		100	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan	%		100	100	614,069	100	614,069	100	620,210	100	626,412	100	632,676		Dinas Kesehatan	
				Persentase SDM yang Terstandarisasi	%		70	70	80		90		100		100		100		Dinas Kesehatan	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Presentasi mutu pelayanan kefarmasian meningkat	%		75	75	629,525	75	629,525	80	635,820	83	642,178	94,5	648,600	94,5	648,600	Dinas Kesehatan
				Persentase TPM dan DAM memenuhi Standar Kesehatan	%		62	62	70		72		74		76		76		Dinas Kesehatan	
			Program	Jumlah Lembaga yang	Angka		4	4	1,069,181	6	1,069,181	10	1,079,873	13	1,090,672	15	1,101,578	15	1,101,578	Dinas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
			Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Berpartisi dalam Promkes															Kesehatan	
				Persentase Desa yang Menegakkan GERMAS	%		50	50		55		60		65		70		70	Dinas Kesehatan	
				JUMLAH					154,454,744		154,454,744		155,999,291		157,559,284		159,134,877		159,134,877	
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Sk		C	B	11,401,144	B	11,401,144	BB	11,515,155	BB	11,630,307	BB	11,746,610	BB	11,746,610	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase layanan jaringan irigasi	%		50	50	6,800,000	55	6,800,000	60	6,868,000	65	6,936,680	70	7,006,047	70	7,006,047	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik	Meter		2.500	2.500	3,650,000	2.500	3,650,000	2.500	3,686,500	2.500	3,723,365	2.500	3,760,599	2.500	3,760,599	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang Layak	Unit		2	2	500,000	2	500,000	2	505,000	2	510,050	2	515,151	2	515,151	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pelayanan berfungsi baik	Unit		2	2	5,050,000	2	5,050,000	2	5,100,500	2	5,151,505	2	5,203,020	2	5,203,020	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah bangunan pelayanan berfungsi baik	Unit		10	10	2,252,626	10	2,252,626	10	2,275,152	10	2,297,904	10	2,320,883	10	2,320,883	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi Mantap dan jembatan dalam kondisi baik	%		55	55	29,650,000	56,60	29,650,000	58	29,946,500	59,50	30,245,965	61	30,548,425	61	30,548,425	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Prosentase layanan kualitas Jasa Konstruksi	%		100	100	400,000	100	400,000	100	404,000	100	408,040	100	412,120	100	412,120	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan terhadap Tata Ruang Kabupaten	%		100	100	400,000	100	400,000	100	404,000	100	408,040	100	412,120	100	412,120	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki SR (Sambungan Rumah) Sumber Daya Air Bersih	SR		1.000	1.000	8,097,374	700	8,097,374	1.000	8,178,348	1.200	8,260,131	1.500	8,342,733	1.500	8,342,733	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sanitasi Layak dan Sesuai Standar	SR		1.900	1.900	4,593,292	1.200	4,593,292	1.100	4,639,225	1.000	4,685,617	1.000	4,732,473	1.000	4,732,473	Dinas PUPR
				JUMLAH					72,794,436		72,794,436		73,522,380		74,257,604		75,000,180		75,000,180	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																
			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai		C	70	4,085,507	75	4,085,507	80	4,126,362	80	4,167,626	85	4,209,302	85	4,209,302	Dinas Perkim
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase penyelesaian rumah tidak layak huni	%		10	10	168,982	15	168,982	20	170,672	20	172,379	20	174,102	20	174,102	Dinas Perkim
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman yang layak dan berkualitas	%		60	60	2,640,000	70	2,640,000	80	2,666,400	90	2,693,064	100	2,719,995	100	2,719,995	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Layak	%		60	60	1,500,000	70	1,500,000	80	1,515,000	90	1,530,150	100	1,545,452	100	1,545,452	Dinas Perkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase pengentasan kawasan kumuh	%		60	60	200,000	70	200,000	80	202,000	90	204,020	100	206,060	100	206,060	Dinas Perkim
			JUMLAH					8,594,489		8,594,489		8,680,434		8,767,238		8,854,911		8,854,911	
			URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		C	B	8,323,514	B	8,323,514	B	8,406,749	BB	8,490,817	A	8,575,725	A	8,575,725	Satpol PP dan Damkar
			Pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan persentase tindak lanjut LHP BPK	%		100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP dan Damkar
			Indeks kepuasan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100		Satpol PP dan Damkar
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan pelanggaran gangguan trantibum yang terselesaikan	%		90	90	475,000	90	475,000	90	479,750	90	484,548	90	489,393	90	489,393	Satpol PP dan Damkar
			Cakupan penegakan perda dan perkara	%		90	90		90		90		90		90		90		Satpol PP dan Damkar
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan dan Sarpras Pemadam Kebakaran	%		75	75	250,000	75	250,000	75	252,500	75	255,025	75	257,575	75	257,575	Satpol PP dan Damkar
			JUMLAH					9,048,514		9,048,514		9,138,999		9,230,389		9,322,693		9,322,693	
			URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	3,701,520	B	3,701,520	B	3,738,535	B	3,775,921	B	3,813,680	B	3,813,680	BPBD



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Kabupaten/Kota																	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Mitigasi dan Bencana alam dan non alam yang tertanggulangi	%		75	75	999,162	75	999,162	80	1,009,154	80	1,019,245	90	1,029,438	90	1,029,438	BPBD
				Efektivitas kinerja tim penanggulangan bencana	Tim		13	13		13		13		13		13		13	BPBD	
				Persentase penanganan bangunan / infrastruktur rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	%		70	70		75		80		80		85		85	BPBD	
				Jumlah laporan data risiko bencana yang tersedia dan tertanggulangi	Data		10	10		15		20		25		30		30	BPBD	
				Jumlah infrastruktur/bangunan yang tertangani pasca bencana kabupaten/kota	Unit		6	6		8		10		10		15		15	BPBD	
				Persentase kecepatan penanganan bencana dan Jumlah logistik yang terpenuhi untuk korban bencana	%		75	75		80		90		95		100		100	BPBD	
			JUMLAH						4,700,682		4,700,682		4,747,689		4,795,166		4,843,117		4,843,117	
			URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS SOSIAL																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		C	B	4,279,838	B	4,279,838	BB	4,322,636	A	4,365,863	A	4,409,521	A	4,409,521	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang dibina dan diberdayakan	%		75	75	374,916	60	374,916	60	378,665	60	382,452	60	386,276	60	386,276	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dan mendapatkan rehabilitasi kesejahteraan sosial terhadap jumlah PMKS	%		80	80	211,723	80	211,723	80	213,840	80	215,979	80	218,138	80	218,138	Dinas Sosial



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase keluarga miskin yang mendapat jaminan sosial	%		56	56	165,000	65	165,000	75	166,650	85	168,317	95	170,000	95	170,000	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan bencana	%		100	100	152,882	100	152,882	100	154,411	100	155,955	100	157,514	100	157,514	Dinas Sosial
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah makam pahlawan yang di kelola dengan baik	Angka	1	1	1	37,002	1	37,002	1	37,372	1	37,746	1	38,123	1	38,123	Dinas Sosial
				JUMLAH					5,221,361		5,221,361		5,273,575		5,326,310		5,379,573		5,379,573	
			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		C	B	3,944,078	B	3,944,078	B	3,983,519	B	4,023,354	B	4,063,588	B	4,063,588	Dinas Nakertrans
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Manajemen pengembangan ketenagakerjaan	Dokumen		2	2	25,410	2	25,410	2	25,664	2	25,921	2	26,180	2	26,180	Dinas Nakertrans
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja terdidik	Orang		20	20	25,027	20	25,027	20	25,277	20	25,530	20	25,785	20	25,785	Dinas Nakertrans
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%		71,54	71,54	35,047	71,56	35,047	71,59	35,397	80	35,751	80,01	36,109	80,01	36,109	Dinas Nakertrans
			Program Hubungan Industrial	Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha	Kasus		5	5	102,025	5	102,025	4	103,045	4	104,076	3	105,116	3	105,116	Dinas Nakertrans
				Persentase tenaga kerja Yang Menjadi Peserta Jaminan Sosial	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Nakertrans
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan pemukiman transmigrasi pada Tahap Kemandirian	Unit		1	1	23,784.00	1	23,784.00	1	24,022	1	24,262	1	24,505	1	24,505	Dinas Nakertrans
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	persentase persebaran penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten	Kawasan		25	25	24,998.00	25	24,998.00	25	25,248	25	25,500	25	25,755	25	25,755	Dinas Nakertrans
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Satuan pemukiman transmigrasi pada Tahap Kemandirian	Unit		1	1	40,574.00	1	40,574.00	1	40,980	1	41,390	1	41,803	1	41,803	Dinas Nakertrans
				JUMLAH					4,220,943		4,220,943		4,263,152		4,305,784		4,348,842		4,348,842	
			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP OPD	Skor		C	75	3,434,648	75	3,434,648	80	3,468,994	80	3,503,684	80	3,538,721	80	3,538,721	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		90	90		90		100		100		100		100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
			Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Gemar Membaca	%		70	70	330,935	75	330,935	78	334,244	80	337,587	81	340,963	81	340,963	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip Dinamis & Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Yang Terkelola Sesuai Dengan Standar ANRI	%		50	50	163,000	50	163,000	65	164,630	75	166,276	85	167,939	85	167,939	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			JUMLAH					3,928,583		3,928,583		3,967,869		4,007,548		4,047,623		4,047,623		
		URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																		
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA SEJAHTERA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP OPD	Skor		C	70	3,756,725	72	3,756,725	73	3794292.25	74	3832235.173	75	3870557.524	75	3870557.524	Dinas PPKBPPPA	
		Kabupaten/Kota	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntable dan persentase tindak lanjut LHP BPK	%		100	100		100		100		100		100		100	Dinas PPKBPPPA		
			Indeks kepuasan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100	Dinas PPKBPPPA		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Diskriminasi terhadap perempuan menurun	%		50	50	350,000	60	350,000	70	353500	80	357035	90	360605.35	90	360605.35	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase penurunan kasus tindak lanjut atas kasus kekerasan perempuan	Kasus		20	20	31,500	18	31,500	16	31815	15	32133.15	10	32454.4815	10	32454.4815	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	%		65	65	33,200	75	33,200	80	33532	90	33867.32	95	34205.9932	95	34205.9932	Dinas PPKBPPPA	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kasus Kekerasan Terhadap Anak	Kasus		C	7	63,999	10	63,999	12	64638.99	15	65285.3799	18	65938.2337	18	65938.2337	Dinas PPKBPPPA	
		Program Pengendalian	Jumlah persentase			2,31	2,31	30,000	2,3	30,000	2,29	30300	2,27	30603	2,26	30909.03	2,26	30909.03	Dinas	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
			Penduduk	penurunan angka pertumbuhan penduduk															PPKBPPPA	
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kesertaan ber KB		44	44	3,228,329	44	3,228,329	44	3260612.29	44	3293218.413	44	3326150.597	44	3326150.597	Dinas PPKBPPPA	
				Jumlah Ketersediaan Alokon di atas kebutuhan Alokon dan kepuasan akseptor peserta KB aktif	Faskes		20	20		22		24		25		26		26	Dinas PPKBPPPA	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase jumlah keluarga yang statusnya pra sejahtera	%		20	20	43,304	40	43,304	60	43737.04	80	44174.4104	100	44616.1545	100	44616.1545	Dinas PPKBPPPA
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	Orang		230	230	1,050,000	238	1,050,000	240	1,060,500	243	1,071,105	290	1,081,816	290	1,081,816	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat pelajar	Cabang Olahraga		8	8	900,000	12	900,000	16	909,000	20	918,090	22	927,271	22	927,271	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus kepanduan yang aktif dan produktif	%		70	70	900,000	80	900,000	90	909,000	100	918,090	100	927,271	100	927,271	Dinas Pemuda dan Olahraga
				JUMLAH					10,387,057		10,387,057		10,490,928		10,595,837		10,701,795		10,701,795	
			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		C	B	3,694,533	B	3,694,533	BB	3,731,478	BB	3,768,793	A	3,806,481	A	3,806,481	Dinas PMD
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan kualitas adminitrasi Desa	%		20	20	1,055,000	20	1,055,000	20	1,065,550	20	1,076,206	20	1,086,968	20	1,086,968	Dinas PMD
				Persentase Peningkatan Aparatur Bumdes dan Perencanaan Desa	%		15	15		15		20		25		25		25		Dinas PMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Desa	%		15	15	460,000	15	460,000	20	464600	25	469246	25	473938.46	25	473,938	Dinas PMD
				Persentase Peningkatan	%		20	20		20		20		20		20		20		Dinas PMD



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
				Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan																
				JUMLAH					5,209,533		5,209,533		5,261,628		5,314,245		5,367,387			
			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		C	B	3,682,171	B	3,682,171	BB	3,718,993	BB	3,756,183	A	3,793,744	A	3,793,744	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemuda yang berperan serta dalam Pembangunan	Orang		230	230	1,050,000	238	1,050,000	240	1,060,500	243	1,071,105	290	1,081,816	290	1,081,816	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cabang Olahraga yang berprestasi tingkat pelajar	Cabang Olahraga		8	8	900,000	12	900,000	16	909,000	20	918,090	22	927,271	22	927,271	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase gugus kepanduan yang aktif dan produktif	%		70	70	900,000	80	900,000	90	909,000	100	918,090	100	927,271	100	927,271	Dinas Pemuda dan Olahraga
				JUMLAH					6,532,171		6,532,171		6,597,493		6,663,468		6,730,102		6,730,102	
			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS PERHUBUNGAN																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Skor		C	B	3,010,143	B	3,010,143	B	3,040,244	A	3,070,647	A	3,101,353	A	3,101,353	Dinas Perhubungan
				Persentase tata kelola administrasi keuangan baik	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perhubungan
				Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan umum dan kepegawaian	%		80	80		85		90		100		100		100		Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan Angkutan umum	%		30	30	579,000	40	579,000	50	584,790	60	590,638	70	596,544	70	596,544	Dinas Perhubungan
				Persentase Angka Pelanggaran Lalu Lintas	%		50	50		40		30		20		10		10	-	Dinas Perhubungan
				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan	%		50	50		55		60		65		70		70	-	Dinas Perhubungan
				JUMLAH					3,589,143		3,589,143		3,625,034		3,661,285		3,697,898		3,697,898	
			URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR																	
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai		C	80	8,902,511	85	8,902,511	88	8,991,536	90	9,081,451	95	9,172,266	95	9,172,266	Dinas LHK



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
			Daerah Kabupaten/Kota																			
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase pencapaian target PPLH	Dokumen		1	1	244,973	1	244,973	1	247,423	1	249,897	1	252,396	1	252,396	Dinas LHK		
				Prosentase pencapaian program pemerintah, dan program swasta berorientasi TPB	Dokumen		1	1							1			1		Dinas LHK		
				Presentase penurunan pelanggaran ketentuan perizinan	%		10	10		15		20		25		30		30		Dinas LHK		
				Presentase SDM LH kelompok masyarakat yang kompeten	Kelompok		1	1		1		1		1		1		1		Dinas LHK		
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemar					110,402		110,402				111,506		112,621		113,747	0	113,747	Dinas LHK
				Indeks Pencemar															0		Dinas LHK	
				Indeks Pencemar															0		Dinas LHK	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Presentase tutupan lahan KEHATI	%		80	80	163,979	83	163,979	87	165,619	90	167,275	95	168,948	95	168,948		Dinas LHK	
			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Presentase tutupan lahan tahura	%		75	75	149,998	78	149,998	80	151,498	83	153,013	85	154,543	85	154,543		Dinas LHK	
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase limbah B3 yang dikelola	%		30	30	55,578	50	55,578	60	56,134	70	56,695	90	57,262	90	57,262		Dinas LHK	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Presentase pemenuhan ketentuan perizinan	%		100	100	49,916	100	49,916	100	50,415	100	50,919	100	51,429	100	51,429		Dinas LHK	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Polh	Presentase pengakuan	%		70	70	59,289	80	59,289	80	59,882	100	60,481	100	61,086	100	61,086		Dinas LHK	
				Presentase pemberdayaan	%		50	50		60		70		80		100		100			Dinas LHK	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase terselesaikannya penanganan kasus lingkungan			100	100	58,167	100	58,167	100	58,749	100	59,336	100	59,930	100	59,930	Dinas LHK
			Program Pengelolaan Persampahan	Presentase pengurangan volume sampah Kab	%		80	80	553,706	80	553,706	80	559,243	80	564,835	80	570,484	80	570,484	Dinas LHK
				Presentase hasil pengumpulan			30	30		50		60		70		90		90		Dinas LHK
				JUMLAH					10,348,519		10,348,519		10,452,004		10,556,524		10,662,089		10,662,089	
			URUSAN PILIHAN																	
			DINAS PERTANIAN																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		B	BB	22,435,848	BB	22,435,848	BB	22,660,206	BB	22,886,809	BB	23,115,677	BB	23,115,677	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi					1,644,950		1,644,950		1,661,400		1,678,013		1,694,794		1,694,794	Dinas Pertanian
				- Produksi Padi			63,262	63,262		64,015		64,015		64,768		64,768		64,768		Dinas Pertanian
				- Produksi Jagung			33,600	33,600		34,200		34,800		34,800		35,400		35,400		Dinas Pertanian
				Populasi (Ekor) dan produksi () ternak (Ruminansia Besar, Ruminansia kecil dan Unggas)																Dinas Pertanian
				- Produksi Sapi			195,44	195,44		198,38		201,35		204,37		204,37		204,37		Dinas Pertanian
				Ketersedian Sarana Produksi Pertanian (Alsintan, Pupuk dan Pestisida) sesuai kebutuhan dan Peruntukan	%															Dinas Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktifitas	%				4,280,000		4,280,000		4,322,800		4,366,028		4,409,688		4,409,688	Dinas Pertanian
				Produktivitas sektor peternakan	%															Dinas Pertanian
				Persentase ketersediaan prasarana pertanian	%															Dinas Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan	%				400,000		400,000		404,000		408,040		412,120		412,120	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana Pertanian	Rasio				550,000		550,000		555,500		561,055		566,666		566,666	Dinas Pertanian



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Izin Usaha yang Dikeluarkan				150,000		150,000		151,500		153,015		154,545		154,545	Dinas Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	Standarisasi Klasifikasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	%		20	20	642,250	40	642,250	60	648,673	80	655,159	100	661,711	100	661,711	Dinas Pertanian
				Rasio kenaikan kelas kelompok per Kecamatan	Rasio		1:20	1:20		1:20		1:20		1:20		1:20		1:20	Dinas Pertanian	
				Rasio ketersediaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) terhadap kelompok binaan	Rasio		1:12	1:12		1:10		1:9		1:8		1:7		1:7	Dinas Pertanian	
				Jumlah kelompok tani ternak yang bergabung dalam korporasi ternak	Korporasi		1	1		3		5		9		11		11	Dinas Pertanian	
				JUMLAH					30,103,048		30,103,048		30,404,078		30,708,119		31,015,200		31,015,200	
			URUSAN PILIHAN																	
			DINAS PERIKANAN																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		CC	80	3,644,469	85	3,644,469	90	3,680,914	95	3,717,723	100	3,754,900	100	3,754,900	Dinas Perikanan
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		70	70		80		85		90		100		100		Dinas Perikanan
				Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		70	70		80		85		90		100		100		Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentasi nelayan yang di berikan jaminan asuransi	%		75	75	651,744	75	651,744	80	658,261	85	664,844	90	671,492	90	671,492	Dinas Perikanan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Tingkat Kesejahteraan Para Pengusaha Pembudidaya Ikan	%				1,421,889		1,421,889		1,436,108		1,450,469		1,464,974		1,464,974	Dinas Perikanan
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentasi Penurunan pelanggaran penggunaan alat tangkap tidak rama lingkungan	%				70,000		70,000		70,700		71,407		72,121		72,121	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentasi data dan informasi yang terapdet untuk usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	%				310,000		310,000		313,100		316,231		319,393		319,393	Dinas Perikanan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
				JUMLAH				6,098,102		6,098,102		6,159,083		6,220,674		6,282,881		6,282,881			
			URUSAN PILIHAN																		
			DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO																		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		B	75	4,357,664	80	4,357,664	85	4,401,241	90	4,445,253	95	4,489,706	95	4,489,706	Dinas Perindagkop UM	
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Perindagkop UM	
				Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		75	75		80		85		90		100		100		Dinas Perindagkop UM	
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi kometmen perizinan dan pendaftaran perusahaan	Badan Usaha		20	20	41,000	20	41,000	20	41,410	20	41,824	20	42,242	20	42,242	Dinas Perindagkop UM	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan ditata	Pasar		3	3	165,000	3	165,000	3	166,650	3	168,317	3	170,000	3	170,000	Dinas Perindagkop UM	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Koefisiensi variasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting antar waktu	Koefisien		<3	<3	179,500	<3	179,500	<3	181,295	<3	183,108	<3	184,939	<3	184,939	Dinas Perindagkop UM	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	tertib ukur alat UTTP dan BDKT di masyarakat	UTTP		120	120	73,100	150	73,100	170	73,831	200	74,569	250	75,315	250	75,315	Dinas Perindagkop UM	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah kawasan industri yang dibangun dan dikembangkan	Kawasan		1	1	400,000	1	400,000	1	404,000	1	408,040	1	412,120	1	412,120	Dinas Perindagkop UM	
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM memiliki Izin Usaha Industri (IUI)	IKM		87	87	7,600	100	7,600	100	7,676	100	7,753	100	7,830	100	7,830	Dinas Perindagkop UM	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	sistem informasi industri(data base industri)	System		1	1	88,500	1	88,500	1	89,385	1	90,279	1	91,182	1	91,182	Dinas Perindagkop UM	
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah KSP/USP yang memiliki izin lengkap	KSP/USP		5	5		7		10		13		15		15		Dinas Perindagkop UM	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang sehat dan aktif serta akuntabel	Koperasi		10	10	27,000	15	27,000	17	27,270	20	27,543	22	27,818	22	27,818	Dinas Perindagkop UM	
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah KSP/USP sehat	KSP/USP		10	10	11,300	10	11,300	10	11,413	10	11,527	10	11,642	10	11,642	Dinas Perindagkop	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Koperasi																UM	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang memiliki SDM yang handal	Koperasi		17	17	70,500	17	70,500	17	71,205	17	71,917	18	72,636	18	72,636	Dinas Perindagkop UM
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	Koperasi		17	17	7,200	17	7,200	17	7,272	17	7,345	18	7,418	18	7,418	Dinas Perindagkop UM
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang Akuntabel dan berdaya saing	UMKM		120	120	106,750	150	106,750	170	107,818	200	108,896	230	109,985	230	109,985	Dinas Perindagkop UM
			Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang produktif	%				332,000		332,000		335,320		338,673		342,060		342,060	Dinas Perindagkop UM
				JUMLAH					5,867,114		5,867,114.0		5,925,785.1		5,985,043.0		6,044,893.4		6,044,893.4	
			URUSAN PILIHAN																	
			DINAS PARIWISATA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Nilai		C	B	2,381,276	B	2,381,276	BB	2,405,089	BB	2,429,140	A	2,453,431	A	2,453,431	Dinas Pariwisata
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
				Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		80	80		85		90		95		100		100		Dinas Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Destinasi yang dikembangkan	Destinasi		5	5	349,102	4	349,102	10	352,593	7	356,119	6	359,680	6	359,680	Dinas Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata						135,000		135,000		136,350		137,714		139,091		139,091	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						100,000		100,000		101,000		102,010		103,030		103,030	Dinas Pariwisata
				JUMLAH					2,965,378		2,965,378		2,995,032		3,024,982		3,055,232		3,055,232	
			URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR																	
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		B	80	3,874,205.00	85	3,874,205.00	90	3,912,947	95	3,952,077	100	3,991,597	100	3,991,597	Dinas PMPTSP
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		80	80		85		90		95		100		100		Dinas PMPTSP
				Persentase Tingkat Kepuasan dan	%		80	80		85		90		95		100		100		Dinas PMPTSP



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
				kenyamanan ASN																
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Inveor	Badan Usaha		1	1	60,000.00	1	60,000.00	1	60,600	1	61,206	1	61,818	1	61,818	Dinas PMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi investasi	%		80	80	205,000.00	85	205,000.00	87	207,050	89	209,121	90	211,212	90	211,212	Dinas PMPTSP
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Percepatan Layanan Perizinan Dan Non Perizinan	%		80	80	205,000.00	85	205,000.00	87	207,050	89	209,121	90	211,212	90	211,212	Dinas PMPTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Realisasi investasi	Milliar		405	405	90,000.00	409	90,000.00	413	90,900	417	91,809	421	92,727	421	92,727	Dinas PMPTSP
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data penanaman modal yang terealisasi	%		25	25	75,000.00	30	75,000.00	35	75,750	40	76,508	45	77,273	45	77,273	Dinas PMPTSP
				JUMLAH					4,509,205		4,509,205		4,554,297		4,599,840		4,645,838		4,645,838	
			URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR																	
			DINAS KETAHANAN PANGAN																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		B	75	3,658,830.00	75	3,658,830.00	77,5	3,695,418	77,5	3,732,372	80	3,769,696	80	3,769,696	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Tingkat Kepuasan dan kenyamanan ASN	%		80	80		80		82,5		82,5		85		85		Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase desa mandiri pangan	%		18	18	500,000.00	23	500,000.00	28	505,000	33	510,050	38	515,151	38	515,151	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase stabilitas harga pangan di tingkat produsen/konsumen	%		100	100	685,000.00	100	685,000.00	100	691,850	100	698,769	100	705,756	100	705,756	Dinas Ketahanan Pangan
				Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%		52	52		50		48		45		40		40		Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%		12	12	130,000.00	12	130,000.00	12	131,300	12	132,613	12	133,939	12	133,939	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%		80	80	50,000.00	80	50,000.00	80	50,500	80	51,005	80	51,515	80	51,515	Dinas Ketahanan Pangan
				JUMLAH					5,023,830		5,023,830		5,074,068		5,124,809		5,176,057		5,176,057	
			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		B	80	5,416,132	85	5,416,132	90	5,470,293	90	5,524,996	90	5,580,246	90	5,580,246	Bappeda Litbang	
			Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		Bappeda Litbang	
			Persentase Tingkat Kepuasan ASN	%		75	75		80		85		90		90		90		Bappeda Litbang	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	Angka		20,29	20,29	655,000	23	655,000	25	661,550	30	668,166	30	674,847	30	674,847	Bappeda Litbang	
			Persentase penyusunan perencanaan berbasis teknologi informasi	%		85	85		90		100		100		100		100		Bappeda Litbang	
			Nilai Pengukuran Kinerja	Angka		13,99	13,99		15		20		25		25		25		Bappeda Litbang	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD dengan RPJMD dan RENSTRA OPD	%		100	100	1,010,000	100	1,010,000	100	1,020,100	100	1,030,301	100	1,040,604	100	1,040,604	Bappeda Litbang	
			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan OPD dengan visi misi Kepala Daerah pada RPJMD	%		100	100		100		100		100		100		100		Bappeda Litbang	
			Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi Perangkat Daerah	%		90	90		90		90		90		90		90		Bappeda Litbang	
			Persentase target indikator tujuan dan sasaran misi 2 dan 3 dalam RPJMD yang tercapai	%		90	90		90		90		90		90		90		Bappeda Litbang	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan pembangunan	%		20	20	350,000	20	350,000	20	353,500	25	357,035	25	360,605	25	360,605	Bappeda Litbang	
			Persentase peningkatan indeks inovasi daerah	%		65	65		70		75		80		85		85		Bappeda Litbang	
			JUMLAH					7,431,132		7,431,132		7,505,443		7,580,498		7,656,303		7,656,303		
		FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
		SEKRETARIAT DAERAH																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Kebijakan dibidang Administrasi Umum	%		100	100	29,642,309	100	29,642,309	100	29,938,732	100	30,238,119	100	30,540,501	100	30,540,501	Sekretariat Daerah	



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
				(Nilai RB, Nilai SAKIP, Nilai AKIP Setda, Opini LHP BPK (WTP), Indeks Profesionalisme ASN, dll)																
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Nilai LPPD, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesejahteraan Rakyat)	%		100	100	6,394,929	100	6,394,929	100	6,458,878	100	6,523,467	100	6,588,702	100	6,588,702	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase terlaksananya Kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan (Inflasi Daerah, Peningkatan UMKM, Peningkatan PAD, Nilai Tukar Nelayan, Indeks Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran, Persentase Rumah Layak Huni, Cakupan Layanan Air Bersih, Realisasi Investasi)	%		75	75	3,781,398	80	3,781,398	85	3,819,212	90	3,857,404	95	3,895,978	95	3,895,978	Sekretariat Daerah
				JUMLAH					39,818,636		39,818,636		40,216,822		40,618,991		41,025,180		41,025,180	
			FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
			SEKRETARIAT DPRD																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor				24,987,107		24,987,107		25,236,978		25,489,348		25,744,241		25,744,241	Sekretariat DPRD
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%															Sekretariat DPRD
				Persentase Tingkat Kepuasan ASN	%															Sekretariat DPRD
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	%				13,963,857		13,963,857		14,103,496		14,244,531		14,386,976		14,386,976	Sekretariat DPRD
				JUMLAH					38,950,964		38,950,964		39,340,474		39,733,878		40,131,217		40,131,217	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																
			INSPEKTORAT																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Persyaratan Level Kapabilitas APIP	%		40	40	6,147,673	40	6,147,673	40	6,209,150	40	6,271,241	40	6,333,954	40	6,333,954	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yg menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai standar	%		70	70	664,225	75	664,225	80	670,867	85	677,576	90	684,352	90	684,352	Inspektorat
			Pesentase Penyelesaian Tindak Lanjut yang di TL hasil temuan Pengawasan Internal dan Eksternal	%		60	60		65		70		75		80		80		Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase OPD yg menyusun Dokumen Kinerja Rencana Aksi	%		40	40	403,579	40	403,579	40	407,615	40	411,691	40	415,808	40	415,808	Inspektorat
			Pemenuhan Persyaratan Level Maturitas SPIP	Level SPIP		2	2		3		3	-	3	-	4	-	4	-	Inspektorat
			JUMLAH					7,215,477		7,215,477		7,287,632		7,360,508		7,434,113		7,434,113	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
			BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH																
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor		80	80	6,882,943	81	6,882,943	81	6,951,772	82	7,021,290	82	7,091,503	82	7,091,503	BPKAD
			Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%		100	100		100		100		100		100		100		BPKAD
			Persentase Tingkat Kepuasan ASN	%		80	80		82,5		85		87,5		90		90		BPKAD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan Perda Tentang APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan					3,548,302		3,548,302		3,583,785		3,619,623		3,655,819		3,655,819	BPKAD
			Penetapan Perda Tentang Pertanggung Jawaban APBD tepat waktu sesuai dengan tenggat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan																BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Seluruh BMD Terinventarisasi dengan Baik					852,940		852,940		861,469		870,084		878,785		878,785	BPKAD



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		Target	Rp (000)
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah	%		97	97	891,710	98	891,710	98	900,627	98	909,633	98,50	918,730	98,50	918,730	BPKAD
				JUMLAH					12,175,895		12,175,895		12,297,654		12,420,630		12,544,837		12,544,837	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP OPD	Skor				4,316,472		4,316,472		4,359,637		4,403,233		4,447,265	0	4,447,265	BKPSDM
				Persentase pengelolaan keuangan dan BMD sesuai SAP	%													0		BKPSDM
				Persentase Tingkat Kepuasan ASN	%													0		BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan administrasi kepegawaian	%		100	100	1,076,357	100	1,076,357	100	1,087,121	100	1,097,992	100	1,108,972	100	1,108,972	BKPSDM
				Persentase pemenuhan kebutuhan ASN	%		100	100		100		100		100		100		100		BKPSDM
				Persentase penempatan pejabat sesuai kompetensi/ kualifikasi	%		80	80		85		90		95		100		100		BKPSDM
				Persentase Jumlah ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	%		75	75		85		90		95		100		100		BKPSDM
				Persentase ASN yang memiliki kinerja dengan predikat baik	%		75	75		85		90		95		100		100		BKPSDM
				Jumlah Penurunan kasus pelanggaran disiplin	%		2	2		4		6		8		10		10		BKPSDM
				JUMLAH					5,392,829		5,392,829		5,446,757		5,501,225		5,556,237		5,556,237	
			URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR																	
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai		C	B	3,606,480	B	3,606,480	BB	3,642,545	BB	3,678,970	A	3,715,760	A	3,715,760	Dinas Kominfo
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	%		80	80	205,000	85	205,000	90	207,050	100	209,121	100	211,212	100	211,212	Dinas Kominfo
			Program Aplikasi	Indeks SPBE	Skor		2,6	2,6	299,483	2,7	299,483	2,8	302,478	2,9	305,503	3,0	308,558	3,0	308,558	Dinas Kominfo



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Informatika																	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia guna Pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	%		40	40	35,000	60	35,000	80	35,350	85	35,704	98	36,061	98	36,061	Dinas Kominfo
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks		1	1	100,000	2	100,000	3	101,000	4	102,010	5	103,030	5	103,030	Dinas Kominfo
				JUMLAH					4,245,963		4,245,963		4,288,423		4,331,307		4,374,620		4,374,620	
			URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR																	
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	5,029,461	B	5,029,461	BB	5,079,756	BB	5,130,553	A	5,181,859	A	5,181,859	Dinas Dukcapil
			Program Pendaftaran Penduduk						200,000		200,000		202,000		204,020		206,060		206,060	Dinas Dukcapil
			Program Pencatatan Sipil						150,000		150,000		151,500		153,015		154,545		154,545	Dinas Dukcapil
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						50,000		50,000		50,500		51,005		51,515		51,515	Dinas Dukcapil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan						100,000		100,000		101,000		102,010		103,030		103,030	Dinas Dukcapil
				JUMLAH					5,529,461		5,529,461		5,584,756		5,640,603		5,697,009		5,697,009	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN KOTA MANNA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	6,907,541	B	6,907,541	BB	6,976,616	BB	7,046,383	A	7,116,846	A	7,116,846	KECAMATAN KOTA MANNA
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	35,145	80	35,145	85	35,496	90	35,851	90	36,210	90	36,210	KECAMATAN KOTA MANNA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	519,744	70	519,744	75	524,941	80	530,191	85	535,493	85	535,493	KECAMATAN KOTA MANNA
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	3,200	75	3,200	80	3,232	85	3,264	90	3,297	90	3,297	KECAMATAN KOTA MANNA
			Program Pembinaan	Indeks Kepuasan	Skor		70	70	17,605	75	17,605	80	17,781	85	17,959	90	18,138	90	18,138	KECAMATAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
			Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Masyarakat (IKM)															KOTA MANNA	
			JUMLAH					7,483,235		7,483,235		7,558,067		7,633,648		7,709,985		7,709,985		
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN PASAR MANNA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	7,370,483	B	7,370,483	BB	7,444,188	BB	7,518,630	A	7,593,816	A	7,593,816	KECAMATAN PASAR MANNA
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	35,800	80	35,800	85	36,158	90	36,520	90	36,885	90	36,885	KECAMATAN PASAR MANNA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	29,163	70	29,163	75	29,455	80	29,749	85	30,047	85	30,047	KECAMATAN PASAR MANNA
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	3,250	75	3,250	80	3,283	85	3,315	90	3,348	90	3,348	KECAMATAN PASAR MANNA
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	21,009	75	21,009	80	21,219	85	21,431	90	21,646	90	21,646	KECAMATAN PASAR MANNA
			JUMLAH						7,459,705		7,459,705		7,534,302		7,609,645		7,685,742		7,685,742	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN MANNA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	2,683,747	B	2,683,747	BB	2,710,584	BB	2,737,690	A	2,765,067	A	2,765,067	KECAMATAN MANNA
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	35,150	80	35,150	85	35,502	90	35,857	90	36,215	90	36,215	KECAMATAN MANNA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	28,042	70	28,042	75	28,322	80	28,606	85	28,892	85	28,892	KECAMATAN MANNA
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	5,400	75	5,400	80	5,454	85	5,509	90	5,564	90	5,564	KECAMATAN MANNA
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	18,548	75	18,548	80	18,733	85	18,921	90	19,110	90	19,110	KECAMATAN MANNA



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)
				JUMLAH					2,770,887		2,770,887		2,798,596		2,826,582		2,854,848		2,854,848		
			UNSUR KEWILAYAHAN																		
			KECAMATAN BUNGA MAS																		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	1,539,863	B	1,539,863	BB	1,555,262	BB	1,570,814	A	1,586,522	A	1,586,522	KECAMATAN BUNGA MAS	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	16,415	80	16,415	85	16,579	90	16,745	90	16,912	90	16,912	KECAMATAN BUNGA MAS	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	25,356	70	25,356	75	25,610	80	25,866	85	26,124	85	26,124	KECAMATAN BUNGA MAS	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	20,867	75	20,867	80	21,076	85	21,286	90	21,499	90	21,499	KECAMATAN BUNGA MAS	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	10,390	75	10,390	80	10,494	85	10,599	90	10,705	90	10,705	KECAMATAN BUNGA MAS	
				JUMLAH					1,612,891		1,612,891		1,629,020		1,645,310		1,661,763		1,661,763		
			UNSUR KEWILAYAHAN																		
			KECAMATAN KEDURANG ILIR																		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	1,621,888	B	1,621,888	BB	1,638,107	BB	1,654,488	A	1,671,033	A	1,671,033	KECAMATAN KEDURANG ILIR	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	20,782	80	20,782	85	20,990	90	21,200	90	21,412	90	21,412	KECAMATAN KEDURANG ILIR	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	28,727	70	28,727	75	29,014	80	29,304	85	29,597	85	29,597	KECAMATAN KEDURANG ILIR	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	26,222	75	26,222	80	26,484	85	26,749	90	27,017	90	27,017	KECAMATAN KEDURANG ILIR	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	20,586	75	20,586	80	20,792	85	21,000	90	21,210	90	21,210	KECAMATAN KEDURANG ILIR	
				JUMLAH					1,718,205		1,718,205		1,735,387		1,752,741		1,770,268		1,770,268		
			UNSUR KEWILAYAHAN																		

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD				
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
			KECAMATAN KEDURANG																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	1,883,281	B	1,883,281	BB	1,902,114	BB	1,921,135	A	1,940,346	A	1,940,346	KECAMATAN KEDURANG	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	13,147	80	13,147	85	13,278	90	13,411	90	13,545	90	13,545	KECAMATAN KEDURANG	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	22,437	70	22,437	75	22,661	80	22,888	85	23,117	85	23,117	KECAMATAN KEDURANG	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	14,650	75	14,650	80	14,797	85	14,944	90	15,094	90	15,094	KECAMATAN KEDURANG	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	16,894	75	16,894	80	17,063	85	17,234	90	17,406	90	17,406	KECAMATAN KEDURANG	
			JUMLAH					1,950,409		1,950,409		1,969,913		1,989,612		2,009,508		2,009,508		
		UNSUR KEWILAYAHAN																		
		KECAMATAN AIR NIPIS																		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	2,026,063	B	2,026,063	BB	2,046,324	BB	2,066,787	A	2,087,455	A	2,087,455	KECAMATAN AIR NIPIS	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	6,121	80	6,121	85	6,182	90	6,244	90	6,306	90	6,306	KECAMATAN AIR NIPIS	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	40,800	70	40,800	75	41,208	80	41,620	85	42,036	85	42,036	KECAMATAN AIR NIPIS	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	10,500	75	10,500	80	10,605	85	10,711	90	10,818	90	10,818	KECAMATAN AIR NIPIS	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	8,241	75	8,241	80	8,323	85	8,407	90	8,491	90	8,491	KECAMATAN AIR NIPIS	
			JUMLAH					2,091,725		2,091,725		2,112,642		2,133,769		2,155,106		2,155,106		
		UNSUR KEWILAYAHAN																		
		KECAMATAN SEGINIM																		
		Program Penunjang	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai		C	B	2,843,831	B	2,843,831	BB	2,872,269	BB	2,900,992	A	2,930,002	A	2,930,002	KECAMATAN	

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
			Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	OPD															SEGINIM	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	27,162	80	27,162	85	27,434	90	27,708	90	27,985	90	27,985	KECAMATAN SEGINIM
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	163,647	70	163,647	75	165,283	80	166,936	85	168,606	85	168,606	KECAMATAN SEGINIM
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	11,887	75	11,887	80	12,006	85	12,126	90	12,247	90	12,247	KECAMATAN SEGINIM
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	55,230	75	55,230	80	55,782	85	56,340	90	56,904	90	56,904	KECAMATAN SEGINIM
				JUMLAH					3,101,757		3,101,757		3,132,775		3,164,102		3,195,743		3,195,743	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN PINO																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	2,345,168	B	2,345,168	BB	2,368,620	BB	2,392,306	A	2,416,229	A	2,416,229	KECAMATAN PINO
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	33,036	80	33,036	85	33,366	90	33,700	90	34,037	90	34,037	KECAMATAN PINO
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	219,143	70	219,143	75	221,334	80	223,548	85	225,783	85	225,783	KECAMATAN PINO
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	40,300	75	40,300	80	40,703	85	41,110	90	41,521	90	41,521	KECAMATAN PINO
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	30,390	75	30,390	80	30,694	85	31,001	90	31,311	90	31,311	KECAMATAN PINO
				JUMLAH					2,668,037		2,668,037		2,694,717		2,721,665		2,748,881		2,748,881	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN ULU MANNA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	1,863,059	B	1,863,059	BB	1,881,690	BB	1,900,506	A	1,919,512	A	1,919,512	KECAMATAN ULU MANNA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
			Kabupaten/Kota																	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	15,010	80	15,010	85	15,160	90	15,312	90	15,465	90	15,465	KECAMATAN ULU MANNA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	20,000	70	20,000	75	20,200	80	20,402	85	20,606	85	20,606	KECAMATAN ULU MANNA
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	13,030	75	13,030	80	13,160	85	13,292	90	13,425	90	13,425	KECAMATAN ULU MANNA
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	19,015	75	19,015	80	19,205	85	19,397	90	19,591	90	19,591	KECAMATAN ULU MANNA
				JUMLAH					1,930,114		1,930,114		1,949,415		1,968,909		1,988,598		1,988,598	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN PINO RAYA																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai		C	B	2,175,031	B	2,175,031	BB	2,196,781	BB	2,218,749	A	2,240,937	A	2,240,937	KECAMATAN PINO RAYA
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		75	75	15,717	80	15,717	85	15,874	90	16,033	90	16,193	90	16,193	KECAMATAN PINO RAYA
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	presentase lembaga kemasyarakatan yang terberdayakan	%		65	65	16,517	70	16,517	75	16,682	80	16,849	85	17,017	85	17,017	KECAMATAN PINO RAYA
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	10,590	75	10,590	80	10,696	85	10,803	90	10,911	90	10,911	KECAMATAN PINO RAYA
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor		70	70	5,962	75	5,962	80	6,022	85	6,082	90	6,143	90	6,143	KECAMATAN PINO RAYA
				JUMLAH					2,223,817		2,223,817		2,246,055		2,268,516		2,291,201		2,291,201	
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai		C	B	2,801,455	B	2,801,455	BB	2,829,470	BB	2,857,764	A	2,886,342	A	2,886,342	Badan Kesbangpol
			Program Penguatan	Persentase Masvarakat	%		100	100	132.784	100	132.784	100	134.112	100	135.453	100	136.807	100	136.807	Badan



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target		Rp (000)
			Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Yang Memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa															Kesbangpol	
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	%		80	80	1,305,757	80,3	1,305,757	80,25	1,318,815	80,3	1,332,003	81	1,345,323	81	1,345,323	Badan Kesbangpol
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/ LSM yang Di Bina	%		50	50	86,271	55	86,271	60	87,134	65	88,005	70	88,885	70	88,885	Badan Kesbangpol
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	%		100	100	135,719	100	135,719	100	137,076	100	138,447	100	139,831	100	139,831	Badan Kesbangpol
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tersedianya Data Terkait Pemantapan Kewaspadaan Nasional Penanganan Konflik Sosial	Dokumen		50	50	225,860	50	225,860	50	228,119	50	230,400	50	232,704	50	232,704	Badan Kesbangpol
				JUMLAH					4,687,846		4,687,846		4,734,724		4,782,072		4,829,892		4,829,892	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Penetapan indikator kinerja bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan



Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan indikator kinerja daerah dalam RPJMD diformulasikan menjadi 2 kategori yaitu:

1. Indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.
2. Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Kepala Daerah ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Indikator kinerja utama menjadi instrument untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021-2025.

Rumusan indikator kinerja utama Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	TAHUN AWAL RPJMD	TARGET TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Kemiskinan	17.82	17.80	17.62	17.20	16.83	16.4	15.8
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.52	3.2	3.09	2.9	2.9	2.8	2.7
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.26	1.83	3.05	4.23	4.68	4.97	5.11
4.	Indeks Pembangunan Manusia	70.63	70.95	71.27	71.38	71.67	71.98	72.21



8.2. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Sedangkan Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan meliputi produktivitas total daerah, Nilai Tukar Petani, dan lama pelayanan perijinan.

Tabel 8.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
Tahun 2022-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		Tahun 2019	Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,23	70,63	70,95	71,27	71,38	71,67	71,98	71,98
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,61	13,79	13,89	13,90	13,97	14,05	14,05
Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,02	9,26	9,26	9,29	9,39	9,49	9,60	9,60
Angka harapan hidup	Tahun	67,79	67,9	67,91	67,95	68,09	68,22	68,26	68,26
Angka Kemiskinan	Persen	18,54	17,82	17,8	17,62	17,20	16,83	16,40	16,40
Indeks Pembangunan Gender	Angka	91,19	91,00	91,01-92,00	92,01-93,00	93,01-94,00	94,01-95,00	95,01-96,00	95,01-96,00
Persentase pemenuhan infrastruktur (dasar dan strategis) daerah	Persen	70,46	68,37	70,50	72,25	74,46	77,15	80,00	80,00
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	n/a	69,96	69,96-70,03	70,04-71,03	71,04-72,03	72,04-73,03	73,04-74,03	73,04-74,03
Indeks Resiko	Indeks	186	130	130	125	120	115	110	110



Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
		Tahun 2019	Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	2026	
Bencana									
Persentase pemenuhan infrastruktur strategis yang memadai	Persen	66,43	55,96	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	76-80
Persentase pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai	Persen	57,88	58,90	59-62	63-68	69-72	73-78	78-85	78-85
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	n/a	69,96	67,77	68,24	68,72	68,81	68,92	68,92
Indeks Resiko Bencana	Indeks	186	130	130	125	120	115	110	110
Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	4.99	0.26	1.83	3.05	4.23	4.68	4.97	4.97
Persentase pertumbuhan sektor unggulan terhadap perekonomian daerah	Persen	3,12	0,32	1.34	1.55	2.07	3.01	3,50	3,50
Realisasi investasi	Milliar	235	627	631	634	637	640	643	643
Indeks Ketahanan Pangan	Angka	72,44	74,54	74,54-75,00	75,00-76,50	76,50-78,00	78,00-79,50	79,50-81,00	79,50-81,00
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	C	C	CC	B	B	BB	A	A
Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	BB	BB	A	A
Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	53	53	53-60	61-70	71-75	76-80	81-90	81-90
Indeks SPBE	Nilai	2,32	2,27	2,28-2,60	2,61-2,85	2,86-3,50	3,51-4,00	4,00-4,50	4,00-4,50
Indeks Inovasi Daerah	Nilai	n/a	60,00-65,00	60,00-65,00	65,01-70,00	70,01-75,00	75,01-80,00	80,01-85,00	80,01-85,00
Nilai pelayanan publik	Nilai	NA	3,61	3,61-3,65	3,66-3,70	3,71-4,00	4,01-4,50	4,51-5,00	4,51-5,00



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, yang akan dicapai selama masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2021-2024.

Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang disusun melalui pendekatan perencanaan politis, teknokratis, top down-bottom up, dan partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan. Dokumen RPJMD menterjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dielaborasi dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan serta program-program yang telah ditetapkan.

9.1. Pedoman Transisi

Dokumen RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, maka perlu disusun RPJMD periode selanjutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya.

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2021-2026, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan mulai tahun 2026. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 dimaksud akan tetap didasarkan pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu, dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

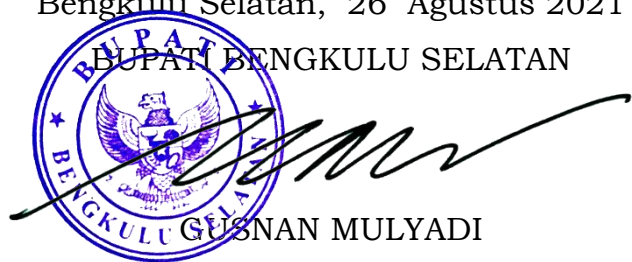
1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, dan program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
3. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kabupaten Bengkulu Selatan wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2021-2026



- ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026;
6. Bagi program prioritas Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun prioritas nasional, dimana terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran terhadap program tersebut, maka dalam hal pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai macam skema, antara lain melalui kerjasama dengan Badan Usaha (*Public Private Partnership*), *Corporate Social Responsibility* (CSR), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maupun Kerjasama Kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah, baik dalam negeri maupun lembaga-lembaga internasional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Dalam hal pelaksanaan RPJMD, apabila target kinerja yang ditetapkan telah tercapai, maka perlu dirumuskan Kembali besaran target kinerja baru dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Bengkulu Selatan, 26 Agustus 2021

BUPATIN BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI